



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SURYA DARMADI.
Tempat lahir	: Medan.
Umur / Tgl. Lahir	: 70 Tahun / 04 Maret 1952.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: 1. Jl. Bukit Golf Utama PE-9 RT.012. RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. 2. 21 th Nassim Park Residence #18-01 Orchard Road Singapura. 3. 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One #41-01 Singapura.
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Pembantaran oleh Penyidik tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 22 Agustus 2022;

Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan 30 Nopember 2022;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 di Rumah Tahanan Negera Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I.;

Pembantaran ke-I oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022;

Pembantaran ke-II oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 03 Januari 2023;

Pembantaran ke-III oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2023;

Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023 di Rumah Tahanan Negera Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I.;

Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 di Rumah Tanahan Negera Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I.;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 di Rumah Tahanan Negera Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I.;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Mei 2023 Nomor : W10.U/2737/HK.07/V/2023., terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :Ir. Yan Mustafa Amir, SH.MH., Sugito, SH.MH., Yanto Aprianto, SH.,C.LA.,C.LI., Anwarsyah Tarigan, SH.MH., Elly Muzdalifah, SH.MH., Zaid Mushafi, SH.MH., Andi Carson, SH.MH., Mohamad Indra Darmawan, SH. dan Tetty Diansari, SH.MH., Advokad beralamat di Gran Rubina Business Park, 15th-E Floor, Rasuna Epicentrum, Jln. Rasuna Said, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2023;

Halaman 2 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Terdakwa SURYA DARMADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hulu di Jl. Raya Pematang Rebah, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan di Kantor Regional Office Duta Palma Group di Jl. O. K. M. Jamil Nomor 1, Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H.

Halaman 3 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008 (dilakukan penuntutan terpisah) secara melawan hukum, yaitu:

1. Terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN, Terdakwa meminta agar pembukaan lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di area kawasan hutan di wilayah Indragiri Hulu dapat disetujui oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit padahal diketahui lahan yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan.
2. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari meskipun tidak memiliki izin prinsip tetapi telah diberikan izin lokasi perkebunan kelapa sawit oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan.
3. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari meskipun tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN padahal diketahui bahwa lahan yang diberikan izin tersebut berada dalam kawasan hutan.
4. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Seberida Subur dan PT Palma Satu dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan walaupun diberikan izin usaha perkebunan tetapi tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan, sehingga negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama tanpa dilengkapi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 1.551 hektar dan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit seluas 9 hektar.

Halaman 4 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari secara tanpa hak telah melaksanakan usaha perkebunan dalam kawasan hutan yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan.
7. Terdakwa tidak mengikut sertakan masyarakat petani perkebunan sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 serta tidak membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% (*dua puluh persen*) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/02/2007, sehingga menimbulkan gejala (konflik sosial) dalam masyarakat.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Pasal 4 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1) huruf a s/d huruf e, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.
3. Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.
4. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
5. Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.
7. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-

Halaman 5 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

8. Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan Perkebunan.
9. Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
10. Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: 404/Menhut-II/2003 Tanggal 10 Juli 2003.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (tujuh triliun lima ratus Sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan USD7,885,857.36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7,885,857.36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, juga merugikan Perekonomian Negara yaitu sebesar Rp73.920.690.300.000 (tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pemilik dari Darmex Group yang perusahaannya terletak di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang

Halaman 6 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya, Pengangkutan serta bergerak di bidang Properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa, dengan rincian grup usaha sebagai berikut:

a. PT Darmex Plantations, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Darmex Plantations memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Duta Palma Nusantara
- 2) PT Cerenti Subur
- 3) PT Johan Sentosa
- 4) PT Eluan Mahkota
- 5) PT Wana Jingga Timur
- 6) PT Delimuda Perkasa
- 7) PT Banyu Bening Utama
- 8) PT Seberida Subur
- 9) PT Mekarsari Alam Lestari
- 10) PT Panca Agro Lestari
- 11) PT Kencana Amal Tani
- 12) PT Palma Inti Lestari
- 13) PT Aditya Palma Nusantara
- 14) PT Lestari Persada Alam
- 15) PT Palma Satu

b. PT Alfa Ledo, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Alfa Ledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Wirata Daya Bangun Persada
- 2) PT Lestari Persada Alam

Halaman 7 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT Teluk Keramat
- 4) PT Kaliau Mas Perkasa
- 5) PT Wana Hijau Semesta
- 6) PT Darmex Agro
- 7) PT Asset Pasific Internasional
- 8) PT Ledo Lestari
- 9) PT Bukit Jagoi Indah
- 10) PT Lestari Alam Raya
- 11) PT Bengkayang Subur
- 12) PT Dumai Inti Utama
- 13) PT Mitra Wawasan
- 14) PT Ceria Prima
- 15) PT Wiratadaya Bangun Persada

c. PT Monterado Mas, merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas melalui PT Darmex Plantation yaitu sebesar 99,9% saham, dan saham atas nama Terdakwa SURYA DARMADI sebesar 0,001%. PT Monterado Mas memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Bayas Biofuels
- 2) PT Darmex Biofuels
- 3) PT Darmex Oil & Fats
- 4) PT Teluk Kuantan Perkasa
- 5) PT Dabi Oleo
- 6) PT Dabi Biofuels

d. PT Asset Pacific, berlokasi di Jakarta merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang properti dimana pemegang sahamnya adalah Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Asset Pacific memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Tugu Tani

Halaman 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Harapanjaya Bumipertiwi
- 3) PT Kuningan Nusajaya (XL TOWER)
- 4) PT Menara Capital Indonusa (PALMA TOWER)
- 5) PT Permata Dumai Abadi
- 6) PT Wanamitra Permai (MENARA PALMA)
- 7) PT Bumijawa Sentosa (PALMA ONE)
- 8) PT Danatama Mulia (WISMA PALMA)
- 9) PT Persada Hijau Raya
- 10) PT Hijau Permata Wanalestari
- 11) PT Semesta Alam Permai
- 12) PT Ratu Alam Persada
- 13) PT Palma Express
- 14) PT Menara Perdana
- e. PT DELIMUDA NUSANTARA, merupakan Perusahaan Kapal Tongkang milik Terdakwa SURYA DARMADI yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Pelabuhan PT Bayas Biofuels)
- f. PT Dabi Air Nusantara merupakan Perusahaan Penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk Helikopter milik Terdakwa SURYA DARMADI
- g. RICH ASIAN PTE LTD merupakan Perusahaan milik terdakwa SURYA DARMADI yang didirikan di Singapura (3 Shenton Way #10-04 Shenton House Singapore 068805)
- h. WAXBILL PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- i. PALMBRIDGE PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- j. ASSET PASIFIC PTY LTD merupakan Perusahaan Properti di Australia milik Terdakwa SURYA DARMADI
- k. PALMA PASIFIC PTE LTD merupakan Perusahaan Properti di Singapura milik SURYA DARMADI.
- Terdakwa sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menempatkan keluarganya yaitu Sianto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan

Halaman 9 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris perusahaan pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, sehingga dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan dari Terdakwa, termasuk keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.

- Pada akhir tahun 2003 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu agar Terdakwa diberikan izin untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur dan untuk mempercepat operasional pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari padahal diketahui bahwa lahan yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, pada pertemuan tersebut H. RAJA THAMSIR RACHMAN memerintahkan Ir. H Amedtribja Praja selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu untuk segera memproses permintaan tersebut, padahal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah dilaksanakan.
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Februari 2004 Terdakwa dan Suheri Terta mengadakan rapat dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN, Ir. H Amedtribja Praja, Drs. H. Bambang Priyono selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Mohamad Sardjan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan disepakati untuk memudahkan pengurusan Izin Lokasi dan IUP (Izin Usaha Perkebunan) kepada Terdakwa.
- Atas perintah H. RAJA THAMSIR RACHMAN tersebut, Ir. Amedtribja Praja kemudian memerintahkan Ir. Manap Tambunan dan Yulianto untuk melakukan pengecekan terhadap areal yang dimohonkan, dengan hasil pengecekan lahan-lahan tersebut berada dalam Kawasan hutan sesuai dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan hasil sebagai berikut:
 1. PT Banyu Bening Utama (PT BBU), lahan seluas 6.420 ha berada di Kawasan Hutan HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi)

Halaman 10 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Paya Rumbai Kecamatan Siberida
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

2. PT Palma Satu (PT PS), lahan seluas 10.230 ha berada di Kawasan Hutan HPK (Hutan Yang Dapat Dikonversi) yang berlokasi di Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 3. PT Panca Agro Lestari (PT PAL), lahan seluas 3.113 ha berada di Kawasan Hutan HPK (Hutan Produktif Yang Dapat Dikonversi) dan lahan seluas 335 Ha berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas yang berlokasi di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rumbai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 4. PT Seberida Subur (PT SS), Lahan seluas 1.587 ha berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan seluas 7 Ha berada dalam kawasan HPK (Hutan Yang Dapat Dikonversi) yang berlokasi di Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- Kemudian Ir. Amedtribja Praja, MM melaporkan hasil survey tersebut kepada H. RAJA THAMSIR RACHMAN dan menyampaikan agar lahan yang dimohonkan tersebut dilakukan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu, akan tetapi H. RAJA THAMSIR RACHMAN tidak menerima saran tersebut dan memerintahkan Ir. H. Amedtribja Praja, MM untuk segera menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan dan Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit untuk PT BANYU BENING UTAMA (PT BBU), PT PANCA AGRO LESTARI (PTPAL), PT PALMA SATU (PT PS) dan PT SEBERIDA SUBUR (PT SS) menggunakan peta lokasi dalam Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau dimana lokasi lahan yang dimohonkan berstatus Arahan Pengembangan Kawasan Lainnya (APKL) dan Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan (APKP) dengan tujuan lahan yang dimohonkan tidak dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan, padahal kenyataannya berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) lokasi lahan yang dimohonkan masuk kawasan hutan sehingga diwajibkan adanya izin pelepasan kawasan hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanpa izin pelepasan kawasan hutan, dikeluarkan rekomendasi teknis ketersediaan lahan dan rekomendasi teknis kesesuaian lahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

a. PT BANYU BENING UTAMA:

- 1) Surat Nomor: 522.2/PR-III/2004/117 Tanggal 2 Maret 2004 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT BANYU BENING UTAMA.
- 2) Surat Nomor: 522.2/PR-III/2004/120 Tanggal 9 Maret 2004 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT BANYU BENING UTAMA.

b. PT PANCAAGRO LESTARI:

- 1) Surat Nomor: 522.2/PR-XII/2005/1119 Tanggal 1 Desember 2005 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT PANCAAGRO LESTARI.
- 2) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2005/1135 Tanggal 7 Desember 2005 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT PANCAAGRO LESTARI.

c. PT SEBERIDA SUBUR:

- 1) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/172 Tanggal 22 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT SEBERIDA SUBUR.
- 2) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/177 Tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT SEBERIDA SUBUR.

d. PT PALMA SATU:

- 1) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/178 Tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT PALMA SATU.
- 2) Surat Nomor: 522.2/PR-II/2007/179 tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT PALMA SATU.

- Atas dasar Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan, H. RAJA THAMSIR RACHMAN memerintahkan Drs. H. Bambang Priyono

Halaman 12 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pertanahan Tahun 2004-2005 dan Ir. H. Syah Soerya selaku Kepala Dinas Pertanahan 2006-2007 membuat pertimbangan teknis penerbitan izin lokasi untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur di dalam kawasan hutan meskipun tidak ada persetujuan penanaman modal (Izin Prinsip) yang menjadi syarat untuk memperoleh izin lokasi.

- Sejak Tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 perusahaan-perusahaan milik Terdakwa tanpa adanya persetujuan penanaman modal (Izin Prinsip) telah mendapatkan Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, yaitu sebagai berikut:

1. PT Banyu Bening Utama

- Izin lokasi terhadap tanah seluas 6.420 ha yang terletak di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 83 Tahun 2004 Tanggal 23 April 2004.
- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 1.551 ha yang terletak di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 Tanggal 8 April 2011.
- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 9 ha yang terletak di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 158 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011.

2. PT Panca Agro Lestari

- Izin lokasi terhadap tanah seluas 3.000 ha yang terletak di Desa Penyaguan dan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2005 Tanggal 20 September 2005, kemudian luas areal direvisi menjadi ± 2.100 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 148A Tahun 2007 tanggal 6 Agustus 2007.
- Selanjutnya diperpanjang dan direvisi berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 atas areal semula seluas lebih kurang

Halaman 13 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100 ha menjadi seluas lebih kurang 3.800 ha di Desa Penyaguan dan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

3. PT Palma Satu

- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 14.144 ha yang terletak di Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007 yang pada konsiderannya (menimbang) menggunakan Draft (konsep) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Revisi Izin lokasi terhadap tanah areal semula ± 14.144 ha menjadi seluas ± 10.230 ha terletak di Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 180 Tahun 2010 Tanggal 8 Juli 2010.

4. PT Seberida Subur

- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 6.132 ha yang terletak di Desa Kelesa Kecamatan Seberida, Desa Siambul dan Desa Seberida Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 89 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007.
- PT Seberida Subur telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit sebelum adanya izin lokasi maupun izin usaha perkebunan.
- Perpanjangan dan Revisi Izin lokasi terhadap tanah yang semula seluas ± 6.132 ha menjadi seluas 1.800 ha yang terletak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010.
- Selanjutnya diperpanjang dan direvisi kembali menjadi seluas 6.132 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 197 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010.
- Terdakwa melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan berdasarkan IUP-B (Izin Usaha Budidaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan) yang tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan yang dibuat formalitas untuk mendapatkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari H. Raja Thamsir Rachman, yaitu:

- a. PT Banyu Bening Utama mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2004 sementara Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Nomor: 01/SK/Bapedalda/2004 baru diterbitkan pada tanggal 1 November 2004 atas nama PT Banyu Bening Utama dengan luas lahan 6.420 Ha, masing-masing yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN.
- b. PT Panca Argo Lestari mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) pada tanggal 23 Januari 2006 sementara Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Nomor: 660/Bapedalda-AMDAL/INHU/VII/2007/198 baru diterbitkan pada tahun 2007 atas nama PT PANCA ARGO LESTARI, masing-masing yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN.
- c. PT Palma Satu mendapat IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) pada tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN, meskipun tidak ada AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
- d. PT Seberida Subur mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN, meskipun tidak ada AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
- e. PT Banyu Bening Utama mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P) diterbitkan tanpa AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
- f. PT PANCA AGRO LESTARI mendapatkan perluasan areal dari 2.980 ha menjadi 3.800 ha (tambah 900 ha) pada tahun 2010, namun baru diterbitkan AMDAL pada tahun 2014.
- g. PT Kencana Amal Tani Menjalankan kegiatan pabrik kelapa sawit tanpa adanya AMDAL, SKKL, Izin Lingkungan, serta tidak ada IUP-B dan IUP-P.

Halaman 15 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 Terdakwa meminta agar H. RAJA THAMSIR RACHMAN menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), padahal lahan yang dimintakan berdasarkan Peta TGHK (Tata Guna Hutan Kesepatan) berada dalam kawasan hutan sehingga memerlukan izin pelepasan kawasan hutan, akan tetapi agar tidak memerlukan izin pelepasan kawasan hutan, H. RAJA THAMSIR RACHMAN menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRW Propinsi Riau dengan fungsi lahan APL (APKP/APKL), yakni:

1. PT Banyu Bening Utama

- Tanggal 29 September 2003, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 5.060 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun 2003.
- Tanggal 16 April 2004, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 6.420 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2004.

2. PT Palma Satu

- Pada tanggal 26 Februari 2007, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 14.144 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007.

3. PT PancaAgro Lestari

Pada tanggal 23 Februari 2006, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 2.980 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006.

4. PT Seberida Subur

- Pada tanggal 26 Februari 2007, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 6.312 ha berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 92 Tahun 2007.
- Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan meskipun tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 ha yang memiliki HGU, namun tidak ada izin pelepasan kawasan hutan.
 2. PT Kencana Amal Tani untuk lahan seluas 3.792 ha memiliki HGU, namun tidak ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan.
 3. PT Panca Agro Lestari untuk lahan seluas 3.816 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan.
 4. PT Seberida Subur untuk lahan seluas 6.132 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan, dan
 5. PT Palma Satu untuk lahan seluas 10.230 ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan.
- Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2022 perusahaan-perusahaan milik Terdakwa telah melakukan kegiatan penanaman dan kegiatan produksi kelapa sawit dan mendapat nilai jual tandan buah segar (TBS) sebagai berikut:

No	Nama perusahaan	Luas (ha)	Nilai Jual TBS (Rp)
1	PT Palma Satu	10.000	868.788.165.668,90
2	PT Seberida Subur	6.132	614.190.850.647,04
3	PT Banyu Bening Utama	7.971	2.353.357.781.807,46
4	PT Panca Agro Lestari	3.816	2.193.761.386.245,00
5	PT Kencana Amal Tani	9.176	5.404.289.424.485,53
			11.434.387.608.853,90

- Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa yang telah mendapat izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari H. RAJA THAMSIR RACHMAN tidak dilengkapi Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur.
- Terdakwa melaksanakan usaha perkebunan dalam kawasan hutan melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, telah mengakibatkan:
- 1) Telah terjadi perubahan fisik dari sebelumnya kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit.
 - 2) Tidak ada lagi pohon hutan alam asli.
- Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2022 terdapat kerusakan tanah dan lingkungan, sebagai berikut:

1) PT Kencana Amal Tani

- a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (kegiatan *cut and fill* pada pembangunan jalan, penebangan vegetasi pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Kencana Amal Tani Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (5-10 cm, 20-30 cm), solum tanah (0 cm) dan batuan permukaan (50-80 %).
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Keputusan Menteri Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter klei (liat), pasir dan redoks.

2) PT Palma Satu

- a. Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Palma Satu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Halaman 18 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (2-5 cm), subsiden (10-20 cm; 100-150 cm, 250-300 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm).
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
 - d. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2017) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm).
 - e. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.
- 3) PT Panca Agro Lestari
- a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah, kegiatan *cut and fill*, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Panca Agro Lestari Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (2-5 cm), dan solum tanah (0 cm).

Halaman 19 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

4) PT Banyu Bening Utama

- a. Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Banyu Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (10-20 cm), subsiden (20-30 cm; 60-80 cm; 80-90 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm).
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2016) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm).
- e. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan

Halaman 20 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

Selain itu, juga dilakukan verifikasi lapangan dan analisis sampel tanah atas pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit dari PT Banyu Bening Utama, dengan hasil:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana pabrik kelapa sawit dan dumping/penimbunan limbah padat) pada kawasan hutan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Banyu Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter Erosi tanah (2-5 cm, 20-30 cm), subsiden (20-30 cm; 100-200 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm).
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2017) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm).
- e. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

- f. Pada lokasi pembuangan limbah padat tidak ditemukan *landfill* sehingga limbah padat ditumpuk/*dumping* di atas tanah gambut dengan ketinggian 3-6m.

5) PT Seberida Subur

- a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (kegiatan *cut and fill* pada pembangunan jalan, penebangan vegetasi pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Seberida Subur Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan.
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai Rp73.920.690.300.000,00 (*tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) yaitu:

No	Nama perusahaan	Luas (ha)	Kerugian LH (Rp)
1	PT PALMA SATU (PT PS)	10.000	19.927.400.000.000
2	PT SEBERIDA SUBUR (PT SS)	6.132	12.219.481.680.000
3	PT BANYU BENING UTAMA (PT BBU)	7.971	15.884.130.540.000
4	PT PANCA AGRO LESTARI (PT PAL)	3.816	7.604.295.840.000
5	PT KENCANA AMAL TANI (PT KAT)	9.176	18.285.382.240.000

Halaman 22 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL		73.920.690.300.000

Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.

- Berdasarkan Laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, yaitu:

- a) Alih lahan ilegal telah memunculkan biaya eksternalitas negatif karena kualitas lingkungan mengalami penurunan. PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur bertanggung jawab untuk menanggung biaya *recovery* dan proses *recovery* lingkungan. Apabila biaya *recovery* tidak dibebankan kepada PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur, maka biaya *recovery* akan menjadi tanggungan negara.
- b) Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan *nature* yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya *recovery* lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara ilegal bernilai total sebesar Rp73.920.690.300.000,00.
- c) Alih lahan yang dilakukan tanpa izin memiliki konsekuensi adanya kewajiban perusahaan terkait alih lahan maupun pengusahaan kebun sawit tidak dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini berdampak pada hilangnya penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.
- d) Terjadi penurunan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan perkebunan karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat. Hilangnya pendapatan rumah tangga dari program sawit rakyat merupakan bagian dari keuntungan *illegal* yang diperoleh oleh perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan kerugian sebesar Rp556.086.968.453,00 akibat tidak diimplementasikannya ketentuan terkait sawit rakyat.

Halaman 23 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga terjadi hilangnya kesempatan berkembang bagi koperasi rumah tangga yang mengelola sawit rakyat. Pola inti-plasma di sektor sawit pada umumnya terjadi melalui hubungan kerjasama antara perusahaan sebagai inti dengan para petani sawit rakyat yang tergabung dalam koperasi. Tidak adanya penerapan kebijakan sawit rakyat, maka pendapatan untuk koperasi sawit rakyat juga menjadi tidak ada.

- e) Pelanggaran izin yang dilakukan PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur telah menimbulkan sejumlah konflik dan kekerasan.
- Dari usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2020, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.238.274.248.234,00 (*dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
 - Keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN mengakibatkan:
 1. Negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.
 2. Terjadi kerusakan lingkungan karena terdakwa tidak melaksanakan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Terdakwa melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Kencana Amal Tani dan PT Palma Satu tidak melibatkan masyarakat dalam usaha perkebunan dan tidak membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19:

Ayat (1) : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;

Ayat (2) : Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 23 : Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24 : Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25 : Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26:

Ayat (1) : Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Ayat (2) : Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

2. Pasal 4 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1) huruf a s/d huruf e, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, yang menegaskan :

Halaman 25 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (2): Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Pasal 12 Ayat (1) huruf a s/d huruf e:

- a. Membayar uang pemasukan kepada Negara;
- b. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
- c. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- d. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
- e. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 : Izin usaha pemanfaatan kawasan:

- a. diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/ kota;

3. Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan yang menegaskan:

Halaman 26 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diselenggarakan melalui pemberian izin.

Ayat (2) : Izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Izin usaha pemanfaatan hutan;
- b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- d. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- e. Izin pemungutan hasil hutan kayu; dan
- f. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

4. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

Pasal 2 : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Pasal 3 : Lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi:

- a. perubahan peruntukan kawasan hutan; dan
- b. perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 4 Ayat (1): Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Pasal 6 : Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:

- a. secara parsial; atau

Halaman 27 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. untuk wilayah provinsi.

Pasal 7 Ayat (1) : Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. tukar menukar kawasan hutan; atau
- b. pelepasan kawasan hutan.

Pasal 8:

Ayat (1) : Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. gubernur atau bupati/walikota;
- c. pimpinan badan usaha; atau
- d. ketua yayasan.

Pasal 9:

Ayat (1) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

5. Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa: "Dalam pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon melampirkan rekaman surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/PMDN.

1) Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 huruf c angka 2, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 Tahun

Halaman 28 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menegaskan:

Pasal 3 : Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Pasal 4:

Ayat (1) huruf c angka 2: Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:

Huruf c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha:

angka 2 : Komoditas lainnya

- 1 Provinsi: 20.000 Ha
- Seluruh Indonesia: 100.000 Ha

6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, yang menegaskan:

Pertama: Menunjuk areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan

hutan dengan fungsi dan luas seperti perincian berikut:

1. Hutan Lindung : 397.150 Ha
2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata : 451.240 ha
3. Hutan Produksi Terbatas : 1.971.553 Ha
4. Hutan Produksi Tetap : 1.866.132 Ha

Halaman 29 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah luas kawasan tetap : 4.686.075 Ha

Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan Lain :
4.770.085 Ha

7. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang menegaskan:

Pasal 1 huruf a : Pelepasan Kawasan Hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan Usaha Pertanian.

Pasal 2 : Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah Usaha Pertanian adalah Kawasan hutan yang berdasarkan tanahnya cocok untuk Usaha Pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

8. Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan Perkebunan, yang menegaskan:

Pasal 13:

Ayat (1) : IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.

Ayat (2) : Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

Halaman 30 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/ walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 15 : Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan

Halaman 31 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16:

Ayat (1): Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Surat keterangan domisili;
- d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000;
- g) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- h) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- i) Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau paya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Ayat (2): Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

9. Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang menegaskan:

Pasal 5:

Ayat (1): Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki izin usaha industri perkebunan.

Ayat (2): Usaha Industri Perkebunan yang dilakukan oleh petani perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus didaftar oleh pemberi izin.

Pasal 6:

Halaman 33 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota.
- b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Ayat (2) : IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

Pasal 10 : Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Surat keterangan domisili.
- d. Rencana kerja usaha perkebunan.
- e. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Halaman 34 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

10. Surat Menteri Kehutanan Nomor: 404/Menhut-II/2003 Tanggal 10 Juli 2003 Perihal surat Edaran yang menegaskan:

Pertama : Bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK.

Kedua : Bagi provinsi yang telah ada keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang hasil paduserasi antara TGHK dan RTRWP.

- Perbuatan Terdakwa bersama H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu Periode Tahun 1999 s/d Tahun 2008 telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian:
 - a. Rp2.238.274.248.234,00 (*dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*)

Halaman 35 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keuntungan tidak sah (*illegal gain*) yang diperoleh Terdakwa.

b. Rp556.086.968.453,00 (*lima ratus lima puluh enam miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*) sebagai keuntungan tidak sah karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat.

c. Rp4.798.706.951.640,00 (*empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD7,885,857.36(*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*).

- Perbuatan Terdakwa SURYA DARMADI bersama-sama dengan H. RAJA TAMSIR RACHMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian negara yaitu:

a. Merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (*empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD7,885,857.36(*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh tiga puluh enam sen dolar Amerika*) sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Kerugian Keuangan Negara:

No	Jenis Kerugian	Jumlah (USD dan Rp)
1.	Hasil Pendapatan negara atas pemanfaatan hutan yang tidak diterima:	
	a. Dana Reboisasi	\$7.885.857,36
	b. Provisi Sumber Daya Hutan	Rp11.828.786.040,00
	c. Denda	Rp177.431.790.600,00
	d. Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	Rp511.747.200.000,00
	Jumlah (1)	Rp701.007.776.640,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		\$7.885.857,36
2.	Biaya Pemulihan Kerusakan Sumber Daya hutan	Rp4.097.699.175.000,00
	Jumlah (2)	Rp4.097.699.175.000,00
	Jumlah (1 + 2)	Rp4.798.706.951.640,00
		\$7.885.857,36

2. Jumlah Kerugian Keuangan Negara per Perusahaan:

No	Nama Perusahaan	Jumlah	
		US Dollar	Rupiah
1.	PT Panca Agro Lestari	1.528.200,00	522.795.240.000,00
2.	PT Palma Satu	3.288.924,00	1.450.535.174.000,00
3.	PT Banyu Bening Utama	429.624,00	925.698.639.000,00
4.	PT Seberida Subur	116.553,36	717.844.284.360,00
5.	PT Kencana Amal Tani	2.468.556,00	1.273.236.646.000,00
Total		7.885.857,36	4.798.706.951.640,00

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.

- b. Mengakibatkan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (*tujuh puluh tiga triliun Sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha sebagaimana Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan Ilegal PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan pelatihan ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 37 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ;

SUBSIDIAIR:

Terdakwa SURYA DARMADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hulu di Jl. Raya Pematang Rebah, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan di Kantor Regional Office Duta Palma Group di Jl. O. K. M. Jamil Nomor 1, Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersamadengan Drs. H. RAJA THAMSIR RACHMAN, MM selaku Bupati Indragiri Hulu Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008 (dilakukan penuntutan terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa SURYA DARMADI sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dan USD7,885,857.36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen) yang terdiri dari keuntungan tidak sah (illegal gain), kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penggunaan Kawasan Hutan dan Biaya Pemulihan Lingkungan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa SURYA DARMADI telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam kedudukan sebagai pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma satu yang*

Halaman 38 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin lokasi dan izin usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan tanpa adanya izin prinsip dan bertentangan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), serta tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan;
2. Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% (*dua puluh persen*) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan;
3. Dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Terdakwa melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan.
5. Terdakwa melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dalam kawasan hutan menggunakan izin lokasi yang peruntukannya untuk survey lokasi dan sosialisasi.

Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
2. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
3. Pasal 8, Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002
4. Pasal 15 jo Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/02/2007

Halaman 39 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7,885,857.36(tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, juga merugikan Perekonomian Negara yaitu sebesarRp73.920.690.300.000 (tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022,yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pemilik dari Darmex Group yang perusahaannya terletak di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya, Pengangkutan serta bergerak di bidang Properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa, dengan rincian grup usaha sebagai berikut:
 - a. PT Darmex Plantations, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Darmex Plantations memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
 - 1) PT Duta Palma Nusantara
 - 2) PT Cerenti Subur
 - 3) PT Johan Sentosa
 - 4) PT Eluan Mahkota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PT Wana Jingga Timur
 - 6) PT Delimuda Perkasa
 - 7) PT Banyu Bening Utama
 - 8) PT Seberida Subur
 - 9) PT Mekarsari Alam Lestari
 - 10) PT Panca Agro Lestari
 - 11) PT Kencana Amal Tani
 - 12) PT Palma Inti Lestari
 - 13) PT Aditya Palma Nusantara
 - 14) PT Lestari Persada Alam
 - 15) PT Palma Satu
- b. PT Alfa Ledo, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Alfa Ledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
- 1) PT Wirata Daya Bangun Persada
 - 2) PT Lestari Persada Alam
 - 3) PT Teluk Keramat
 - 4) PT Kaliau Mas Perkasa
 - 5) PT Wana Hijau Semesta
 - 6) PT Darmex Agro
 - 7) PT Asset Pasific Internasional
 - 8) PT Ledo Lestari
 - 9) PT Bukit Jagoi Indah
 - 10) PT Lestari Alam Raya
 - 11) PT Bengkayang Subur
 - 12) PT Dumai Inti Utama
 - 13) PT Mitra Wawasan
 - 14) PT Ceria Prima

Halaman 41 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) PT Wiratadaya Bangun Persada

c. PT Monterado Mas, merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas melalui PT Darmex Plantation yaitu sebesar 99,9% saham, dan saham atas nama Terdakwa SURYA DARMADI sebesar 0,001%. PT Monterado Mas memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Bayas Biofuels
- 2) PT Darmex Biofuels
- 3) PT Darmex Oil & Fats
- 4) PT Teluk Kuantan Perkasa
- 5) PT Dabi Oleo
- 6) PT Dabi Biofuels

d. PT Asset Pacific, berlokasi di Jakarta merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang properti dimana pemegang sahamnya adalah Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Asset Pacific memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Tugu Tani
- 2) PT Harapanjaya Bumipertiwi
- 3) PT Kuningan Nusajaya (XL TOWER)
- 4) PT Menara Capital Indonusa (PALMA TOWER)
- 5) PT Permata Dumai Abadi
- 6) PT Wanamitra Permai (MENARA PALMA)
- 7) PT Bumijawa Sentosa (PALMA ONE)
- 8) PT Danatama Mulia (WISMA PALMA)
- 9) PT Persada Hijau Raya
- 10) PT Hijau Permata Wanalestari
- 11) PT Semesta Alam Permai
- 12) PT Ratu Alam Persada

Halaman 42 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)PT Palma Express

14)PT Menara Perdana

- e. PT DELIMUDA NUSANTARA, merupakan Perusahaan Kapal Tongkang milik Terdakwa SURYA DARMADI yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Pelabuhan PT Bayas Biofuels)
- f. PT Dabi Air Nusantara merupakan Perusahaan Penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk Helikopter milik Terdakwa SURYA DARMADI
- g. RICH ASIAN PTE LTD merupakan Perusahaan milik terdakwa SURYA DARMADI yang didirikan di Singapura (3 Shenton Way #10-04 Shenton House Singapore 068805)
- h. WAXBILL PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- i. PALMBRIDGE PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- j. ASSET PASIFIC PTY LTD merupakan Perusahaan Properti di Australia milik Terdakwa SURYA DARMADI
- k. PALMA PASIFIC PTE LTD merupakan Perusahaan Properti di Singapura milik SURYA DARMADI.
- Terdakwa sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menempatkan keluarganya yaitu Sianto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan yaitu Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris perusahaan pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, sehingga dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan dari Terdakwa, termasuk keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Drs. H. RAJA THAMSIR RACHMAN, MM merupakan Bupati Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.24-1233 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 15 Nopember 1999 Periode Tahun 1999 s.d. Tahun 2004 dan SK Mendagri Nomor: 131.21-552 Tahun 2005 tentang Pemberhentian

Halaman 43 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 21 Juli 2005 untuk Periode Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang berdasarkan ketentuan pasal 6 Ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 memiliki kewenangan untuk menerbitkan Izin usaha Perkebunan (IUP) yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi memiliki kewenangan untuk menandatangani Izin Lokasi.

- Pada akhir Tahun 2003 Terdakwa melakukan pertemuan dengan H. Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu dan menyepakati agar Terdakwa diberikan izin untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit untuk PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur dan mempercepat operasional pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari padahal diketahui bahwa lahan yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dan selanjutnya H. RAJA THAMSIR RACHMAN memerintahkan kepada Ir. H Amedtribja Praja selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu untuk segera memproses permintaan tersebut, yang sudah diketahui kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah dilaksanakan.
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Februari 2004 Terdakwa dan Suheri Terta mengadakan rapat dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN, Ir. H Amedtribja Praja, Drs. H. Bambang Priyono selaku kepala Dinas Pertanahan dan Mohamad Sardjan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan disepakati untuk memudahkan pengurusan Izin Lokasi dan IUP (Izin Usaha Perkebunan) kepada Terdakwa.
- Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, H. Raja Thamsir Rachman menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Indragiri Hulu dengan cara memerintahkan Drs. H. Bambang Priyono selaku Kepala Dinas Pertanahan Tahun 2004-2005 dan Ir. H. Syah Soerya selaku Kepala Dinas Pertanahan 2006-2007 untuk membuat Pertimbangan Teknis penerbitan Izin Lokasi dalam kawasan hutan yang seharusnya tidak diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dimana Izin Lokasi yang diberikan tanpa adanya persetujuan penanaman modal (Izin Prinsip) yang menjadi syarat bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha sawit. Adapun Izin lokasi yang diterbitkan sebagai berikut:

1. PT Banyu Bening Utama

- Izin lokasi terhadap tanah seluas 6.420 ha yang terletak di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 83 Tahun 2004 Tanggal 23 April 2004.
- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 1.560 ha yang terletak di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 6/180/T.HK/2010 Tanggal 5 Juni 2010.
- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 1.551 ha yang terletak di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 Tanggal 8 April 2011.
- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 9 ha yang terletak di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 158 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011.

2. PT Panca Agro Lestari

- Izin lokasi terhadap tanah seluas 3.000 ha yang terletak di Desa Penyaguan dan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 276 Tahun 2005 Tanggal 20 September 2005, kemudian luas areal direvisi menjadi ± 2.100 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 148A Tahun 2007 tanggal 6 Agustus 2007.
- Selanjutnya diperpanjang dan direvisi berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 atas areal semula seluas lebih kurang 2.100 ha menjadi seluas lebih kurang 3.800 ha di Desa Penyaguan dan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 45 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Palma Satu

- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 14.144 ha yang terletak di Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 90 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007 yang pada konsiderannya (menimbang) menggunakan Draft (konsep) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Revisi Izin lokasi terhadap tanah areal semula ± 14.144 ha menjadi seluas ± 10.230 ha terletak di Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 180 Tahun 2010 Tanggal 8 Juli 2010.

4. PT Seberida Subur

- Izin lokasi terhadap tanah seluas ± 6.132 ha yang terletak di Desa Kelesa Kecamatan Seberida, Desa Siambul dan Desa Seberida Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 89 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007.
- PT Seberida Subur telah melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit sebelum adanya izin lokasi maupun izin usaha perkebunan.
- Perpanjangan dan Revisi Izin lokasi terhadap tanah yang semula seluas ± 6.132 ha menjadi seluas 1.800 ha yang terletak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 183 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010.
- Selanjutnya diperpanjang dan direvisi kembali menjadi seluas 6.132 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 197 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010.
- Selain itu, pada tahun 2011 Terdakwa melalui PT Banyu Bening Utama mendapatkan izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011, dimana izin lokasi tersebut diperuntukan hanya untuk kegiatan survey dan sosialisasi, namun oleh Terdakwa

Halaman 46 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*), penanaman dan pengolahan kelapa sawit.

- Sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007, H. Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu juga telah menyalahgunakan kewenangan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), padahal lahan yang dimintakan berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berada dalam kawasan hutan sehingga memerlukan izin pelepasan kawasan hutan, akan tetapi agar tidak memerlukan izin pelepasan kawasan hutan, H. RAJA THAMSIR RACHMAN menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang RTRW Propinsi Riau dengan fungsi lahan APL (APKP/APKL), Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan sebagai berikut:

1. PT Banyu Bening Utama

- Tanggal 29 September 2003, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 5.060 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun 2003.
- Tanggal 16 April 2004, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 6.420 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2004.

2. PT Palma Satu

- Pada tanggal 26 Februari 2007, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 14.144 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007.

3. PT PancaAgro Lestari

Pada tanggal 23 Februari 2006, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 2.980 ha berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006.

4. PT Seberida Subur

Pada tanggal 26 Februari 2007, Bupati Indragiri Hulu menerbitkan Izin Usaha Perkebunan seluas ± 6.312 ha berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 92 Tahun 2007.

Halaman 47 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas izin usaha perkebunan tersebut, Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari melaksanakan kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit tanpa dilengkapi dengan izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang menegaskan:

Pasal 1 huruf a : Pelepasan Kawasan Hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan Usaha Pertanian.

Pasal 2 : Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah Usaha Pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan tanahnya cocok untuk Usaha Pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

- Dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, Terdakwa SURYA DARMADI tidak melaksanakan kewajiban untuk menyediakan lahan perkebunan kepada masyarakat seluas 20% dari total lahan yang diusahakan oleh PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang menegaskan:

“Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf l dan m, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

huruf l : Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 (Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan oleh perusahaan) yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan

huruf m: Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

- Terdakwa melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan berdasarkan IUP-B (Izin Usaha Budidaya Perkebunan) yang tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan yang dibuat formalitas untuk mendapatkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari H. Raja Thamsir Rachman, yaitu:
 - a. PT Banyu Bening Utama mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2004 sementara Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Nomor: 01/SK/Bapedalda/2004 baru diterbitkan pada tanggal 1 November 2004 atas nama PT Banyu Bening Utama dengan luas lahan 6.420 Ha, masing-masing yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN.
 - b. PT Panca Argo Lestari mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) pada tanggal 23 Januari 2006 sementara Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Nomor: 660/Bapedalda-AMDAL/INHU/VII/2007/198 baru diterbitkan pada tahun 2007 atas nama PT PANCA ARGO LESTARI, masing-masing yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN.
 - c. PT Palma Satu mendapat IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) pada tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN, meskipun tidak ada AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
 - d. PT Seberida Subur mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan) diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2007 yang ditandatangani oleh H. RAJA THAMSIR RACHMAN, meskipun tidak ada AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.
 - e. PT Banyu Bening Utama mendapatkan Izin Usaha Pengelolaan Perkebunan (IUP-P) diterbitkan tanpa AMDAL, SKKL atau Izin Lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PT PANCA AGRO LESTARI mendapatkan perluasan areal dari 2.980 ha menjadi 3.800 ha (tambah 900 ha) pada tahun 2010, namun baru diterbitkan AMDAL pada tahun 2014.
- g. PT Kencana Amal Tani Menjalankan kegiatan pabrik kelapa sawit tanpa adanya AMDAL, SKKL, Izin Lingkungan, serta tidak ada IUP-B dan IUP-P.
- Perbuatan Terdakwa menggunakan PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, mengakibatkan:
 - 1) Telah terjadi perubahan fisik dari sebelumnya kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit.
 - 2) Tidak ada lagi pohon hutan alam asli.
- Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dari Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) tanggal 11 Agustus 2022 terdapat kerusakan tanah dan lingkungan, sebagai berikut:
 - 1) PT Kencana Amal Tani
 - a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (kegiatan *cut and fill* pada pembangunan jalan, penebangan vegetasi pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Kencana Amal Tani Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (5-10 cm, 20-30 cm), solum tanah (0 cm) dan batuan permukaan (50-80 %).
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku

Halaman 50 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (Keputusan Menteri Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.

- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter klei (liat), pasir dan redoks.

2) PT Palma Satu

- a. Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Palma Satu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (2-5 cm), subsiden (10-20 cm; 100-150 cm, 250-300 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm).
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2017) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm).
- e. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan

Halaman 51 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

3) PT Panca Agro Lestari

- a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral bergambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah, kegiatan *cut and fill*, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Panca Agro Lestari Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral bergambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (2-5 cm), dan solum tanah (0 cm).
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

4) PT Banyu Bening Utama

- a. Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana jalan/kanal dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Banyu Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan

Halaman 52 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah (10-20 cm), subsiden (20-30 cm; 60-80 cm; 80-90 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm).

- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
- d. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2016) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm).
- e. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.

Selain itu, juga dilakukan verifikasi lapangan dan analisis sampel tanah atas pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit dari PT Banyu Bening Utama, dengan hasil:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah gambut dan lingkungan akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit (pengerukan/penggalian kanal pada tanah gambut, penebangan vegetasi pohon hutan alam, pembangunan sarana dan prasarana pabrik kelapa sawit dan dumping/penimbunan limbah padat) pada kawasan hutan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Banyu Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter Erosi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2-5 cm, 20-30 cm), subsiden (20-30 cm; 100-200 cm), dan kedalaman air tanah dangkal (60-80 cm).

- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan dan kegiatan pabrik kelapa sawit pada kawasan hutan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor: KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.
 - d. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah gambut telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 57 Tahun 2017) untuk kriteria tinggi muka air tanah (60-80 cm).
 - e. Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB PT Biodiversitas Bioteknologi Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan tanah gambut karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk parameter pH dan redoks.
 - f. Pada lokasi pembuangan limbah padat tidak ditemukan *landfill* sehingga limbah padat ditumpuk/*dumping* di atas tanah gambut dengan ketinggian 3-6m.
- 5) PT Seberida Subur
- a. Telah terjadi kerusakan tanah mineral dan lingkungan akibat pembangunan kebun kelapa sawit (kegiatan *cut and fill* pada pembangunan jalan, penebangan vegetasi pohon hutan alam dan penanaman kelapa sawit) pada kawasan hutan oleh PT Seberida Subur Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi tanah mineral telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, solum tanah dan batuan permukaan.
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pembangunan kelapa sawit pada kawasan hutan

Halaman 54 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Kepmen Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi.

- Perusahaan milik Terdakwa yang telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit walaupun tidak memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan, sebagai berikut:
 1. PT Banyu Bening Utama seluas 6.417 Ha yang telah memiliki HGU, namun tidak ada izin pelepasan kawasan hutan;
 2. PT Kencana Amal Tani untuk lahan seluas 3.792 ha telah memiliki HGU, namun tidak ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
 3. PT Panca Agro Lestari untuk lahan seluas 3.816 Ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan;
 4. PT Seberida Subur untuk lahan seluas 6.132 Ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan; dan
 5. PT Palma Satu untuk lahan seluas 10.230 Ha tidak memiliki HGU dan tidak ada Izin Pelepasan kawasan Hutan.
- Dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2022 perusahaan-perusahaan milik Terdakwa telah melakukan kegiatan penanaman dan kegiatan produksi kelapa sawit dan mendapat nilai jual tandan buah segar (TBS) sebagai berikut:

No	Nama perusahaan	Luas (ha)	Nilai Jual TBS (Rp)
1	PT Palma Satu	10.000	868.788.165.668,90
2	PT Seberida Subur	6.132	614.190.850.647,04
3	PT Banyu Bening Utama	7.971	2.353.357.781.807,46
4	PT Panca Agro Lestari	3.816	2.193.761.386.245,00
5	PT Kencana Amal Tani	9.176	5.404.289.424.485,53
			11.434.387.608.853,90

- Akibat perbuatan Terdakwa yang melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai Rp73.920.690.300.000,00 (*tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) yaitu:

No	Nama perusahaan	Luas (ha)	Kerugian LH (Rp)
----	-----------------	-----------	------------------

Halaman 55 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT PALMA SATU (PT PS)	10.000	19.927.400.000.000
2	PT SEBERIDA SUBUR (PT SS)	6.132	12.219.481.680.000
3	PT BANYU BENING UTAMA (PT BBU)	7.971	15.884.130.540.000
4	PT PANCA AGRO LESTARI (PT PAL)	3.816	7.604.295.840.000
5	PT KENCANA AMAL TANI (PT KAT)	9.176	18.285.382.240.000
	TOTAL		73.920.690.300.000

Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.

- Berdasarkan Laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 - a) Alih lahan ilegal telah memunculkan biaya eksternalitas negatif karena kualitas lingkungan mengalami penurunan. PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur bertanggung jawab untuk menanggung biaya *recovery* dan proses *recovery* lingkungan. Apabila biaya *recovery* tidak dibebankan kepada PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur, maka biaya *recovery* akan menjadi tanggungan negara.
 - b) Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan *nature* yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya *recovery* lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara illegal bernilai total sebesar Rp73.920.690.300.000,00.
 - c) Alih lahan yang dilakukan tanpa izin memiliki konsekuensi adanya kewajiban perusahaan terkait alih lahan maupun pengusahaan kebun sawit tidak dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini berdampak pada hilangnya penerimaan pemerintah yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.
 - d) Terjadi penurunan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan perkebunan karena perusahaan sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan sawit rakyat. Hilangnya pendapatan rumah tangga dari program sawit rakyat merupakan bagian dari keuntungan *illegal* yang diperoleh oleh perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan kerugian sebesar Rp556.086.968.453,00 akibat tidak diimplementasikannya ketentuan terkait sawit rakyat. Selain itu juga terjadi hilangnya kesempatan berkembang bagi koperasi rumah tangga yang mengelola sawit rakyat. Pola inti-plasma di sektor sawit pada umumnya terjadi melalui hubungan kerjasama antara perusahaan sebagai inti dengan para petani sawit rakyat yang tergabung dalam koperasi. Tidak adanya penerapan kebijakan sawit rakyat, maka pendapatan untuk koperasi sawit rakyat juga menjadi tidak ada.

e) Pelanggaran izin yang dilakukan PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur telah menimbulkan sejumlah konflik dan kekerasan.

- Dari usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2020, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.238.274.248.234,00 (*dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi ketentuan:

1. Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa: "Dalam pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon melampirkan rekaman surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN atau surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/PMDN.
2. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Ketentuan Pelepasan

Halaman 57 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang menegaskan:

Pasal 1 huruf a : Pelepasan Kawasan Hutan adalah pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan Usaha Pertanian.

Pasal 2 : Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah Usaha Pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan tanahnya cocok untuk Usaha Pertanian dan menurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

3. Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan Perkebunan, yang menegaskan:

Pasal 13

Ayat (1) : IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.

Ayat (2) : Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

Ayat (3) : IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 15 : Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan

Halaman 58 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

Halaman 59 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 16

Ayat (1) : Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Surat keterangan domisili;
- d) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- e) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- f) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000;
- g) Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- h) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;

Halaman 60 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- j) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau paya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Ayat (2) : Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

4. Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang menegaskan:

Pasal 5

Ayat (1) : Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki izin usaha industri perkebunan.

Ayat (2) : Usaha Industri Perkebunan yang dilakukan oleh petani perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus didaftar oleh pemberi izin.

Pasal 6

Ayat (1) : IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota.
- b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Ayat (2) : IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

Pasal 10 : Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Surat keterangan domisili.
- d. Rencana kerja usaha perkebunan.
- e. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris

Halaman 62 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.

k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu periode tahun 1999 s/d tahun 2008 telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus Sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, yaitu:

a. Rp2.238.274.248.234,00 (*dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) dari keuntungan tidak sah (*illegal gain*) yang diperoleh Terdakwa.

b. Rp556.086.968.453,00 (*lima ratus lima puluh enam miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*) sebagai keuntungan tidak sah karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat.

c. Rp4.798.706.951.640,00 (*empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*) dari kewajiban pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Penggunaan Kawasan Hutan dan Biaya Pemulihan Lingkungan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa SURYA DARMADI.

- Perbuatan Terdakwa SURYA DARMADI bersama-sama dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (*empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta*

Halaman 63 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7,885,857.36(tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu dari BPKP Nomor: PE.03/SR-657/D5/01/2022 Tanggal 25 Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kerugian Keuangan Negara:

No	Jenis Kerugian	Jumlah (USD dan Rp)
1.	Hasil Pendapatan negara atas pemanfaatan hutan yang tidak diterima: a. Dana Reboisasi b. Provisi Sumber Daya Hutan c. Denda d. Kompensasi Penggunaan Kawasan Hutan	 \$7.885.857,36 Rp11.828.786.040,00 Rp177.431.790.600,00 Rp511.747.200.000,00
	Jumlah (1)	Rp701.007.776.640,00 \$7.885.857,36
2.	Biaya Pemulihan Kerusakan Sumber Daya hutan	Rp4.097.699.175.000,00
	Jumlah (2)	Rp4.097.699.175.000,00
	Jumlah (1 + 2)	Rp4.798.706.951.640,00 \$7.885.857,36

b. Jumlah Kerugian Keuangan Negara per perusahaan:

No	Nama Perusahaan	Jumlah	
		US Dollar	Rupiah
1.	PT Panca Agro Lestari	1.528.200,00	522.795.240.000,00
2.	PT Palma Satu	3.288.924,00	1.450.535.174.000,00
3.	PT Banyu Bening Utama	429.624,00	925.698.639.000,00
4.	PT Seberida Subur	116.553,36	717.844.284.360,00
5.	PT Kencana Amal Tani	2.468.556,00	1.273.236.646.000,00
Total		7.885.857,36	4.798.706.951.640,00

- Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.

- Selain merugikan keuangan Negara juga mengakibatkan kerugian perekonomian Negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (*tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha sebagaimana Laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

D A N

K E D U A:

Terdakwa SURYA DARMADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di Regional Office Duta Palma Nusantara Jl. O.K.M Jamil No. 1 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di Kantor Asset Pacific di Menara Palma Kav X,2 No 6, Jl. Hr. Rasuna Said, RT.8/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Kantor Palma Tower di Jln Kartini Nomor 6, Pondok Pinang Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 65 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yakni melakukan pembelian tanah dan bangunan, atas harta kekayaan yang merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) huruf a yaitu hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dari usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010, Terdakwa SURYA DARMADI mengetahui atau patut menduga uang dan hasil kejahatan lainnya yang dipergunakan untuk melakukan pembelian dan penyertaan modal yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dengan mengatasnamakan Terdakwa SURYA DARMADI, pihak lain dan Perusahaan milik Terdakwa SURYA DARMADI maupun sebagai pemilik manfaat atas perusahaan tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pemilik dari Darmex Group yang perusahaannya terletak di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya, Pengangkutan serta bergerak di bidang Properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa, dengan rincian grup usaha sebagai berikut:
 - a. PT Darmex Plantations, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Darmex Plantations memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
 - 1) PT Duta Palma Nusantara
 - 2) PT Cerenti Subur
 - 3) PT Johan Sentosa
 - 4) PT Eluan Mahkota
 - 5) PT Wana Jingga Timur
 - 6) PT Delimuda Perkasa
 - 7) PT Banyu Bening Utama
 - 8) PT Seberida Subur

Halaman 66 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) PT Mekarsari Alam Lestari
 - 10) PT Panca Agro Lestari
 - 11) PT Kencana Amal Tani
 - 12) PT Palma Inti Lestari
 - 13) PT Aditya Palma Nusantara
 - 14) PT Lestari Persada Alam
 - 15) PT Palma Satu
- b. PT Alfa Ledo, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Alfa Ledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
- 1) PT Wirata Daya Bangun Persada
 - 2) PT Lestari Persada Alam
 - 3) PT Teluk Keramat
 - 4) PT Kaliau Mas Perkasa
 - 5) PT Wana Hijau Semesta
 - 6) PT Darmex Agro
 - 7) PT Asset Pasific Internasional
 - 8) PT Ledo Lestari
 - 9) PT Bukit Jagoi Indah
 - 10) PT Lestari Alam Raya
 - 11) PT Bengkayang Subur
 - 12) PT Dumai Inti Utama
 - 13) PT Mitra Wawasan
 - 14) PT Ceria Prima
 - 15) PT Wiratadaya Bangun Persada
- c. PT Monterado Mas, merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya. Terdakwa merupakan Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayoritas melalui PT Darmex Plantation yaitu sebesar 99,9% saham, dan saham atas nama Terdakwa SURYA DARMADI sebesar 0,001%. PT Monterado Mas memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Bayas Biofuels
- 2) PT Darmex Biofuels
- 3) PT Darmex Oil & Fats
- 4) PT Teluk Kuantan Perkasa
- 5) PT Dabi Oleo
- 6) PT Dabi Biofuels

d. PT Asset Pacific, berlokasi di Jakarta merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang properti dimana pemegang sahamnya adalah Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Asset Pacific memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Tugu Tani
- 2) PT Harapanjaya Bumipertiwi
- 3) PT Kuningan Nusajaya (XL TOWER)
- 4) PT Menara Capital Indonusa (PALMA TOWER)
- 5) PT Permata Dumai Abadi
- 6) PT Wanamitra Permai (MENARA PALMA)
- 7) PT Bumijawa Sentosa (PALMA ONE)
- 8) PT Danatama Mulia (WISMA PALMA)
- 9) PT Persada Hijau Raya
- 10) PT Hijau Permata Wanalestari
- 11) PT Semesta Alam Permai
- 12) PT Ratu Alam Persada
- 13) PT Palma Express
- 14) PT Menara Perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT DELIMUDA NUSANTARA, merupakan perusahaan kapal tongkang milik Terdakwa SURYA DARMADI yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
- f. PT Dabi Air Nusantara merupakan perusahaan penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk Helikopter milik Terdakwa SURYA DARMADI
- g. RICH ASIAN PTE LTD merupakan perusahaan milik terdakwa SURYA DARMADI yang didirikan di Singapura beralamat di 3 Shenton Way #10-04 Shenton House Singapore 068805.
- h. WAXBILL PTE LTD merupakan perusahaan trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI.
- i. PALMBRIDGE PTE LTD merupakan perusahaan trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI.
- j. ASSET PASIFIC PTY LTD merupakan Perusahaan Properti di Australia milik Terdakwa SURYA DARMADI.
- k. PALMA PASIFIC PTE LTD merupakan perusahaan properti di Singapura milik SURYA DARMADI.
- Terdakwa sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menempatkan keluarganya yaitu Sianto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan yaitu Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris perusahaan pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, sehingga dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan dari Terdakwa, termasuk keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Terdakwa SURYA DARMADI selaku pemilik manfaat PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan Pabrik Kepala Sawit di kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan dan izin pelepasan kawasan hutan, sehingga terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus*

Halaman 69 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh rupiah) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*) yang merupakan hasil tindak pidana korupsi.

- Hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa melalui PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari selanjutnya ditempatkan dan ditransfer ke PT Darmex Plantations selaku holding perusahaan perkebunan di Riau milik Terdakwa SURYA DARMADI dalam bentuk pembagian deviden, pembayaran hutang pemegang saham, penyeteroran modal ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, PT Asset Pacific dan ke perusahaan-perusahaan Terdakwa yang lain. Kemudian harta kekayaan yang diperoleh sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*), dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan atas nama Terdakwa SURYA DARMADI maupun atas nama pihak lain, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian Rumah Susun (Rusun) Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & APT Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.35 No.CP-35 Blok Central Park Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi atas nama SURYA DARMADI berdasarkan Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor: 779/XIII/B luas 880 M².
2. Pada tahun 2005 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & APT Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.40 No.PA-40A Blok Park Avenu Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi atas nama pihak lain yaitu Cheryl Darmadi (anak Terdakwa) berdasarkan Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor: 816/XXXVII/Park Avenue luas 440 M².
3. Pada Tahun 2005 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni PT

Halaman 70 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanamitra Permai (anak perusahaan PT Asset Pacific) melakukan pembelian rumah yang terletak di Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 Kav 6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 927 luas 4.720 M².

4. Pada tahun 2007 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 sub Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB 6846 luas 4.445 M².
5. Pada tahun 2007 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 sub Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB 7411 luas 535 M².
6. Pada Tahun 2007 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Simprug Garden Blok G No. 20 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta selatan berdasarkan sertifikat Hak Milik 3740 luas 912 M² atas nama SURYA DARMADI.
7. Pada Tahun 2007, Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian Tanah dan bangunan di atas sertifikat hak milik (SHM) No. 3740 luas 912 M² yang terletak di Jl. Simprug Garden Blok G No. 20 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama atas nama SURYA DARMADI.
8. Pada tahun 2007 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni PT Ratu Alam Persada yang terletak di Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 sub Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat HGB 7411 luas 535 M².
9. Pada Tahun 2007 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama pihak lain yaitu PT Delimuda Perkasa sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01 An. PT. Delimuda Perkasa dengan luas tanah 697.196 M² (meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;

10. Pada Tahun 2008, Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni Bill Darmadi (anak terdakwa) di atas sertifikat HGB 9396 luas 2.358 M² Jl. Golf Utama Sektor III Blok PE Kav No. 7 Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, dan kemudian pada Tahun 2018.
11. Pada Tahun 2008, Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni Bill Darmadi berdasarkan sertifikat HGB 9397 luas 2723 M² Jl. Golf Utama Sektor III Blok PE Kav No. 7 Kelurahan Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama yang kemudian pada Tahun 2018.
12. Pada Tahun 2010 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan atas nama pihak lain yakni PT Kuningan Nusajaya (anak perusahaan PT Asset Pacific) yang terletak di Jl. Rangkayo Rasuna Said Blok X.5 No.12 dan X.5 No.11 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan sesuai sertifikat HGB 2051 luas 4.470 M² pada tahun 2010 dengan nilai Rp299.999.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*). Dari modal setor PT Asset Pacific ke PT Kuningan Nusajaya senilai Rp331.100.744.347,00 (*tiga ratus tiga puluh satu miliar seratus juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

DAN

KETIGA

PRIMAIR

Halaman 72 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURYA DARMADI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Regional Office Duta Palma Nusantara Jl. O.K.M Jamil No. 1 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di Kantor Asset Pacific di Menara Palma Kav X,2 No 6, Jl. Hr. Rasuna Said, RT.8/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Kantor Palma Tower di Jln Kartini Nomor 6, Pondok Pinang Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yakni melakukan penempatan dana pada lembaga keuangan dalam bentuk tabungan dan deposito, melakukan pembelanjaan atau pembayaran diantaranya untuk pembelian tanah dan bangunan, memberikan pinjaman kepada pihak yang terafiliasi, membiayai pembangunan pabrik, pembelian saham, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu dengan mengatasnamakan terdakwa sendiri, mengatasnamakan pihak lain dalam pembelian tanah dan bangunan di dalam negeri dan luar negeri, penempatan dana di bank, penyetoran modal, transaksi saham, pembelian kapal, mengalihkan dana ke perusahaan terdakwa di luar negeri, yang dilakukan Terdakwa SURYA DARMADI dengan cara sebagai berikut:*

- Terdakwa sebagai pemilik dari Darmex Group yang perusahaannya terletak di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya, Pengangkutan serta bergerak di bidang

Halaman 73 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa, dengan rincian grup usaha sebagai berikut:

a. PT Darmex Plantations, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Darmex Plantations memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Duta Palma Nusantara
- 2) PT Cerenti Subur
- 3) PT Johan Sentosa
- 4) PT Eluan Mahkota
- 5) PT Wana Jingga Timur
- 6) PT Delimuda Perkasa
- 7) PT Banyu Bening Utama
- 8) PT Seberida Subur
- 9) PT Mekarsari Alam Lestari
- 10) PT Panca Agro Lestari
- 11) PT Kencana Amal Tani
- 12) PT Palma Inti Lestari
- 13) PT Aditya Palma Nusantara
- 14) PT Lestari Persada Alam
- 15) PT Palma Satu

b. PT Alfa Ledo, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Alfa Ledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Wirata Daya Bangun Persada
- 2) PT Lestari Persada Alam
- 3) PT Teluk Keramat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PT Kaliau Mas Perkasa
 - 5) PT Wana Hijau Semesta
 - 6) PT Darmex Agro
 - 7) PT Asset Pasific Internasional
 - 8) PT Ledo Lestari
 - 9) PT Bukit Jagoi Indah
 - 10) PT Lestari Alam Raya
 - 11) PT Bengkayang Subur
 - 12) PT Dumai Inti Utama
 - 13) PT Mitra Wawasan
 - 14) PT Ceria Prima
 - 15) PT Wiratadaya Bangun Persada
- c. PT Monterado Mas, merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas melalui PT Darmex Plantation yaitu sebesar 99,9% saham, dan saham atas nama Terdakwa SURYA DARMADI sebesar 0,001%. PT Monterado Mas memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
- 1) PT Bayas Biofuels
 - 2) PT Darmex Biofuels
 - 3) PT Darmex Oil & Fats
 - 4) PT Teluk Kuantan Perkasa
 - 5) PT Dabi Oleo
 - 6) PT Dabi Biofuels
- d. PT Asset Pacific, berlokasi di Jakarta merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang properti dimana pemegang sahamnya adalah Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Asset Pacific memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
- 1) PT Tugu Tani

Halaman 75 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Harapanjaya Bumipertiwi
- 3) PT Kuningan Nusajaya (XL TOWER)
- 4) PT Menara Capital Indonusa (PALMA TOWER)
- 5) PT Permata Dumai Abadi
- 6) PT Wanamitra Permai (MENARA PALMA)
- 7) PT Bumijawa Sentosa (PALMA ONE)
- 8) PT Danatama Mulia (WISMA PALMA)
- 9) PT Persada Hijau Raya
- 10) PT Hijau Permata Wanalestari
- 11) PT Semesta Alam Permai
- 12) PT Ratu Alam Persada
- 13) PT Palma Express
- 14) PT Menara Perdana
- e. PT DELIMUDA NUSANTARA, merupakan Perusahaan Kapal Tongkang milik Terdakwa SURYA DARMADI yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Pelabuhan PT Bayas Biofuels)
- f. PT Dabi Air Nusantara merupakan Perusahaan Penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk Helikopter milik Terdakwa SURYA DARMADI
- g. RICH ASIAN PTE LTD merupakan Perusahaan milik terdakwa SURYA DARMADI yang didirikan di Singapura (3 Shenton Way #10-04 Shenton House Singapore 068805)
- h. WAXBILL PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- i. PALMBRIDGE PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- j. ASSET PASIFIC PTY LTD merupakan Perusahaan Properti di Australia milik Terdakwa SURYA DARMADI
- k. PALMA PASIFIC PTE LTD merupakan Perusahaan Properti di Singapura milik SURYA DARMADI
- Terdakwa sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menempatkan keluarganya yaitu Sianto Wetan dan Alisati Firman

Halaman 76 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta karyawan yaitu Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris perusahaan pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, sehingga dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan dari Terdakwa, termasuk keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.

- Terdakwa SURYA DARMADI selaku *beneficial owner* atau pemilik manfaat PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan Pabrik Kepala Sawit di kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan, izin pelepasan kawasan hutan, sehingga terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*) merupakan hasil tindak pidana korupsi.
- Hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa melalui PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari selanjutnya ditempatkan dan ditransfer ke PT Darmex Plantations selaku holding perusahaan perkebunan di Riau milik Terdakwa SURYA DARMADI dalam bentuk pembagian deviden, pembayaran hutang pemegang saham, penyeteroran modal ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, PT Asset Pacific dan ke perusahaan-perusahaan Terdakwa yang lain. Kemudian harta kekayaan yang diperoleh sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwa SURYA DARMADI dengan mengatasnamakan terdakwa sendiri, mengatasnamakan pihak lain

Halaman 77 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembelian tanah dan bangunan di dalam negeri dan luar negeri, penempatan dana di bank, penyetoran modal, transaksi saham, pembelian kapal, mengalihkan dana ke perusahaan terdakwa di luar negeri, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp15.153.790.200,00 (*lima belas miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*) kepada Cheryl Darmadi (anak Terdakwa) menggunakan Rekening PT Palma Satu pada Bank Mandiri Nomor 1240005570610.
2. Pada tanggal 31 Januari 2012 sampai 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp3.352.902.748.385,00 (*tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Banyu Bening Utama di Bank Mandiri.
3. Pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp331.291.072.111,00 (*tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu seratus sebelas rupiah*) ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Seberida Subur di Bank Mandiri.
4. Pada tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp2.704.885.792.251,00 (*dua triliun tujuh ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) ke rekening PT DARMEX AGRO, PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX BIOFUEL dan PT DARMEX OIL & FATS dan YAYASAN DARMEX menggunakan rekening Bank milik PT Kencana Amal Tani di Bank Mandiri.
5. Pada tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp1.498.081.527.239,00 (*satu triliun empat ratus sembilan*

Halaman 78 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat miliar delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ke PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX AGRO, PT DARMEX BIOFUELS dan PT DARMEX OIL & FATS menggunakan rekening Bank PT Panca Agro Lestari di Bank Mandiri.

6. Pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp1.892.738.295.122,00 (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah*) ke PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX AGRO, PT DARMEX BIOFUELS dan PT DARMEX OIL & FATS menggunakan Rekening Bank PT Palma Satu di Bank Mandiri.
7. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan penyetoran modal ke PT Harapanjaya Bumipertiwi melalui PT Asset Pacific sebesar Rp440.000.000.000,00 (*empat ratus empat puluh miliar rupiah*). Uang tersebut kemudian dipergunakan PT Harapanjaya Bumipertiwi untuk membeli 3 bidang tanah yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 9.271 M² berdasarkan sertifikat HGB Nomor 1663/Kuningan Timur tanggal 7 Juni 2000 beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Kav 29-30 RT/RW 04/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan tahun 2012 atas nama PT Harapanjaya Bumi Pertiwi.
 - b. Sebidang tanah seluas 5.726 M² berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 1641/Kuningan Timur beralamat di beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto RT/RW 03/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2018 atas nama PT Harapanjaya Bumi Pertiwi.
 - c. Sebidang tanah seluas 2.846 M² berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 02276/Kuningan Timur beralamat di beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto RT/RW 03/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2019 atas nama PT Harapanjaya Bumi Pertiwi.
8. Pada tahun 2012 sampai tahun 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening

Halaman 79 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Harapanjaya Bumi Pertiwi, PT Asset Pacific mentransfer Dana ke PT Delimuda Nusantara untuk Penyetoran Modal dan Pembelian Saham antara lain sebagai berikut:

- a. Terdakwa SURYA DARMADI sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari mengirimkan dana ke PT Delimuda Nusantara senilai Rp54.969.416.431,00 (lima puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- b. Pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa Surya Darmadi melakukan penyetoran modal ke PT Delimuda Nusantara sebesar Rp39.999.000.000,00 sebagai pemegang saham PT Delimuda Nusantara sebesar 99,99 % dan Julia Riady sebesar 1.000.000,00 (0,001%);
- c. Pada tahun 2018 Terdakwa Surya Darmadi melalui PT Harapanjaya BumiPertiwi menyetorkan modal dalam bentuk Shareholder Loan (SL) kepada PT Delimuda Nusantara senilai Rp120.000.000.000,00
- d. Pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa Surya darmadi melalui PT Asset Pacific mengirimkan dana untuk pembelian saham PT Delimuda Nusantara sebesar Rp24.999.000.000,00

Selanjutnya melalui PT Delimuda Nusantara, Terdakwa SURYA DARMADI menguasai dan memiliki sejumlah asset diantaranya sebagai berikut:

1. Royal Palma – IV, Barge, PT. Delimuda Nusantara, Dumai, 2000 PPj No.1213/L, 1596, 1317
2. Royal Palma 21, Tug Boat, PT. Delimuda Nusantara, Batam, 2012 PPM No.2575/L, 153, 46
3. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.

Halaman 80 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.
9. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Darmex Plantations melakukan penyertaan modal ke PT Monterado Mas selanjutnya PT Monterado Mas melalui PT Dabi Oleo mendirikan pabrik di Lubuk Gaung Riau dengan dana sebesar Rp1.493.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah), namun pada tahun 2020 Pabrik tersebut dijual Terdakwa kepada PT Sari Dumai Oleo.
10. Pada Tahun 2013 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembayaran Tanah dan Bangunan Perkantoran yang terletak di Jl. Salemba Raya No 5 dan 5A Rt 014 Rw 03 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat sesuai sertifikat HGB 224 dengan luas 2.180 M² melalui PT Asset Pacific.
11. Pada tahun 2013 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific melakukan penyeteran modal ke PT Tugu Tani (anak perusahaan) sebesar Rp331.100.744.347,00 selanjutnya melalui PT Tugu Tani melakukan pembayaran tanah dan bangunan perkantoran yang terletak Jl. Arif Rahman Hakim No.3 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat sesuai sertifikat HGB 773 luas 16.250 M².
12. Pada tahun 2013 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartement The Pakubuwono View, Jl. Tengku Nyak Arief yang beralamat di Jl. Kramat No.12 Rt 009 Rw 01 Lantai 12 No.LW 12B Blok Lacewood Kelurahan Kebayoran Lama dengan sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun Nomor: 40/XI/LACEWOOD seluas 180 M² atas nama Cheryl Darmadi.
13. Pada tahun 2015 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4291 luas 800 M² atas nama ADIL DARMADI.

Halaman 81 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada Tahun 2015 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4414 seluas 2209 M² atas nama ADIL DARMADI.

15. Pada tahun 2015 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Menara Perdana melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali terletak di Jl Wana Segara No. 33 Ling. Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan rincian:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 941 An. PT. Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 M² yang terletak Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Hotel Holiday Inn Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1147 dengan luas 2.000 M² terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

16. Pada tahun 2016 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian bangunan perkantoran yang terletak di Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor II Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor: 6659 dengan luas 5.000 M² atas nama PT Menara Capital Indonusa.

17. Pada tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pasific menempatkan dana ke Perusahaan Terdakwa di Singapura dalam bentuk penyertaan saham sebesar SG\$4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu dolar Singapura) melalui perjanjian antara PT Asset Pasific (Subscriber) dan Palma Pasific PTE LTD (Existing Shareholder) dan Rich Asian PTE LTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific dan Palma Pacific Pte Ltd mentransfer Dana sebesar SGD63.000.000,00 (enam puluh tiga juta dolar Singapura) ke Rich Asian Pte Ltd yang merupakan perusahaan Terdakwa di Singapura.

19. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific melakukan pembelian Properti di Australia menggunakan Asset Pacific Pty Ltd yang terletak di 235 Queen Street, Melbourne, Victoria, 3000 senilai AUD \$45.400.000 (empat puluh lima juta empat ratus ribu dolar Australia)

20. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific membeli asset berupa 22 unit apartement di Singapura yang terdiri atas apartement unit #02-05, #03-05, #04-05, #05-05, #06-05, #07-05, #09-05, #10-05, #11-05, #12-05, #13-05, #14-05, #15-05, #16-05, #17-05, #18-05, #19-05, #20-05, #21-05, #22-05, #23-05 and #24-05 yang terletak di Draycott 8, 8 Draycott Park, Singapore 259404 senilai SGD \$166.772.550,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh dolar Singapura).

21. Pada bulan Juni 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Menara Capital Indonusa melakukan pembelian saham MCOL sebesar Rp175,031,185,000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah),..

22. Pada tahun 2020 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Danatama Mulia melakukan pembelian 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 828 atas nama PT Danatama Mulia seluas 152 M².
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 829 atas nama PT Danatama Mulia seluas 143 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 849 Atas nama PT. Danatama Mulia seluas 155 m².

23. Pada tahun 2020 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantation telah menempatkan dana dalam bentuk giro dan Deposito pada Bank Mandiri, Bank BRI, bank BNI, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp544.066.922.778,00,00 (*lima ratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) pada Bank BNI di beberapa rekening atas nama Asset Pasific dan Darmex Plantation.
- b. Sebesar Rp3,020,879,952,618,00 (*tiga triliun dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah*) pada beberapa rekening Bank BRI atas nama PT Asset Pacific.
- c. Sebesar Rp1.558.242.189.583,23 (*satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen*), USD11.400.813,57 (*sebelas juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas dolar Amerika lima puluh tujuh sen*) dan SGD646,04 (*enam ratus empat puluh enam dolar Singapura nol empat sen*) atas nama nasabah Aset Pacific dan Darmex Plantations yang tersimpan pada beberapa rekening Bank Mandiri.

24. Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Darmex Plantation melakukan setoran modal ke PT Alfa Ledo senilai Rp3.000.000.000.000,00 (*tiga triliun rupiah*) dengan komposisi pemegang saham Terdakwa SURYA DARMADI sebesar 99,99% dan Julia Riady sebesar 0,001%. Melalui anak perusahaan PT Alfa Ledo Terdakwa menguasai sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, diantaranya:

- a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 56 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 1.386,08 Ha yang terletak Desa Semanga, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;

- b) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 116 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.106,54 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- c) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 115 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.930,21 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- d) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 58 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 3.405,84 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sebunga, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- e) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 57 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 5.602 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- f) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 171 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 169,19 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- g) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 170 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 205,81 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- h) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 An.

Halaman 85 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ceria Prima dengan luas tanah 7.023,57 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;

- i) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 4.093,11 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo dan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;
- j) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 8.029,803 Ha. yang terletak Desa Mayak dan Kalon, Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;
- k) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 14.335,848 Ha. yang terletak Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;

25. Pada tahun 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartement South Hills Lantai 15 No. 15 R luas 124 M² Jl. Denpasar Raya Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 7916 atas nama ADIL DARMADI (anak Terdakwa).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SUBSIDIAR:

Terdakwa SURYA DARMADI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Regional Office Duta Palma Nusantara Jl. O.K.M Jamil No. 1 Simpang Tiga Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di Kantor Asset Pacific di Menara Palma Kav X,2 No 6, Jl. Hr. Rasuna Said, RT.8/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Kantor Palma Tower di Jln

Halaman 86 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Nomor 6, Pondok Pinang Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa H. Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Terdakwa sebagai pemilik dari Darmex Group yang perusahaannya terletak di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya, Pengangkutan serta bergerak di bidang Properti yang seluruh kegiatannya dikendalikan oleh Terdakwa, dengan rincian grup usaha sebagai berikut:
 - a. PT Darmex Plantations, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Darmex Plantations memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
 - 1) PT Duta Palma Nusantara
 - 2) PT Cerenti Subur
 - 3) PT Johan Sentosa
 - 4) PT Eluan Mahkota
 - 5) PT Wana Jingga Timur
 - 6) PT Delimuda Perkasa
 - 7) PT Banyu Bening Utama
 - 8) PT Seberida Subur
 - 9) PT Mekarsari Alam Lestari

Halaman 87 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) PT Panca Agro Lestari
 - 11) PT Kencana Amal Tani
 - 12) PT Palma Inti Lestari
 - 13) PT Aditya Palma Nusantara
 - 14) PT Lestari Persada Alam
 - 15) PT Palma Satu
- b. PT Alfa Ledo, merupakan *holding* perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Barat. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Alfa Ledo memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
- 1) PT Wirata Daya Bangun Persada
 - 2) PT Lestari Persada Alam
 - 3) PT Teluk Keramat
 - 4) PT Kaliau Mas Perkasa
 - 5) PT Wana Hijau Semesta
 - 6) PT Darmex Agro
 - 7) PT Asset Pasific Internasional
 - 8) PT Ledo Lestari
 - 9) PT Bukit Jagoi Indah
 - 10) PT Lestari Alam Raya
 - 11) PT Bengkayang Subur
 - 12) PT Dumai Inti Utama
 - 13) PT Mitra Wawasan
 - 14) PT Ceria Prima
 - 15) PT Wiratadaya Bangun Persada
- c. PT Monterado Mas, merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya. Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas melalui PT Darmex Plantation yaitu sebesar 99,9% saham, dan saham atas nama Terdakwa SURYA DARMADI

Halaman 88 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,001%. PT Monterado Mas memiliki anak perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Bayas Biofuels
 - 2) PT Darmex Biofuels
 - 3) PT Darmex Oil & Fats
 - 4) PT Teluk Kuantan Perkasa
 - 5) PT Dabi Oleo
 - 6) PT Dabi Biofuels
- d. PT Asset Pacific, berlokasi di Jakarta merupakan *holding* perusahaan milik Terdakwa yang bergerak di bidang properti dimana pemegang sahamnya adalah Terdakwa merupakan Pemegang Saham Mayoritas yaitu sebesar 99,9% saham dan Julia Riady (adik Terdakwa) sebesar 0,001%. PT Asset Pacific memiliki anak perusahaan sebagai berikut:
- 1) PT Tugu Tani
 - 2) PT Harapanjaya Bumipertiwi
 - 3) PT Kuningan Nusajaya (XL TOWER)
 - 4) PT Menara Capital Indonusa (PALMA TOWER)
 - 5) PT Permata Dumai Abadi
 - 6) PT Wanamitra Permai (MENARA PALMA)
 - 7) PT Bumijawa Sentosa (PALMA ONE)
 - 8) PT Danatama Mulia (WISMA PALMA)
 - 9) PT Persada Hijau Raya
 - 10) PT Hijau Permata Wanalestari
 - 11) PT Semesta Alam Permai
 - 12) PT Ratu Alam Persada
 - 13) PT Palma Express
 - 14) PT Menara Perdana
- e. PT DELIMUDA NUSANTARA, merupakan Perusahaan Kapal Tongkang milik Terdakwa SURYA DARMADI yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Pelabuhan PT Bayas Biofuels)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PT Dabi Air Nusantara merupakan Perusahaan Penerbangan yang 25% sahamnya dalam bentuk Helikopter milik Terdakwa SURYA DARMADI
- g. RICH ASIAN PTE LTD merupakan Perusahaan milik terdakwa SURYA DARMADI yang didirikan di Singapura (3 Shenton Way #10-04 Shenton House Singapore 068805)
- h. WAXBILL PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- i. PALMBRIDGE PTE LTD merupakan Perusahaan Trading CPO di Singapura milik Terdakwa SURYA DARMADI
- j. ASSET PASIFIC PTY LTD merupakan Perusahaan Properti di Australia milik Terdakwa SURYA DARMADI
- k. PALMA PASIFIC PTE LTD merupakan Perusahaan Properti di Singapura milik SURYA DARMADI.
- Terdakwa sebagai Pemegang Saham Mayoritas telah menempatkan keluarganya yaitu Sianto Wetan dan Alisati Firman serta karyawan yaitu Herry Hermawan, Tovariga Ginting dan Putri Ayu sebagai direksi maupun komisaris perusahaan pada PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari, sehingga dalam pengambilan keputusan operasional dan keuangan perusahaan seluruhnya atas keputusan dari Terdakwa, termasuk keputusan untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Terdakwa SURYA DARMADI selaku *beneficial owner* atau pemilik manfaat PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Kencana Amal Tani dan PT Panca Agro Lestari telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan Pabrik Kepala Sawit di kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin prinsip, izin lingkungan, izin pelepasan kawasan hutan, sehingga terdakwa memperoleh harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan*

Halaman 90 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen).

- Hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa melalui PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari selanjutnya ditempatkan dan ditransfer ke PT Darmex Plantations selaku holding perusahaan perkebunan di Riau milik Terdakwa SURYA DARMADI dalam bentuk pembagian deviden, pembayaran hutang pemegang saham, penyeteroran modal ke PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, PT Asset Pacific dan ke perusahaan-perusahaan Terdakwa yang lain. Kemudian harta kekayaan yang diperoleh sebesar Rp7.593.068.204.327,00 (*tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh delapan juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan USD7,885,857.36 (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar Amerika tiga puluh enam sen*), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwa SURYA DARMADI, yaitu dengan mengatasnamakanterdakwa sendiri, mengatasnamakan pihak lain dalam pembelian tanah dan bangunan di dalam negeri dan luar negeri, penempatan dana di bank, penyeteroran modal, transaksi saham, pembelian kapal, mengalihkan dana ke perusahaan terdakwa di luar negeri, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp15.153.790.200,00 (*lima belas miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*) kepada Cheryl Darmadi (anak Terdakwa) menggunakan Rekening PT Palma Satu pada Bank Mandiri Nomor 1240005570610.
2. Pada tanggal 31 Januari 2012 sampai 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp3.352.902.748.385,00 (*tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Banyu Bening Utama di Bank Mandiri.

Halaman 91 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp331.291.072.111,00 (*tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh dua ribu seratus sebelas rupiah*) ke PT Bayas Biofuel, PT Darmex Agro, PT Darmex Oil & Fats, Yayasan Darmex menggunakan rekening bank milik PT Seberida Subur di Bank Mandiri.
4. Pada tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp2.704.885.792.251,00 (*dua triliun tujuh ratus empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) ke rekening PT DARMEX AGRO, PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX BIOFUEL dan PT DARMEX OIL & FATS dan YAYASAN DARMEX menggunakan rekening Bank milik PT Kencana Amal Tani di Bank Mandiri.
5. Pada tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp1.498.081.527.239,00 (*satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*) ke PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX AGRO, PT DARMEX BIOFUELS dan PT DARMEX OIL & FATS menggunakan rekening Bank PT Panca Agro Lestari di Bank Mandiri.
6. Pada tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa SURYA DARMADI mentransfer uang sebesar Rp1.892.738.295.122,00 (*satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah*) ke PT DARMEX PLANTATIONS, PT DARMEX AGRO, PT DARMEX BIOFUELS dan PT DARMEX OIL & FATS menggunakan Rekening Bank PT Palma Satu di Bank Mandiri.
7. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan penyetoran modal ke PT Harapanjaya Bumipertiwi melalui PT Asset Pacific sebesar Rp440.000.000.000,00 (*empat ratus empat puluh miliar rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut kemudian dipergunakan PT Harapanjaya Bumipertiwi untuk membeli 3 bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 9.271 M² berdasarkan sertifikat HGB Nomor 1663/Kuningan Timur tanggal 7 Juni 2000 beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Kav 29-30 RT/RW 04/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan tahun 2012 atas nama PT Harapanjaya Bumi Pertiwi.
 - b. Sebidang tanah seluas 5.726 M² berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 1641/Kuningan Timur beralamat di beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto RT/RW 03/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2018 atas nama PT Harapanjaya Bumi Pertiwi.
 - c. Sebidang tanah seluas 2.846 M² berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 02276/Kuningan Timur beralamat di beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto RT/RW 03/03 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan dengan tahun perolehan 2019 atas nama PT Harapanjaya Bumi Pertiwi.
8. Pada tahun 2012 sampai tahun 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Harapanjaya Bumi Pertiwi, PT Asset Pacifik mentransfer Dana ke PT Delimuda Nusantara untuk Penyetoran Modal dan Pembelian Saham antara lain sebagai berikut:
- a. Terdakwa SURYA DARMADI sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 melalui PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari mengirimkan dana ke PT Delimuda Nusantara senilai Rp54.969.416.431,00 (lima puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b. Pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa Surya Darmadi melakukan penyetoran modal ke PT Delimuda Nusantara sebesar Rp39.999.000.000,00 sebagai pemegang saham PT Delimuda Nusantara sebesar 99,99 % dan Julia Riady sebesar 1.000.000,00 (0,001%)

Halaman 93 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tahun 2018 Terdakwa Surya Darmadi melalui PT Harapanjaya BumiPertiwi menyetorkan modal dalam bentuk Shareholder Loan (SL) kepada PT Delimuda Nusantara senilai Rp120.000.000.000,00

d. Pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa Surya Darmadi melalui PT Asset Pacific mengirimkan dana untuk pembelian saham PT Delimuda Nusantara sebesar Rp24.999.000.000,00

Selanjutnya melalui PT Delimuda Nusantara, Terdakwa SURYA DARMADI menguasai dan memiliki sejumlah asset diantaranya sebagai berikut:

1. Royal Palma – IV, Barge, PT. Delimuda Nusantara, Dumai, 2000 PPj No.1213/L, 1596, 1317
2. Royal Palma 21, Tug Boat, PT. Delimuda Nusantara, Batam, 2012 PPM No.2575/L, 153, 46
3. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.
4. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.
9. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Darmex Plantations melakukan penyertaan modal ke PT Monterado Mas selanjutnya PT Monterado Mas melalui PT Dabi Oleo mendirikan pabrik di Lubuk Gaung Riau dengan dana sebesar Rp1.493.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah), namun pada tahun 2020 Pabrik tersebut dijual Terdakwa kepada PT Sari Dumai Oleo.
10. Pada Tahun 2013 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembayaran Tanah dan Bangunan Perkantoran yang terletak di Jl. Salemba Raya No 5 dan 5A Rt 014 Rw 03 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat sesuai sertifikat HGB 224 dengan luas 2.180 M² melalui PT Asset Pacific.

11. Pada tahun 2013 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific melakukan penyetoran modal ke PT Tugu Tani (anak perusahaan) sebesar Rp331.100.744.347,00 selanjutnya melalui PT Tugu Tani melakukan pembayaran tanah dan bangunan perkantoran yang terletak Jl. Arif Rahman Hakim No.3 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat sesuai sertifikat HGB 773 luas 16.250 M².
12. Pada tahun 2013 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartement The Pakubuwono View, Jl. Tengku Nyak Arief yang beralamat di Jl. Kramat No.12 Rt 009 Rw 01 Lantai 12 No.LW 12B Blok Lacewood Kelurahan Kebayoran Lama dengan sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun Nomor: 40/XI/LACEWOOD seluas 180 M² atas nama Cheryl Darmadi.
13. Pada tahun 2015 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4291 luas 800 M² atas nama ADIL DARMADI.
14. Pada Tahun 2015 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4414 seluas 2209 M² atas nama ADIL DARMADI.
15. Pada tahun 2015 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Menara Perdana melakukan pembelian 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berupa Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali terletak di Jl Wana Segara No. 33 Ling. Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan rincian:
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 941 An. PT. Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 M² yang terletak Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Halaman 95 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Propinsi Bali, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Hotel Holiday Inn Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali;

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1147 dengan luas 2.000 M2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

16. Pada tahun 2016 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian bangunan perkantoran yang terletak di Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor II Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor: 6659 dengan luas 5.000 M² atas nama PT Menara Capital Indonusa.

17. Pada tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pasific menempatkan dana ke Perusahaan Terdakwa di Singapura dalam bentuk penyertaan saham sebesar SG\$4,800,000 (empat juta delapan ratus ribu dolar Singapura) melalui perjanjian antara PT Asset Pasific (Subscriber) dan Palma Pasific PTE LTD (Existing Shareholder) dan Rich Asian PTE LTD.

18. Pada tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific dan Palma Pacific Pte Ltd mentransfer Dana sebesar SGD63.000.000,00 (enam puluh tiga juta dolar Singapura) ke Rich Asian Pte Ltd yang merupakan perusahaan Terdakwa di Singapura.

19. Pada bulan Juni 2021 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific melakukan pembelian Properti di Australia menggunakan Asset Pacific Pty Ltd yang terletak di 235 Queen Street, Melbourne, Victoria, 3000 senilai AUD \$45.400.000 (empat puluh lima juta empat ratus ribu dolar Australia)

20. Pada bulan Mei 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific membeli asset berupa 22 unit apartement di Singapura yang terdiri atas apartement unit #02-05, #03-05, #04-05, #05-05, #06-05, #07-05, #09-05, #10-05, #11-05, #12-05, #13-05, #14-05, #15-05, #16-05, #17-05, #18-05, #19-05, #20-05, #21-05, #22-05, #23-05 and #24-05 yang terletak di

Halaman 96 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Draycott 8, 8 Draycott Park, Singapore 259404 senilai SGD \$166.772.550,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh dolar Singapura).

21. Pada bulan Juni 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Menara Capital Indonusa melakukan pembelian saham MCOL sebesar Rp175,031,185,000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*),.

22. Pada tahun 2020 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Danatama Mulia melakukan pembelian 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 828 atas nama PT Danatama Mulia seluas 152 M².
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 829 atas nama PT Danatama Mulia seluas 143 M²
- c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 849 Atas nama PT. Danatama Mulia seluas 155 m².

23. Pada tahun 2020 Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantation telah menempatkan dana dalam bentuk giro dan Deposito pada Bank Mandiri, Bank BRI, bank BNI, sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp544.066.922.778,00,00 (*lima ratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) pada Bank BNI di beberapa rekening atas nama Asset Pasific dan Darmex Plantation.
- b. Sebesar Rp3,020,879,952,618,00 (*tiga triliun dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah*) pada beberapa rekening Bank BRI atas nama PT Asset Pacific.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebesar Rp1.558.242.189.583,23 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen), USD11.400.813,57 (sebelas juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas dolar Amerika lima puluh tujuh sen) dan SGD646,04 (enam ratus empat puluh enam dolar Singapura nol empat sen) atas nama nasabah Aset Pacific dan Darmex Plantations yang tersimpan pada beberapa rekening Bank Mandiri.

24. Terdakwa SURYA DARMADI melalui PT Darmex Plantation melakukan setoran modal ke PT Alfa Ledo senilai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dengan komposisi pemegang saham Terdakwa SURYA DARMADI sebesar 99,99% dan Julia Riady sebesar 0,001%. Melalui anak perusahaan PT Alfa Ledo Terdakwa menguasai sejumlah asset berupa tanah dan bangunan, diantaranya:

- a) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 56 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 1.386,08 Ha yang terletak Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- b) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 116 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.106,54 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- c) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 115 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.930,21 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- d) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 58 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 3.405,84 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejangkung dan Sebunga, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;

- e) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 57 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 5.602 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- f) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 171 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 169,19 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- g) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 170 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 205,81 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;
- h) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 7.023,57 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;
- i) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 4.093,11 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo dan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;
- j) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 8.029,803 Ha. yang terletak Desa Mayak dan Kalon, Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;

Halaman 99 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 14.335,848 Ha. yang terletak Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;

25. Pada tahun 2022 Terdakwa SURYA DARMADI melakukan pembelian 1 (satu) unit Apartement South Hills Lantai 15 No. 15 R luas 124 M² Jl. Denpasar Raya Jakarta Selatan dengan sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 7916 atas nama ADIL DARMADI (anak Terdakwa).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menghukum Terdakwa SURYA DARMADI dengan pidana "seumur hidup" ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00;(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 100 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00; (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7.885.857,36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar tiga puluh enam sen dolar Amerika), dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00;(tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika Terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- I. Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa Surya Darmadi Yang Disita Dalam Berkas Perkara An. H. Raja Thamsir Rachman:

No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
A. BARANG BUKTI FOTOCOPY DOKUMEN :		
I.	1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit XXX Serangge Sengkilo pada UPT KPH Indragiri Provinsi Riau Periode 2020-2029; 2) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati No : 215 Tahun 2003 Tanggal 29 September 2003; 3) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. Kpts. 1204/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 105 An. Wang Yurizal, S.Hut; 4) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/II/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 490 An.	Disita dari WANG YURIZAL, S.Hut tanggal 10 Juni 2022

Halaman 101 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Wang Yurizal, S.Hut;</p> <p>5) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1248/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 137 An. Kasman Dahlan, S. Hut;</p> <p>6) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/I/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 492 An. Kasman Dahlan, S. Hut;</p> <p>7) 1 (satu) Bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.</p>	
II.	<p>1. 1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Kencana Amal Tani yang didalamnya berisi :</p> <p>1.1 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Nomor : 34 Tahun 1996 tanggal 07 Juni 1996;</p> <p>1.2 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Perpanjangan izin Lokasi Untuk Perkebunan Nomor : 08/VI/PIL/1998 tanggal 23 Juni 1998;</p> <p>1.3 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perkebunan perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Kencana Amal Tani, propinsi Riau tanggal Januari 1997;</p> <p>1.4 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah ada Izin Usaha tahun 2011 tanggal 09 Januari 2012;</p> <p>1.5 1 (satu) rangkap Fotokopi surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 810/I/PMDN/1988 Nomor Proyek : 1110/3552-09-05577;</p> <p>1.6 1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 477/III/PMDN/1996 perihal Persetujuan Perubahan Bidang usaha, Jenis/Kapasitas produksi dan rencana investasi (model II/D) PT. Kencana Amal Tani dalam rangka PMDN tanggal 23 Oct 1996;</p> <p>1.7 1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 43/III/PMDN/1999 perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal tanggal 24 Februari 1999;</p> <p>1.8 1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 185/III/PMDN/1999 perihal Persetujuan perubahan rencana Penanaman modal tanggal 27 Juli 1999;</p> <p>1.9 1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 311/III/PMDN/1999 perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal tanggal 29 Nov 1999;</p> <p>1.10 1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, II. RENCANA INVESTASI, III. RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN/PERMODALAN;</p> <p>1.11 1 (Satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 438/BPT 04.01/IV/2012 tanggal 03 April 2012;</p> <p>1.12 1 (satu) lembar fotokopi surat pemerintah kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP 040114604914 berlaku s/d 16 Februari 2015 tanggal surat 03 April 2012;</p> <p>1.13 1 (satu) lembar fotokopi surat Daftar : Data Perizinan yang telah disampaikan, Nama</p>	<p>Disita dari ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M. Si tanggal 09 Juni 2022</p>

Halaman 102 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	Perusahaan : PT Kencana Amal Tani;	
1.14	1 (satu) rangkap fotokopi surat PT Kencana Amal Tani no : 693/Leg/Eks/KAT/IV/2016 tanggal 26 April 2016 perihal Penyapaian izin-izin;	
1.15	1 (satu) rangkap fotokopi surat Menteri Pertanian RI nomor : HK.350/E4.267/11.87 tanggal 25 november 1987 perihal izin/persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Coklat dan kelapa Hibrida seluas 2.500 Ha (intercropping) serta karet seluas 5.000 Ha di Kab. Indragiri Hulu Prop. Riau;	
1.16	1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 83 Tahun 2008 Tentang KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEBERIDA DAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU OLEH PT KENCANA AMAL TANI;	
1.17	1 (satu) lembar fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bupati Indragiri Hulu nomor : 114/BPMD & PPT/BP-IMB/V/2013 Tanggal 29 mei 2013;	
1.18	1 (satu) lembar fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bupati Indragiri Hulu nomor : 115/BPMD & PPT/BP-IMB/V/2013 Tanggal 29 mei 2013;	
1.19	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Tentang Izin Gangguan nomor : 1189/03.01/BPTPM/IV/2016 Tanggal 08 April 2016;	
1.20	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP : 040114604914 berlaku s/d tgl 16 Februari 2020 tanggal 08 April 2016 nama perusahaan PT. Kencana Amal Tani;	
1.21	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 31/B.04.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 08 April 2016 Nama Perusahaan : PT Kencana Amal Tani;	
1.22	1 (satu) rangkap Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 52/T/Industri/Pertanian/2008 Tentang Izin Usaha Tetap PT Kencana Amal Tani tanggal 25 Januari 2008;	
1.23	1 (satu) rangkap fotokopi surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu nomor : 11/BPMD & PPT/BP/SIPPA-P/V/2014 tentang izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) permukaan tanggal 23 Mei 2014;	
1.24	1 (Satu) rangkap foto kopi Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu nomor : 10/BPMD&PPT/BP-LB3/IX/2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun an. PT Kencana Amal Tani tanggal 17 September 2014;	
1.25	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Lingkungan Hidup Rengat nomor : 660/BLH-Inhu/VII/2014/191 tanggal 24 Juli 2014 Perihal Pengantar rekomendasi izin tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;	
1.26	1 (satu) rangkap fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Lingkungan Hidup Rengat nomor : 660/BLH-Inhu/VII/2014/190 tanggal 24 Juli 2014 Perihal	



	Rekomendasi izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 An. PT. Kencana Amal Tani;	
2.	1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Kencana Amal Tani yang didalamnya berisi :	
2.1	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Rengat nomor : 03/BPMD-PPT/BP/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Teguran terhadap kewajiban retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
2.2	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Rengat nomor : 259/BPMD-PPT/UM/XI/2012 tanggal 01 November 2012 Perihal Pengantar Retribusi izin Mendirikan Bangunan terhutang;	
2.3	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu nomor : 090/Palma 1/PKU/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan HPK;	
2.4	1 (satu) rangkap fotokopi surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan nomor : 5.205/KUH-5/2011 tanggal 09 Maret 2011 Perihal Hasil Telaahan Status Areal;	
2.5	1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 791/9-14/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Perihal Mohon supaya tidak mengesahkan hak guna usaha yang dimohon PT Palma Satu untuk keperluan Pembangunan Kebun kelapa sawit di desa Penyaguan;	
2.6	1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu nomor : 32/Adm.Pum/100/2010 tanggal 21 Februari 2010 perihal keberadaan PT Palma Satu di Kabupaten Indragiri Hulu;	
2.7	1 (satu) rangkap fotokopi surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan nomor : S.121/BPP/2012 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Kelengkapan persyaratan permohonan Pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;	
2.8	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu Nomor : 04/PS-PKU/II/10 hal : permohonan Perpanjangan izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 05 Januari 2010;	
2.9	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu no : 364/UM-PKU/XII/09 tanggal 11 Desember 2009 hal Permohonan untuk menghadap;	
2.101	(satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah	



	<p>Rengat nomor : 179/ADM.PUM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT Palma Satu seluas 3.000 Ha;</p> <p>2.111 (satu) rangkap fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat, Laporan Hasil Pengecekan dan Peninjauan Lapangan Terkait Lahan/Desa Masyarakat Penyaguan seluas ± 3000 Ha yang mohon di Inclave dalam Lahan PT Palma Satu;</p> <p>2.121 (satu) lembar fotokopi surat Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat perihal Lahan desa atau masyarakat Penyaguan seluas ± 3.000 Ha yang mohon di inclave dalam lahan PT Palma Satu tanggal 2 Juni 2010;</p> <p>2.131 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor : 228/Adm.Pum/100/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal status izin lokasi PT. Palma Satu;</p> <p>2.141 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor : 23/TP/100/2008 tanggal Agustus 2008 perihal Panggilan Menghadap;</p> <p>2.151 (satu) rangkap fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pendapatan Daerah Rengat Nomor : 977/DIPENDA/2012/131 tanggal 11 April 2012 perihal Tindak Lanjut Pansus Duta Palma Group;</p> <p>2.161 (satu) rangkap fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional RI nomor : 4169/252-600/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 perihal Laporan Dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan PT Palma Satu di Batas Kabupaten Indragiri Hulu-Indragiri Hilir, Provinsi Riau;</p> <p>2.171 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia nomor : S. 278/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 04 Maret 2013 perihal Tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan An PT Palma Satu;</p> <p>2.181 (satu) rangkap fotokopi surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau nomor : 522.1/Planhut/800 tanggal 28 Maret 2014 perihal Revisi Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi untuk perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Palma Satu;</p> <p>2.191 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 200 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 Tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan Kebun kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 30 Juli 2010;</p>	
--	---	--



2.201	(satu) lembar fotokopi Surat bupati Indragiri Hulu nomor 31/ADM.PUM/100/II/2013 Tanggal 25 Januari 2013 perihal Penjelasan Permasalahan PT Palma Satu;
2.211	(satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu nomor : 870/Disbun-S/VI/2015/597 tanggal 7 Mei 2015 perihal Teguran Pertama;
2.221	(satu) lembar fotokopi surat Bupati Indragiri Hulu nomor 870/Disbun-S/VI/2015/761 tanggal 12 Juni 2015 perihal teguran Kedua;
2.231	(satu) rangkap fotokopi Lembar Dipsosisi Indeks 174 Tanggal Penyelesaian 30-11-2012 perihal Permintaan penyelesaian Lahan Permasalahan Lahan;
2.241	(satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Bagian umum Kepada Tapem, Lembar Pengantar tanggal 23-10-2013;
2.251	(satu) rangkap Fotokopi keputusan Bupati Indragiri Hulu no 180 tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 8 Juli 2010;
2.261	(satu) lembar fotokopi surat Bupati indragiri Hulu perihal penghentian aktivitas di lahan masyarakat desa Penyaguan Kecamatan batang gansal nomor : 118/ADM.PUM/100/V/2011 Tanggal 20 Juni 2011;
2.271	(satu) lembar fotokopi surat Bupati Indragiri Hulu Perihal Penghentian aktivitas penguasaan dan pengelolaan lahan desa Penyaguan nomor : 338/UIN/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
2.281	(satu) rangkap fotokopi surat PT Palma Satu perihal tanggapan surat bupati Indragiri Hulu nomor 118/ADM.PUM/100/VI/2011 nomor : 0168/UN/PS/PKU/VI/XI tanggal 30 Juni 2011;
2.291	(satu) rangkap fotokopi surat keputusan Bupati indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 08 Juli 2010;
2.301	(satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati Indragiri Hulu nomor 91 tahun 2007 Tentang izin Usaha Perkebunan An PT Palma Satu tanggal 26 Februari 2007;
2.311	(satu) lembar fotokopi daftar : Data perizinan yang telah disampaikan, Nama perusahaan : PT Palma Satu tanggal 2 Juni 2016;
2.321	(satu) rangkap fotokopi surat dinas pertanahan kabupaten Indragiri Hulu nomor 12.A./IL-DPT/II/2007 tanggal 18 Februari 2007 perihal Rekomendasi Izin Lokasi;
2.331	(satu) lembar fotokopi surat PT Palma satu nomor: legal-PS/X/1702/IV/2016 tanggal 28 April 2016



	<p>perihal daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Palma Satu;</p> <p>2.341 (satu) rangkap keputusan bupati Indragiri Hulu nomor 90 tahun 2007 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit an Palma Satu tanggal 26 februari 2007;</p> <p>2.351 (satu) lembar fotokopi surat penyampaian izin-izin PT Palma Satu nomor 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 20016;</p> <p>2.361 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan menengah nomor 214/M.04.01/BPTPM/III/2014 tanggal 7 maret 2014;</p> <p>2.371 (satu) lembar fotokopi Tanda daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) tanggal 07 Maret 2014 nomor TDP : 040114682497 berlaku s/d 7 maret 2019;</p> <p>2.381 (satu) lembar fotokopi surat Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru tentang izin gangguan nomor 0804/03.01/BPTPM/III/2014 tanggal 10 maret 2014;</p> <p>2.391 (satu) rangkap fotokopi surat dinas Pertanahan Pematang Reba nomor : 590/TGP-II/2007/02 tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi teknis izin lokasi PT Palma Satu;</p> <p>2.401 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan kegiatan perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit di kecamatan Seberida dan kecamatan Batang Gansal Kabupaten indragiri Hulu provinsi Riau oleh PT Palma Satu tanggal 14 April 2008;</p> <p>2.411 (satu) rangkap fotokopi surat Dinas Kehutan Provinsi Riau nomor : 522.1/lanhut/5657 tanggal 26 Desember 2012 perihal pertimbangan teknis permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Palma Satu;</p> <p>2.421 (satu) lembar fotokopi surat badan Pelayanan Perizinan Terpadu provinsi Riau nomor 503/BP2T-IR/II/2013/48 tanggal 4 Februari 2013 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kebun kelapa sawit PT Palma Satu;</p> <p>3. 1 (Satu) MAP warna hijau bertuliskan PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) yang berisi :</p> <p>3.1 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Panca Agro Lestari Nomor : 050/DISBUN-Pengem/709 tanggal 08 Agustus 2012;</p> <p>3.2 1 (satu) rangkap foto copy Surat Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten</p>	
--	---	--



	Indragiri Hulu kepada Sekertaris Derah Indragiri Hulu Perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Nomor : 870/DISBUN/VII/2011/639;	
3.3	1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Indragiri Hulu perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Nomor 70/Disbun-VI/2011/556 tanggal 21 Juni 2011;	
3.4	1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 tahun 2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 20 September 2005.	
3.5	1 (satu) rangkap foto copy surat bupati Indragiri Hulu Nomor: 89 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. SEBERIDA SUBUR tanggal 26 Februari 2007.	
3.6	1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 0125/PS/PKU/IV/10 tanggal 20 April 2010.	
3.7	1 (satu) lembar foto copy surat pemerintahan kabupaten Indragiri hulu perihal permohonan izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 0125/PS/PKU/IV/10 tanggal 22 April 2010.	
3.8	1 (satu) lembar foto copy surat bupati Indragiri Hulu perihal tindak lanjut permohonan izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 79/ADM.PUM/100/V/2010 tanggal 06 Mei 2010.	
3.9	1 (satu) lembar foto copy surat pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu perihal tindak lanjut permohonan izin lokasi PT.PANCA AGRO LESTARI dan PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 59/ADM.PUM/100/IV/2014 tanggal 23 April 2014.	
3.10	1 (satu) rangkap foto copy surat pemerintah kabupaten Indragiri Hulu Notulen rapat Koordinasi pembahasan revisi izin lokasi PT. BANYU BENING UTAMA, PT. AGRO LESTARI, PT. INTI INDO SAWIT SUBUR Tanggal 11 April 2014.	
3.111	(satu) lembar foto copy surat bupati Indragiri Hulu perihal revisi izin lokasi Nomor 06/Adm.Pum/100/I/2014 tanggal 02 Januari 2014.	
3.12	1 (satu) lembar foto copy surat PT. PANCA AGRO LESTARI kanor perwakilan Pekanbaru perihal revisi penggabungan izin lokasi Nomor : Legal PAL-PKU/X/039/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.	
3.131	(satu) lembar foto copy surat pernyataan kesepakatan atas nama PT. PANACA AGRO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LESTARI tanggal 04 Mei 2012.	
3.14	1 (satu) rangkap foto copy akte Notaris & PPAT MEILINA SIDARTA, S.H berita acara Perseroan Terbatas PT. PANCA AGRO LESTARI, berkedudukan di Pekanbaru-kota madya Pekanbaru Nomor: 37 Tanggal 26 Juni 2008.	
3.15	1 (satu) lembar foto copy surat bupati Indragiri Hulu izin mendirikan bangunan Nomor; 42/180/HK/tahun 2008 Tanggal 18 April 2008.	
3.161	(satu) lembar foto copy surat pemerintah kabupaten Indragiri hulu camat batang gansal perihal rekomendasi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 60/530.08/II/2008 tanggal 25 Februari 2008.	
3.171	(satu) lembar foto copy surat keputusan walikota Pekanbaru Nomor; 286/H/BPT/WK-2009 Tentang izin tempat usaha tanggal 29 Januari 2009.	
3.18	1 (satu) lembar foto copy surat pemerintah kota Pekanbaru dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar Nomor: 58/Dinas04.01/USDAG/II/2009 Tanggal 11 Februari 2009.	
3.191	(satu) lembar foto copy surat pemerintah kota Pekanbaru kecamatan bukit raya surat keterangan domisili usaha Nomor: 98/BR/SKDU/2008 Tanggal 04 Desember 2008.	
3.201	(satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. PANCA AGRO LESTARI.	
3.21	1 (satu) lembar foto copy surat departemen keuangan republik Indonesia surat keterangan terdaftar Nomor: PEM-PB 124/WPJ.02/KP.0403/2009 Tanggal 11 Maret 2009.	
3.22	1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-93929.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Panca Agro Lestari tanggal 05 Desember 2008;	
3.231	(satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Jalan Nomor 03/10/DR/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;	
3.241	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. PAL Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;	
3.25	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah	

Halaman 109 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. SSK Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;	
3.261	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. SKP/SS Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;	
3.271	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. ASIONG Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;	
3.281	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. SIR Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;	
3.291	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.PAL tanggal 22 Mei 2009;	
3.30	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.SSK tanggal 22 Mei 2009;	
3.311	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.SKP / SS tanggal 22 Mei 2009;	
3.321	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.ASIONG tanggal 22 Mei 2009;	
3.331	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.PAL tanggal 25 November 2009;	
3.341	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.SSK tanggal 25 November 2009;	
3.351	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu	



	Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.ASIONG tanggal 25 November 2009;	
3.361	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.SS tanggal 25 November 2009;	
3.371	(satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : /DR/10/XI/2009 tentang Musyawarah Desa tanggal 19 November 2009;	
3.381	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 PT.PAL tanggal 1 Juni 2009;	
3.391	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 PT.SSK tanggal 1 Juni 2009;	
3.401	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 Kepada Saudara ASIONG tanggal 1 Juni 2009;	
3.411	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 Pimpinan PT. tanggal 1 Juni 2009;	
3.421	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 Kepada Pimpinan PT.SIR tanggal 1 Juni 2009;	
3.431	(satu) lembar foto copy Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang perihal Permohonan Telaah Areal PT. Panca Agro Lestari Nomor : S.139/VII/BPKH XII-1/2011 tanggal 15 Agustus 2015;	
3.441	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi di Konversi (HPK) untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 503BP2T-IR/II/2013/50 tanggal 04 Februari 2013;	
3.451	(satu) lembar foto copy Denah Lokasi An. PT.	



	Panca Agro Lestari;	
3.461	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Penyampaian Izin-izin PT. Panca Agro Lestari Nomor : 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 2016;	
3.471	(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 23 Januari 2006;	
3.481	(satu) rangkap foto copy Surat PT. Panca Agro Lestari perihal Daftar Perizinan Yang Dimiliki Oleh PT. Panca Agro Lestari Nomor : Legal-PAL/X/701/IV/2016 tanggal 28 April 2016;	
3.491	(satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 522.1/Planhut/5211 Kepada Bapak Gubernur Riau tanggal 30 November 2012;	
3.501	(satu) rangkap foto copy Surat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama PT. Panca Agro Lestari Kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi tanggal 02 Januari 2013;	
3.511	(satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Pana Agro Lestari tanggal 04 Februari 2013;	
3.521	(satu) rangkap foto copy Surat Bupati Kuantan Singingi perihal Rekomendasi Tukar-menukar Atas Nama PT. Panca Agro Lestari Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522/UM/316 tanggal 11 Maret 2013;	
3.531	(satu) rangkap foto copy Surat Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasionbal Provinsi Riau perihal Permohonan Pelimpahan Pengukuran Kadastral Areal PT. Panca Agro Lestari di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 885/6.14/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;	
3.541	(satu) rangkap foto copy Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Nomor : 04BP-HGU/III/2014 tanggal 06 Maret 2016;	
3.55	1 (satu) ragkap foto copy Denah PT. Panca Agro Lestari Penggunaan Tanah Kini;	
3.561	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pekerjaan	



	Umum perihal Advice Planning Lokasi / Kawasan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 832/DPU-TRBT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;	
	3.571 (satu) lembar foto copy Denah Peta Pola Ruang RT/RW Kabupaten Indragiri Hulu;	
	3.581 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis Tukar-menukar Kawasan hutan atas nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 522.1/Planhut/566 tanggal 28 Februari 2014;	
	3.591 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan atas nama Pt. Panca Agro Lestari Nomor : 503/BP2T-IR/III/2014/220 tanggal 14 Maret 2014;	
	3.601 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 524 Tahun 2014.	
4.	1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Seberida Subur yang didalamnya berisi :	
4.1	1 (Satu) Lembar Fotocopy daftar perizinan yang dimiliki oleh PT. Seberida Subur No : legal-SS/X/700/IV/2016 Tanggal 28 April 2016	
4.2	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit An. PT. Seberida Subur No : 05/PS-PKU-1/10 Tanggal 05 Januari 2010	
4.3	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Kelayakan Lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit Kec. Seberi dan Dan Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau Oleh PT. Seberida Subur No : 5 Tahun 2008 Tanpa Tanggal, bulan tahun 2008	
4.4	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan pembukaan lahan RKT Tahun 2008/2009 No : 522.2/PR-III/2008/316 Tanggal 14 Maret 2008	
4.5	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan pembukaan lahan RKT Tahun 2007/2008 No : 522.2/PR-III/2007/227 Tanggal 12 Maret 2007	
4.6	1 (Satu) Rangkap Fotocopy pertimbangan teknis tukar menukar An . PT. Seberida Subur No : 522.12/DISHUB-PUK/757 Tanggal 22 April 2017	
4.7	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekomendasi tukar menukar An . PT. Seberida Subur No : 503/BP2T-IR/III/2014/219 Tanggal 14 Maret 2014	
4.8	1 (Satu) Rangkap Fotocopy pertimbangan teknis tukar menukar kawasan hutan An. PT. Seberida Subur di provinsi Riau No : 522.1/planhut/567 Tanggal 28 Februari 2014	
4.9	1 (Satu) Rangkap Fotocopy rekomendasi tukar menukar kawasan hutan An. PT. Seberida Subur No : 522/UM/594 Tanggal 16 Mei 2013	
4.101	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati	



	<p>Indragiri Hulu Tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit An. PT. Seberida Subur No : 183 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010</p>	
4.111	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Izin usaha perkebunan An. PT. Seberida Subur No : 92 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2010	
4.121	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Pemberian Izin lokasi untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit An. PT. Seberida Subur No : 89 Tahun 2007 Tanggal 06 Februari 2007	
4.131	(Satu) Rangkap Fotocopy rekomendasi teknis izin lokasi No : 590/TGT-II/2007/01 Tanggal 22 februari 2007	
4.141	(Satu) Lembar Fotocopy Surat pernyataan An. Edison Pinem Tanggal 1 Mei 2012	
4.151	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang izin usaha perkebunan An. PT. Seberida Subur No : 92 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007	
4.161	(Satu) Lembar Fotocopy penyampaian izin-izin No : 58/BPMD-PPT/IV/2016 Tanggal 19 April 2016	
4.171	(Satu) Lembar Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar (PB) No : 272/BPMD dan PPT/SIUP-PB/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011	
4.181	(Satu) Lembar Fotocopy tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Tanggal 11 Mei 2011	
4.191	(Satu) Lembar Fotocopy izin tempat usaha / izin gangguan (HO) Kab. Indragiri Hulu PT. Seberida Subur No: 250/BPMD DAN PPT/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011	
4.201	(Satu) Lembar Fotocopy izin reklame No :465 /BPMD dan PPT/V/2011 An. PT. Seberida Subur Tanggal 11 Mei 2011	
4.211	(Satu) Rangkap Fotocopy akta pendirian Perseroan terbatas No : 16	
4.221	(Satu) Lembar Fotocopy persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas No : W7-04854HT.01.04.TH2007 Tanggal 1 Mei 2007	
4.231	(Satu) Rangkap Fotocopy surat persetujuan peruban status perusahaan Non penanaman modal dalam negri / penanaman modal asing (Non PMDN/PMA) menjadi penanaman modal asing (PMA) No : 102/V/PMA/2006 Tanggal 14 Juni 2006	
5.	1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Banyu Bening Utama yang didalamnya berisi :	
5.1	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Konfirmasi status lahan An. PT. Banyu Bening Utama No: 522/sekr/VII/2014/19 Tanggal 17 Juli 2014	



5.2	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Telaahan Staf Kepala Dinas Kehutanan Kan. Indragiri Hulu kepada Bupati Indragiri Hulu Cq. Asisten Tata Pemerintahan No : 522/PU-XII/2010/1230 Tanggal 08 Desember 2010
5.3	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pertimbangan Teknis tersediaan lahan An. PT. Banyu Bening Utama No : 522.2/PU-XII/2010/1307 Tanggal 27 Desember 2010
5.4	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekomendasi kesesuaian dengan rencana marko pembangunan perkebunan provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Banyu Bening Utama No : 503/BP2T-IR/II/2013/51 Tanggal 4 Februari 2013
5.5	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pertimbangan Teknis permohonan rekomendasi kesesuaian dengan rencana marko pembanguna perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Banyu Bening Utama No : 522.1/planhut/5113 Tanggal 21 November 2012
5.6	1 (Satu) Rangkap Fotocopy pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian dengan rencana marko pembangunan perekebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit PT. Banyu Bening Utama No : 050/disbun-pengemb/708 Tanggal 08 agustus 2012
5.7	1 (Satu) Lembar Fotocopy permohonan izin lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) No :0192/BBU-PKU/VI/2010 Tanggal 20 Juni 20210
5.8	1 (Satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan No : 48/SKDP/KC/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010
5.9	1 (Satu) Rangkap fotocopy rekap keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang izin lokasi Tahun 2011 No : 90,93,155,158,178,208,219,284,305,333,349,364. Tahun 2012 No : 187,188,189,190,191,192,240,272,334,357,365,366,395. Tahun 2013 No Urut 1 s/d 9. Tahun 2014 No urut 1 s/d 2. Tahun 2015 No urut 1 s/d 4. Tahun 2016 No urut 1
5.101	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 158 Tahun 2011 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Pabrik kelapa sawit An . Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 26 April 2011
5.111	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 155 Tahun 2011 Tentang pemberian izin pembanguna kelapa sawit Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 8 April 2011
5.121	(Satu) Lembar fotocopy Rekap Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Izin lokasi Tahun 2010 No urut 1 s/d 13.
5.131	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 6/180/T.HK/2010 Tentang



	pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit an. Pt. Banyu bening utama Tanggal 5 juni 2010	
5.141	(Satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 83 Tahun 2004 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Kebun kalap sawit An . Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 23 April 2004	
5.151	(Satu) Lembar fotocopy Penghentian aktifitas pengolahan lahan di Desa Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku No :24/PEM/100/2007 Tanggal 15 Januari 2007	
5.161	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 71 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 215 Tahun 2003 Tentang izin usahaan perkebunan An. Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 16 April 2004	
5.171	(Satu) lembar fotocopy pertimbangan teknis pertanahan untuk izin lokasi Pt. Banyu Bening Utama No : 850/400/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010	
5.181	(Satu) lembar fotocopy pengesahan akta pendirian perseroan terbatas (PT) Menti Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-17825HT.01.01.TH2004 Tanggal 16 Juli 2004	
5.191	(Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No : 65 An. Pt. Banyu Bening Utama	
5.201	(Satu) Rangkap fotocopy Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) kegiatan pembanguna pabrik kelapa sawit PT. Banyu Bening Utama kapasitas 60 Ton TBS PERJAM	
5.211	(Satu) Bundel fotocopy pertimbang teknis ketersediaan lahan An. PT Banyu Bening Utama No :522.2/PU-XII/2010/1307 Tanggal 27 Desember 2010	
5.221	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 155 Tahun 2011 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Kebun kealapa sawit An. PT Banyu Bening Utama Tanggal 8 April 2011	
5.231	(Satu) Rangkap fotocopy penyampaian izin-izin No 694/Leg/Eks/BBU/IV/2016 Tanggal 26 April 2016	
5.241	(Satu) Rangkap fotocopy Rekomendasi teknis kesesuaian lahan PT Banyu Bening Utama No : 522.2/PR-III/2004/120 Tanggal 09 Maret 2004	
5.251	(Satu) Lembar fotocopy Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri No : 21/540-01/IUKS/IV/2014 Tanggal 08 April 2014	
5.261	(Satu) Rangkap fotocopy kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>oleh PT Banyu Bening Utama Nomor : 01 Tanggal 01 November 2021</p> <p>5.271 (Satu) Rangkap fotocopy izin usaha perkebunan (IUP) penanaman modal asing kepala badan koordinasi penanaman modal No : 856/1/IU/PMA/2014 Tanggal 14 Juni 2014</p> <p>5.281 (Satu) Rangkap fotocopy izin pengambilan dan pemanfaatan air (SIPPA) permukaan No : 12/BPMD&PPT/BP/SIPPA-P/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014</p> <p>5.291 (Satu) Rangkap fotocopy izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun An.PT Banyu Bening Utama No : 11/BPMD&PPT/BP-LB3/IX/2014 Tanggal 17 September 2014</p> <p>5.301 (Satu) Lembar Fotocopy pengantar rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 No : 660/BLH-inhu/VII/2014/193 Tanggal 24 Juli 2014</p> <p>5.311 (Satu) Lembar Fotocopy rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 An. PT Banyu Bening Ut No : 660/BLH-inhu/VII/2014/192 Tanggal 24 Juli 2014</p> <p>5.321(Satu) Lembar Fotocopy surat izin usaha perdagangan besar No : 16/B.04.01/BPTPM/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016</p> <p>5.331 (Satu) Lembar Fotocopy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) No: 01747 Tanggal 10 Maret 2016</p> <p>5.341(Satu) Lembar Fotocopy izin gangguan An. Sianto Wetan No :643/03.01/BPTPM/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016</p> <p>5.351 (Satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat tanah Hak guna usaha No : 01</p> <p>5.361 (Satu) Lembar Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) No :72/BPMD&PPT-BP-YMB/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011</p>	
III.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) buah flashdisk/USB warna merah hitam merk Sandisk 32 GB yang berisi data Laporan Harian Produksi TBS (Tandan Buah Segar) sawit.2. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Kebun Banyu-II bulan Desember 2017 PT. Banyu Bening Utama.3. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Kebun Banyu-II bulan Maret 2017 PT. Banyu Bening Utama Kebun Banyu-II.4. 1 (satu) bundel Laporan Produksi Harian PT. Banyu Bening Utama Kebun Banyu-II bulan Mei 2022.	Disita dari KUKU HERO LESMONO tanggal 09 Juni 2022
IV.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Rekapitulasi Statistik Produksi periode Januari 2013 s/d Desember 2013 PT. Seberida Subur2. 1 (satu) lembar Peta Survey Areal Perkebunan an. PT. Seberida Subur;3. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja Traksi (LHK) PT. Seberida Subur periode 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022;4. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja Traksi (LHK) PT. Seberida Subur periode 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;5. Fotocopy Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 522/Disbun-PPHP/294/2021 tanggal 09 Maret 2021 perihal Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi	Disita dari EVENDI Tanggal 09 Juni 2022

Halaman 117 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Pekebun Provinsi Riau.</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel File Pembukuan PT. Seberida Subur tahun 2020;1 (satu) bundel data Produksi PT. Seberida Subur tahun 20131 (satu) bundel data Produksi PT. Seberida Subur tahun 20121 (satu) bundel laporan Pembukuan Lahan PT. Seberida Subur tahun 2006 s/d tahun 20081 (satu) bundel File Tanaman PT. Seberida Subur tahun 20151 (satu) bundel File KS Dana Bantuan Untuk Desa PT. Seberida Subur1 (satu) bundel Laporan Stock Bibit PT. Seberida Subur mulai 13 Maret 2007 s/d 20 Juli 20091 (satu) buku Anggaran Belanja Kebun PT. Seberida Subur Tahun 20141 (satu) buku Anggaran Belanja Kebun PT. Seberida Subur Tahun 20121 (satu) buku Berita Acara Serah terima dari Asisten Kepala PT. Seberida Subur an.Hairul Bahri Hasibuan kepada Juandi Lubis tanggal 5 Desember 2014;1 (satu) bundel Surat Keluar PT. Seberida Subur tahun 2015Fotocopy Berita Acara Penerimaan Mesin Doorsmeer Nomor:003/BA/SS-EST/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.1 (satu) lembar data Rekapitulasi Kendaraan PT Seberida Subur periode Juni 2022;Daftar Karyawan PT. Seberida Subur1 (satu) Kardus yang berisi Surat Pengantar Pengangkutan Buah Sawit PT. Seberida Subur kepada PT. Kencana Amal Tani Periode Tahun 2021;1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi PT Seberida Subur periode tahun 2016 s/d tahun 2021;	
V.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120008300018 dengan nama Perusahaan PT. Seberida Subur tanggal 01 Maret 2019;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor: 89 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas nama PT. Seberida Subur	Disita dari EVENDI Tanggal 09 Juni 2022
VI.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) odner warna hitam data Produksi terdiri dari<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel lembar laporan harian produksi dan pupuk PT. Palma Satu dari tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 20191 (satu) bundel lembar laporan harian produksi dan pupuk PT. Palma Satu dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 20202 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Dalam Rangka Penelitian PBB hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016.2 (dua) lembar surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Inragiri Hulu Nomor: 660/DLH-P4LH/IV/2017/97 tanggal 4 April 2017 Perihal Kewajiban Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 56/ADM.PUM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal bantuan Personil Keamanan dalam rangka Pengecekan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gasal seluas 600 Ha (300 KK)1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 57/ADM.PUM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Izin Masuk Area.2 (dua) lembar surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Perihal Penyampaian Izin-izin.1 (satu) lembar surat Nomor: 006/Palma I-Humas/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 Perihal laporan akan masuknya masyarakat penyaguan melakukan panen di Divisi VI Kbn. Palma -I hari Sabtu, 01 Agustus 2015 serta strategis dan upaya yang akan	Disita dari Novendra Tanggal 09 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dilakukan guna menghadang masyarakat.</p> <p>8. 1 (satu) bundel laporan unit kebun PT. Duta Palma Nusantara Bayu Bening Utama bulan Desember 2015</p> <p>9. 1 (satu) bundel laporan produksi dari bulan Januari sampai Juli tahun 2019 PT. Palma Satu Perkebunan Palma A</p> <p>10. 1 (satu) bundel surat Nomor: 014/B/SM-Palma/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Pengajuan Lahan Plasma 1.000 Ha PT. Palma Satu.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Laporan Produksi harian dari bulan Januari sampai dengan Maret 2019 PT. Seberida Subur Perkebunan Siambul.</p> <p>12. 1 (satu) bundel laporan Manager Report bulan Maret 2020 Darmexagro Kebun Palma B.</p> <p>13. 1 (satu) bundel Anggaran Belanja Kebun tahun 2016 PT. Palma Satu Kebun Palma I dan Kebun Palma II Budget Revisi Departemen Agronomy.</p> <p>14. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Oktober 2015 Darmexagro Area IV</p> <p>15. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Januari 2016 Area IV</p> <p>16. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan April 2016 Area IV</p> <p>17. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Mei 2016 Area IV</p> <p>18. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Juni 2016 Area IV</p> <p>19. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Juli 2016 Area IV</p> <p>20. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan September 2016 Area IV</p> <p>21. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Januari 2017</p> <p>22. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2017</p> <p>23. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2017</p> <p>24. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Januari 2019</p> <p>25. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2019</p> <p>26. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Maret 2019</p> <p>27. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2019</p> <p>28. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Mei 2019</p> <p>29. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Januari 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</p> <p>30. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</p> <p>31. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Maret 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</p> <p>32. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</p> <p>33. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2020 PT. Palma satu Kebun Palma A</p> <p>34. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2020 PT. Palma satu Kebun Palma A</p> <p>35. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Juni 2020 PT. Palma satu Kebun Palma A</p> <p>36. 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat PS.A (palma satu A)</p>	
VII.	<p>1. 1 (Satu) lembar historis Produksi Per Bulan Periode 5 tahun (2017-2021)</p> <p>2. 2 (dua) lembar Areal Statement;</p> <p>3. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Januari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>4. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Januari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Februari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>6. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari</p>	Disita dari Dewi Kurniawan Tanggal 09 Juni 2022

Halaman 119 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>7. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Maret 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>9. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan April 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>10. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>11. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Mei 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</p>	
VIII.	<p>1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>5. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>10. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>11. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>12. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>13. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>14. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>15. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited</p>	<p>Disita dari Putri Ayu</p> <p>Tanggal 05 Juli 2022</p>



	<p>PT. Seberida Subur 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>17. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>19. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</p> <p>21. 1 (satu) bundel copy Job Description Head Accounting;</p> <p>22. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. 007/HRD/SK-DF-HO/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pengangkatan Putri Ayu sebagai Head Accounting Riau;</p> <p>23. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Palma Satu;</p> <p>24. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>25. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>26. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Seberida Subur;</p> <p>27. 1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Panca Agro Lestari;</p> <p>28. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Putri Ayu;</p> <p>29. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-10.170.HT.01.04.th.92 tanggal 14 Desember 1992 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>30. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8956.HT.01.04.TH'96 tanggal 16 September 1996 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>31. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-91358.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 28 Nopember 2008 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>32. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.01.10-18650 tanggal 24 Mei 2012 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>33. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.01.10-45603 tanggal 31 Oktober 2013 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>34. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938998 tanggal 10 Juni 2012 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>35. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0004160 tanggal 18 Januari 2016 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>36. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0022511</p>	
--	--	--



	<p>tanggal 18 Januari 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0148787 tanggal 21 Juni 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>38. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0071405.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 18 September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>39. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0389942 tanggal 23 September 2020 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;</p> <p>40. 1 (satu) bundel fotocopy Perseroan Terbatas, Perseroan2 Firma atau Komanditer dan Perkumpulan2 Koperasi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.2745.HT.01.01-Th'89 Persetujuan atas akta pendirian PT. Cerenti Subur;</p> <p>41. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0022506 tanggal 18 Januari 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Cerenti Subur;</p> <p>42. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0148783 tanggal 21 Juni 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Cerenti Subur;</p> <p>43. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0070805.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 17 September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Cerenti Subur;</p> <p>44. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0389394 tanggal 22 September 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Cerenti Subur;</p> <p>45. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0054128.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 17 September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Cerenti Subur;</p> <p>46. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Palma Satu tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>47. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Kencana Amal Tani tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>48. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Banyu Bening Utama tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>49. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Seberida Subur tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>50. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Panca agro Lestari tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p>	
IX.	<p>1. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Seberida Subur, Juli 2007;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Amal tani tahun 2007;</p> <p>3. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Realisasi Pembangunan Kebun oleh PT. Sri Anugerah yang berubah nama menjadi PT. Siberida Subur tahun 2007;</p> <p>4. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha di Desa Penyaguan dan Desa Danau</p>	Disita dari Yudhi Eka Saputra tanggal 15 Juli 2022



	<p>Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT. Panca Agro Lestari, Rengat 2013;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Kencana Amal Tani, Pekanbaru 2007;</p> <p>6. 1 (satu) bundel Draf Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal) kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Kencana Amal Tani, Rengat 2006;</p> <p>7. 1 (satu) bundel Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Kencana Amal Tani, Pekanbaru 2007;</p> <p>8. 1 (satu) bundel Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) kegiatan penambahan luas areal perkebunan kelapa sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha PT. Panca Agro Lestari, Rengat 2013;</p> <p>9. 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kehutanan Kab. Indragiri Hulu Nomor :522/sekr -XII/2011/1490 tanggal 06 Desember 2011 Perihal Data dan Peta Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Kapolres Indragiri Hulu;</p> <p>10. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;</p> <p>11. 1 (satu) bundel Surat atas nama masyarakat 3 (tiga) Desa, (Kuala Cenaku, Pulau Jum'at dan Tanjung Sari) tanggal 11 Juli 2008 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu tentang Pengunduran Diri dari Kerjasama Kemitraan PT. Agro Lestari;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 121/TP/100/2008 tanggal 26 September 2008 yang ditujukan kepada Kadishutbun Kab. Indragiri Hulu Perihal Permasalahan PT. Agro Lestari dengan Masyarakat 3 Desa di Kecamatan Kuala Cenaku;</p> <p>13. 1 (satu) bundel Surat dari Klinik Hukum Pertanahan Pemberdayaan dan Perjuangan Hak-Hak atas tanah Kuasa Hukum Warga Desa Penyaguhan Nomor : 10.KHP/DP-PS/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Mohon Kesediaan Mengembalikan Hak Penguasaan Lahan Seluas 3.000 Ha yang ditujukan kepada PT. Duta palma Nusantara Group dan PT Palma 1;</p> <p>14. 1(satu) bundel laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kebakaran Lahan di Areal PT. Banyu Bening Utama dan PT. Bertuah Aneka Yasa Kab. Indragiri Hulu, bulan Januari 2007.</p>	
X.	<p>1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Amal Tani Tahun 1996 beserta lampirannya;</p> <p>2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara Tahun 1996 beserta lampirannya;</p> <p>3. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Amal Tani Tahun 2002 beserta lampirannya;</p> <p>4. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara Tahun 2005 beserta lampirannya;</p> <p>5. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Banyu Bening Utama Tahun 2007 beserta lampirannya;</p>	<p>Disita dari RIJAL ARIQ</p> <p>Tanggal 15 Juli 2022</p>
XI.	<p>1. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Januari 2021 File Kebun;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan</p>	<p>Disita dari Jumarihot Ompusunggu Tanggal 14</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Februari 2021 File Kebun;	Juli 2022
3. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Maret 2021 File Kebun;	
4. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan April 2021 File Kebun;	
5. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Mei 2021 File Kebun;	
6. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2021 File Kebun;	
7. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juli 2021 File Kebun;	
8. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Agustus 2021 File Kebun;	
9. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan September 2021 File Kebun;	
10. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Oktober 2021 File Kebun;	
11. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan November 2021 File Kebun;	
12. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Desember 2021 File Kebun;	
13. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Februari 2022 File Kebun;	
14. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Maret 2022 File Kebun;	
15. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan April 2022 File Kebun;	
16. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Mei 2022 File Kebun;	
17. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2022 File Kebun;	
18. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Januari 2021 File Kebun;	
19. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Februari 2021 File Kebun;	
20. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Maret 2021 File Kebun;	
21. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan April 2021 File Kebun;	
22. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Mei 2021 File Kebun;	
23. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2021 File Kebun;	
24. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT.	

Halaman 124 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juli 2021 File Kebun;	
25.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Agustus 2021 File Kebun;	
26.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan September 2021 File Kebun;	
27.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Oktober 2021 File Kebun;	
28.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan November 2021 File Kebun;	
29.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Desember 2021 File Kebun;	
30.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2022 File Kebun;	
31.	1 (satu) bundel file Permintaan Dana THR Kebun Siambul Tahap I tahun 2022 PT. Seberida Subur – PT. Duta Palma Nusantara – Group;	
32.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Januari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
33.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Februari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
34.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Maret 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
35.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan April 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
36.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Mei 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
37.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Rapel Gaji Bulan Januari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
38.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Januari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
39.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Februari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
40.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Maret 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
41.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan April 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
42.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Mei 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;	
43.	1 (satu) bundel Laporan Harian Produksi periode tanggal 1 Mei 2022 s.d 13 Jul 2022;	
44.	1 (satu) bundel Rekap Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2021 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;	
45.	1 (satu) bundel Ulasan Pencapaian Produksi PT. Seberida Subur Kebun Siambul periode Februari 2022 s.d Juli 2022;	
46.	1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Satu periode 01 April	



	<p>2022 s.d 31 April 2022;</p> <p>47. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Satu periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Satu periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022;</p> <p>49. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 April 2022 s.d 31 April 2022;</p> <p>50. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;</p> <p>51. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022;</p> <p>52. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022;</p> <p>53. 1 (satu) bundel Perjanjian Antara PT. Seberida Subur dengan PT. Hari Bangun Persada mengenai Pekerjaan Pembangunan Jembatan Permanen Nomor : 02/PT.SS/IV/2022 tanggal 25 April 2022;</p> <p>54. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT. Kencana Amal Tani dengan PT. Seberida Subur dengan Nomor : 01/PT.KAT-SS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;</p> <p>55. 1 (satu) bundel Perjanjian Antara PT. Seberida Subur dengan PT. Graha Mandiri Alam Persada mengenai Pekerjaan Tunas Pokok Kelapa Sawit Nomor : 03/PT.SS/IV/2022 tanggal 25 April 2022;</p> <p>56. 1 (satu) lembar realisasi perbaikan jalan longsor tahun 2022 Divisi Satu Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>57. 1 (satu) bundel Peta Denah Perumahan Karyawan PT. Seberida Subur (Ex Divisi I) Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>58. 1 (satu) bundel Peta Denah Perumahan Karyawan PT. Seberida Subur (Ex Divisi I) Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>59. 1 (satu) bundel Sensus Produksi Semester II Tahun 2022 Blok E32 Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>60. 1 (satu) bundel Sensus Produksi Semester II Tahun 2022 Blok D34 Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p>	
XII.	<p>1. 1 (satu) bundel Laporan Rekap Kebun, Statistik Produksi bulan Oktober, November 2022 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>2. 1 (satu) lembar history produksi 5 tahun periode 2016 s.d 2021 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>3. 1 (satu) bundel rencana kerja tahun 2022 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>4. 1 (satu) bundel Statistik Produksi Mei 2022, Februari 2022, Januari 2022, Desember 2021 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>5. 1 (satu) bundel laporan hasil kunjungan kebun seberida subur Nomor : SS-001/RHPC/III/2014 tanggal 20 Maret 2014;</p> <p>6. 1 (satu) bundel laporan kunjungan ke Lokasi PT. Seberida Subur dan PT. Karya Semesta Persada Kebun Siambul dan Penyaguan Kunjungan tanggal 07 s.d 09 Januari 2010;</p> <p>7. 1 (satu) lembar surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.05/WASDAL-VIII/2010 tanggal Oktober 2010 untuk Monitoring penggunaan kawasan hutan pada areal konsesi oleh PT. Palma Satu di kec. Batang Gangsal, PT. Seberida Subur di Kec. Batang Gangsal;</p>	<p>Disita dari Jumarihot Ompusunggu tanggal 14 Juli 2022</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. 1 (satu) Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.05/Dishut-X/2011/1299 tanggal 25 Oktober 2011	
XIII.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar konsep Surat Perihal Rekomendasi Teknis Revisi Ketersediaan Ketersediaan Lahan Permohonan IUP An. PT. BANYU BENING UTAMA.1 (satu) bundel konsep Surat Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan Permohonan IUP An. PT. PALMA SATU.1 (satu) bundel lembar disposisi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi Surat Tim 7 Perjuangan Masyarakat Desa Penyaguan kepada Bupati Indragiri Hulu tanggal 15 Maret 2010 perihal Pemberitahuan, masyarakat akan melakukan =pembangunan pondok-pondok dan penutupan/pemutusan akses jalan masuk uang menuju lokasi areal lahan milik masyarakat seluas ± 3.000 hektar dengan menggunakan alat berat excavator.1 (satu) bundel lembar disposisi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi Surat Bupati Indragiri Hulu Tanggal 23 Februari 2010 Nomor: 036/ASDA/II/2010 Perihal Aksesibilitas Jalan.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Tiga tahun Dua Ribu Tujuh atas nama J. LINGGA.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Tiga tahun Dua Ribu Tujuh atas nama MUSRAL.1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha Di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu oleh PT. Panca Agro Lestari.	Disita dari Faisal Ilahi tanggal Disita Tanggal 22 Juli 2022
XIV	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.003-0317.0 letak objek Jl. Lintas Timur Gg. Family1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.003-0314.0 letak objek Desa Ringin, RT.05/RW.041 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.002-0268.0 letak objek Jl. Desa RT.02/RW01, PRSL 001981 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.001-0872.0 letak objek Jl. Simpang Korindo B 10 Ringin1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.010-0114.0 letak objek Dsn Aluran Jaya, Panyaguan1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.007-0087.0 letak objek Dsn Aluran Jaya, Panyaguan1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.003-0097.0 letak objek Dsn Tanjung Kubu, Panyaguan1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.003-0094.0 letak objek Dsn Tanjung Kubu, Panyaguan1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.003-0344.0 letak objek Sungai Cenaku , Kuala Cinaku1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.003-0368.0 letak objek Dsn Suka Mulya, Kuala Cinaku	Disita dari ARIEF FADILLAH Tanggal 22 Juli 2022

Halaman 127 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.005-0278.0 letak objek Dsn Suka Mulya, Kuala Cinaku12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.005-0264.0 letak objek Dsn Teluk Pinang Jaya, Kuala Cinaku13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.005-0052.0 letak objek Dsn Mekar Sari, Kuala Mulya14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.005-0064.0 letak objek Jl. Lingkar Kuala Mulya, Kuala Mulya15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.006-0034.0 letak objek Lahan Usaha 2, Kuala Mulya16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.002-0115.0 letak objek Jl. Pisang, Kuala Mulya17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.001-0356.0 letak objek Jl. Korindi Dusun III, Siambul18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.003-0211.0 letak objek Talang Tanjung, Siambul19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.006-0111.0 letak objek Dusun Tualang, Siambul20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.003-0210.0 letak objek Talang Tanjung, Siambul21. 1 (satu) lembar daftar nilai jual objek pajak diluar kawasan perkebunan;22. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Palma Satu;23. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Seberida Subur;24. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Kencana Amal Tani;25. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Panca Agro Lestari;26. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Banyu Bening Utama;27. 1 (satu) lembar rekapan data penerimaan PPJ Non PLN PT. Banyu Bening Utama periode 2013 s.d 2022;1 (satu) lembar	
XV.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Seberida Subur Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-0005721-379 (USD) BMOD-BMID2. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Panca Agro Lestari Mandiri Dollar A/C:124-0005842-738 BMDO-BMDI3. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Palma Satu A/C:124-000.557-1055 Bank Mandiri Cab. Menara Palma BMDO-BMDI4. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Banyu Bening Utama Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-000.5388.294 BMOD-BMID Per. Januari 2016 s.d.5. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani A/C:101.001.056.6089 (USD) Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta Per Februari 2020 EXFO-EXFI6. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Palma Satu Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-000.5570-610 (IDR) BMI-BMO Per. Agustus 2019	Disita dari Karenina Gunawan tanggal 07 Juli 2022

Halaman 128 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>7. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Banyu Bening Utama Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-000.538.8286 Per Januari 2022 BMO-BMI</p> <p>8. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Panca Agro Lestari Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta IDR A/C:124-000.620.8905 Per. Agustus 2019 s.d.-</p> <p>9. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani Bank Mandiri A/C:070.000.559.5603 (IDR) Per. Mei 2018 BMO-BMI</p> <p>10. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani Bank Mandiri A/C: 070.000.559.5603 (IDR) Per. Maret 2019 BMO-BMI</p> <p>11. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani Bank Mandiri A/C: 070.000.559.5603 (IDR) Per. 2021 BMO-BMI</p> <p>12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan ke Surya Darmadi terdiri dari:</p> <p>1) PT. DARMEX PLANTATION</p> <p>a) EBITDA</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2017</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2018</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2019</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2020</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2021</p> <p>b) Laba Fiskal</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2017</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2018</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2019</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2020</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2021</p> <p>2) PT. ALFA LEDO</p> <p>a) EBITDA</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2017</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2018</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2019</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2020</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2021</p> <p>b) Laba Fiskal</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2017</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2018</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2019</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2020</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2021</p> <p>3) PT. MONTERADO MAS</p> <p>a) EBITDA</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2017</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2018</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2019</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2020</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2021</p>	
--	--	--



	<p>13. 1 (satu) bundel Penilaian Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Duta Palma Nusantara dari KJPP Karmanto dan Rekan (Business License 2.09.0062)</p> <p>14. 1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 071/TRS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Pembagian Deviden PT. Kencana Amal Tani</p> <p>15. 1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 072/TRS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Pembagian Deviden PT. Panca Agro Lestari</p> <p>16. 1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 030/TRS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pembagian Deviden PT. Kencana Amal Tani</p> <p>17. 1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 031/TRS/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pembagian Deviden PT. Banyu Bening Utama</p> <p>18. 1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 032/TRS/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pembagian Deviden PT. Panca Agro Lestari</p> <p>19. 1 (satu) lembar fotokopi rekap deposito Per 31 Desember 2018</p> <p>20. 1 (satu) lembar fotokopi rekap deposito Per 31 Desember 2020</p> <p>21. 1 (satu) lembar fotokopi rekap deposito Per 31 Desember 2021</p> <p>22. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PT. SEBERIDA SUBUR dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020</p>	
XVI.	<p>1. 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. BANYU BENING UTAMA;</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. BANYU BENING UTAMA;</p> <p>3. 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. PALMA SATU;</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. PALMA SATU;</p> <p>5. 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. KENCANA AMAL TANI;</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. KENCANA AMAL TANI;</p> <p>7. 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. PANCA AGRO LESTARI;</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. PANCA AGRO LESTARI;</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. SEBERIDA SUBUR;</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. SEBERIDA SUBUR;</p> <p>11. 1 (satu) Bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT. PALMA SATU ke PT. BANYU BENING UTAMA,</p>	Disita dari Putri Ayu tanggal 26 Juli 2022



	<p>berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voucher Pengeluaran PT. PALMA SATU, Keterangan: BY TITIP OLAH SAWIT-KWT.166/KW-BBU/12/2019 tanggal 27 Maret 2020, dengan Jumlah Rp. 41.545.872,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);- Transfer Information, Transaction Status: Executed Succesfully, Transaction References Nomor: 202002171112747645, Amount: IDR 41.545.872,00, Immediate: 27-Mar-2020;- Kwitansi PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 166/KW-BBU/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima dari: PT. PALMA SATU, Jumlah Uang: Rp. 42.315.240,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);- Invoice PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 204/BBU-INV-L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan Kepada Yth. PT. PALMA SATU, Keterangan: Biaya Titip Olah: Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga Rp. 42.315.240,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);- Laporan Pengolahan TBS Dari PALMA SATU Bulan Desember 2019 PKS KUALA CENAKU (BBU) tanggal 31 Desember 2019;- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.006-19.55082035 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha Kena Pajak PT. BANYU BENING UTAMA, NPWP: 02.004.551.4-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak PT. PALMA SATU, NPWP: 02.458.443.5-218.000, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 38.468.400,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 3.846.840,00. <p>12. 1 (satu) Bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT. PANCA AGRO LESTARI ke PT. BANYU BENING UTAMA, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voucher Pengeluaran PT. PANCA AGRO LESTARI, Keterangan: BY TITIP OLAH SAWIT-KWT.167/KW-BBU/12/2019 tanggal 19 Maret 2020, dengan Jumlah Rp. 234.087.624,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);- Transfer Information, Transaction Status: Executed Succesfully, Transaction References Nomor: 202002171051736273, Amount: IDR 234.087.624,00, Immediate: 19-Mar-2020;- Kwitansi PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 167/KW-BBU/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima dari: PT. PANCA AGRO LESTARI, Jumlah Uang: Rp. 238.422.580,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);- Invoice PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 205/BBU-INV-L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan Kepada Yth. PT. PANCA AGRO LESTARI, Keterangan: Biaya Titip Olah: Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga Rp. 238.422.580,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);- Laporan Pengolahan TBS Dari PANCA AGRO LESTARI Bulan Desember 2019 PKS KUALA CENAKU (BBU) tanggal 31 Desember 2019;- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.006-19.55082036 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha Kena Pajak PT. BANYU BENING UTAMA, NPWP: 02.004.551.4-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak PT. PANCA AGRO LESTARI, NPWP: 02.491.330.3-216.000, Dasar Pengenaan Pajak	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rp. 216.747.800,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 21.674.780,00.</p> <p>13. 1 (satu) Bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT. SIBERIDA SUBUR ke PT. KENCANA AMAL TANI, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voucher Pengeluaran PT. SIBERIDA SUBUR, Keterangan: TITIP OLAH SAWIT-KWT.173/KW-KAT/12/2019 tanggal 08 April 2020, dengan Jumlah Rp. 34.897.608,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);- Kwitansi PT. KENCANA AMAL TANI Nomor 173/KW-KAT/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima dari: PT. SEBERIDA SUBUR, Jumlah Uang: Rp. 35.543.860,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);- Invoice PT. KENCANA AMAL TANI Nomor 173/KAT-INV-L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan Kepada Yth. PT. SEBERIDA SUBUR, Keterangan: Biaya Titip Olah: Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga Rp. 35.543.860,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);- Titip Olah Dari PT. SEBERIDA SUBUR Bulan Desember 2019 PT. KENCANA AMAL TANI tanggal 31 Desember 2019;- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.006-19.53787047 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha Kena Pajak PT. KENCANA AMAL TANI, NPWP: 01.062.203.3-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak PT. SEBERIDA SUBUR, NPWP: 01.852.739.0-213.000, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 32.312.600,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 3.231.260,00;- Transfer Information, Transaction Status: Executed Successfully, Transaction References Nomor: 202002171028718279, Amount: IDR 34.897.608,00, Immediate: 08-Apr-2020. <p>14. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan (Rugi) PT. SEBERIDA SUBUR, Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020, Sisa (Rugi) Rp. 6.133.672.594,-;</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. KENCANA AMAL TANI, Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba (Rugi) Rp. 19.608.994.825,-;</p> <p>16. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. PANCA AGRO LESTARI, Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba (Rugi) Rp. 19.496.207.495,-;</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. BANYU BENING UTAMA, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba (Rugi) Rp. 44.098.974.491,-;</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. PALMA SATU, Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020, Sisa (Rugi) Rp. 111.322.005.402,-.</p>	
XVII.	<p>1. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 91 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2006.tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Palma satu</p> <p>2. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun Kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu.</p> <p>3. 1 (satu) buah map kuning berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Peta Situasi lahan PT. BBU Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.	Disita dari Hj. Bonayus Pariza, S.Sos tanggal 10 Juni 2022

Halaman 132 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• 6 (enam) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor: 215 tahun 2003 tanggal 29 September 2003 tentang Izin Perkebunan PT. Banyu Bening Utama• 3 (tiga) lembar fotocopy Perjanjian antara masyarakat dengan PT. Banyu Bening Utama dibuat hari Jumat tanggal 18 Maret 2011.• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dua Desa antara Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulia terkait penyerahan lahan atau tanah dari PT. Banyu Bening Utama kepada dua desa tersebut sampai saat ini belum terealisasi dibuat tanggal 10 Februari 2021.• 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 155 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas Nama PT. Banyu Bening Utama.• 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 091/BBU/PKU/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan HPK dari PT. Banyu Bening Utama kepada Bupati Indragiri Hulu.• 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor: S.236/VII/Kuh-5/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal Hasil Telaahan Status Areal yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan. <p>4. 1 (satu) buah Map Hitam berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 92 Tahun 2007 tanggal 26 Ferbruari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Seberida Subur.• 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 89 Tahun 2007 tanggal 26 Ferbruari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Seberida Subur.• 3 (tiga) lembar fotocopy surat Nomor: 590/TGT-II/2007/01 tanggal 22 Februari 2007 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi dari Dinas Pertanahan kepada Bupati Indragiri Hulu.• 1 (satu) lembar fotocopy peta kebun siambul PT. Seberida Subur, tahun 2016.• 1 (satu) lembar asli peta bangunan PT. Seberida Subur, bulan September 2015• 2 (dua) lembar fotocopy Pendirian Serikat Pekerja Perkebunan Mandiri PT. Seberida Subur Nomor 70• 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pencatatan nomor: 01/Dinsosnakertrans.04/PHI-PSP/II/2015 tanggal 8 Januari 2015.atas nama PT. Seberida Subur• 4 (empat) lembar PT. Seberida Subur Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 08/P2K3/DINSOSNAKERTRANAS.04/IV/2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan PT. Seberida Subur Desa Siambul, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu.• 2(dua) lembar fotocopy Kebijakan Mutu, K3 dan	
--	--	--

Halaman 133 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Lingkungan tanggal 11 Juli 2008</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar fotocopy surat Penumpukan Tanaman Menghasilkan PT. Siberida Subur.• 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi statistic produksi per devisi PT. Siberida Subur (Des 13, Des 14, Sep 15)• 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi statistic produksi per devisi PT. Siberida Subur (Des 13, Des 14, okt 15)• 4 (empat) lembar rencana kerja tahunan tahun 2015 PT. Siberida Subur.• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor:04/SK/Perindagkop.UKM/IV/2007 tanggal 03 April 2007 tentang mendapatkan SIUP dan TDP PT. Siberida Subur.• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor: W7-04854 HT.01.04-TH.2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas nama PT. Siberida Subur.• 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 024/KPK/500/DP/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 atas nama PT. Siberida Subur.• 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Rapat hari senin tanggal 9 Januari 2006. <p>5. 2 (dua) lembar fotocopy surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 233/TP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 perihal Pendataan Kebun Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan .</p> <p>6. 3 (tiga) lembar fotocopy data perusahaan di Kab. Indragiri Hulu yang terindikasi dalam Kawasan Hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan.</p> <p>7. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan hasil kunjungan Pansus tanggal 15 Maret 2022.</p> <p>8. 4 (empat) lembar fotocopy surat nomor: 090/PPH/413 tanggal 10 Maret 2022 Perihal Kunjungan Kerja Pansus.</p> <p>9. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun Kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu.</p> <p>10. 1 (satu) bundel fotocopy terkait izin lokasi diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 90 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma Satu.• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2007• 10 (sepuluh) lembar surat Berita Acara Penetapan Batas Desa tanggal 17 Juni 2006 <p>11. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Analisa spasial Hasil Pengecekan lapangan dan pengukuran areal klem masyarakat desa penyaguan kec. Batang gasal kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>12. 4 (empat) lembar data Izin Perkebunan (IUP) di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>13. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Hasil Verifikasi, Klarifikasi Kelengkapan Data dan Konsinyasi Digitasi Peta Perizinan Perkebunan Untuk Pemenuhan Target Percepatan Implementasi</p>	
--	--	--



	<p>Kebijakan satu Peta di Provinsi Riau tanggal 10 November 2020.</p> <p>14. 3 (tiga) lembar asli Data Izin Usaha Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Indragiri Hulu.</p> <p>15. 5 (lima) lembar asli Rekapitulasi jumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Januari 2022.</p> <p>16. 1 (satu) lembar WORK MAP , seismic survey services for 2D seismic acquisition.</p> <p>17. 1 (satu) lembar disposisi nomor agenda :648 tanggal penerimaan 8 September 2016, tanggal penomoran 22 April 2016 dari direktorat Jenderal Potensi Pertahanan,ringkasan isi melaporkan tentang kejahatan PT. Palma Satu (Duta Palma Nusantara Group).</p> <p>18. 1 (satu) lembar surat nomor:08/YP&MPR-2015.I/Pusat/Tindakum/JK-IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Melaporkan tentang Kejahatan PT. Palma I (Duta Palma Nusantara Group) yang merampas lahan warga Desa Penyaguhan, Kec. Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, Sekaligus mohon bantuan hukum agar PT. Palma I Segera mengembalikan Ha katas Lahan Masyarakat Desa Penyaguhan, Kec. Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>19. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/KUD-GS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal surat pemberitahuan penguasaan lahan masyarakat desa penyaguan seluas 3000 Ha.</p> <p>20. 1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu tanggal 8 Oktober 2009 perihal penghentian aktifitas penguasaan dan pengelolaan lahan Desa Penyaguan.</p> <p>21. 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor:118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penghentian Aktifitas di lahan masyarakat Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal.</p> <p>22. 2 (dua) lembar surat Nomor: 0168/UM/PS-PKU/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 hal. Tanggapan surat Bupati Indragiri Hulu No:118/ADM.PUM/100/VI/2011.</p> <p>23. 4 (empat) lembar surat Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Areal Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 3 Februari 2015</p> <p>24. 1 (satu) lembar Peta Kebun PT. Panca Agro Lestari</p> <p>25. 4 (empat) lembar surat Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Areal Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 8 Mei 2015</p> <p>26. 2 (dua) lembar surat hasil rapat permasalahan tindak lanjut tuntutan masyarakat desa Penyaguan terhadap areal PT. Palma Satu (tuliskan tangan)</p> <p>27. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 061/ORG/XII/2005/225 tanggal 9 Desember 2005 perihal pembubuhan paraf;</p> <p>28. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 49 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 180/HK/10/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal Penyampaian Keputusan Bupati Inhu No. 345 Tahun 2002;</p> <p>30. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 345 Tahun 2002 tanggal 15 November 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; 31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 180/HK/138/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal Prosedur Pembuatan dan Penyampaian Keputusan dan Instruksi Bupati;	
XVIII.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Panca Agro Lestari.1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 525 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha di Desa Penyaguan dan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau Oleh PT. Panca Agro Lestari;1 (satu) Lembar Izin Lingkungan PT. Panca Agro Lestari tanggal 14 Juli 2014 yang di /1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Pelepasan Kawasan Hutan PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah PT. Panca Agro Lestari Nomor 04/PB-HGU/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau;1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan an. PT. Panca Agro Lestari tanggal 23 Januari 2006;1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan PT. Palma Satu tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Pelepasan Kawasan Hutan PT. Palma Satu tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);1 (satu) lembar Fotocopy NPWP PT DUTAPALMA NUSANTARA Nomor NPWP : 01.326.065.8-073.000 alamat Menara Palma LT.27, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.6 Kuningan Timur – Setiabudi Jakarta Selatan – DKI Jakarta Raya -12950.1 (satu) rangkap Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 06/RSL/HGU/1995 tanggal 13 Desember 1995.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor 182/Mentantut/VII/2000 tanggal 03 November 2000 atas nama PT. DUTAPALMA NUSANTARA.1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108832236 PT. Palma Satu tanggal 23 Agustus 2018 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);1 (satu) rangkap Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan pada hari Minggu Tanggal 3 Maret 2019 terhadap PT. Panca Agro Lestari yang	Disita dari ROBY DAHDAN MARGANTI tanggal 09 Juni 2022

Halaman 136 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	dikeluarkan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	
15.	1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Terbatas (PT) Palma Satu yang dikeluarkan Badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru tanggal 07 Maret 2014;	
16.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0938997 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PALMSA SATU tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum;	
17.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 214/M.04.01/BPTPM/III/2014 an PT. PALMA SATU tanggal 07 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;	
18.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 522.1/Plahut/5657 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Palma Satu tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau berikut dengan Lampiran Fotocopy Peta Lokasi PT Palma Satu;	
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Barang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau Oleh PT. Palma Satu tanggal 14 April 2008;	
20.	1 (satu) Lembar fotocopy NPWP PT. PALMA SATU Nomor : 02.458.443.5-218.000;	
21.	1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan AN. PT. PALMA SATU tanggal 26 Februari 2007;	
22.	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 0804/03.01/BPTPM/III/2014 tentang Izin Gangguan tanggal 10 Maret 2014;	
23.	1 (satu) rangkap Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Palma Satu Nomor 23 Tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI, SH;	
24.	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar PT. Kencana Amal Tani Nomor 31/B.04.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;	
25.	1 (satu) Lembar fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan an PT. Kencana Amal Tani Nomor TDP 040114604914 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;	
26.	1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten IndragiriHulu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Aplication) Kepada PT. Kencana Amal Tani tanggal 15 November 2018 berikut dengan Lampirannya;	
27.	1 (satu) lembar Fotocopy surat Izin Usaha berupa Izin	



	<p>Usaha Industri PT. Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan PT. Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>29. 1 (satu) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104712341 PT. Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>30. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau oleh PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar (PB), PT SEBERIDA SUBUR, Nomor : 10/DPMD dan PPT/SIUP – PB/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, pada tanggal 02 November 2016 di Rengat.</p> <p>32. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), PT SEBERIDA SUBUR Nomor TDP : 04061010058 berlaku s/d tanggal 02 November 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, pada tanggal 02 November 2016.</p> <p>33. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB), PT SEBERIDA SUBUR, yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2019.</p> <p>34. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 05 tahun 2008 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGELOLAAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEBERIDA DAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRIHULU PROVINSI RIAU OLEH PT. SEBERIDA SUBUR ditetapkan di Rengat pada tanggal 14 April 2008.</p> <p>35. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Nomor : 590/TGT-II/2007/01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 22 Februari 2007.</p> <p>36. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Pelepasan Kawasan Hutan, PT SEBERIDA SUBUR yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2019</p> <p>37. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu, Nomor : 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. SEBERIDA SUBUR pada tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>38. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu, Nomor : 92 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan AN.PT. SEBERIDA SUBUR. Yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2010 di Rengat.</p> <p>39. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu, Nomor : 183 tahun 2010 Tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. SEBERIDA SUBUR yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2010.</p> <p>40. 1 (satu) Fotocopy Lembar Fotocopy Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SEBERIDA SUBUR, Nomor AHU-AH.01.03-093885 yang diterbitkan di Jakarta pada</p>	
--	---	--



	<p>tanggal 09 Juni 2015 a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt Direktur Jendral Administrasi Hukum DR.AIDIR AMIN DAUD,S.H.,M.H NIP.19581120 198810 1 001.</p> <p>41. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-07906 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendiran Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 11 April 2003 A.N Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.</p> <p>42. 1 (satu) Rangkap Fotocopy SALINAN/GROSSE akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham "PT.SEBERIDA SUBUR" berkedudukan di Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 24.- Tanggal 5 Juni 2015, Notaris LINDA HERAWATI S.H.</p> <p>43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Operasional/Komersial PT BANYU BENING UTAMA yang Diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2020.</p> <p>44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Lingkungan PT BANYU BENING UTAMA yang diterbitkan oleh Bupati Kab.Indragiri Hulu pada tanggal 5 Maret 2010.</p> <p>45. 1 (satu) Rangkap Izin Usaha Perkebunan PT.BANYU BENING UTAMA diterbitkan Izin Usaha Proyek Pertama pada Tanggal : 8 Mei 2020, Perubahan ke-16 Tanggal : 20 Januari 2021</p> <p>46. 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP : 02.004.551.4.218.000 PT.BANYU BENING UTAMA</p> <p>47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 59-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.BANYU BENING UTAMA atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2007.</p> <p>48. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau, Nomor : 07/RSL/HGU/2006 pada hari rabu tanggal 13 September 2006.</p> <p>49. 1 (satu) Rangkap surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT.Banyu Bening Utama Nomor 522.2/PR-III/2004/120. Pada tanggal 9 Maret 2004.</p> <p>50. 1 (satu) Rangkap Fotocopy surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kehutanan Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.N PT.Palma Satu. Nomor 522.1/Planhut/5657 Pada tanggal 26 Desember 2012.</p> <p>51. 1 (satu) Rangkap Fotocopy surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk Kebun Kelapa Sawit A.N PT BANYU BENING UTAMA, Nomor : 503/BP2T-IR/II/2013/49</p> <p>52. 2 (dua) Lembar Pelepasan Kawasan Hutan PT.BANYU BENING UTAMA pada tanggal 21 Januari 2019.</p> <p>53. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas Nama PT.Banyu Bening Utama</p>	
--	--	--



	<p>pada tanggal 23 April 2004.</p> <p>54. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Atas nama PT.BANYU BENING UTAMA pada tanggal 26 April 2011.</p> <p>55. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT.BANYU BENING UTAMA Nomor: AHU-AH.01.03-0389946. Diterbitkan di Jakarta tanggal 23 September 2020 A.N Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar,S.H.,LLM. NIP 19690918 199403 1 001.</p> <p>56. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 71 Tahun 204 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.215 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perkebunan AN. PT.BANYU BENING UTAMA, ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 April 2004.</p> <p>57. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. BANYU BENING UTAMA, pada tanggal 8 April 2011.</p> <p>58. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BANYU BENING UTAMA Nomor : 65.- pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020.</p> <p>59. 1 (satu) buku catatan PT. DUTA PALMA NUSANTARA disampul warna coklat.</p> <p>60. 1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT.DUTA PALMA NUSANTARA Perkebunan dan Pabrik. Laporan Semester I 2020</p> <p>61. 1 (satu) dokumen UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 60 TON TBS/ JAM di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. PT BANYU BENING UTAMA. Rengat 2010.</p> <p>62. 1 (satu) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT PANCA AGRO LESTARI. Rengat 2014.</p> <p>63. 1 (satu) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT PANCA AGRO LESTARI. Rengat 2014.</p> <p>64. 1 (Satu) dokumen PT JOHAN SENTOSA tentang Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangkinang, 2015.</p> <p>65. 1 (satu) dokumen PT.PALMA SATU tentang Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit. Pekanbaru 2007.</p> <p>66. 1 (satu) dokumen PT. SEBERIDA SUBUR tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit. Pekanbaru 2007.</p> <p>67. 1 (satu) dokumen FINAL REPORT PT. BANYU BENING UTAMA, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 71 Tahun 2004, Tanggal 16 April 2004,</p>	
--	--	--



	Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.420 Ha. Pekanbaru Agustus 2004.	
68.	1 (satu) dokumen FINAL REPORT PT. BANYU BENING UTAMA, Analisis Dampak lingkungan (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 71 Tahun 2004, Tanggal 16 April 2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.420 Ha. Pekanbaru Agustus 2004.	
69.	1 (satu) Odner warna hitam dokumen Panca Argo Lestari (PAL);	
70.	1 (satu) Odner warna hitam dokumen Kencana Amal Tani (KAT);	
71.	1 (satu) Odner warna hitam dokumen DAN KAP Palma Satu;	
72.	1 (satu) Clear Horder File warna kuning Banyu Bening Utama (BBU);	
73.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 741/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 509/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama SUKARDI;	
74.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 738/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 506/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama MERLINDA;	
75.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 740/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 508/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama ARIASEH;	
76.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 829/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 557/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama MURNATI;	
77.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor : 773/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 527/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama HJ. MINAH;	
78.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor : 776/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 530/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama ACOK RASID;	
79.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor : 774/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 528/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama KAMARIAH;	
80.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 737/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 505/SKGR/593.31/ VII /2008 atas nama ARIANI;	
81.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 741/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 510/SKGR/593.31/ VII /2008 atas nama SULASTRI;	
82.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 739/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 507/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama DR. ARWAN;	
83.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 830/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 558/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama RAHMANTO;	
84.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 833/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 561/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama ROHIMAN;	
85.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 836/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 564/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama SUTRISNO;	
86.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 828/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 556/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama SUTRISNO;	
87.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 832/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 560/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama NURUL;	
88.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 831/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor :	



	<p>559/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama FITRI;</p> <p>89. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 834/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 562/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama YANI;</p> <p>90. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 837/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 565/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama ROMADON;</p> <p>91. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 835/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 563/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama EDI SUSANTO;</p> <p>92. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Izin – Izin PT. Banyu Bening Utama Nomor : 694/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal 26 April 2016 beserta lampiran;</p> <p>93. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Izin – Izin PT. Kencana Amal Tani Nomor : 693/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal 26 April 2016 beserta lampiran;</p> <p>94. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 50/Kpts-II/94 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Kuko – S. Toreh yang terletak di kabupaten daerah tingkat II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 7.830,31 Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan karet, coklat dan kelapa hibrida atas nama PT. Cerenti Subur;</p> <p>95. 1 (satu) rangkap surat Perseroan Terbatas, Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi No. 2354;</p> <p>96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17825 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;</p> <p>97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Indra Giri Hulu Nomor : 182 Tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Panca Agro Lestri.</p> <p>98. 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Riau Nomor : 08/RSL/HGU/2001 tanggal 14 November 2001;</p> <p>99. 1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor : AHU-AH.01.03-0389943 tanggal 23 September 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>100. 1 (satu) rangkap Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kencana Amal Tani Nomor 66 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH;</p> <p>101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 332/um/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 Perihal Penghentian Aktifitas Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Desa Penyaguan yang dibuat oleh Bupati Indragiri Hulu;</p> <p>102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penghentian Aktifitas di lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal yang dibuat oleh Bupati Indragiri Hulu;</p> <p>103. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Palma Satu tanggal 08 Juli 2010;</p> <p>104. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 (nomor Ketik) Perpanjang dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama</p>	
--	--	--



	<p>PT. Palma Satu tanggal 08 Juli 2010;</p> <p>105. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. Palma Satu tanggal 27 Februari 2007;</p> <p>106. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT. Palma satu, Desa Penyaguan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 4 Mei 2010;</p> <p>107. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pengecekan dan peninjauan lapangan Terkait Lahan Desa/Masyarakat Penyaguan Seluas ± 3000 ha yang Mohon di Inclave dalam Lahan PT. Palma Satu yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Mei 2010;</p> <p>108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Lahan Seluas ± 3000 Ha yang telah di Inclave serta dilakukan pemasangan patok batas lahan perkebunan masyarakat desa Penyaguan dengan PT. Palma Satu;</p> <p>109. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Nomor 179/ADM.PUM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemasangan Patok Tapal Batas lahan Perkebunan masyarakat Desa Penyaguan dengan PT. Palma Satu Seluas 3000 Ha yang dikeluarkan oleh SEKDA Kabupaten Indragiri Hulu;</p> <p>110. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 522.12/DISHUT-PUK/757 tanggal 22 April 2013 perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan An. PT. Seberida Subur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi;</p> <p>111. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Palma Satu;</p> <p>112. 1 (satu) rangkap Fotocopy Tanda Terima Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Palma Satu tanggal 2 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat;</p> <p>113. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Nomor 503/BP2T-IR/II/2013148 tanggal 04 Februari 2013 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat di Konversi Untuk Kebun Kelapa Sawit PT. Palma Satu yang dibuat oleh Badan Pelayanan Terpadu Propinsi Riau.</p> <p>114. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 171/Leg-Eks/PS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan dan Pembentukan Tim Terpadu;</p> <p>115. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar di Propinsi Riau.</p> <p>116. 1 (satu) outner warna merah berisikan dokumen PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>117. 1 (satu) Bundel Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Triwulan II tahun 2021 PT. Banyu Bening Utama Periode April Juni 2021;</p> <p>118. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Kencana Amal Tani Periode Juli – Desember 2021</p>	
--	--	--



	Semester II;	
119.	1 (satu) bundel Laporan Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Banyu Bening Utama Laporan Semester I 2021;	
120.	1 (satu) bundel Laporan Pemakaian Air Sungai Cenaku PT. Banyu Bening Utama Periode Triwulan III 2021;	
121.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisa Air Limbah PKS PT. Banyu Bening Utama Periode Triwulan III 2021;	
122.	1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV PT Kencana Amal Tani Tahun 2021 dalam Kegiatan Pemanfaatan Air limbah industry Minyak sawit pada tanah perkebunan Kelapa Sawit (Land Aplikasi)	
123.	1 (satu) bundel Dokumen Final Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit;	
124.	1 (satu) bundel Laporan identifikasi dan analisis keberadaan nilai Konsevasi tinggi (NKT) di areal PT Bayu Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau tahun 2004;	
125.	1 (satu) Bundel Laporan pelaksanaan izin lingkungan PT. Dutapalma Nusantara Perkebunan dan pabrik Laporan Semester I 2021;	
126.	1 (satu) bundel Laporan Departemen Operation Internal Audit No. 12/BBU-1 RIAU/02/22 Pemeriksaan tanggal 23 Februari S.d 02 Maret 2022;	
127.	1 (satu) bundel Laporan Departemen Operation Internal Audit No. 12/BBU-1 RIAU/02/22 Pemeriksaan tanggal 16 Februari S.d 22 Februari1 2022;	
128.	1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Banyu Bening Utama Tahun 2013;	
129.	1 (satu) map Besar Berisalkan Kontak person /Tlp Pimpinan Kebun, PKS dan Downstream Rigion Riau dan Jambi;	
130.	2 (dua) foto copy lembar bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT. Panca agro lestari Tahun 2013;	
131.	1 (satu) eksemplar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Eluan Mahkota Tahun 2013;	
132.	1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PBB tahun 2014 Original;	
133.	1 (satu) Lembar Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang disusun oleh Sdr. Palgunady dan ditanda tangani oleh Wasikun sekajy HR & GA Manager;	
134.	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Duta Palma Nusantara Tahun 2013	
135.	2 (dua) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Banyu Bening Utama Tahun 2013	
136.	2 (dua) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Kencana Amal Tani Tahun 2013	
137.	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Wanajingga Timur Tahun 2013	
138.	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Cerenti Subur Tahun 2013	
139.	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Eluan	



	<p>Mahkota Tahun 2013</p> <p>140. 1 (satu) eksemplar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Johan Sentosa Tahun 2013 beserta lampirannya;</p> <p>141. 2 (dua) lembar bukti foto copy setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Palma Satu Tahun 2013</p> <p>142. 2 (dua) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Seberida Subur Tahun 2013;</p> <p>143. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Surya Darmadi dan Adil Darmadi Tahun 2013;</p> <p>144. 1 (satu) lembar Fax surat Nomor: 660/BLH-AMDAL/XII/2013/440 Perihal Keterlambatan Penyerahan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang ditanda tangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Moch. Bayu Setiya Budiono, SH. MH tertanggal 10 Desember 20-13 ditujukan kepada Pimpinan PT Panca Agro Lestari;</p> <p>145. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-37995.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 09 Agustus 2009 Tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT Seberida Subur beserta lampirannya;</p> <p>146. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-04854 HT.01.04-TH.2007 Tanggal 01 Mei 2007 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas Atas nama PT Seberida Subur beserta Fotocopy Berita Acara Rapat Nomor 08 tanggal 9 Januari 2006</p> <p>147. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03282, Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2015 seluas 9635 m2.</p> <p>148. 1 (satu) lembar surat fax nomor:06/Adm.Pum/100/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Indragiri Hulu YOPI ARIANTO, SE ditujukan kepada pimpinan PT Panca Agro Lestari Perihal Revisi Izin Lokasi.</p> <p>149. 2 (dua) lembar fotocopy surat yang ditanda tangani ZULHER selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Propinsi Riau tertanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Riau untuk Perkebunan Kepala Sawit a.n PT PANCA AGRO LESTARI.</p> <p>150. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Evaluasi Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budidaya Pertanian / Perkebunan dan Non Kehutanan lainnya An. PT Kencana Amal Tani di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;</p> <p>151. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat nomor 660/BLH-AMDAL/I/2014/12 Tanggal 13 Januari 2014 Perihal Teguran yang ditanda tangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dan ditujukan kepada SKPD Terkait se-Kab. Inhu dan Pimpinan Perusahaan PT Seberida Subur beserta lampirannya;</p> <p>152. 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak Guna usaha No.</p>	
--	---	--



	<p>1 Tahun 2007 atas nama PT Banyu Bening Utama yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2010 seluas 6.417,90 ha terletak di Desa paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau;</p> <p>153. 1 (satu) eksemplar Rekapitan Permintaan Dana beserta lampirannya;</p> <p>154. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Panca Agro Lestari;</p> <p>155. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Palma Satu Desa Penyaguan Kecamatan Barang Gansal Kab. Indragiri Hulu-Rengat;</p> <p>156. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Johan Sentosa;</p> <p>157. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Banyu Bening Utama;</p> <p>158. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Eluan Mahkota (EMA);</p> <p>159. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Nomor: Legal-PAL/X/701/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Perihal Daftar Perizinan yang dimiliki oleh PT Panca Agro Lestari, yang ditujukan kepada Kepala badan penanaman modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu;</p> <p>160. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan HAM RI Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Agro Lestari Tanggal 19 Januari 2016 beserta lampirannya;</p> <p>161. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama ABD. RAHMAH dan NURZAJEFRIY tertanggal 30 April 2007</p> <p>162. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama R. MUSLIM dan MERY L. tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>163. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama AMAT dan AFWAN tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>164. Surat Keterangan tanah tanpa Register tanpa Tanggal Atas nama Evianti seluas 20.000 M2 yang ditandatangani Kepala Desa Penyaguan, beserta lampirannya;</p> <p>165. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama SIAR dan DIMAS tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>166. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama KILPI dan LATIF tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>167. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama ENNI dan SUWARDI B tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>168. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama EVI SUSANTI dan DWI M tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>169. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama ALI YUSUF dan MUSLIM A tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>170. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama GUSRIADI dan INDRA</p>	
--	---	--



	tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya; 171. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama SARIFAH dan GUSWIR tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya; 172. 1 (satu) lembar data nama pabrik dan kebun Duta Palma; 173. 1 (Satu) buku agenda warna biru	
XIX.	A. Dokumen Terkait Duta Palma Grup 1. Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 90 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu; 2. Fotocopy Surat Nomor: HK.350/E4.267/11.87 tanggal 25 Nopember 1987 perihal izin/persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Coklat dan Kelapa Hibrida seluas 2.500 Ha (intercropping) serta Karet seluas 5.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau; 3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 34 tahun 1996 tanggal 7 Juni 1996 tentang Pemberian izin lokasi untuk perkebunan; 4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:08/VI/PIL/1998 tentang Perpanjangan izin lokasi untuk perkebunan; 5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 83 tahun 2004 tanggal 23 April 2004 Tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama; 6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 276 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari; 7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 66 tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Panca Agro Lestari; 8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 92 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Seberida Subur; 9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 83 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau oleh PT. Kencana Amal Tani; 10. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 91 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin usaha perkebunan PT. Palma Satu; 11. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 04 tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit di kecamatan seberida dan kecamatan batang gangsal Kabupaten Indragiri hulu propinsi riau oleh PT. Palma satu; 12. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 83 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit di kecamatan seberida dan kecamatan batang gangsal Kabupaten Indragiri hulu propinsi Riau oleh PT. Kencana Amal Tani; 13. Fotocopy Surat Bupati Indra Giri Hulu Nomor:	Disita dari Tri Joni, SH. MM tanggal 10 Juni 2022



	<p>332/um/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal penghentian aktifitas penguasaan dan pengelolaan lahan Desa Penyaguan yang ditujukan kepada PT.Palma Satu;</p> <p>14. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu;</p> <p>15. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 7/180/T.HK/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>16. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 182 tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari;</p> <p>17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 183 tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Seberida Subur;</p> <p>18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma satu;</p> <p>19. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 155 tahun 2011 tanggal 08 April 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>20. Fotocopy Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal penghentian aktifitas di lahan masyarakat Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal yang ditujukan kepada PT. Palma Satu;</p> <p>21. Fotocopy Surat dari PT. Palma Satu tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu perihal tanggapan surat Bupati Indragiri Hulu;</p> <p>B. Dokumen terkait PT. Kencana Amal Tani, yaitu:</p> <p>1. Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT. Kencana Amal Tani.</p> <p>C. Dokumen terkait PT. Banyu Bening Utama, yaitu:</p> <p>1. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6/180/T.HK/2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Kelapa Sawit Atas Nama PT. Banyu Bening Utama, Rengat 05 – 06 - 2010</p> <p>2. Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2010, Rengat 26 April 2010</p> <p>3. Foto Copy Surat Masuk Dari PT. Banyu Bening Utama Nomor: 012/Leg-Eks/BBU/VIII/2013, Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Bening Utama, Tanggal 22 Agustus 2013</p> <p>4. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-B) PT. Banyu Bening Utama, Tanggal / /2014 "Tanda Tangan Di Coret Bupati";</p> <p>5. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Banyu Bening Utama, 8 April 2011</p> <p>6. Foto Copy Data Administrasi Perkebunan PT. Banyu Bening Utama, Lokasi Desa Kuala Mulia Ke. Kuala</p>	
--	--	--



	Cenaku Indragiri Hulu	
7.	Foto Copy Surat Masuk Dari Dinas Kehutanan Nomor: 522/Sekr/VII/2014/196, Tentang Konfirmasi Status Lahan Atas Nama PT. Banyu Bening Utama Pada Tanggal 17 Juli 2014	
8.	Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Nomor: 80/Adm.Pum/VI/2013 Tentang Surat Pengantar tanggal 3 Juni 2014	
9.	Foto Copy Surat Dari Pemprov Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/Bp2t-Ir/II/2013/49 Tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Hpk) Untuk Kebun Kelapa Sawit an. PT. Banyu Bening Utama tanggal 4 Februari 2013	
10.	Foto Copy Surat Pemprov. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/Bp2t-Ir/II/2013/51 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Banyu Bening Utama tanggal 4 Februari 2013	
11.	Foto Copy Surat Dari Pemprov. Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/Planhut/5113 Tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.N. PT. Banyu Bening Utama tanggal 21 November 2013	
12.	Foto Copy Daftar Nama KUD Koperasi Bermitra Dengan Perusahaan Dibidang Perkebunan	
13.	Foto Copy Surat Dari Pemprov. Dinas Perkebunan Nomor: 050/Disbun-Pengemb/708 Tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Prov. Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.N. PT. Banyu Bening Utama tanggal 8 Agustus 2012	
14.	Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah, perihal Undangan Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Kabupaten Indragiri Hilir Secara Pasti Di Lapangan Nomor : 181/Adm.Pum/V/2012 tanggal 03 Mei 2013	
15.	Foto Copy Surat Dari PT. Banyu Bening Utama Tentang Surat Pernyataan, tanggal 1 Mei 2012	
16.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. Banyu Bening Utama, Tanggal 16 April 2004	
17.	Foto Copy Surat Izin Usaha Nomor : 2232/Bpt/2010 A.N. Surya Darmadi, tanggal 2 Juli 2010	
18.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Banyu Bening Utama, tanggal 26 Agustus 2010	
19.	Foto Copy Surat Dari Badan Pelayanan Terpadu Tentang Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 301/Bpt 04.01/Viii/2010 tanggal 26 Agustus 2010	
20.	Foto Copy Bukti Transfer PT. Banyu Bening Utama Ke Dipenda Nominal Rp. 43.657.800 Tanggal 27 Februari 2012	
21.	Foto Copy Sertifikat Tanah Milik PT. Banyu Bening Utama Tanggal 10 Desember 2010	
22.	Foto Copy Sertifikat Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan Milik PT. Banyu Bening Utama tanggal 15 Juli 2011	
23.	Foto Copy Akta, Rengat 15 Juli 2011	
24.	Foto Copy Surat Pernyataan Dari Pt. Banyu Bening Utama, Pekanbaru 1 Mei 2012	



25.	Foto Copy Surat Pengantar 15 April 2011	
26.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 8 April 2011	
27.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangun Pabrik Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 26 April 2011	
28.	Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 72/Bpmd&Ppt/Bp-lmb/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011	
29.	Foto Copy Bukti Transfer Tanggal 26 April 2012	
30.	Foto Copy Sertifikat Izin Usaha A.N. Surya Darmadi Tanggal 2 Juli 2010	
31.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan	
32.	Foto Copy Bukti Izin Usaha Perdagangan Besar Tanggal 26 Agustus 2010	
33.	Foto Copy Akta Pengawas Ketenaga Kerjaan Tanggal 25 Mei 2011	
34.	Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Pt. Banyu Bening Utama Dengan Masyarakat Desa Kuala Cenaku Dan Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu Tanggal 3 Maret 2011	
35.	Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Pem-00531/Wpj.02/Kp.1003/2012 Pekanbaru 24 April 2012	
36.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 29 Maret 2012	
37.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 29 Maret 2012	
38.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 2 Maret 2012	
39.	Foto Copy Surat Dari Dispeda Tentang Penyampaian Ketetapan Tagihan Retribusi Daerah Tahun 2012 Pada Tanggal 29 Februari 2012	
40.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 28 Februari 2012	
41.	Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan A.N Surya Darmadi Tanggal 6 Mei 2011	
42.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangun Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama 26 April 2011	
43.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama 26 April 2011	
44.	Foto Copy Surat Perjanjian Pt. Banyu Bening Utama Pada Tanggal 18 Maret 2011	
45.	Foto Copy Surat Dari Pt. Banyu Bening Utama Nomor 0041/Bbu-Pku/I/2011 Tentang Skedul Pembangunan Kebun Plasma Bagi Masyarakat Desa Kuala Cenaku Dan Kuala Mulia Pekanbaru 26 Januari 2011	
46.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Nomor 522.2/Pu-Xii/2010/1307 Tentang Pertimbangan Teknis Ketersediaan Bahan A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 27 Desember 2010	
47.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Nomor : 522.2/Pu-Xii/2010/1307 Tentang Pertimbangan Teknis Ketersediaan Bahan A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 27 Desember 2010	
48.	Foto Copy Surat Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 850/400/Xii/2010 Tentang Pertimbangan Teknis Untuk Izin Lokasi Pt. Banyu	



	Bening Utama Rengat 23 Desember 2010	
49.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Telaah Staf Nomor 522/Pu-Xii/2010/1230 Tentang Status Area Kebun Dan Kebun Kelapa Sawit Pt. Banyu Bening Utama 8 Desember 2010	
50.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Telaah Staf Nomor 522/Pu-Xii/2010/1230 Tentang Status Area Kebun Dan Kebun Kelapa Sawit Pt. Banyu Bening Utama 8 Desember 2010	
51.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan A.N. Pt. Banyu Bening Utama Pekanbaru 26 Agustus 2010	
52.	Foto Copy Surat Izin Usaha A.N. Surya Darmadi Rengat 26 Agustus 2010	
53.	Foto Copy Banyu Bening Utama Nomor 0192/Bbu-Pku/Vi/2010 Tentang Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (Pks) Rengat 20 Juni 2010	
54.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 48/Skdp/Kc/iii/2010 25 Maret 2010	
55.	Foto Copy Surat Dari Badan Lingkungan Hidup, Rekomendasi Nomor : 660/Blh-Amdal/iii/2010/30 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (Ukl) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (Upl) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Banyu Bening Utama Kapasitas 60 Ton Tbs Per Jam Tanggal 5 Maret 2010	
56.	Foto Copy Surat Keputusan Menkumham A.N. Pt. Banyu Bening Utama, Jakarta 24 Oktober 2008	
57.	Foto Copy Surat Dari Pemprov - Setda Nomor 597/Ph/44.12 Tentang Pengaduan Masyarakat Desa Paya Rumbai Kec. Seberida, Pekanbaru 18 Mei 2006	
58.	Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan Pt. Banyu Bening Utama Lokasi Desa Paya Rumbai Kec. Seberida	
59.	Foto Copy Surat Rekomendasi Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 25 Juli 2005	
60.	Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Nomor : 845/Tp/100/2004 Tentang Tuntutan Masyarakat Desa Payurimbai Rengat 10 Agustus 2004	
61.	Foto Copy Surat Dari Desa Paya Rumbai Nomor : 98/05/Sp-Pr/Xi/2004 Tentang Pengajuan Tuntutan Masyarakat Tanggal 27 Nopember 2004	
62.	Foto Copy Surat Kuasa Khusus Dari Desa Paya Rumbai Kec. Seberida Sebanyak 24 Rangkap Tanggal 20 Maret 2006 Tanggal 19 Juli 2000	
63.	Foto Copy Sk Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17825 Ht.01.01th.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas A.N. Pt. Banyu Bening Utama Jakarta 16 Juli 2004	
64.	Foto Copy Akta Pendirian Persero Terbatas Nomor 65 A.N. Pt. Banyu Bening Utama Oleh Linda Herawati S.H.	
65.	Foto Copy Surat Dari Desa Paya Rumbai Kec. Seberida Nomor ; 002/Sorot/Ih/Iv.2006 Tentang Tuntutan Masyarakat Paya Rumbai Tanggal 19 April 2006	
66.	Foto Copy Surat Kuasa Dari Desa Paya Rumbai Tanggal 10 April 2006	
67.	Foto Copy Profil Masyarakat Desa Paya Rumbai	
68.	Foto Copy Program Desa Paya Rumbai	
69.	Foto Copy Surat Dari Desa Paya Rumbai Nomor ; 64/05/Sk-Pr/Vi/2004 Tentang Pengajuan Hasil Rapat Pemerintahan Desa Dan Bpd Tanggal 5 Juni 2004	
70.	Foto Copy Berita Acara Tuntutan Masyarakat Paya	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rumbai Nomor 002/Sorot/Ih/Iv/2006 Tanggal 31 Mei 2004	
71.	Foto Copy Daftar Hadir Pada Tanggal 31 Mei 2004	
72.	Foto Copy Surat Dari Camat Seberida Nomor ; / 82/Pem/Xii/2004 Tentang Tuntutan Plasma Masyarakat Desa Payarumbai Terhadap Pt. Banyu Bening Utama, Pangkalan Kasai, 3 Desember 2004	
73.	Foto Copy Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Inhu Nomor : 68/Dprd/Iii/2005 Tentang Rekomendasi Hasil Hearing Komisi A Dprd Kab. Inhu, Rengat 3 Maret 2005	
74.	Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Inhu Nomor : 233/Dprd/Vii/2005 Tentang Rekomendasi Hasil Hearing Komisi A Dprd Kab. Inhu Dengan Pt. Banyu Bening Utama, Rengat 25 Juli 2005	
D.	Dokumen terkait PT. Seberida Subur, yaitu:	
1.	Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan Pt. Seberida Subur	
2.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 92 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. Pt. Seberida Subur, Rengat 26 Februari 2007	
3.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 183 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Dan Revisi Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Seberida Subur, Rengat 10 Juli 2010	
4.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Seberida Subur, Rengat 26 Februari 2007	
5.	Foto Copy Surat Pt. Seberida Subur Tentang Surat Pernyataan Dari Edison Pinem, Pekanbaru 1 Mei 2012	
6.	Foto Copy Bukti Setor Pajak	
7.	Foto Copy Sertifikat Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi A.N. Pt. Seberida Subur Yg Di Pimpin Yusuf Dedy. H, Rengat 27 September 2011	
8.	Foto Copy Surat Dari Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor ; 250/Bpmd&Ppt/V/2011 Tentang Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan (Ho) Kabupaten Indragiri Hulu A.N. Rudi Candra, Rengat 11 Mei 2011	
9.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas A.N. Rudi Candra, Rengat 11 Mei 2011	
10.	Foto Copy Surat Persetujuan Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 102/V/Pma/2006 Tentang Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non Pmdn/Pma) Menjadi Penanaman Modal Asing(Pma), Ditanda Tangan Oleh Sutarto	
11.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Seberida Subur, Tidak Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Mujtahid Thalib	
12.	Coretan Tangan	
13.	Foto Copy Bukti Setor Pajak Atas Nama Rudi Candra, Rengat 29 Maret 2012	
E.	Dokumen Terkait PT. Palma Satu, yaitu:	
1.	Fotocopy keputusan bupati Indragiri hulu nomor 90 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu tanggal 26 Februari 2007	
2.	Fotocopy keputusan bupati Indragiri hulu nomor 91 tahun 2007 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Palma satu tanggal 26 Februari 2007	
3.	Asli keputusan bupati Indragiri hulu nomor 180 tahun	

Halaman 152 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu tanggal 8 Juli 2010</p> <p>4. Fotocopy berita acara rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan pt. Palma satu sesuai dengan surat keputusan bupati Indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada hari rabu tanggal delapan bulan desember dua ribu sepuluh bertempat di ruang rapat bupati inhu</p> <p>5. Fotocopy surat dari bpd desa penyaguan nomor 05/pyg/v/2009 hal keresahan masyarakat yang ditujukan kepada ketua dpd provinsi riau c.q. ketua komisi b di Pekanbaru tanggal 22 Mei 2009</p> <p>6. Fotocopy surat pernyataan nomor : /ps-pku/iii/2007 atas nama alisati firman tanggal 8 Maret 2007</p> <p>7. Fotocopy berita acara penetapan batas desa pada hari sabtu tanggal tujuh belas bulan juni tahun dua ribu enam</p> <p>8. Fotocopy daftar hadir rapat penetapan batas desa kuala cenaku kecamatan kuala cenaku dengan desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 17 juni 2006</p> <p>9. Fotocopy berita acara penetapan batas desa pada hari minggu tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu delapan</p> <p>10. Fotocopy daftar hadir rapat penetapan batas desa payarumbai kecamatan seberida dan desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 3 februari 2008</p> <p>11. Fotocopy surat tugas nomor 180/st/um/ix/2010 perihal pelaksanaan tugas pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3000 ha tanggal 3 september 2010 s/d selesai. Tanggal 1 september 2010</p> <p>12. Fotocopy berita acara pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu seluas ± 3000 ha pada hari jumat tanggal tiga bulan september tahun dua ribu sepuluh bertempat di desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu</p> <p>13. Fotocopy surat pernyataan warga masyarakat dan kelompok tani yang memiliki lahan di desa penyaguan tanggal 5 juli 2010</p> <p>14. Fotocopy surat keterangan warga desa penyaguan nomor : /pyg/v/2010 tanggal 3 mei 2010</p> <p>15. Fotocopy laporan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan terkait lahan desa/masyarakat penyaguan seluas ± 3000 ha yang mohon di inclave dalam lahan pt. Palma satu tanggal 27 mei 2010</p> <p>16. Fotocopy surat kementerian kehutanan nomor : s.278/menhut-vii/kuh/2013 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Palma satu tanggal 4 maret 2013</p> <p>17. Fotocopy surat bupati indragiri hulu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 hal penghentian aktivitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 20 juni 2011</p> <p>18. Fotocopy surat dari pt. Palma satu nomor 168/um/ps-pku/vi/11 hal tanggapan surat bupati indragiri hulu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 30 juni</p>	
--	---	--



	2011	
19.	Fotocopy surat camat batang gansal nomor : 590/btg/vii/2010/212 perihal rekomendasi perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan an. Pt. Palma satu tanggal 2 juli 2010	
20.	Fotocopy surat kepala desa penyaguan nomor : 01/rek-il/pyn/vi/2010 perihal rekomendasi perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan an. Pt. Palma satu tanggal 2 juni 2010	
21.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 179/adm.pum/viii/2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3000 ha tanggal 31 agustus 2010	
22.	Fotocopy lembar disposisi surat dari tim vii perjuangan desa penyaguan tanggal 23 agustus 2010 perihal mohon bantuan teknis	
23.	Fotocopy surat dari tim vii perjuangan desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu tanggal 23 agustus 2010 perihal mohon bantuan teknis	
24.	Fotocopy surat dari komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia nomor : 1.908/k/pmt/ix/2014 perihal penanganan kasus sengketa batas dan konflik perkebunan tanggal 10 september 2014	
25.	Fotocopy surat bupati indragiri hulu nomor 102/adm.pum/100/2013 perihal fasilitasi konflik lahan masyarakat dengan pt. Palma satu tanggal 13 mei 2013	
26.	Fotocopy surat komisi pemberantasan korupsi republik indonesia nomor : r-974/40-43/03/2011 hal tanggapan atas pengaduan masyarakat tanggal 21 maret 2011	
27.	Fotocopy surat dari lsm kp2mi nomor : 005/pmi-inhu/i/2011 hal pengaduan dugaan korupsi kehutanan penyerobotan lahan dan illegal logging oleh tujuh perusahaan di indragiri hulu tanggal 5 januari 2011	
28.	Fotocopy surat klinik hukum pertanahan nomor : 10.a-khp/dp-ps/kih/x/2011 hal mohon bantuan tanggal 19 oktober 2011	
29.	Fotocopy surat klinik hukum pertanahan nomor : 10.khp/dp-ps/x/2011 hal mohon kesediaan mengembalikan hak penguasaan lahan seluas 3000 ha tanggal 19 oktober 2011	
30.	Fotocopy surat klinik hukum pertanahan nomor : 10.b-khp/dp-ps/bpn/x/2011 hal mohon perhatian tanggal 19 oktober 2011	
31.	Fotocopy lembar disposisi surat dari camat batang gansal nomor : 100/320/vi/2009 perihal tentang izin lokasi pt. Palma satu	
32.	Fotocopy surat camat batang gansal nomor : 100/320/vi/2009 perihal izin lokasi pt. Palma satu tanggal 12 juni 2009	
33.	Fotocopy berita acara rapat koordinasi pembahasan permohonan izin lokasi pt. Palma satu hari kamis tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu sembilan	
34.	Fotocopy lembar disposisi surat dari tim vii perjuangan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal perihal pemberitahuan penyampaian aspirasi dan penguasaan lahan perkebunan milik masyarakat seluas ± 3000 ha berdasarkan sk bupati no 180 tahun 2010 tanggal 08 juli 2010 yang saat ini masih digarap dan dikuasai oleh pt. Palma satu tanggal 11 april 2011	
35.	Fotocopy surat dari tim vii perjuangan masyarakat	



	<p>desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu perihal pemberitahuan penyampaian aspirasi dan penguasaan lahan perkebunan milik masyarakat seluas ± 3000 hektar berdasarkan surat keputusan bupati nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 juli 2010 yang saat ini masih digarap dan dikuasai oleh pt. Palma satu tanggal 11 april 2011</p> <p>36. Fotocopy nota dinas nomor : 140/adm.pum/100/2011 tanggal 4 agustus 2011 perihal peninjauan dan pengecekan lapangan lokasi kebakaran lahan masyarakat desa penyaguan sekaligus pengecekan patok tapal batas lahan masyarakat desa penyaguan yang diinclave dari areal pt. Palma satu</p> <p>37. Fotocopy surat sekretarit daerah nomor : 181/adm.pum/100/2010 perihal penunjukan personil pengecekan lapangan tanggal 25 oktober 2010</p> <p>38. Fotocopy undangan bupati indragiri hulu nomor : 246/adm.pum/xii/2010 perihal rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan pt. Palma satu sesuai dengan surat keputusan bupati indragiri hulu nomor : 180 tahun 2010 tanggal 8 juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu bertempat di ruangan rapat bupati indragiri hulu tanggal 8 desember 2010</p> <p>39. Fotocopy surat tugas nomor 206/st/adm.pum/100/2010 tanggal 27 oktober 2010 perihal melaksanakan tugas pengecekan lapangan terkait adanya pencabutan patok tapal batas lahan masyarakat desa penyaguan dengan lahan pt. Palma satu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanggal 28 oktober s/d selesai di desa penyaguan kecamatan batang gansal</p> <p>40. Fotocopy laporan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan terkait lahan desa/masyarakat penyaguan seluas ± 3000 ha yang mohon diinclave dalam lahan pt. Palma satu tanggal 27 mei 2010</p> <p>41. Fotocopy berita acara hasil pengecekan lapangan terhadap lahan seluas ± 3000 ha yang telah diinclave serta telah dilakukan pemasangan patok batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu tanggal 28 oktober 2010</p> <p>42. Fotocopy kesimpulan rapat koordinasi tindak lanjut hearing dprd kab. Inhu dengan pt. Palma satu dan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu tanggal 25 juni 2010</p> <p>43. Fotocopy surat sekretariat daerah nomor 88/adm.pum/v/2010 tanggal 18 mei 2010 perihal permintaan personil pengecekan dan peninjauan ke lapangan lahan seluas ± 3000 ha lokasi pt. Palma satu di kecamatan batang gansal</p> <p>44. Fotocopy surat dprd kab. Inhu nomor 118/dprd/iv/2010 tanggal 29 april 2010 perihal undangan rapat dengar pendapat komisi a dprd kab. Indragiri hulu</p> <p>45. Fotocopy berita acara dengar pendapat komisi a dprd kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu desa penyaguan dan pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu tanggal 4 mei 2010</p> <p>46. Fotocopy undangan nomor : 246/adm.pum/xii/2010 tanggal 6 desember 2010 perihal rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan</p>	
--	--	--



	perkebunan pt. Palma satu	
47.	Fotocopy lembar disposisi surat dari tim 7 perjuangan desa penyaguan tanggal 10 november 2010 perihal pemberitahuan pembuatan parit tapal batas	
48.	Fotocopy surat tim vii perjuangan desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu perihal pemberitahuan pembuatan parit tapal batas tanggal 10 november 2010	
49.	Fotocopy surat tim vii perjuangan desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu perihal pemberitahuan tanggal 15 november 2010	
50.	Fotocopy undangan sekretariat daerah nomor : 124/adm.pum/005/2010 tanggal 25 juni 2010 perihal rapat tindak lanjut hearing dprd kab. Inhu dengan pt. Palma satu dan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal	
51.	Fotocopy lembar disposisi surat dari pt. Palma satu tanggal 5 januari 2010 nomor : 04/ps-pku/i/10 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. Palma satu	
52.	Fotocopy surat dari pt. Palma satu nomor : 04/ps-pku/i/10 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. Palma satu tanggal 5 januari 2010	
53.	Fotocopy surat pernyataan dari masyarakat dan kelompok tani yang memiliki lahan di desa penyaguan tanggal 5 juli 2010	
54.	Fotocopy surat keterangan nomor : /pyg/v/2010 tanggal 3 mei 2010	
55.	Fotocopy surat badan pertanahan nasional republik indonesia kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi riau nomor : 791/9-14/iv/2010 perihal mohon supaya tidak mengesahkan permohonan hak guna usaha yang dimohon pt palma satu untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit di desa penyaguan tanggal 29 april 2010	
56.	Fotocopy surat bupati indragiri hulu nomor 118/adm.pum/100/vi/2011 perihal penghentian aktivitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 20 juni 2011	
57.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 179/adm.pum/viii/2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3000 ha tanggal 31 agustus 2010	
58.	Fotocopy surat dari kapolres inhu nomor : r/42/ii/2010 perihal permasalahan lahan antara masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansak dengan pt. Palma satu tanggal 23 februari 2010	
59.	Fotocopy surat kapolres inhu nomor : b/770/v/2010/reskrim perihal mohon bantuan penunjukan saksi tanggal 14 mei 2010	
60.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 180/hk/35/v/2010 perihal penyampaian nama personil tanggal 21 mei 2010 beserta lampiran nama personil	
61.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 70/adm.pum/100/2011 perihal pengecekan dan pengukuran lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal april 2011	
62.	Fotocopy surat satuan polisi pamong praja nomor : 725/pol.pp/2010 perihal pengiriman personil pengecekan lapangan tanggal 26 oktober 2010	
63.	Fotocopy surat tugas nomor : 090/disbun/x/2010/831 tanggal 27 oktober 2010	
64.	Fotocopy keputusan bupati indragiri hulu nomor tahun 2010 tentang pencabutan keputusan bupati	



	indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu	
65.	Fotocopy surat keterangan terdaftar nomor : pem-061/wpj.06/kp.0903/2005 tanggal 17 juni 2005	
66.	Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 025/kpk/500/dp/iii/2007 tanggal 8 maret 2007	
67.	Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 92/-1.751.21 tanggal 14 juni 2005	
68.	Surat izin usah perdagangan (siup)- besar nomor : 02571/ /1.824.51 tanggal 12 juli 2005	
69.	Fotocopy surat dinas pertanahan nomor : 590/tgt-ii/2007/02 perihal rekomendasi teknis izin lokasi tanggal 23 februari 2007	
70.	Fotocopy berita acara pertemuan negosiasi antara PT. Bertuah aneka yasa (duta palma group) dengan masyarakat kuala cenaku kabupaten indragiri hulu provinsi riau pada hari selasa tanggal lima bulan januari tahun dua ribu sepuluh	
71.	Fotocopy rapat koordinasi antara pt. Bertuah aneka yas (PT. Bay) dengan masyarakat desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu tentang program kemitraan dengan masyarakat tanggal 13 januari 2010	
72.	Akta notaris oleh yulia, s.h. tanggal 8 juni 2005	
73.	Copy Surat Nomor: 06/PYG/II/2009 tanggal 16 Februari 2009, perihal Penyetopan Aktivitas PT. Palma 1	
74.	Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma SATU, tanggal 26 Februari 2007	
75.	Surat Pernyataan Nomor : /PS-PKU/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 atas nama ALISATI FIRMAN sebanyak 4 rangkap	
76.	Data Administrasi Perusahaan Perkebunan Pt. Palma 1, Lokasi Desa Payarumbai Kec. Seberida Kab. Inhu 3 Rangkap	
77.	Lembar Disposisi Indek 104 Perihal Status Kemitraan Pt. Palma Satu Tanggal 16 Februari 2009 Nomor 06/Pyg/II/2009 Asal Tata Pemerintahan	
78.	Lembar Disposisi Surat Dari Kedes Penyaguan Kec.Batang Gansal Tanggal Surat 16 Februari 2009 Nomor Surat 06/Pyg/II/2009 Surat Diterima Tanggal 23 Februari 2009 Ditandatangani 24 Februari 2009	
79.	Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma SATU, tanggal 26 Februari 2007	
80.	Berita Acara Penetapan Batas Desa di buat di Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Tanggal 17 Juni 2006.	
81.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar)	
82.	BERITA ACARA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA PAYA RUMBAI DENGAN DESA PENYAGUAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2008	
83.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Payarumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 Lembar)	
84.	LEMBAR DISPOSISI DARI KEPALA DESA PEYAGUAN TANGGAL SURAT 187 JULI 2009 DITERIMA 21 JULI 2009 NOMOR SURAT	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	07/PYG/VII/2009 OLEH KABAG ADM PEMERINTAH UMUM SETDA KAB. INHU DRS. MULTACDI, MSI	
85.	PENYETOPAN AKTIFITAS PT PALMA SATU NOMOR 07/PYG/VII/2009 TANGGAL 18 JULI 2009 A.N. KETUA DPD DESA PENYAGUAN R MUSLIM A.N. KEPALA DESA PENYAGUAN FIRMANZAH	
86.	Surat Pernyataan Nomor : /PS-PKU/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 atas nama ALISATI FIRMAN	
87.	Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma SATU, tanggal 26 Februari 2007	
88.	Berita Acara Penetapan Batas Desa di buat di Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Tanggal 17 Juni 2006.	
89.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar)	
90.	BERITA ACARA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA PAYA RUMBAI DENGAN DESA PENYAGUAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2008	
91.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Februari 2008	
92.	Berita Acara Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Tanggal 03 Nopember 2008.	
93.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Nopember 2008	
94.	BERITA ACARA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA PAYA RUMBAI DENGAN DESA PENYAGUAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2008	
95.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Februari 2008	
96.	Surat Sekretariat Daerah Nomor 23/TP/100/2008 Perihal Panggilan Menghadap Tanggal Agyustus 2008 Kepada Yth Sdr, Direktur PT. Palma satu di Pekanbaru.	
97.	Berita Acara Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Tanggal 03 Nopember 2008.	
98.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Nopember 2008	
99.	Lembar Disposisi Surat dari Desa Penyaguan Nomor 09/09-PYG/IV/2008 Perihal Penghentian Alat Berat Pembukaan Lahan An. PT. Palma Satu Tanggal 6 April 2008 Kepada Yth Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu	
100.	Lembar Disposisi Tanggal 16 Februari 2009 Nomor 06/PYG/II/2009 Asal Kades Penyaguan diterima Tanggal 23 Februari 2009	
101.	Surat dari Kepala Desa Penyaguan Nomor 06/PYG/II/2009 Hal Status Kemitraan PT.Palma Satu Kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba.	
102.	Undangan Rapat Camat Batang Gansal Hari Kamis 11 Juni 2009 Pukul 08.30 WIB s/d selesai di Aula Kantor Camat Batang Gansal	
103.	Surat Sekretariat Daerah Nomor 228/Adm.Pum/100/2009 Perihal Status Izin Lokasi PT.Palma Satu Tanggal 15 Juni 2009 Kepada Yth,	

Halaman 158 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Sdr Direktur PT.Palma Satu di Pekanbaru (3 Rangkap)</p> <p>104. Surat dari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Nomor 07/PYG/VII/2009 Hal Penyetopan Aktifitas PT. Palma satu Tanggal 18 Juli 2009 Kepada Yth Bapak Camat Batang Gansal di Seberida</p> <p>105. Surat Sekretariat Daerah Nomor 193/ADM.PUM/100/XI/2009 Perihal Surat Pengantar tanggal Nopember 2009 Kepada Yth. Sdr. DIREKTUR PT. PALMA SATU di PEKANBARU.</p> <p>106. Rapat terbatas Penyelesaian Permasalahan Antara PT. Palma Satu dengan Camat Batang Gansal Mewakili Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal</p> <p>107. Daftar hadir Rapat/Pertemuan Antara PT. Palma satu dengan Pemerintah Daerah (Asisten 1, Camat dan Perwakilan PT. Palma satu)</p> <p>108. Surat PT. Palma Satu Nomor 357/UM-PKU/XI/09 Tanggal 30 Nopember 2009 Hal Permohonan untuk menghadap Kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba</p> <p>109. Surat PT. Palma Satu Nomor 364/UM-PKU/XI/09 Tanggal 11 Desember 2009 Hal Permohonan untuk menghadap Kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba</p> <p>110. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21.15/Adm.Pum/XI/2009/100 Perihal Masalah Batas Kabupaten Inhu dan Inhil Tanggal 19 Nopember 2009 Kepada Yth Sdr. Gubernur Riau c/q kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Riau di pekanbaru</p> <p>111. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 tahun 2010 Tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa sawit Atas nama PT.Palma satu Tanggal 8 Juli 2010.</p> <p>112. Lembar Disposisi Tanggal 2 Juni 2010 Nomor 25.15/Adm.Pum/IX/2009/100 Tentang Lahan Desa atau masyarakat penyaguan ± 3000 Ha yang mohon di inclave dalam lahan PT. Palma Satu</p> <p>113. Lembar disposisi tanggal 9 Desember 2009 Nomor 201/ADM.PUM/100/XII/2009 tentang undangan rapat perihal permohonan untuk menghadap, bupati Indragiri hulu.</p> <p>114. Lembar Disposisi tanggal 18 Januari 2010 Nomor : 01/Pem/XII/2009 tentang laporan tuntutan masyarakat desa kuala cenaku kecamatan kuala cenaku.</p> <p>115. Lembaran Disposisi tanggal 12 Januari 2010 tentang pemberitahuan masyarakat akan mengambil / menguasai kembali lahan milik masyarakat seluas ± 3000 ha.</p> <p>116. Lembar Disposisi tanggal 10 Februari 2010 tentang tuntutan masyarakat desa penyaguan.</p> <p>117. Nota pengajuan konsep tanggal Februari 2010 Nomor : /ADM.PUM/100/II/2010 tentang surat keberadaan PT. Palma Satu di Kabupaten Indragiri hulu.</p> <p>118. Surat DPRD tanggal 29 April 2010 Nomor 118/DPRD/IV/2010 tentang undangan rapat dengar pendapat komisi A DPRD Kab. Indgariri hulu.</p> <p>119. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Prov. Riau tanggal 29 april 2010 Nomor : 791/9-14/IV/2010 tentang mohon supaya tidak mengesahkan permohonan hak guna usaha yang dimohon PT. Duta Palma Satu untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit di desa</p>	
--	---	--



	penyaguan.	
120.	Lembar Disposisi tanggal 2 Juni 2010 tentang lahan desa atau masyarakat penyaguan seluas ± 3000 Ha yang mohon di inclave dalam lahan PT. Palma Satu.	
121.	Nota Pengajuan Konsep tanggal Juli 2010 Nomor : 180/HK/ /VII/2010 tentang koreksi draft setda kab. Inhu.	
122.	Surat tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 179/ADM.PUM/VIII/2010 tentang pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan PT. Palma Satu Seluas 3000 Ha.	
123.	Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanggal 8 Juli 2010 Nomor : 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma Satu.	
124.	Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanggal 30 Juli 2010 Nomor : 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 (Nomor Diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu.	
125.	Surat bupati indrgiri hulu tanggal 20 juni 2011 nomor : 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tentang penghentian aktifitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal.	
126.	surat DPRD Kab. Inhu tanggal 12 januari 2012 Nomor : 28/DPRD/I/2012 tentang konfirmasi ulang data dan peta izin lokasi PT. Palma Satu.	
127.	Surat kementerian kehutanan tanggal 30 maret 2012 Nomor : s.121/BPRUK-1/2012 tentang kelengkapan persyaratan permohonan pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.	
128.	Surat Komisi Nasional Hak asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan ke Bupati Indrgiri Hulu dan DPRD kab. Inhu tanggal 1 November 2012 Nomor : 2.460/K/PMT/XI/2012 tentang permintaan penjelasan permasalahan lahan, beserta lembar disposisi.	
129.	Surat pemda Inhu tanggal 25 april 2012 Nomor : 176/ADM.PUM/100/IV/2012 tentang tindak lanjut hasil TIM Pansus DPRD Kab. Inhu.	
130.	Surat undangan bupati Indragiri hulu nomor 27/ADM.PUM/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang rapat koordinasi permasalahan duta palma group (PT.Palma Satu).	
131.	Surat bupati indrgiri hulu tanggal 25 januari 2013 nomor : 31/ADM.PUM/100/I/2013 tentang penjelasan permasalahan PT. Palma Satu beserta bukti kirim tanggal 28 Januari 2013.	
132.	Surat Menteri kehutanan tanggal 4 maret 2013 nomor : s.278/Menhut-VII/KUH/2013 tentang tanggapan atas permohonan pelepasan Kawasan hutan AN. PT. Palma Satu.	
133.	Surat BPN RI Nomor : 4169/25.2-600/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang laporan dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan PT. Palma Satu dibatas kabupupaten Indragiri hulu – Indragiri hilir, Provinsi Riau, beserta lembar disposisi.	
134.	Surat komisi nasional hak asasi manusia RI tanggal 24 Mei 2013 nomor ; 1.459/k/PMT/V/2013 Perihal tindak lanjut rekomendasi DPRD Kab. Inhu yang ditujukan kepada bupati Indragiri hulu.	
135.	Surat dari BPN Kanwil Riau tanggal 13 januari 2014 Nomor : 030/18-14/I/2014 perihal laporan dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan PT. Palma Satu.	
136.	Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 28	



	<p>Maret 2014 Nomor : 522.1/Planhut/806 perihal revisi surat pertimbangan teknis rekomendasi pelepasan Kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Palma Satu.</p> <p>137. Draft Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang revisi izin usaha perkebunan PT. Palma Satu tahun 2014.</p> <p>F. Dokumen terkait PT. Panca Agro Lestari, yaitu:</p> <p>1. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO Lestari tanggal 20 September 2005.</p> <p>2. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan An.PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 23 Januari 2006.</p> <p>3. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 10 Juli 2010.</p> <p>4. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 148 A Tahun 2007 tentang Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 6 Agustus 2007.</p> <p>5. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 10 Juli 2010, Yang telah dilegalisir pada tanggal 14 Januari 2015.</p> <p>6. Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT. PANCA AGRO LESTARI, Lokasi Desa Danau Rumbai / Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu. (16 item)</p> <p>7. Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT. PANCA AGRO LESTARI, Lokasi Desa Danau Rumbai / Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu. (17 item)</p> <p>8. Foto Copy Lembar Disposisi Perihal Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Danau Rumbai Kec, Batang Gansal Kab. Inhu dengan PT. Panca Agro Lestari, tanggal diterima 11-01-2013.</p> <p>9. Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : B/52/I/2013/Dit Intelkam tanggal 7 Januari 2013 Perihal Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Danau Rumbai Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu dengan PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) Kepada KAPOLRES INHU.</p> <p>10. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 10 Juli 2010.</p> <p>11. Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanahan Nomor : 144/IL-DP/IX/2005 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi tanggal 3 September 2005.</p> <p>12. Foto Copy Disposisi Kepala Bagian Hukum Nomor : 180/HK/ /VII/2010 bulan Juli 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanpa nomor tentang perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Panca Agro Lestari.</p> <p>13. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/2010 Hal Permasalahan PT.</p>	
--	--	--



	PAL.	
14.	Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 September 2010.	
15.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/006 Perihal Pengaduan tanggal 5 Oktober 2006.	
16.	Foto Copy Surat Kepala Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tentang Surat Dukungan Masyarakat tanggal 17 Februari 2003.	
17.	Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang Nomor : 33/SK-SC/2003 tanggal 24 Desember 2003.	
18.	Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Habibi tanggal 24 September 2004.	
19.	Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Atas Nama Habibi tanggal 24 September 2004.	
20.	Foto Copy Peta Situasi Tanah Atas Nama Habibi tanggal 24 September 2004.	
21.	Foto Copy Surat Penyerahan Atas Nama Habibi Kepada Toba tanggal 10 Agustus 2004.	
22.	Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang Atas Nama HERDYANTO tanggal 24 Desember 2003.	
23.	Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Atas Nama HERDYANTO tanggal 24 September 2004.	
24.	Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Nama HERDYANTO tanggal 24 September 2004.	
25.	Foto Copy Surat Penyerahan HERDYANTO KEPADA TOBA tanggal 10 Agustus 2004.	
26.	Foto Copy Peta Situasi Tanah An. HERDYANTO tanggal 24 September 2004.	
27.	Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. PAL dengan Masyarakat Desa Danau Rambai di Seberida tanggal 22 Januari 2010.	
28.	Foto Copy KRONOLOGIS LAHAN MASYARAKAT DUSUN PENCALANG DESA Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang digarap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 februari 2010.	
29.	Foto Copy Permohonan Izin UNRAS Kepala Desa Danau Rambai Kepada KAPOLRES INHU tanggal 14 Desember 2011.	
30.	Foto Copy Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 670 (tulisan kurang jelas)/Disbun-VII/2011/556 Hal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Tanggal 21 Juni 2011.	
31.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 04 Agustus 2008.	
32.	Foto Copy Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor : 46/LSM-MPR-Ber-Nas /VII/2010 Hal Permohonan permintaan Hearing kepada Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu tanggal 30 Juli 2010.	
33.	Foto Copy Surat Camat Batang Gansal Nomor : 227/310/VII/BTG/2010 Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Atas Lahan warga masyarakat Desa Danau Rambai ke Pimpinan PT. PAL tanggal 1 Juli 2010.	
34.	Foto Copy Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor : 04/LSM-MPR-Ber-Nas /VI/2010 Hal menindaklanjuti surat pertama ke pimpinan PT. PAL tanggal 28 Juni 2010.	
35.	Foto Copy Surat Kuasa Masyarakat Desa Danau Rambai tanggal 9 Maret 2010.	
36.	Foto Copy KRONOLOGIS LAHAN MASYARAKAT DUSUN PENCALANG DESA Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang digarap Perusahaan	



	Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 februari 2010.	
37.	Foto Copy Surat Polsek Pangkalan Kasai tentang Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPI/342/X/2006/Polsek Seberida Atas Nama SUPAR tanggal 01 Oktober 2006.	
38.	Foto Copy Surat Pengurus Penertipan Pengembangan Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec, Batang Gansal Inhu Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 28 Januari 2010.	
39.	Foto Copy Daftar Hadir Rapat PT. PAL dengan Masyarakat Desa Danau Rambai di Seberida tanggal 22 Januari 2010.	
40.	Foto Copy Surat Pengurus Penertipan Pengembangan Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec, Batang Gansal Inhu Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 31 Desember 2010.	
41.	Foto Copy Surat Pengurus Penertipan Pengembangan Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec, Batang Gansal Inhu Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 20 Oktober 2009.	
42.	Foto Copy Surat Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian tanggal 14 oktober 2009.	
43.	Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.	
44.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/006 Kepada Camat Batang Gansal Hal Pengaduan tanggal 5 Oktober 2006.	
45.	Foto Copy Surat Undangan Sekretaris Daerah Kepada Kabag Tapem Setda kab. Inhu Acara Pertemuan Terhadap Permasalahan PT. PAL ,BBU, PALMA SATU dan KAT.	
46.	Foto Copy Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor : 46/LSM MPR Ber-Nas/VII/2010 Kepada Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu Hal Permohonan Permintaan Hearing tanggal 30 Juli 2010.	
47.	Foto Copy Surat Camat Batang Gansal Nomor : 227/310/VII/BTG/2010 kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 1 juli 2010 Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Atas Lahan warga masyarakat Desa Danau Rambai.	
48.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Kepada PT. PAL tanggal 04 Agustus 2008.	
49.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/2010 kepada Bupati Indragiri Hulu Hal Permasalahan PT. Pal tanggal 20 September 2010.	
50.	Foto Copy Undangan Rapat Sekretaris Daerah Nomor : 114/ADM.PUM/005/2011 Acara Tindaklanjut Rapat Koordinasi Pernyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PANCA AGRO LESTARI (PT.PAL) tanggal 15 Juni 2011.	
51.	Foto Copy Surat Kepala Desa Sencalang Nomor : 32/SK-SC/2003 Atas Nama Sahari tanggal 24	



	Desember 2003.	
52.	Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Atas Nama Sahari tanggal 24 September 2004.	
53.	Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian An. SAHARI kepada M. Toba tanggal 24 September 2004.	
54.	Foto Copy Surat Penyerahan An. Sahari Kepada Toba tanggal 10 Agustus 2004.	
55.	Foto Copy Peta Situasi Tanah yang dikuasai SAHARI tanggal 24 September 2004.	
56.	Foto Copy Lembar Disposisi Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Lahan Warga Desa Danau Rambai dengan PT. PAL.	
57.	Foto Copy Disposisi Kabag ADM. Pemerintahan Umum setda kab inhu tanggal 24 September 2010.	
58.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/2010 Hal Permasalahan PT. PAL tanggal 20 September 2010.	
59.	Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tanggal 20/09-2010.	
60.	Foto Copy Daftar Nama-Nama masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu yang Menuntut Lahan Diserobot PT. Panca Agro Lestari (PT.PAL).	
61.	Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 31/SK-SC/2003 tanggal 24 Desember 2003.	
62.	Foto Copy Surat Penyerahan TAMRIN dengan TOBA tanggal 10 Agustus 2004.	
63.	Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa TAMRIN tanggal 24 September 2004.	
64.	Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian TAMRIN tanggal 24 September 2004.	
65.	Foto Copy Peta Situasi Tanah yang dikuasai TAMRIN tanggal 24 September 2004.	
66.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI.	
67.	Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522 /Sekre/VII/2014/198 Perihal Konfirmasi Status Lahan PT. PAL tanggal 17 Juli 2014. Terlampir peta	
68.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2014 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT. PAL tanggal 2014. Terlampir peta.	
69.	Foto Copy Surat PT. PAL kepada Bupati Indragiri Hulu Nomor : 003/Leg-Eks/FAL/VIII/2013 Perihal Permohonan Revisi Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa (IUP-B) tanggal 22 Agustus 2013. Terlampir peta.	
70.	Foto Copy Surat PT. PAL tentang Surat Pernyataan Perusahaan atau Kelompok (Grup) Usaha Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas Atas Nama Dedy Sumardi tanggal 29 April 2014.	
71.	Foto Copy Surat Kementrian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-73/WPJ.02/KP.0603/2010 tanggal 3 November 2010.	
72.	Foto Copy Surat Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Riau kepada Direktur PT. PAL Nomor : 503/BP2T-IR/II/2013/52 Perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa	



	<p>Sawit An. PT. PAL tanggal 4 Februari 2013. Terlampir Peta</p> <p>73. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit An. PT. PAL tanggal 10 Juli 2010. Peta terlampir</p> <p>74. Foto Copy Surat PT. PAL Kepada Bupati Indragiri Hulu Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Panca Agro Lestari Tanggal 22 Agustus 2013.</p> <p>75. Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 050/Disbun-Pengemb/709 Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 8 Agustus 2012.</p> <p>76. Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 522.1/Planhut/5211 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro pembangunan perkebunan propinsi Riau untuk perkebunan Kelapa Sawit An. PT. PAL tanggal 30 November 2012. Peta terlampir</p> <p>77. Foto Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor: 503/BP2T-IR/II/2013/50 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi dikonversi (HPK) untuk perkebunan Kelapa Sawit An. Pal tanggal 4 Februari 2013. Peta terlampir</p> <p>78. Foto Copy Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Pemko Pekanbaru Nomor : 1189/BPT/2011 tentang Izin Tempat Usaha Jufendiwan Herianto tanggal 11 April 2011. Terlampir surat izin usaha perdagangan besar nomor : 153/BPT 04.01/IV/2011 An. PT. PAL tanggal 18 April 2011 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : TDP 040115107308 tanggal 18 April 2014 An. PT. PAL.</p> <p>79. Foto Copy Surat Keterangan Notaris Linda Herawati, SH. Tanggal 12 Desember 2011.</p> <p>80. Foto Copy Surat Dinas Pertanahan Kab. Inhu kepada Bupati Indragiri hulu Nomor : 01.590/TGT-II/2007/03 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi tanggal 26 Februari 2007. Peta terlampir</p> <p>81. Foto Copy Surat Bupati Kuantan Singingi Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor : 522/U/316 Perihal Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan An. PT. PAL tanggal 11 Maret 2013. Peta terlampir.</p> <p>82. Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kuantan Singingi Kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 522.12/DISHUT-PUK/006 Perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan An. PT. PAL tanggal 2 Januari 2013.</p> <p>83. Foto Copy Surat Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Bupati Indragiri Hulu Nomor: 522.2/PR-XII/2005/1119 Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT. PAL tanggal 1 Desember 2005. Peta terlampir</p> <p>84. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai Dengan PT. PANCA AGRO LESTARI (PT.PAL) tanggal 7 April 2014.</p> <p>85. Foto Copy Surat Berita Acara PT. PAL tanggal 15 April 2014.</p> <p>86. Foto Copy Lembar Disposisi Index 800 Perihal Surat Kesepakatan asal masyarakat Desa Danau Rambai</p>	
--	--	--



	tanggal terima 19 Juni (tulisan tidak jelas).	
87.	Foto Copy Surat Kesepakatan akhir masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Rencana Kemitraan dengan PT. PAL tanggal 17 Juni 2013.	
88.	Foto copy Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Direktur PT. PAL Nomor : 870/DISBUN-VI/2011/556 Perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan tanggal 21 Juni 2011.	
89.	Foto Copy Rekomendasi Panitia Khusus Duta Palma Group DPRD Kab. Inhu Tahun 2012.	
90.	Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan An. Vande Simanulang tanggal 4 Mei 2014.	
91.	Foto Copy Surat Pernyataan PT. PAL tanggal 6 Desember 2012.	
92.	Foto Copy Permohonan Pembangunan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berbentuk Plasma tanggal 21 Januari 2013.	
93.	Foto Copy Surat Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian tanggal 14 Oktober 2009.	
94.	Foto Copy KRONOLOGIS LAHAN MASYARAKAT DUSUN PENCALANG DESA Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang digarap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Februari 2010.	
95.	Foto Copy Coretan Tangan.	
96.	Foto Copy Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai kec. Batang gansal terhadap PT. PAL tanggal 3 Mei 2013.	
97.	Foto Copy Surat Bupati Indragiri hulu kepada Direktur PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor : 127/ADM PUM/VI/2013 perihal panggilan menghadap tanggal 27 Juni 2013.	
98.	Foto Copy Disposisi Surat Nomor : 82/LSM MPR Ber-Nas/VI/2013 perihal tindak lanjut penyelesaian masalah tanah yang diserobot PT. PAL Sutrisno dkk, dengan bukti kepemilikan sejumlah 20 lembar SKGR (40 Hektare) didesa Danau Rambai Kec. Batang Gansal 10 Juni 2013.	
99.	Foto Copy Surat dari Petani Pemilik Tanah Desa Penyaguan tanggal Juni 2011.	
100.	Foto Copy Surat Kepala Desa Belimbing : a. Nomor : 35/08.B/II/2005 tanggal 20 Februari 2005 b. Nomor : 92/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 c. Nomor : 93/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 d. Nomor : 94/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 e. Nomor : 95/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 f. Nomor : 96/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 g. Nomor : 97/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 h. Nomor : 98/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003 i. Nomor : 37/08.B/II/2005 tanggal 20 Februari 2005	
101.	Foto Copy Surat Kuasa Pemilik Tanah yang terletak	



	di Dusun Penyuguan Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu yang diberikan kepada H. KURDI, HAR tanggal 20 Februari 2006.	
102.	Foto Copy Surat Keterangan tanggal 27 September 2007.	
103.	Foto Copy Disposisi Surat Perihal Kelanjutan Penyelesaian tuntutan tanah ulayat sekitar 1200 ha yang diserobot PT. PAL Desa Danau Rambai Nomor 54/LSM MPR Ber-Nas/IV/2011 tanggal 11 April 2011.	
104.	Foto Copy Undangan Rapat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 85/ADM.PUM/005/2011 tanggal 9 mei 2011.	
105.	Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Pada tanggal 6 April 2011.	
106.	Foto Copy tanda terima Pemberitahuan Nomor: STTP/II/IV/2011/INTELKAM tanggal 5 April 2011.	
107.	Foto Copy Disposisi Undangan Rapat tanggal 13 mei 2013 daftar hadir terlampir.	
108.	Foto Copy Tulisan Tangan.	
109.	Foto Copy surat bupati Indragiri Hulu kepada PT. PAL Nomor : 464/ADM.PUM/100/ 2012 tanggal 4 Desember 2012.	
110.	Foto Copy Surat Edaran BPN RI Nomor : 2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk MAsyarakat Sekitar (KEbun Plasma) dan melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Responsibility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pertanahan tanggal 27 Desember 2012.	
111.	Foto Copy Disposisi Penyampaian dan permohonan untuk segera direalisasikan tuntutan masyarakat desa danau rambai tanggal 14 november 2012, Berita Acara, surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-1270/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 mei 2012 dan surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-1269/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 mei 2012 perihal Pengaduan Masyarakat.	
112.	Foto Copy Surat Berita Acara Team Sepuluh tanggal 24 Oktober 2012	
113.	Foto Copy Disposisi surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-1270/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 mei 2012.	
114.	Foto Copy Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Direktur PT. PAL Perihal Penyelesaian tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal tanggal 14 mei 2011.	
115.	Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian permalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 10 Mei 2011.	
116.	Foto Copy Lembar Disposisi Perihal Penyelesaian Pembangunan Lokasi Perkebunan tanggal 1 Agustus 2013.	
117.	Foto Copy Surat Undangan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 99/ADM.PUM/005/2011 tentang Tindaklanjuti Rapat Koordinasi Penyelesaian PERmasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang GAnsai terhadap PT. PAL tanggal 6 Juni 2011. Daftar hadir dan berita acara terlampir	
118.	Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai kec. Batang Gansal Terhadap PT. PAL tanggal 10 Mei 2011. Daftar hadir terlampir	
119.	Foto Copy Surat Undangan Hearing Komisi A DPRD Kab. Indragiri Hulu Nomor : 32/DPRD/II/2011 tanggal	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>27 Januari 2011.</p> <p>120. Foto Copy Surat Tagihan Pajak An. PT. PAL Taun 2012.</p> <p>121. Foto Copy Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 6 Juni 2011.</p> <p>122. Foto Copy Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Kab. Inhu kepada Direktur PT.PAL tanggal 15 Juni 2011.</p> <p>123. Foto Copy Surat Bupati Indragiri Hulu Kepada PT. PAL Nomor : 79 /ADM.PUM/100/V/2010 Perihal Tindak LANjut Permohonan Izin Usaha Perkebunan KELapa Sawit PT. PAL tanggal 6 mei 2010.</p> <p>124. Foto Copy Berita Acara Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian PERmasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 21 Juni 2011.</p> <p>125. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai kepada Ketua DPRD Kab. Inhu Nomor : 31/MB-DR/XII/2010 Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Atas Lahan warga masyarakat Desa Danau Rambai tanggal 7 Desember 2010 berserta Disposisi dari Sekretariat DPRD Kab. Inhu.</p> <p>126. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tanggal 20 september 2010.</p> <p>127. Foto Copy Catatan Tangan.</p> <p>G. 4 (empat) buah buku register Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu yang terdiri tahun 2005, tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2011.</p>	
XX.	<p>1. 6 (enam) buah Buku Bank PT. Darmex Oil & Fats;</p> <p>2. 2 (dua) buah Buku Bank PT. Monte Rado Mas;</p> <p>3. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Darmex Agro;</p> <p>4. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Johan Sentosa;</p> <p>5. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Eluan Mahkota;</p> <p>6. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Wirata Daya Bangun Persada;</p> <p>7. 2 (dua) Buah Buku Bank PT Dumai Bulking;</p> <p>8. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Kencana Amal Tani;</p> <p>9. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Ceria Prima;</p> <p>10. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Ledo Lestari;</p> <p>11. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Darmex Bio Fuel;</p> <p>12. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT. Duta Palma Nusantara;</p> <p>13. 7 (tujuh) Buah Buku Bank PT Darmex Plantation;</p> <p>14. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Banyu Bening Utama;</p> <p>15. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Mekarsari Alam Lestari;</p> <p>16. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Dabi Bio Fuel;</p> <p>17. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Bayas Bio Fuel;</p> <p>18. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Delimuda Perkasa;</p> <p>19. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Alfaledo;</p> <p>20. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Wana Jingga Timur;</p> <p>21. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Delimuda Nusantara;</p> <p>22. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Kandis Mekar Lestari;</p> <p>23. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Unggul Beras Indonesia;</p> <p>24. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Lestari alam Raya;</p> <p>25. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Palma Lestari;</p> <p>26. 1 (satu) Buah Buku Sewa Tangki Finance Direksi;</p> <p>27. 1 (satu) Buah Buku Bank jan 2016 tanpa nama Perusahaan;</p>	<p>Disita dari BETTI DAME HUTAUURUK Tanggal 04 Agustus 2022</p>
XXI.	<p>1. 1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi April 2016;</p> <p>2. 1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi Mart tahun 2016;</p> <p>3. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Februari 2016;</p> <p>4. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi statistik Januari 2016;</p> <p>5. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi per divisi pertahun tanam;</p>	<p>Disita dari Salamuddin, Sp Tanggal 09 Juni 2022</p>

Halaman 168 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



6.	1 (satu) lembar budget produksi tahun 2016;	
7.	1 (satu) lembar history produksi TBS 5 tahun;	
8.	1 (satu) lembar monitoring produksi semester I 2016	
9.	1 (sat) rangkap data penaksiran produksi semester I tahun 2016;	
10.	1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi bulan desember 2015;	
11.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Juni 2016;	
12.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Mei 2016;	
13.	1 (satu) rangkap statistik produksi bulan Juli 2016;	
14.	1 (sat) rangkap rekapitulasi Produksi bulan November 2016;	
15.	1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi bulan Oktober 2016	
16.	1 (Satu) rangkap statistik bulan September 2016;	
17.	1 (sat) lembar statistik produksi bulan Agustus 2016;	
18.	1 (satu) rangkap sensus produksi semester I 2016;	
19.	1 (Satu) rangkap realisasi dan proyeksi produksi tahun 2013 s/d 2021;	
20.	1 (sat) rangkap history produksi bulanan 2010 sampai dengan 2015;	
21.	1 (sat) rangkap penaksiran produksi semester 2 tahun 2016;	
22.	1 (satu) bundel Cash flow budget PT PANCA AGRO LESTARI DIVISI V tahun 2016;	
23.	1 (satu) bundel Cash Flow Budget PT PANCA AGRO LESTARI DIVISI I tahun 2016;	
24.	1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi desember 2017;	
25.	1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi november 2017;	
26.	1 (satu) rangkap peta History Produksi 2012 s/d 2017	
27.	1 (Satu) rangkap surat pernyataan penyelesaian progress perawatan tahun 2017;	
28.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi oktober 2017;	
29.	1 (satu) lembar peta rencana water management;	
30.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi september 2017;	
31.	1 (satu) rangkap sebaran budget produksi TBS 2017;	
32.	1 (satu) lembar history sebaran produksi TBS per bulan selama 5 tahun;	
33.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Agustus 2017;	
34.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Juli 2017;	
35.	1 (satu) rangkap rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja Budget Tahun 2017;	
36.	1 (Satu) lembar surat perihat standar produktifitas kelapa sawit no 349/HoA/NI/2017 tanggal 22 Agustus 2017	
37.	1 (Satu) lembar data karyawan aktif sampai tanggal 15 Juli 2017;	
38.	1 (satu) lembar history produksi TBS 5 tahun;	
39.	1 (satu) lembar estimasi selesai perbaikan unit Dump truck;	
40.	1 (satu) lembar data PO tunai spare part Dump truck;	
41.	1 (sat) rangkap rencana crash program pemeliharaan tanaman Septembe s/d Desember 2017;	
42.	1 (satu) rangkap surat persiapan budget tahun 2018 No 328 tanggal 5 Agustus 2017;	
43.	1 (satu) rangkap penaksiran produksi semester 2 tahun 2017;	
44.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan juni 2017;	
45.	1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi stastistik Mei 2017;	
46.	1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik April 2017	
47.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statsistik Februari 2017;	
48.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statsistik Mart 2017;	
49.	1 (sat) rang kap rekapitulasi produksi statistik Januari 2017;	
50.	1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama antara PT Panca Agro Lestari dengan PT SHALI RIAU LESTARI NO.023/SUST/SPK/PAL/SRL/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;	
51.	1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama Pemantauan	



	Lingkungan antara PT Panca Agro Lestari dengan PT Mutu Agung Lestari NO. 006/SUST/SPK/PAL/MUTU/IX/2016 tanggal 26 September 2016;	
52.	1 (satu) rangkap perubahan batas maksimal pembayaran premi kutib brondolan No.344/HoA/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;	
53.	1 (satu) rangkap ketetapan SPH di areal gambut dan mineral nomor : 302/HoA/IX/2016 tanggal 28 September 2016;	
54.	1 (satu) rangkap jadwal rapat budget tahap I No 202/HOA/NIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;	
55.	1 (satu) rangkap persiapan budget tahun 2016 No 190/HoA/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015;	
56.	1 (satu) rangkap data barang mash di gudang sampai dengan 30-12-2015,	
57.	1 (satu) rangkap Outstanding permohonan pembelian tahun 2015 PT Panca Agro Lestari Kebun Batang Gansal;	
58.	1 (sat) rangkap kunjungan rutin staff controller traksi Pekanbaru No. 12/AGR/HOA/1/2016 tanggal 11 Januari 2016;	
59.	1 (satu) lembar Pinjam unit Dump Truck no 003/PAL/KBN/II/2016 tanggal 07 Januari 2016;	
60.	1 (satu) lembar penormalan pusingan panen dan pencapaian target restan Nol nomor 02/AMA-EF/CN/2016 tanggal 11 Januari 2016;	
61.	1 (Satu) lembar format lampiran pembuatan PP untuk spare part pass moving tanggal 11 Januari 2016;	
62.	1 (satu) rangkap nama Humas tanggal 06 Januari 2016;	
63.	1 (satu) rangkap struktur PIC purchasing RO Riau per tanggal 7 Januari 2017;	
64.	1 (satu) rangkap improvement sistem pendataan curah hujan No.004/RnD.-PKU/STAT/1/2016 tanggal 5 Januari 2016;	
65.	1 (satu) rangkap email RE : IM No.019/SOP/DEPT/Memo/XI/2015 tanggal 4 Januari 2016;	
66.	1 (satu) rangkap laporan hasil pememsaan administrasi dan laporan divisi no.120/HoA/IV/2016 tanggal 21 April 2016;	
67.	1 (satu) rangkap jadwal pelaksanaan LSU 2016 daftar Blok LSU 2016 pedoman teknis LSU 2016 no : 048/RND/PKU/EST/EF/IV/2016 tanggal 21 April 2016;	
68.	1 (satu) lembar pemeriksaan meja miring dan laporan kebun no 107/HoA/TV/2016 tanggal 09 April 2016;	
69.	1 (satu) undangan rapat kerja progress kerja dan RKB no 106/HoA/IV/2016 tanggal 09 April 2016;	
70.	1 (satu) rangkap penerbitan SO/DO motor Grader Komatsu GD 450 tanggal 15 Maret 2016;	
71.	1 (satu) rangkap progres kerja per divisi per tanggal 20 maret 2022;	
72.	1 (satu) rangkap peta divis I:	
73.	1 (satu) lembar peta rencana pembuatan Titi Panen;	
74.	1 (satu) lembar denah kebun Batang Gansal;	
75.	1 (satu) rangkap action plan kunjungan ARM IV rayon II;	
76.	1 (satu) rangkap permohonan dana nomor:011/ENP/PAL-K/Bn/11/2007 tanggal 1 Februari 2007	
77.	1 (satu) lembar permohonan dana nomor 016/ENP/PAL-K/BN/V/2007 tanggal 26 Februari 2007:	
78.	1 (satu) rangkap denah plan Activity;	
79.	1 (satu) lembar denah PT PAS, PT TOBA, PT SIR, PT SSK;	
80.	1 (Satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT Panca Agro Lestari terkait hasil pematokan yang dilakukan oleh kepala desa penyuguan (P. Tatan) terhadap areal yang diklaim oleh Kelompok Darwis di blok G dan H	
81.	1 (satu) rangkap nama-nama pemilik kebun sawit masyarakat di sekitar areal PT PAL;	
82.	1 (Sat) bundel budget 2016 tahap I;	
83.	1 (sat) rangkap denah rencana pembagian blok areal Toba;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>84. 1 (satu) bunde rencana kerja tahunan-bulanan budget tahun 2016;</p> <p>85. 1 (sat) bundel working sheet PT PAL Budget Tahun 2016;</p> <p>86. 1 (satu) bundel progress kerja buat tapak timbun;</p> <p>87. 1 (satu) lembar prosedur pinjaman atau permintaan barang antar PT atau kebun;</p> <p>88. 1 (satu) rangkap permohonan ganti rugi kebun sawit kelompok H.tani nomor 328/PAL-KBN/XI1/2014 tanggal 24 Desember 2014;</p> <p>89. 1 (satu) rangkap standar input rasio 0,16 HK atau HA nomor 119/H0A/V/2015 tanggal 20 Mei 2015:</p>	
XII.	<p>1) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 197 tahun 2010 tanggal 30 juli 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu tanpa nomor tentang perpanjangan dan revisi lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Seberida subur.</p> <p>2) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 89 tahun 2007 tanggal 26 februari 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Seberida subur.</p> <p>3) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 92 tahun 2007 tanggal 26 februari 2007 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Seberida subur.</p> <p>4) Fotocopy Surat dinas pertanahan nomor : 591/tgt-iv/2007/01 tanggal 3 april 2007 perihal rekomendasi teknis izin lokasi</p> <p>5) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Palma satu lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu tanggal 23 april 2012.</p> <p>6) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Banyu bening utama lokasi desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu tanggal 23 april 2012.</p> <p>7) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Banyu bening utama lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu tanggal 23 april 2012.</p> <p>8) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Seberida subur lokasi desa seberida kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu tanggal 23 april 2012.</p> <p>9) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Kencana amal tani lokasi desa seberida kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu tanggal 23 april 2012.</p> <p>10) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Panca agro lestari lokasi desa danau rambai/penyugan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu tanggal 23 april 2012.</p> <p>11) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Bayu bening utama lokasi desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku tanggal 8 april 2021.</p> <p>12) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Bayu bening utama lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida tanggal 16 april 2004.</p> <p>13) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Seberida subur lokasi desa seberida kecamatan batang gansal tanggal 26 pebruari 2007.</p> <p>14) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Kencana amal tani lokasi desa seberida kecamatan seberida tanggal 13 juni 2008.</p> <p>15) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Panca agro lestari lokasi desa danau rambai/penyugan kecamatan batang gansal tanggal 20 september 2005.</p> <p>16) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Palma satu lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida tanggal 26 februari 2007.</p> <p>17) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu/sekretaris daerah nomor :228/adm.pum/100/2009 tanggal 15 juni 2009 perihal status izin lokasi pt. Palma satu.</p> <p>18) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 200 tahun 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 (nomor diketik)</p>	<p>Disita dari Raja Fachrurazi tanggal 10 Jui 2022</p>

Halaman 171 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 30 juli 2010.</p> <p>19) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 8 juli 2010.</p> <p>20) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 90 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 26 februari 2007.</p> <p>21) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 91 tahun 2007 tentang izin lokasi usaha perkebunan an. Pt. Palma satu pada tanggal 26 februari 2007.</p> <p>22) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor 352/um/x/2009 tanggal 8 oktober 2009 perihal penghentian aktifitas penguasaan dan pengelolaan lahan desa penyaguan.</p> <p>23) Fotocopy Berita acara dengar pendapat komisi a dprd kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu, desa penyaguan dan pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu tanggal 4 mei 2010.</p> <p>24) Fotocopy Laporan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan terkait lahan desa/masyarakat penyaguan seluas 3.000 ha yang mohon di inclave dalam lahan pt. Palma satu pada tanggal 27 mei 2010.</p> <p>25) Fotocopy Kesimpulan rapat koordinasi tindak lanjut hearing dprd kab. Inhu dengan pt. Palma i dan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu pada tanggal 25 uni 2010.</p> <p>26) Fotocopy Surat tugas bupati inhu nomor 180/st/um/ix/2010 untuk melaksanakan tugas pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha, tanggal 3 september 2010.</p> <p>27) Fotocopy Surat bupati inhu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 20 juni 2011 perihal penghentian aktifitas dilahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>28) Fotocopy Surat wakil bupati inhu nomor : 3/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 januari 2013 perihal penjelasan permasalahan pt. Palma satu.</p> <p>29) Fotocopy Surat bupati inhu nomor : 32/adm.pum/100/2010 tanggal 25 pebruari 2010 perihal keberadaan pt. Palma satu di kabupaten indragiri hulu.</p> <p>30) Fotocopy Berita acara hasil pengecekan lapangan terhadap lahan seluas 3.000 ha yang telah di inclave serta telah dilakukan pemasangan patok batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu pada tanggal 28 oktober 2010.</p> <p>31) Fotocopy surat wakil bupati inhu nomor :870/disbun-s/vi/2015/761 tanggal 12 juni 2015 hal teguran kedua.</p> <p>32) Fotocopy Surat wakil bupati inhu nomor :870/disbun-s/vi/2015/597 tanggal 7 mei 2015 hal teguran pertama.</p> <p>33) Fotocopy Surat bupati inhu/ sekda nomor : 179/adm.pum/viii/2010 tanggal 31 agustus 2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha.</p> <p>34) Fotocopy Berita acara pemasangan patok tapal batas perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha pada tanggal 3 september 2010.</p> <p>35) Fotocopy Surat bupati inhu/sekda/asisten administrasi dan kesra nomor 179/adm.pum/viii/2010 tanggal 31 agustus 2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha.</p> <p>36) Fotocopy Surat tugas bupati inhu/sekda/asisten pemerintahan dan kesra nomor : 206/st/adm.pum/100/2010 untuk melaksanakan tugas pengecekan lapangan terkait adanya pencabutan patok tapal batas lahan masyarakat desa penyaguan</p>	
--	--	--



	<p>dengan lahan pt. Palma satu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanggal 28 oktober 2010 di desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>37) Fotocopy Berita acara rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan pt. Palma satu sesuai dengan surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 8 desember 2010.</p> <p>38) Fotocopy Surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 200 tahun 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 3 juli 2010.</p> <p>39) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor 32/adm.pum/100/2010 tanggal 25 februari 2010 perihal keberadaan pt. Palma satu di kabupaten indragiri hulu.</p> <p>40) Fotocopy Surat badan pertanahan nasional republik indonesia kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi riau nomor : 791/9-14/iv/2010 tanggal 29 april 2010 perihal mohon supaya tidak mengesahkan permohonan hak guna usaha yang dimohon pt. Palma satu untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit di desa penyaguan.</p> <p>41) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 90 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu tanggal 26 februari 2007.</p> <p>42) Fotocopy Surat pt. Palma satu pekanbaru nomor : 0168/um/ps-pku/vi/11 tanggal 30 juni 2011 hal tanggapan surat bupati indragiri hulu no : 118/adm.pum/100/vi/2011.</p> <p>43) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 20 juni 2011 perihal penghentian aktifitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>44) Fotocopy Berita acara pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu seluas ± 3.000 ha tanggal 3 september 2010.</p> <p>45) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor : 31/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 januari 2013 perihal penjelasan permasalahan pt. Palma satu.</p> <p>46) Fotocopy Surat komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia nomor : 2.460/k/pmt/xi/2012 tanggal 1 november 2012 perihal permintaan penjelasan permasalahan lahan.</p> <p>47) Fotocopy Daftar hadir rapat koordinasi permasalahan duta palma group (pt. Palma satu) tanggal 25 januari 2013.</p> <p>48) Fotocopy Surat pt. Palma satu pekanbaru nomor : 090/palma 1/pku/iii/2012 tanggal 12 maret 2012 hal permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hpk.</p> <p>49) Fotocopy Surat direktorat jenderal planologi kehutanan direktorat pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan nomor : 5.205/kuh-5/0-011 tanggal 09 maret 2011 hal hasil telaahan status areal.</p> <p>50) Fotocopy Surat kementerian kehutanan direktorat jenderal bina usaha kehutanan direktorat bina rencana pemanfaatan dan usaha kawasan nomor : 8.121/brpuk-1/2012 tanggal 30 maret 2012.</p> <p>51) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik indonesia nomor : s.278/menhut-vii/kuh/2013 tanggal 4 maret 2013 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Palma satu.</p> <p>52) Fotocopy Surat dinas kehutanan provinsi riau nomor : 522.1/planhut/806 tanggal 26 maret 2014 perihal revisi surat pertimbangan teknis rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit an. Pt. Palma satu.</p> <p>53) Fotocopy Surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indragiri hulu nomor : 28/dprd/i/2012</p>	
--	---	--



	<p>tanggal 12 januari 2012 hal konfirmasi ulang data dan peta izin lokasi pt. Palma satu.</p> <p>54) Fotocopy Surat kementerian kehutanan direktorat jenderal planologi kehutanan direktorat pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan nomor : 357/bus-3/2012 tanggal 20-1-2012 hal permohonan konfirmasi peta izin-izin lokasi duta palma group di indragiri hulu.</p> <p>55) Fotocopy Surat badan pertanahan nasional kantor wilayah propinsi riau nomor : 030/18-14/i/2014 tanggal 13 januari 2014 perihal laporan dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan pt. Palma satu dibatas kabupaten indragiri hulu-indragiri hilir, provinsi riau.</p> <p>56) Fotocopy Surat komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia nomor : 1.459/k/pmt/v/2013 tanggal 24 mei 2013 perihal tindaklanjut rekomendasi dprd kab. Indragiri hulu.</p> <p>57) Fotocopy Surat sekretaris daerah kabupaten indragiri hulu nomor : 23/tp/100/2008 tanggal Agustus 2008 perihal panggilan menghadap.</p> <p>58) Fotocopy Surat pt. Palma satu pekanbaru nomor : 364/um-pku/..... Tanggal 11 desember 2009 hal permohonan menghadap.</p> <p>59) Fotocopy Surat asisten pemerintahan dan kesra nomor : 201/adm.pum/100/xii/2009 tanggal 9 desember s009 perihal undangan rapat.</p> <p>60) Fotocopy Surat pt. Palma satu pekanbaru nomor : 357/um-pku/xi/09 tanggal 30 nopember 2009 hal permohonan untuk menghadap.</p> <p>61) Fotocopy Surat tim 7 perjuangan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kab. Indragiri hulu tanggal 08 februari 2010 perihal tuntutan masyarakat.</p> <p>62) Fotocopy Surat pt. Palma satu pekanbaru nomor : 0014/um-pku/ii/2010 tanggal 01 pebruari 2010 hal pembangunan kebun plasma pola kkpa untuk masyarakat desa penyaguan.</p> <p>63) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik indonesia nomor : s.853/menhut-vii/kuh/2012 tanggal 21 nopember 2012 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Panca agro lestari di kab. Indragiri hulu provinsi riau.</p> <p>64) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik indonesia nomor : s.852/menhut-vii/kuh/2012 tanggal 21 nopember 2012 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Seberida subur di kab. Indragiri hulu provinsi riau.</p> <p>65) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik indonesia nomor : s.278/menhut-vii/kuh/2013 tanggal 4 maret 2013 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Palma satu.</p> <p>66) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor : 3/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 januari 2013 perihal penjelasan permasalahan pt. Palma satu.</p> <p>67) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma satu.</p> <p>68) Fotocopy Keputusan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor : 54/hgu/bpn/96 tanggal 29 nopember 1996 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah di kabupaten indragiri hulu, propinsi riau.</p> <p>69) Fotocopy Keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor : 54/hgu/bpn/2003 tanggal 30 september 2003 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah terletak di kabupaten indragiri hulu, propinsi riau.</p> <p>70) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 71 tahun 2004 tanggal 16 april 2004 tentang perubahan atas keputusan bupati indragiri hulu no. 215 tahun 2003 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Banyu bening utama.</p> <p>71) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 215 tahun 2003 tanggal 29 september 2003 tentang izin usaha perkebunan.</p>	
--	---	--



72)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 158 tahun 2011 tanggal 26 april 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit atas nama pt. Banyu bening utama.
73)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 7/180/t.hk/2010 tanggal 05/06/2010 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit atas nama pt. Banyu bening utama.
74)	Copy surat dinas kehutanan kabupaten indragiri hulu nomor : 522.2/pu-xii/2010/1307 tanggal 27 desember 2010 perihal pertimbangan teknis ketersediaan lahan an. Pt. Banyu bening utama.
75)	Telaahan staf nomor : 02/tp/ii/2007 tanggal 15 januari 2007 hal laporan dan pengaduan kelompok tani subur desa kuala mulia atas penyerobotan lahan masyarakat oleh pt. Banyu bening utama.
76)	Berita acara kesepakatan pt. Banyu bening utama dengan masyarakat desa kuala cenaku dan masyarakat desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu tanggal 3 maret 2011.
77)	Surat rekomendasi badan lingkungan hidup kabupaten indagiri hulu nomor : 660/blh-amdal/iii/2010/30 tanggal 5 maret 2010 tentang upaya pengelolaan laingkungan hidup (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan (upl) kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit pt. Banyu bening utama kapasitas 60 ton tbs per jam.
78)	Telaahan staf dinas kehutanan kabupaten indragiri hulu nomor 522/pu-xii/2010/1230 tanggal 8 desember 2010 perihal status areal kebun dan pabrik kelapa sawit pt. Banyu bening utama.
79)	Surat kantor pertanahan kabupaten indragiri hulu nomor : 119/460-iv/2004 tanggal 12 april 2004 perihal status lahan.
80)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 276 tahun 2005 tanggal 20 september 2005 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.
81)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 182 tahun 2010 tanggal 10 juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.
82)	Copy surat pt. Panca agro lestari kantor perwakilan pekanbaru nomor : 002/leg-eks/pal/viii/2013 tanggal 22 agustus 2013 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi pt. Panca agro letari.
83)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 66 tahun 2006 tanggal 23 januari 2006 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Panca agro lestari.
84)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 198 tahun 2010 tanggal 30 juli 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu tanpa nomor tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.
85)	Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor Tanggal 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.
86)	Copy surat dinas pertanahan kabupaten indragiri hulu nomor : 144/il-dp/ix/2005 tanggal 3 september 2005 perihal rekomendasi teknis izin lokasi.
87)	Copy surat sekretaris daerah kabupaten indragiri hulu nomor : 88/adm.pum/100/2011 tanggal 12 mei 2011 perihal penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kec. Batang gansal.
88)	Copy berita acara rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal terhadap pt. Panca agro lestari (pt. Pal) tanggal 10 mei 2011.
89)	Copy berita acara kesepakatan tanggal 06 april 2011.
90)	Copy surat lsm mpr bernas nomor : 54/lsm mpr bernas/iv/2011 tanggal 11 april 2011 hal kelanjutan penyelesaian tuntutan tanah ulayat sekitar 1200 ha yang diserobot pt. Pal di desa danau rambai.
91)	Copy surat kapolda riau nomor : b/52/i/2013/dit intelkam tanggal 07 januari 2013 perihal sengketa



	<p>lahan antara masyarakat desa danau rambai kec. Batang gansal kab. Inhu dengan pt. Panca agro lestari (PT. PAL).</p> <p>92) Copy surat tanda terima pemberitahuan nomor : sttp/11/iv/2011/intelkam.</p> <p>93) Copy surat dinas perkebunan provinsi riau nomor : 050/disbun-pengemb/709 tanggal 8 agustus 2012 perihal pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit a.n. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>94) Copy surat dinas kehutanan provinsi riau nomor : 522.1/planhut/5211 tanggal 30 november 2012 perihal pertimbangan teknis permohonan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit a.n. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>95) Copy dinas kehutanan kabupaten indragiri hulu nomor : 522/sekre/vii/2014/198 tanggal 17 juli 2014 perihal konfirmasi status lahan an. Pt. Panca agro lestari</p> <p>96) Asli peta lampiran nomor : 522/sekre/vii/2014/198 tanggal 17 juli 2014.</p> <p>97) Copy surat badan pelayanan perizinan terpadu prov. Riau nomor : 503/bp2t-ir/ii/2013/52 tanggal 4 feruari 2013 perihal rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit an. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>98) Copy surat badan pelayanan perizinan terpadu prov. Riau nomor : 503/bp2t-ir/ii/2013/50 tanggal 4 feruari 2013 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi dikonversi (hpk) untuk perkebunan kelapa sawit an. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>99) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 148a tahun 2007 tanggal 6 agustus 2007 tentang revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>100) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 276 tahun 2005 tanggal 20 september 2005 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>101) Copy surat undangan nomor : 464/adm.pum/100/2012 tanggal 4 desember 2012 perihal panggilan menghadap.</p> <p>102) Copy surat pernyataan tanggal 6 desember 2012.</p> <p>103) Copy berita acara penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa dana rambai dengan pt. Panca agro lestari (pt. Pal).</p> <p>104) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : Tahun 2014 tanggal 014 tentang revisi izin usaha perkebunan atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>105) Copy berita surat kesepakatan akhir masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu menyangkut rencana kemitraan dengan pt. Panca agro lestari tanggal 17 juni 2013.</p> <p>106) Copy berita acara tanggal 15 april 2014.</p> <p>107) Copy surat pernyataan kesepakatan tanggal 04 mei 2012.</p> <p>108) Copy surat bupati indragiri hulu nomor : 870/disbun-vi/2011/556 tanggal 21 juni 2011 perihal hasil rapat koordinasi penyelesaian konflik lahan.</p> <p>109) Copy surat nomor : 88/adm.pum/100/2011 tanggal 12 mei 2011 perihal penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kec. Batang gansal.</p> <p>110) Copy undangan rapat nomor : 85/adm.pum/005/2011 tanggal 9 mei 2011.</p> <p>111) Copy undangan rapat nomor : 99/adm.pum/005/2011 tanggal 1 juni 2011.</p> <p>112) Copy tindak lanjut rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal terhadap PT. Panca agro lestari (PT. PAL) tanggal 06 juni 2011.</p> <p>113) Copy daftar hadir rapat tindak lanjut rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal terhadap pt. Panca agro lestari (PT. PAL) tanggal 06 juni 2011.</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIII.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0029.1 sebesar Rp408.008.680 (empat ratus delapan juta delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) Tanggal 14 November 2017;2. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0029.1 sebesar Rp391.687.720 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) Tanggal 01 November 2018;3. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-0029.1 sebesar Rp408.926.440 (empat ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) Tanggal 18 September 2019;4. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-0029.1 sebesar Rp327.290.348 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) Tanggal 07 Oktober 2020;5. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-0029.1, sebesar Rp344.883.686 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) Tanggal 29 Juli 2021;6. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.050.367.850,- (satu milyar lima puluh tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Tanggal 10 November 2017;7. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.106.659.760,- (satu milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh rupiah) Tanggal 01 November 2018;8. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.228.283.760,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Tanggal 02 September 2019;9. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.252.405.740,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) Tanggal 17 Juli 2020;10. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0029, sebesar Rp1.250.894.441,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) Tanggal 29 Juli 2021;11. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.293.177.348,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) Tanggal 07 November 2017;	Disita dari Putri Ayu Tanggal 05 Agustus 2022
--------	--	---

Halaman 177 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.293.766.336,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) Tanggal 01 November 2018;
13.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.371.355.936,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) Tanggal 02 September 2019;
14.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.362.715.476,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) Tanggal 17 Juli 2020;
15.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp2.948.281.273,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Tanggal 02 Agustus 2021;
16.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.305.476.630,- (dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) Tanggal 10 November 2017;
17.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.305.471.124,- (dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) Tanggal 01 November 2018;
18.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.541.281.410,- (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) Tanggal 02 September 2019;
19.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.585.927.396,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) Tanggal 17 juli 2020;
20.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.507.683.713,- (dua milyar lima ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) Tanggal 02 Agustus 2021;
21.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1, sebesar Rp1.908.991.840,- (satu milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) Tanggal 10 November 2017;
22.	1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1, sebesar Rp2.102.376.000,- (dua milyar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 178 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>23. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1, sebesar Rp2.202.672.800,- (dua milyar dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Tanggal 23 Oktober 2019;</p> <p>24. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1, sebesar Rp2.438.941.288,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) Tanggal 17 Juli 2020;</p> <p>25. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14,01,050,213,110-0032.1, sebesar Rp2.307.365.994,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) Tanggal 02 Agustus 2021.</p>	
XXIX.	<p>1. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KCP Rengat atas nama PT Palma Satu nomor rekening 1080010574771 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>2. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Palma Satu nomor rekening 1080016127251 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Palma Satu nomor rekening 1080010870401 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Kencana Amal Tani nomor rekening 1080010870617 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>5. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Kencana Amal Tani nomor rekening 1080010870625 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bundel rekening koran transaksi Bank Mandiri KCP Rengat atas nama PT Kencana Amal Tani nomor rekening 1080010567130 periode 01 Januari 2012 s/d 12 Agustus 2021;</p> <p>7. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Atas Nama PT Banyu Bening Utama Nomor Rekening 1080010870682 Periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>8. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Detail Transaksi dan Rekening Koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Atas Nama PT Banyu Bening Utama Nomor Rekening 1080010870666 Periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Detail Transaksi dan Rekening Koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Atas Nama PT Panca Agro Lestari Nomor Rekening 1080011219715 Periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>10. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Palma Satu;</p> <p>11. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Kencana Amal Tani;</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Banyu Bening Utama;</p> <p>13. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Panca Agro Lestari;</p>	<p>Disita dari</p> <p>Gussen Teodrif Siahaan</p> <p>Tanggal 11 Agustus 2022</p>

Halaman 179 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXV.	1. 1 (Satu) Buku Warna Hijau Hitam Bertuliskan Register SK Tahun 2007	Disita dari Yuni Rachmi Tanggal 10 Juni 2022
XXVI.	1. 1 (satu) odner warna merah Pencapaian Produksi tahun 2015 2. 1 (sat) odner warna merah Pencapaian Produksi tahun 2016 3. 1 (satu) odner warna merah Pencapaian Produksi tahun 2017 4. 1 (satu) odner warna Hitam dokumen INHU	Disita dari Robby Dahdan Marganti Tanggal 10 Juni 2022
XXVII.	1. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian Kerjasama antara PT Kuningan Nusa Jaya dan PT Wanamitra Permai dengan PT Nusa Abadi Indo Global (NAI Indonesia) tentang pekerjaan pengelolaan gedung menara palma 2 dan menara palma Nomor : 067/LGL/WMP-KNJ/V/2022 dan Nomor : 275/AGR/NAI/V/2022 tanggal 17 Mei 2022; 2. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian PKWT Nomor : 012/PKWT-III/NAIG/2022 antara PT Nusa Abadi Indo Global dengan Bunnarto Witono tertanggal 1 Agustus 2022; 3. 1 (satu) Lembar Copy Form Kesepakatan Kondisi-FM-HR-22 PT Nusa Abadi Indo Global Nomor : 006/NAI/HRD-KK/IV/2022.	Disita dari Bunnarto Witono Tanggal 12 Agustus 2022
XXVIII.	1. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 927 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Wana Mitra Permai 2. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 899 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Bumi Jawa Sentosa 3. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 1353 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Bumi Jawa Sentosa 4. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 2051 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Kuningan Nusa Jaya 5. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 6659 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Pondok Pinang atas nama PT. Menara Capital Indo Nusa 6. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 224 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kecamatan Senen Kelurahan Paseban atas nama PT. Darmex Pasific 7. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 941 Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Kelurahan Kuta atas nama PT Menara Perdana 8. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 773 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kecamatan Menteng Kelurahan Kebon Sirih atas nama PT. Tugu Tani 9. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 1641 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi 10. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 1663 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi 11. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 2276 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi 12. 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Tim Likuidator PT. Prakarsa Semesta Alam kepada Pemilik Unit Apartemen Essence Darmawangsa perihal Pengumuman Likuidasi dan Hasil Meeting Sosialisasi	Disita dari Rio Prabowo tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 180 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi PT. Prakarsa Semesta Alam		
XXIX.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Copy Berita Acara Serah Terima Unit No. 0294/BAST/SOUTHHILLS-APT/VII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019.1 (satu) bundel Copy Akta Jual Beli dengan No.53/20221 (satu) bundel Copy Formulir Data pemilik1 (satu) bundel Copy KTP a/n ADIL DARMADI1 (satu) bundel Copy Berita Acara Peninjauan Bersama tanggal 18 Mei 20191 (satu) bundel Copy Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Dokumen tanggal 21 Agustus 20191 (satu) bundel Copy Surat Pernyataan Penerimaan House Rules Tanggal 21 Agustus 20191 (satu) bundel Copy Tanda terima Peminjaman Kunci DS untuk perbaikan Defect Unit1 (satu) bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Defect Unit tanggal 21 Agustus 20191 (satu) bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Defect Unit tanggal 22 November 20191 (satu) bundel Copy Checklist Redefect serah terima unit tanggal 13 Juli 20191 (satu) bundel Copy Checklist Defect pra serah terima unit tanggal 21 Juni 2019	Disita dari Djulia tanggal 15 Agustus 2022
XXX.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 124.000.7887.459 periode Agustus 2017 s/d Oktober 2021;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 124.000.5570.610 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 101.001.0150.595 periode Mei 2019 s/d Oktober 2021;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 124.000.5679.957 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 0700005595603 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 124.00.0567993-2 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 1240005677506 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.5678.157 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.00.0538828-6	Disita dari Efrinawati Tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 181 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>periode Januari 2012 s/d Juli 2022;</p> <p>10. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.5679.510 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;</p> <p>11. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.657.4280 periode Oktober 2013 s/d Juli 2022;</p> <p>12. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.691.9873 periode Januari 2015 s/d Januari 2018;</p> <p>13. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 101.00.1071998-5 periode Juli 2020 s/d Juli 2022;</p> <p>14. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Panca Agro Lestari, no. rek. 1240006208905 periode Mei 2012 s/d Juli 2022;</p> <p>15. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Panca Agro Lestari, no. rek. 1240005810859 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;</p> <p>16. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Seberida Subur, no. rek. 124.00.05721.353 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;</p> <p>17. 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Seberida Subur, no. rek. 124.00.05782.967 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;</p> <p>18. 1 (satu) Lembar copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Seberida Subur, no. rek. 124.00.05721.379 (USD) periode Januari 2012 s/d Maret 2020;</p> <p>19. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening dan legalitas perusahaan an. PT. Palma Satu;</p> <p>20. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening dan legalitas perusahaan an. PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>21. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening dan legalitas perusahaan an. PT. Seberida Subur;</p> <p>22. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening & legalitas an PT Banyu Bening Utama;</p> <p>23. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening & legalitas an PT Panca Agro Lestari;</p> <p>24. 1 (satu) Lembar copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 101.001.0150.744 periode Mei 2019 s/d Juli 2022.</p>	
XXXI.	<p>1. 2 (dua) lembar Copy Bukti pembayaran Payment History Apartemen Saouth Hills Kode Unit Z1/15/R;</p> <p>2. 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan atas nama Adil Darmadi;</p> <p>3. 1 (satu) Bundel Copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen South Hills Nomor : 13, Tanggal 12 April 2017;</p> <p>4. 1 (satu) Bundel Copy Kwitansi Pembayaran dari tahun</p>	Disita dari Djulia tanggal 16 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015 s/d tahun 2019;	
	5. 1 (satu) Bundel Copy Rekening Koran Bank BCA KCH Sahid Sudirman Residence JKT dengan Nomor Rekening 5265-32-2929 KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti Tanah Abang;	
XXXII.	1. 1 (Satu) Buah Paspor Republik Indonesia bergambar Garuda Indonesia atas Nama Surya Darmadi Nomor C2148888	Disita dari Surya Darmadi tanggal 15 Agustus 2022
XXXIII.	<p>A. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung XL, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. XL Axiata Tbk, Tgl perjanjian 28 April 20172. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. Hexamatics Info Tech dengan nomor 007/Lease/XLAT/IV/20193. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. Kolaborasi Global Sukses (GO Work) nomor 080/KNJ/LGL/VIII.20204. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. Moradi dengan nomor 008/PSM/KNJ/III/2021. <p>B. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Palma Tower, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Salero Raso dengan nomor ADD No : 044/ADDII/LGL/MCI/III/2022;2. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Bank Mandiri dengan nomor ADD No : 108/ADD/LGL/MCI/XII/20203. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. American Standard, nomor LA No : 035/Lease/Palma Tower/XII/20204. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. American Standard Indonusa, nomor LA No : 036/Lease/Palma Tower/XII/20205. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Cakrawala Bulan Purnama, nomor ADD No : 011/ADDII/MCI/LGL/I/20226. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan The Lobby Café, nomor ADD No : 103/ADDI/Palma Tower/X/20217. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Circleka Indonusa Utama, nomor ADD No : 096/ADDIII/LGL/MCI/IX/20218. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Lixil Trading Indonusa nomor LA No : 037/Lease/Palma Tower/XII/20209. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Robert Bosch, nomor ADD No : 122/ADD/Palma Tower/XI/201710. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Agro Boga Utama, nomor LA No : 001/Lease/Palma Tower/XII/201711. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Asian Paints Color Indonusa, nomor LA No : 016/Lease/Palma Tower/IV/202212. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Asian Paints Indonusa, nomor LA No : 014/Lease/Palma Tower/IV/202213. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Shinsung Tongsang	Disita dari Hilda tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 183 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Indonusa, nomor LA No : 024/Lease/Palma Tower/IX/2021</p> <p>14. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Sew-Eurodrive Pte Ltd, nomor LA No : 001/Lease/Palma Tower/I/2020</p> <p>15. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Miki Indonusa, , nomor ADD No : 063/ADDII/LGL/MCI/VII/2022</p> <p>16. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Linfox Logistics Indonusa, nomor LA No : 010/Lease/Palma Tower/XII/2019</p> <p>17. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan AVL SEA & Australia Co., Ltd, nomor ADD No : 097/ADDIII/LGL/MCI/XI/2021</p> <p>18. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Hertanto, Grace, Karunawan, nomor ADD No : 070/ADD I/LGL/MCI/VIII/2021</p> <p>19. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Eight Teknologi Inovasi, nomor ADD No : 071/ADD I/LGL/MCI/VIII/2021</p> <p>20. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Scroll Corporation, nomor ADD No : 120/ADD/LGL/XI/2021</p> <p>21. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. S.O.T. Indo Sourcing, nomor ADD No : 069/ADDII/LGL/MCI/VIII/2021</p> <p>22. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Petrojaya Boral Plasterboard, nomor ADD No : 006/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>23. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Petrojaya Boral Plasterboard (Storage), nomor ADD No : 007/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>24. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wirata Daya Bangun Persada, nomor ADD No : 022/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>25. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Ledo Lestari, nomor ADD No : 019/ADDII/LGL/MCI/II/2021</p> <p>26. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wana Hijau Semesta, nomor ADD No : 020/ADDII/LGL/MCI/II/2021</p> <p>27. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Ceria Prima, nomor ADD No : 018/ADDII/LGL/MCI/II/2021</p> <p>28. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wana Jingga Timur, nomor ADD No : 021/ADDII/LGL/MCI/II/2021</p> <p>29. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wana Jingga Timur, nomor ADD No : 027/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>30. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Eluan Mahkota, nomor ADD No : 023/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>31. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Kencana Amal Tani, nomor ADD No : 025/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>32. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Johan Sentosa, nomor ADD No : 024/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>33. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Duta Palma Nusantara, nomor ADD No : 030/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>34. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Cerenti Subur, nomor ADD No : 026/ADD/LGL/MCI/II/2021.</p> <p>C. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Menara Palma, antara lain:</p> <p>1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT.</p>	
--	--	--

Halaman 184 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Wanamitra Permai dengan PT Fajar Mitra Indah, No.110/PSM/WMP/X/2021</p> <p>2. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT. Harmoni Panca Utama, No. 098/LGL-WMP/ADD-PSM/IX/2020</p> <p>3. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Kusnadi (Kantin), No. 104/LGL-WMP/PSM-ADD/IX/2021</p> <p>4. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Fajar Mitra Indah (Storage Room), No. 111/PSM/WMP/X/2021</p> <p>5. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT. Darta Media Indonesia, No. 031/LGL-WMP/ADD-PSM/III/2019 dan No. 136/PSM/WMP/X/2020</p> <p>6. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Bank Central Asia, 018/LGL-WMP/PSM-ADDII/III/2019</p> <p>7. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Griya Trada, No. 001/PSM/WMP/I/2018</p> <p>8. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Bank Mandiri, No. 016/ADDII/LGL/WMP/I/2021.</p> <p>9. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Prodia OHC, No. 016/ADDII/LGL/WMP/I/2021</p> <p>10. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan High On Cafeine, No. 094/LGL-WMP/PSM-ADDII/VI/2021</p> <p>11. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Pratama Mitra Abadi, No. 132/LGL-WMP/ADD/XI/2020</p> <p>12. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Transforma, No. 047/ADD/WMP/LGL/IV/2022</p> <p>13. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Aksa Power Indonesia, No. 168/PSM/WMP/XII/2018</p> <p>14. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Eglobal Teknologi Solusindo, No. 047/LGL-WMP/ADD-PSM/III/2020</p> <p>15. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No. 089/PSM/WMP/XI/2016</p> <p>16. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No. 161/PSM/WMP/XII/2017</p> <p>17. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No. 013/PSM/WMP/II/2020</p> <p>18. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan KPPA Mando Corporation, No. 137/ADD/LGL/XI/2020</p> <p>19. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Produk Keuangan Digital, No. 027/PSM/WMP/IV/2022</p> <p>20. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Global Alliance For Improved Nutrition, No. 124/ADDII/WMP-LGL/XII/2021</p> <p>21. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan KMDICA, No. 116/LGL-WMP/ADD/XII/2021</p> <p>22. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, No. 073/PSM/WMP/V/2020</p> <p>23. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Singapore ALE Pte Ltd, No. 040/ADDII/LGL/WMP/IV/V/2022</p> <p>24. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Kawajun Indonesia, No. 032/LGL-WMP/ADD-PSM/IV/2020</p> <p>25. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Perkasa Teknologi Indolube, No. 008/PS/WMP/I/2020</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>26. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Thermax International Indonesia, No. 113/ADDII/WMP-LGL/XI/2021</p> <p>27. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Thermax Limited, No. 113/PSM/WMP/XII/2019</p> <p>28. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Colgate Palmolive Indonesia, no. 23/ADDII/WMP/LGL/III/2022</p> <p>29. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan KAP Heliantono & Rekan, no. 105/PSM/WMP/IX/2020</p> <p>30. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan FA Leks and Co, no. 074/ADDII/LGL/WMP/VIII/2021</p> <p>31. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Hasta Panca Mandiri Utama, No. 067/LGL-WMP/ADD-PSM/V/2020</p> <p>32. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, No. 068/LGL-WMP/ADD-PSM/IV/2020</p> <p>33. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Regus Business Center Indonesia, No. 030/PSM/WMP/II/2018</p> <p>34. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Infinite World Esports, No. 054/PSM/WMP/VI/2022</p> <p>35. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Adipratama Sukses Mandiri, No. 008/ADDII/LGL/WMP/II/2021</p> <p>36. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia, No. 101/LGL-WMP/PSM-ADDII/IX/2020</p> <p>37. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia, No. 099/LGL-WMP/PSM-ADDIII/IX/2020</p> <p>38. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia, No. 100/LGL-WMP/PSM-ADDIII/IX/2020</p> <p>39. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Darmawan dan Partners, No. 002/PSM/WMP/II/2022</p> <p>40. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Mohgategch Indonesia, No. 041/ADDII/LGL/WMP/III/2021</p> <p>41. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Dinamika Nuansa Absolute, No. 030/PSM/WMP/II/2021</p> <p>42. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No. 212/PSM/WMP/XII/2015</p> <p>43. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Darma Legal, No. 039/LGL-WMP/ADD/IV/2021</p> <p>44. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Jose Pratama Group, No. 047/PSM/WMP/VI/2022</p> <p>45. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Alton Yogantara Perkasa, No. 022/PSM/WMP/III/2022</p> <p>46. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Photon Labs Indonesia, No. 017/ADDII/LGL/WMP/II/2021</p> <p>47. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Photon Interactive Indonesia, No. 110/ADDIII/WMP-LGL/X/2021</p> <p>48. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Indo Asiana Lestari, No. 037/PSM/WMP/V/2022</p> <p>49. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Waruwu and Partners, No. 034/ADD/LGL/WMP/IV/2022</p>	
--	--	--

Halaman 186 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>50. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Alexa Monica Cipta, No. 006/PSM/WMP/II/2022.</p> <p>D. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Palma One, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB PRECIOUS, No. 157/ADDII/LGL/BJS/XII/20202. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. DACHSER INDONESIA, No. 126/ADDIII/BJS-LGL/XI/20213. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. JETEC INDONESIA, No. 049/PSM/BJS-BM/II/20224. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PD. SANDJAJA, No. 146/BJS/LGL/XII/20205. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB, No. 071/BJS/LGL/VII/20206. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB PRECIOUS, No. 156/ADDII/LGL/BJS/XII/20207. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan KOPI KREN, No. 041/PSM/BJS-BM/VI/20218. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. DACHSER INDONESIA, No. 051/ADDII/LGL/BJS/VI/20229. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. KENORA RESOURCES INTERNATIONAL, No. 082/PSM/BJS-BM/IX/201910. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. INFOTECH SOLUTIONS, No. 013/BJS/LGL/II/202211. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ONINDO SEKURITA PRATAMA, No. 031/PSM/BJS-BM/II/202012. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. INFOTECH SOLUTIONS, No. 014/ADDII/BJS/LGL/II/202213. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. HITECH SMART SOLUTION, No. 045/PSM/BJS-BM/XII/202114. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan BUT CHIMNEYS REFRACTORIES, No. 101/ADD.PSM/BJS-LGL/III/202115. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan ELC ELECTROCONSULT, No. 047/ADDII/LGL/BJS/I/202116. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan BUT CHIMNEYS REFRACTORIES, No. 102/ADD.PSM/BJS-LGL/III/202117. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CENTRA SARANA ARG, No. 037/PSM/BJS-BM/X/202018. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CENTRA SARANA ARG, No. 047/PSM/BJS-BM/II/202219. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan ELC ELECTROCONSULT, No. 048/ADDII/LGL/BJS/II/202120. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PD. SANDJAJA, No. 146/BJS/LGL/XII/202021. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. DIGITAL CHINA INFORMATION, No. 084/PSM/BJS-BM/IX/201922. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan SSB & R LAW FIRM, No. 175/BJS/LGL/XI/201923. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. MULIA INVESTASI, No.	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>071/ADD/LGL/BJS/XII/2021</p> <p>24. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. FLEMINGS INDONESIA, No. 015/BJS/LGL/ADDII/II/2021</p> <p>25. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. PILAR SUKSES RAHARJA, No. 160/BJS/LGL/VIII/2020</p> <p>26. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan ND PARTNERSHIP, No. 040/PSM/BJS-BM/IV/2021</p> <p>27. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan CV. WISEKA DUTA CONSULTING, No. 048/PSM/BJS-BM/II/2022</p> <p>28. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ABISHAR TECHNOLOGIES, No. 119/BJS/LGL/XI/2020</p> <p>29. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. SATGURU INDONESIA, No. 046/PSM/BJS-BM/II/2022</p> <p>30. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. NETWEB TEKNOLOGI INDONESIA, No. 082/ADD/LGL/BJS/VIII/2021</p> <p>31. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. VIVENTIS SEARCH ASIA, No. 094/BJS/LGL/VII/2019</p> <p>32. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. PRIME PROPERTY MANAGEMENT, No. 051/PSM/BJS-BM/III/2022</p> <p>33. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. PETRO IT SOLUTIONS ASIA, No. 076/ADDI/LGL/BJS/V/2021</p> <p>34. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB, No. 072/BJS/LGL/VIII/2020</p> <p>35. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan RAHAYU & PARTNERS, No. 020/PSM/BJS-BM/II/2020</p> <p>36. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CLOZETTE INTERAKTIF INDONESIA, No. 038/PSM/BJS-BM/VII/2021</p> <p>37. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CLOZETTE INTERAKTIF INDONESIA, No. 038/PSM/BJS-BM/VII/2021</p> <p>38. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ANDROMEDA MULTI TEKNOTAMA, No. 125/BJS/LGL/XI/2021</p> <p>39. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. INDO PRIMA KREASITAMA, No. 128/ADDII/LGL/BJS/X/2021</p> <p>40. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CYGNET PERICON, No. 149/ADDII/LGL/BJS/X/2020</p> <p>41. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ENERGI INDOTEC CONSULTANCY, No. 120/ADDIII/BJS/LGL/XII/2021</p> <p>42. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ERGON OIL INDONESIA, No. 119/ADDII/BJS/LGL/XII/2021</p>	
XXXIV.	<p>1. 1 (satu) bundel surat kronologi DHL Air waybill No.1242963385, 3067764840 dan 9662751722 Jakarta-Singapore ditandatangani oleh Ahmad Irfan Ashari.</p> <p>2. 1 (satu) bundel printout shipment information for 1242963385 dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express) yang distempel oleh PT. Birotika Semesta.</p> <p>3. 1 (sat) bundel printout shipment information for 3067764840 dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express) yang distempel oleh PT. Birotika Semesta.</p> <p>4. 1 (satu) bundel printout shipment information for 9662751722 dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express) yang distempel oleh PT. Birotika Semesta.</p>	Disita dari Putra Otvenanjer Samosir Tanggal 21 Agustus 2022
XXXV.	<p>1. 1 (satu) bindex Kontrak Perjanjian Tahun 2017 dan Tahun 2018 PT. Banyu Bening Utama:</p>	Disita dari Yudi

Halaman 188 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bindex Lampiran Voucher BAPP Replanting Tahap 1 Tahun 2020 PT. Banyu Bening Utama;1 (satu) bindex SKU Tahun 2021 PT. Banyu Bening Utama;1 (satu) bindex kecil BMOD/I Tahun 2018 PT. Banyu Bening Utama;1 (satu) bindex kecil BTCO September s.d. Oktober 2021 PT. Banyu Bening Utama;1 (satu) bindex kecil KPPO/I dan KPPO/1 Oktober s.d. Desember 2021 PT. Banyu Bening Utama;1 (satu) Surat Jasa Pendampingan dalam rangka Initial Public Offering (IPO) Darmex Plantation untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir tanggal 31 Mart 2021;1 (satu) Laporan Keuangan Entitas Induk PT. Darmex Plantations (Perusahaan Di Tahap Pengembangan) 31 Desember, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018;1 (satu) Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen PT. Darmex Plantati1 (satu) Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 PT. Darmex Plantations dan Entitas Anak.	Prasetyo Wibowo Tanggal 15 Juni 2022
XXXVI.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy PT Duta Palma Nusantara Job Description beserta lampirannya;5 (lima) lembar Internal Memorandum Nomor: 007/RIAU/IM-NP/II/2019, Tanggal 19 Februari 2019, tentang Perubahan Susunan Pengurus PT-PT Kebun Wilayah Riau-Pekanbaru;1 (satu) bundel copy Laporan Pemeriksaan Lapang Penyusunan Aspek Tata Guna Tanah PT Banyu Bening utama Sesuai dengan permendagri No. 6 Tahun 1986 Nomor: 32/PB-HGU/XII/2004, Tanggal 11 Desember 2004, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau;1 (satu) bundel copy Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Banyu Bening Utama, Atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau, Tanggal 20 November 2007;1 (satu) bundel copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01 Kec. Sebrida, Kel. Paya-Rumbai, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu a.n. PT Banyu Bening Utama seluas 6.417,9 Ha;1 (satu) bundel copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Riau Nomor: 07/RSL/HGU/2006;(dua) Eksemplar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas 194 Ha yang terletak di Ds/Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau antara Sdri. CHERYL DARMADI dan Sdr. FADLAN ARISANDY yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) lembar;2 (dua) Eksemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : PPJB/CD-P1/194/18 Antara Sdr. CHERYL DARMADI dengan PT PALMA SATU yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) lembar;3 (tiga) lembar Draft INTERNAL MEMORANDUM dari LEGAL Departement PT HARAPANJAYA BUMIPERTIWI kepada Bapak SURYA DARMADI No. 126/HBP/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 perihal DRAFT PPJB dan Surat Komitmen dalm Rencana Pembelian 2 (dua) bidang Tanah a.n. PT Gatsu Persada dan a.n. PT Mulia Mitradaya Perkasa;1 (satu) lembar INTERNAL MEMO dari LEGAL DEPARTEMENT kepada Bapak Surya Darmadi Nomor 143/Leg-Eks/DOF/X/2018 perihal Pelaksana Putusan Pengadilan Tanggal 30 Oktober 2018;1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dept AGRONOMI kepada Bpk. DIREKSI No. /Agro/AO/X/18 Tanggal 6 Oktober 2018 tentang PENGAJUAN BANGUNAN TPS LIMBAH B3 beserta 8 (delapan) lembar lampirannya;1 (satu) lembar INTERNAL MEMO dari Legal Departement kepada Bapak SURYA DARMADI No. 143/Leg-Eks/DOF/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018	Disita dari KPK tanggal 25 Agustus 2022

Halaman 189 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung jo. Pengadilan Hubungan Industrial beserta 1 (satu) lembar catatan kertas berwarna kuning;</p> <p>13. 6 (enam) lembar INTERNAL MEMORANDUM Nomor 016/DAG/IM/VIII/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 dari Legal Departemen DARMEX AGRO GROUP kepada Bapak SURYA DARMADI tentang Ratifikasi atau Perubahan Pengurus Perseroan yang sudah berakhir dan yang akan berakhir masa jabatan di Tahun 2018;</p> <p>14. 9 (sembilan) lembar Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham Nomor : 57, Tanggal 21 April 2015 dari Notaris LINDA HERAWATI;</p> <p>15. Foto Copy 3 (tiga) lembar Asset SURYA DARMADI;</p> <p>16. Foto Copy 1 (satu) lembar Flow Hutang Piutang antar Group;</p> <p>17. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada SURYA DARMADI 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131411269353 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>18. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada SURYA DARMADI nomor rekening 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131412269979 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>19. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada SURYA DARMADI nomor rekening 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131413270680 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>20. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 46.972.000.000,- (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada SURYA DARMADI nomor rekening 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131414271202 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>21. Foto Copy 2 (dua) eksemplar Perjanjian Pengalihan Asset PT DARMEX AGRO ke PT DARMEX PLANTATIONS tanggal 15 September 2016, masing-masing 2 (dua) lembar;</p> <p>22. Foto Copy 1 (satu) lembar Flow Hutang Piutang antar group;</p> <p>23. Foto Copy 1 (satu) lembar Flow Dana Palma Lestari;</p> <p>24. Foto Copy 1 (satu) lembar yang berisi catatan modal beberapa perusahaan;</p> <p>25. 1 (satu) lembar print out dokumen Struktur Organisasi Dept. Legal RO Pekanbaru;</p> <p>26. 1 (satu) lembar print out dokumen Struktur Organisasi Dept. HR & GA RO Pekanbaru;</p> <p>27. 1 (satu) bundel printout dokumen list harta Surya Darmadi beserta lampiran;</p> <p>28. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Keuangan PT Bayas Biofuels tanggal 31 Agustus 2017, 31 Juli 2017, dan 31 Desember 2016</p> <p>29. 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map transparan warna kuning berisi Voucher pengeluaran PT DARMEX AGRO;</p> <p>30. 1 (satu) buah buku dengan cover funny day dengan judul PT CERIA PRIMA (USD) a/c:0700005210526 BMDO/BMDI per Januari 2014;</p> <p>31. 1 (satu) buah buku dengan cover Mongky dengan judul PT WIRATA DAYA BANGUN PERSADA (USD) a/c:070.000.5210.468 BMDO/BMDI per Januari 2014;</p> <p>32. 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna merah dengan judul DARMEX AGRO (FOREX);</p> <p>33. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Kuasa terkait PT DARMEX BIOFUELS;</p> <p>34. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul PT DUTAPALMA NUSANTARA Laporan Posisi keuangan (neraca) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 beserta lampiran.</p> <p>35. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul PT</p>	
--	--	--



	<p>DARMEX AGRO dan Subsidiaries EBITDA-MTM YTD Mei 2014 beserta lampiran.</p> <p>36. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan judul PT DARMEX AGRO Flow dana uang muka setoran modal USD40Juta terima tanggal 10 Maret 2014 dan USD40Juta terima tanggal 19 Maret 2014;</p> <p>37. 1 (satu) lembar copy dokumen posisi keuangan Perusahaan PT BANYI BENING UTAMA, PT PALMA SATU, PT SEBERIDA SUBUR, PT PANCA AGRO LESTARI, PT DELIMUDA PERKASA, dan PT MEKARSARI ALAM LESTARI per 31 Desember 2013</p> <p>38. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul daftar perusahaan yang menggunakan kawasan hutan secara tidak prosedural di 12 Provinsi.</p> <p>39. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT ASET LESTARI;</p> <p>40. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 HOLDING PT DARMEX AGRO;</p> <p>41. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT DOF;</p> <p>42. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT JASUM PLANTATION;</p> <p>43. 1 (satu) lembar copy Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia periode ke 1 tahun 2016;</p> <p>44. 1 (satu) lembar Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan Periode ke 4 tahun 2016;</p> <p>45. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT Tahunan SURYA DARMADI;</p> <p>46. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SSP PPh Ps. 25 SURYA DARMADI;</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT Tahunan Ibu Cheryl, P'Adil + Ibu Sutanti;</p> <p>48. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT OP BP SURYA DARMADI;</p> <p>49. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan Bukti Potong PPh 23 SURYA DARMADI;</p> <p>50. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map berwarna biru bertulisan Subject: File Pajak, Date: Pemeriksaan PPh Pribadi thn 2005 Bapak Surya Darmadi;</p> <p>51. 1 (satu) bundel dokumen dengan lembar paling depan berjudul Tanda Terima SPT Tahunan Nomor : 018-02-00011971;</p> <p>52. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Pemaduserasian TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau, Laporan Akhir, Kementerian Kehutanan, Juli 2012.</p> <p>53. 1 (satu) lembar Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/BAPPEDA/15.03 , Perihal : Usulan Tambahan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau tertanggal 07 Pebruari 2012, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal Selaku Gubernur Riau;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/BAPPEDA/76.03 , Perihal : Usulan Revisi RTRW Provinsi Riau 2010-2029 tertanggal 09 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal.</p> <p>55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/Bappeda/56.10 , Perihal : Permohonan Pembahasan RTRW Prov. Riau 2007-2026 tertanggal 27 April 2009, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal selaku Gubernur Riau.</p> <p>56. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/BAPPEDA/65.27.a , Perihal: Usulan Tambahan Perubahan Kawasan Hutan Pada RTRW Provinsi Riau tertanggal 30 November 2009, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal selaku Gubernur Riau;</p> <p>57. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : nomor: 050/BAPPEDA/58.13, Perihal: Mohon Pertimbangan perubahan luas kawasan bukan hutan di provinsi riau dalam keputusan penunjukan kawasan hutan sesuai hasil rekomendasi tim terpadu tertanggal 12 Agustus 2014 ;</p> <p>58. 1 (satu) lembar print out Peta Revisi Perubahan SK No.</p>	
--	--	--



	673/Menhut-II/2014 yang bukan Rekomendasi Tim Terpadu dengan Kab. Indragiri Hulu. 59. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna surat Palma Satu Nomor : Legal DPN-PKU/VIII/-42/2014 , perihal Permohonan, Kepada Bapak Gubernur Riau, tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Suheri Tirta 60. 1 (satu) lembar print out Peta Indikasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam SK 673 yang tidak sesuai Rekomendasi Tim Terpadu 61. Foto Copy 1 (satu) dokumen Lembar Disposisi tanggal 3 September 2014 atas Surat No. 522.73/Bappeda/500 perihal Usulan Revisi Terhadap Keputusan Menhut RI No. SK.673/Menhut-II/14 62. Foto Copy 1 (satu) dokumen Surat Nomor: 522/DISHUT/268 tanggal 05 September 2014 perihal Usulan Tambahan Pelepasan Kawasan Hutan Pada Revisi RTRW Provinsi Riau beserta lampiran. 63. Foto Copy 1 (satu) dokumen Peta Lampiran Usulan Tambahan Pelepasan Kawasan Hutan Pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. 64. 1 (satu) bundel printout dokumen dalam map transparan wana abu-abu berisi dokumen Akun perbankan personal Surya Darmadi beserta lampiran. 65. 1 (satu) bundel dokumen Akta-Akta Notaris pendirian Perusahaan PT DARMEX AGRO, PT KUNINGAN NUSAJAYA, beserta lampiran dan dokumen pendukung; 66. 1 (satu) bundel copy dokumen Group FX Position per 27 October 2016 67. 1 (satu) Bundel Administrasi Pembukaan Rekening PT Bayas Biofuels pada PT Bank Central Asia; 68. 1 (satu) Bundel Administrasi Pembukaan Rekening PT Mekarsari Alam Lestari pada PT Bank Central Asia.	
XXXVII.	46 (empat puluh enam) bal kardus Gudang Garam Internasional berisikan dokumen transaksi keuangan Perusahaan: 1. PT. Palma Satu; 2. PT. Panca Agro Lestari; 3. PT. Seberia Subur; 4. PT. Banyu Bening Utama; 5. PT. Kencana Amal Tani; 6. PT. Duta Palma Group	Disita dari Ni Komang Devi Arisandi Tanggal 09 Juni 2022
Agar barang bukti foto copy dokumen dari nomor I sampai dengan XXXVII seluruhnya terlampir dalam berkas perkara		

B. BARANG BUKTI TANAH/KEBUN SAWIT:		
I.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Palma Satu;	Disita dari Novendra Tanggal 22 Juni 2022
I.	1 (sat) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Palma Satu;	Disita dari Novendra Tanggal 22 Juni 2022
II.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari	Disita dari Dwi Kurniawan Tanggal 22 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari;	Disita dari Dwi Kurniawan Tanggal 22 Juni 2022
IV.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama;	Disita dari Candro Aritonang Tanggal 22 Juni 2022
V.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama	BA Penolakan Berita Acara Penyitaan dari Rices Heritanto Tanggal 22 Juni 2022
VI.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Seberida Subur;	Disita dari Jumarihot Tanggal 22 Juni 2022
VII.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Kencana Amal Tani;	BA Penolakan Berita Acara Penyitaan dari Ranggi Christian Pelawi Tanggal 22 Juni 2022
Agar barang bukti tanah/kebun sawit dari angka I sampai dengan VIII tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.		

C. BARANG BUKTI ELEKTRONIK:

I.	1. 1 (Satu) buah Harddisk Eksternal Merk Toshiba 1 T, Berisi data PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani Disita Tanggal 15 Juli 2022	Disita dari Ricky Amirudin tanggal 17 Juni 2022
II.	1. 1 (satu) unit CPU warna hitam merek Lenovo ThinkCenter E73, Machine Type 10 AS, Model Number 005HIA, Product ID 10AS005HIA. (terkait data tanaman, rencana kerja dan realisasi kerja) 2. 1 (satu) unit CPU warna Hitam merek Lenovo ThinkCenter Edge72 Machine Type 3484, Model Number NMA, Product ID 3484NMA. (terkait rekap hasil produksi)	Disita dari Novendra Tanggal 09 juni 2022
III.	1. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 7 warna Hitam degan SN- F71T30ZAH67P berserta simcard. 2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A10 TTG dengan SM- A105G/DS dengan Imei 1 : 357080103857034 dan Imei 2 : 357081103857032 beserta simcard	Disita dari Tovariga Triagita Ginting tanggal 09 Juni 2022
IV.	1. 1 (satu) buah Hardisk merek WD My Passport warna Hitam 1 TB dengan SN-WXQ2E31FZDJN berisi File	Disita dari Roby

Halaman 193 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. File Rar Dump Server dengan nilai dengan nilai Hash MD5 : c5adac3cce45e14450d8b0e39d6fa5ea. SHA1 : 35e44b61de33e427927abf4f8699f56519f2875.2. File Rar dari Komputer Lisensi 1 dengan nilai Hash MD5 : 3205a4fa595e364c202ebb938d5ffc41 SHA1 : 3c9d2f89fd5f07986/809ade92a6d47e4817c9f.3. File Rar dari Komputer Lisensi 2 dengan nilai Hash MD5 : 763e0fb8a1a996bf6fada05a4af70141 SHA1 : e75811de9e1e516322046d18337ef385b5d8d5a7.4. File Rar dari Komputer Lisensi 3 dengan nilai Hash MD5 : 43229a3a0e40cae115059783696e3ac SHA1 : d6aefcf1dOd6be01dcOc1a5fb0d7e4b3c3a55bbb.5. File Rar dari Komputer Lisensi 4 dengan nilai Hash MD5 : 483c4203cd65a4c846365a381ad0e6bd SHA1 : 6845d4C446c55e2f9563fba9a6262d2844d3443b.6. File Rar dari Komputer Lisensi 5 dengan nilai Hash MD5 : ad2447ef05ab5a752376b73b2d4d0b58 SHA1 : 648169e77f7c8184ebda2a3a3db47b8a2ec0a0a1.7. File Rar dari Komputer Lisensi 6 dengan nilai Hash MD5 : dc1484883c5c94b5c9b886af9bf9c895 SHA1 : fba22537980e511e03803155774fa3c1361ac7ca8. File Rar data Produksi A dengan nilai Hash MD5 : dc8d19651a2e9ac8e31fbf2f876a046e SHA1 : 65a96589dac3f6c4abb95752c9169809a704c0299. File Rar data Produksi B dengan nilai Hash MD5 : 79537d1636abf6434a27b74e9bb43fec SHA1 : 4c821671139568d0590176a8bf8ee263a1f274910. File Rar data Produksi C dengan nilai Hash MD5 : 1be5687a8f160eda9c41c8a52299684 SHA1 : 56764994a2159e54257aad6943be4620c99d99a	<p>Dahdan Marganti Tanggal 10 Juni 2022</p>
V.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Warna Ungu Nama Model Galaxy A72, Nomor Model : SM-A725F/DS, Nomor Serial : RR8R503VAWA, IMEI (Slot1) 357843235446004, IMEI (Slot2) 353546295446004	<p>Disita dari David Fernando Simanjuntak Tanggal 04 Agustus 2022</p>
VI.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (Satu) Unit handphone Iphone 7+ model MN-512PA/A Nomor Imei : 355346083483402 dengan sim card 08569228121456;	<p>Disita dari Karenina Gunawan Tanggal 20 Juni 2022</p>
VII.	<ol style="list-style-type: none">1. 1(Satu) buah Flashdisk capacity 32 GB warna Merah hitam dengan model SDC Z50-032G dari AHLAN Selaku karyawan bagian administrasi tanaman pada PT. Panca Agro Lestari yang Berisi:<ol style="list-style-type: none">1. Data Historis Produksi Periode 2017 – 20212. Peta Areal Statement	<p>Disita dari Dwi Kurniawan Tanggal 09 Juni 2022</p>
VIII.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) unit Handphone Model MNQM2ZP/A, Serial Number C39T86H7HG04 dengan IMEI: 35 534608 211693 8 dengan Password : 030452;2. 1 (satu) buah kart SIM (seluler) dengan nomor (019) 0988485122;	<p>Disita dari Surya Darmadi Tanggal 15 Agustus 2022</p>

Halaman 194 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar barang bukti elektronik dari angka I sampai dengan VIII tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita

II. Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa Surya Darmadi Yang Disita Dalam Perkara An.Terdakwa Surya Darmadi.

NO.	BARANG BUKTI	KET
1	2	3
A. Barang Bukti Aset Tanah/Bangunan:		
I.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4413 dengan luas 2209 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4291 dengan luas 800 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3740 dengan luas 912 M2 yang terletak Jl. Simprug Garden Blok G No. 20 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor HGB 6659 dengan luas 5.000 M2 yang terletak Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor II Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927 dengan luas 4.720 M2 yang terletak Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 Kav 6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 899 dengan luas 4.340 M2 yang terletak Jl. HR Rasuna Said Rt 08/04 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6846 dengan luas 4.445 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 Seb Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7411 dengan luas 535 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PA Kav 29 Seb Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
II.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09396 dengan luas 2.723 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PE Kav. No.7 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09397 dengan luas 2.358 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PE Kav. No.7 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor : 644/XXI/SANDALWOOD dengan luas 270 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian The Pakubuwono Residence Jl. Pakubuwono VI/Jl. Ophir Rt 005 Rw 01 Lt.23 No.	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi

Halaman 195 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>4. S.23A Blok Sandalwood Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;</p> <p>1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor : 40/XI/LACEWOOD dengan luas 180 M2 yang terletak di Rumah Susun Hunian Apartemen The Pakubuwono View, Jl. Tengku Nyak Arief/Jl. Kramat No.12 Rt 009 Rw 01 Lantai 12 No.LW 12B Blok Lacewood Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 7916 dengan luas 124 M2 yang terletak di Jl. Denpasar Raya Rt 016 Rw 04 Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen South Hills Lantai 15 No. 15-R Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641 dengan luas 5.726 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 28 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Nomor 02276 dengan luas 2.846 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;</p>	
III.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 224 dengan luas 2.180 M2 yang terletak di Jl. Salemba Raya No 5 dan 5A Rt 014 Rw 03 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1663 dengan luas 9.271 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 29-30 Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan.</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
IV.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 773 dengan luas 16.250 M2 yang terletak di Jl. Arief Rachman Hakim No.3 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051 dengan las 4.470 M2 yang terletak di Jalan Rangkayo Rasuna Said Blok X.5 No. 12 dan X.5 No.11 seb. Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
V.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah beserta yang terdapat diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7493 dengan luas 3.554 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 dengan luas 9.640 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 dengan luas 9.635 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10944 dengan luas 9.710 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
VI.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 56 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 1.386,08 Ha yang terletak Desa</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi

Halaman 196 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 116 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.106,54 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 115 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.930,21 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 58 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 3.405,84 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sebunga, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 57 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 5.602 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 171 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 169,19 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 170 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 205,81 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p>	
VII.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 An. PT. Delimuda Perkasa dengan luas tanah 697.196 M² (meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 8 An. PT. Tunjuk Langit Sejahtera dengan luas tanah 1.002 Ha. yang terletak Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi.</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
VIII.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1093 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 1.998 M² (meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
IX.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 7.023,57 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 4.093,11 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo dan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 8.029,803 Ha. yang terletak Desa Mayak dan Kalon, Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 14.335,848 Ha. yang terletak Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;	
X.	1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 828 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 152 M ² (meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta; 2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 829 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 143 M ² (meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta; 3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 849 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 155 M ² (meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
XI.	1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 941 An. PT. Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 M ² yang terletak Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Hotel Holiday Inn Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali; 2. 1 (satu) bidang tanah beserta yang apa yang terdaat di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1147 dengan luas 2.000 M ² terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
Barang Bukti Asset Tanah Dari Angka I Sampai Dengan XI Dirampas Untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.		

B. Barang Bukti Kapal :		
XII.	1. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara. 2. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	Kapal Palembang
XIII.	1. Royal Palma – IV, Barge, PT. Delimuda Nusantara, Dumai, 2000 PPj No.1213/L, 1596, 1317 2. Royal Palma 21, Tug Boat, PT. Delimuda Nusantara, Batam, 2012 PPM No.2575/L, 153, 46	Kapal Tanjung Pinang
Barang bukti kapal dari angka XII sampai dengan XIII dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.		

C. Barang Bukti Helikopter :		
XIV.	1. 1 (satu) unit Helikopter Bell 427 dengan nomor seri 58001 dengan nomor pendaftaran PK-DPN pemilik PT Dabi Air Nusantara."	Disita Dari Surya darmadi

Barang Bukti Helikopter Angka XIV dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai



pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.

D. Barang Bukti Dokumen Kapal:		
XV.	<p>a) Kapal TB. Royal Palma I, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma I oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juni 2022.1 (satu) Bundel Surat Laut Nomor: PK.205/1885/SL-PM/DK-14 milik PT. Delimuda Nusantara yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014.1 (satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 1722/Ba.- Kapal Royal Palma I dikeluarkan di tanjung priok tanggal 12 Juni 2000.1 (satu) Bundel dokumen keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/13/7/DK/2022 Kapal Royal Palma I.1 (satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/6/24/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma I diterbitkan di Rengat tanggal 22 November 2021.1 (satu) Bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor:AL.501/6/25/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma I Milik Kapal Royal Palma I diterbitkan di Rengat tanggal 22 Novemer 2021.1 (satu) Bundel surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/7/13/KSOP.Mrd/2022 milik Royal Palma I diterbitkan di Marunda tanggal 28 April 2022.1 (satu) Bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/822/6/DK/2021 milik Royal Palma I diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Desember 2021.1 (satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/822/5/DK/2021 milik Royal Palma I diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021.1 (satu) Bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor: AL.601/29/13/DK/2022 milik Royal Palma I diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022.1 (satu) Bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification For Hull Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Januari 2022.1 (satu) Bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For Machinery Royal Palma I diterbitkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2022.1 (satu) Bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 154/ILR/MPJ/V/22 TB Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 17 Mei 2022.	Dokumen Kapal Rengat



	<p>14. 1 (satu) Bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 091/PMK/MPJ/V/22 TB Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 17 Mei 2022.</p> <p>15. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/193603/181203/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur Angkutan Laut dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 17 Juni 2022.</p> <p>16. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : B.XXV-903/AL.58 Kapal TB. Royal Palma I tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Nomor Identifikasi TB. Royal Palma I Nomor : NV.101/62/28/DV/2016 tanggal 09 Mei 2016.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta Nomor : 2214 tanggal 06 November 2000 Nama Kapal : TB. Royal Palma I eks. Tomy Maru.</p> <p>19. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 milik Deli Muda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>21. 1 (satu) Bundel Fotokopi Certificate Of Insurance nomor : SO000479-17 Kapal Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021, berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023.</p> <p>22. 1 (satu) Bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang Warga Negara Indonesia Senin 18 November 2019.</p> <p>23. 1 (satu) Bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – I milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>24. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Minyak Oil Record Book Kapal Royal Palma I berlaku dari 14 Oktober 2019.</p> <p>25. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dalam rangka penerbitan Sertifikat SNPP bagi Kapal Tangki Minyak dibawah GT 150 Atau Kapal selain Tangki Minyak dibawah GT 400 (Kapal Standar Non Konvesi (NCVS)) Kapal TB. ROYAL PALMA I milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : AL.601/3/19/KSOP.KC-2021 berlaku sampai dengan 21 Februari 2022.</p> <p>26. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 23 Juli 2022.</p> <p>b) Kapal TB. Royal Palma 5, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 5 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juni 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Pas Besar Kapal Royal Palma 5 Eks DELIMUDA – III diterbitkan di Dumai 23 April 2013.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 1697/Ba.- Kapal Royal Palma 5 Eks DELIMUDA-III dikeluarkan di Tanjung</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Priok 17 April 2000.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/177/1/DK/2021 Kapal Royal Palma 5 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan Jakarta berlaku tanggal 29 Desember 2021 s/d 28 Desember 2022.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/5/5/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma 5 diterbitkan di Rengat tanggal 12 Juli 2021.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/5/6/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma 5 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 12 Juli 2021.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/19/KSOP.KC-2021 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Rengat tanggal 12 Juli 2021.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 s/d 850M3 warna Kuning.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut, Ship Station License, Nomor Pemegang Izin : 00109413, Nomor Aplikasi : 0184728, Nomor Izin : 487/L/SDPPI/2022, Berlaku 24 Februari 2022 s/d 23 fbruari 2027, Nama Stasiun Royal Palma 5.</p> <p>10. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal, National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/267/14/DK/2022 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta tanggal 05 April 2022.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip, National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/501/4/DK/2021 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar, National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/14/8/DK/2021 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.</p> <p>13. 1 (satu) Lembar fotokopi Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikasi Klasifikasi Mesin Royal Palma 5, Nomor 027418, Nomor Register : 06423 diterbitkan di Jakarta 10 Januari 2019 periode survei 5 tahun.</p> <p>14. 1 (satu) Lembar fotokopi Sertifikasi Garis Muat Internasional (1969) International Load Line Certificate, Nomor : 027835 Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta 10 Januari 2019 periode survei 5 tahun.</p> <p>15. 1 (satu) bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 329/ILR/MPJ/XII/21 TB Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 16 Desember 2021.</p> <p>16. 1 (satu) bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 330/ILR/MPJ/XII/21 TB Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 16 Desember 2021.</p> <p>17. 1 (satu) bundel PT. MEGA PRIMA JAYA</p>	
--	---	--

Halaman 201 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 177/PMK/MPJ/XII/21 TB Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 16 desember 2021.</p> <p>18. 1 (satu) lembar sertifikat Nomor : 267/MPJ/HRU/XII/21 masa berlaku 15 Desember 2022</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/193613/181211/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 17 Juni 2022.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/172574/162741/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 23 Maret 2022</p> <p>21. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Nomor : B.XXV-1070/AL.58 Kapal TB. Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta, tanggal 17 Desember 1998.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.518/269/167/DK/2022 Perihal Keterangan tanda panggil (Call Sign) Kapal Royal Palma 5 Eks Deli Muda III tanggal 26 Januari 2022.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : NV.101/62/29/DV.2016, Perihal : Nomor Identifikasi TB. Royal Palma 5 tanggal 9 Mei 2016.</p> <p>24. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: Bxxv-903/AL58 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Surat Dokumen Penyesuaian manajemen Keselamatan Document Of Compliance Nomor: AL.601/18/19/DK/2021 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>26. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akte TB. Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 1108 tanggal 15 Desember 1997.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Surat Statement Letter tanggal 16 Agustus 2019.</p> <p>28. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor:SO000479-16 tanggal 31 Desember 2021 milik PT. DELIMUDA NUSANTARA Kapal Royal Palma 5.</p> <p>29. 1 (satu) bundel Invoice PT. DELIMUDA NUSANTARA nomor : 1184316 tanggal 13 Juni 2014.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Surat Keterangan permohonan PT. TEGUH ABADI NUSANTARA, Nomor 421/TAN/BTM/IV/213.</p> <p>31. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 16 September 2020 di Tanjung Priok.</p> <p>32. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – 5 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>c) Kapal TB. Royal Palma 13, dokumen yang disita</p>	
--	---	--

Halaman 202 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal, Nama Kapal Royal Palma 13 tanggal 22 Agustus 2022.1 (satu) Lembar Surat Pas Besar, Nomor Tanda Pendaftaran : 2007 PPj No.1532/L, Nama Kapal "Royal Palma 13" eks Chiyo Maru No.88 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Tanjung priok 03 Juni 2014.1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara International Tonnage Certificate (1969) Provisional Nomor 626/PPj, Nama Kapal "Royal Palma 13" eks Chiyo Maru No.88 dikeluarkan di Dumai pada tanggal 16 Mei 2007.1 (Satu) Lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document No.AL.504/13/8/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022.1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/7/9/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/7/10/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate No: AL.502/3/10/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.1 (Satu) Bundel Sertifikat Izin Stasiun Radio Kapal Laut/Ship Station License No. Izin 855/L/SDPPI/2017 Nama Stasiun TB. Royal Palma 13 eks Chiyo Maru No.88.1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/72/8/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 01 Februari 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 01 Februari 2021.1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/625/9/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 september 2020 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020.1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.601/14/7/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 025449 No. Register : 11607 No.Imo: 8737661 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018.1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 025779 Nama Kapal : Royal	
--	---	--

Halaman 203 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018.</p> <p>14. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-Inspection Certificate No. : 064/ILR/MPJ/II/2022 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-Inspection Certificate No. : 063/ILR/MPJ/II/2022 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-Inspection Certificate No. : 032/MPK/MPJ/II/22 Nama Kapal : Royal Palma 13 di Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Certificate No. : 042/MPJ/HRU/II/22, Nama Kapal : TB. Royal Palma 13, Milik : PT. Delimamuda Nusantara, Nomor Seri : 494045 diterbitkan di Tanjung Priok.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Certificate No. : 043/MPJ/HRU/II/22, Nama Kapal : TB. Royal Palma 13, Milik : PT. Delimamuda Nusantara, Nomor Seri : 494046 diterbitkan di Tanjung Priok.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/193735/182128/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Lembar Surat Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance NO. AL.601/18/19/DK/2021 tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Lembar Keterangan Tanda Panggil (Call Sign) Nama Kapal : TB. Royal palma 13 Eks.Chiyo Maru No.88 Nomor: Pk.203/30/16/DK-17 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2017.</p> <p>24. 1 (Satu) Lembar Nomor Identifikasi Nama Kapal : TB. Royal palma 13 No. NV.101/62/31/DV.2016 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2016.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -1532-, Tanggal : 04 Juni 2007, Nama Kapal : Motor Tunda Bernama Royal Palma 13, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-12 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 28 September 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TB. Royal Palma 13.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Minyak /Oil Record Book Kapal Motor: TB. Royal Palma 13.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Sampah</p>	
--	--	--

Halaman 204 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>/Garbage Record Book Kapal Motor: TB. Royal Palma 13.</p> <p>d) Kapal TK. Royal Palma-XVI, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal oleh KSOP Nama Kapal Royal Palma XVI pada tanggal 23 Juni 2022.2. 1 (satu) bundel Surat Laut, No. PK.205/1266/SL-PM/DK-14, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta, 05 Maret 2014.3. 1 (satu) lembar Surat Laut nomor PK.674/369/SL-PM/DK-09, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 20 Maret 2009.4. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)/International Tonnage Certificate (1969), No. 698/PPj, Kapal Royal Palma XVI, Dimensi Kapal : Panjang 69,12 M, Lebar 20 M, Tinggi 4,88 M., dikeluarkan di Dumai 06 Januari 2009.5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Constuction Certificate, No. AL.501/4/15/KSOP.STT-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Sintete, 22 Maret 2022.6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No. AL.501/4/16/KSOP.STT-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Sintete, 22 Maret 2022.7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal, National Pollution Prevention Certificate, No. AL.601/632/17/DK/2020, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta, 30 September 2020.8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip/National Anti Fouling System Certificate, No. AL.501/4/17/KSOP.STT-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Sintete 22 Maret 2022.9. 1 (satu) bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of Civil Liability For Oil Pollution Damage, No. AL.602/8/7/DK-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 11 Januari 2022.10. 1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification For Hull, No.046759, No. Register : 12216, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 11 Februari 2020.11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin/Certificate of Classification For Machinery, No. 030604, No.Register :12216 No. IMO : 8740216, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta, 11 Februari 2020.12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 031047 Nama Kapal : Royal Palma XVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2020.13. 1 (satu) lembar CV.AIDIN PERKASA, Re-Inspection Certificate INFLATABLE LIFE RAFT, No.321/AP/DMI/XII/2021, Kapal TK. Royal Palma XVI, Diterbitkan Dumai, 10 Desember 2021.14. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. 321/AP/DMI/XII/2021, Kapal TK.Royal Palma XVI, Diterbitkan Dumai 10 Desember 2021.	
--	--	--

Halaman 205 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>15. 1 (satu) lembar PT. MEGA PRIMA JAYA, Sertifikat Pemeriksaan Ulang/Re-Inspection Certificate, No. 110/PMK/MPJ/VI/22, Kapal TK. Royal Palma XVI, Pemilik PT. DELIMUDA NUSANTARA, diterbitkan di Jakarta Utara, 10 Juni 2022.</p> <p>16. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, No. AL.103/2000/194564/182133/22, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan Di Jakarta 20 Juni 2022.</p> <p>17. 1 (satu) bundel Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, No. AL.103/2000/175021/164213/22, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 30 Maret 2022.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara. Kapal Royal Palma XVI Nomor B.XXV-903/AL.58, Diterbitkan di Jakarta 29 April 2009.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Nomor B.XXV/903/AL.58, Perusahaan PT. DELIMUDA NUSANTARA, Diterbitkan Jakarta 18 Maret 2002.</p> <p>20. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan/Document of Compliance, No. AL.601/18/19/DK/2021, Nama Perusahaan PT. DELIMUDA NUSANTARA, diterbitkan di Jakarta 13 Januari 2021.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Pendaftaran Kapal/Grosse Akte, No. 1630, Nama Kapal TK. Royal Palma XVI, Berkedudukan di Jakarta 16 Februari 2009.</p> <p>22. 1(satu) bundel Certificate Furnished as Evidence of Insurance Pursuant to the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. Diterbitkan pada 31 Desember 2021.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance, No. SO000479-30, Diterbitkan pada 31 Desember 2021.</p> <p>24. 1 (satu) bundel Invoice PT.Delimuda Nusantara, No. 1184319, diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2014.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. UNION MARITIM INDONESIA dengan seorang warga Negara Indonesia Nomor 524/5/9/KSOP.STT-2021, dibuat di Sintete 23 Juni 2021.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Buku SIJIL, Kapal TK. Royal Palma XVI, Isi kotor 1849.</p> <p>27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Sampah/Garbage Record Book, MARPOL 73/78 ANNEX V.</p> <p>e) Kapal TK. Royal Palma XX, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal, Nama Kapal Royal Palma XX tanggal 22 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Lembar Surat Laut Nomor : PK.205/706/SL-PM/DK-15, Nama Kapal Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 31 Maret 2015.</p> <p>3. 1 (satu) Lembar Surat Laut Nomor : PK.205/1333/SL-PM/DK-11, Nama Kapal Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 24 November 2011.</p>	
--	---	--



	<ol style="list-style-type: none">4. 2 (dua) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara International Tonnage Certificate (1969) Provisional Nomor 3500/PPm, Nama Kapal Royal Palma XX dikeluarkan di Batam pada tanggal 28 September 2011.5. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruccion Certificate Nomor: AL.501/3/10/KSOP.KC-2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Rengat tanggal 22 April 2022.6. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor : AL.501/3/11/KSOP.KC- 2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Rengat tanggal 22 April 2022.7. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/643/12/DK/2021, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September 2021.8. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/384/16/DK/2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022.9. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage Nomor : AL.602/08/11/DK/2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022.10. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/187/13/DK/2020, Nama Kapal Royal Palma XX, Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 11 Maret 2022.11. 1 (satu) Lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Provisional Classification Certificate Hull No. 00067-DM/B1.S/2022 No. Register : 14648 Nama Kapal : Royal Palma XX milik PT. Deli Muda Nusantara diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal 01 April 2022.12. 1 (satu) Lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin, Provisional Certificate Of Classification For Machinery No. 00067-DM/B1.S/2022 No.Register 14648 Nama Kapal : Royal Palma XX diterbitkan di Pekanbaru tanggal 01 April 2022.13. 1 (Satu) Lembar Surat Sertifikat Klasifikasi Garis Muat Internasional Sementara / Provisional International Load Line Certificate No. 00067-DM/D1.S/2022-Perp I, Nama Kapal : Royal Palma XX diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal 01 Juli 2022.14. 1 (satu) Bundel Surat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatble Life Raft Nomor : 166/AP/DMI/V/2022, Nama Kapal TK. Royal Palma XX, milik PT. Delimuda Nusantara-Jakarta tanggal 27 Mei 2022.15. 1 (satu) Lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation Fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 185/AP/DMI/V/2022, Nama Kapal TK. Royal Palma XX, milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Dumai pada tanggal 27 Mei	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2022.</p> <p>16. 1 (satu) Lembar Surat Certificate Hydrostatic Release Unit No. : 166/AP/DMI/V/2022 Nama Kapal : TK. Royal Palma XX di Dumai pada tanggal 27 Mei 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/194584/182293/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/175073/164352/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022.</p> <p>19. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/153036/144745/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022.</p> <p>20. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/130499/125054/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2021.</p> <p>21. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : BXXV-903/AL.58 Nama Kapal : Royal Palma XX tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>22. 1 (satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah International Certificate Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemicals In Bulk No. AL.602/04/07/KSOP.DMI-2022, Nama Kapal Royal Palma XX ditebitkan di Dumai 02 Agustus 2022.</p> <p>23. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>24. 1 (satu) Bundel Surat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Document Of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>25. 1 (satu) Bundel Surat Certificate Of Insurance Nomor : SO000479-28, Nama Kapal Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>26. 1 (satu) Lembar Surat Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 BahagianX Seksyen 381 (A) Nomor : WRC-2015-00843, Nama Kapal Royal Palma XX, milik PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Malaysia tanggal 21 Mei 2016.</p> <p>27. 1 (satu) Bundel fotocopy Grosse Akta Nama Kapal : Kapal Tongkang "Royal Palma XX" milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 1931 tanggal 22 November 2011.</p> <p>28. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan Seorang Warga Negara Indonesia di Rengat pada 30 November 2019.</p> <p>29. 1 (satu) Bundel BUKU SIJIL warna Hijau Kapal Motor : TK. Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>f) Kapal Royal Palma 25, dokumen yang disita</p>	
--	---	--

Halaman 208 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Pas Besar Nomor: PK.204/16/05/KPL.BTM-2014 Kapal Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam 24 Maret 20141 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 5600/PPm Kapal Royal Palma 25 dikeluarkan di Batam tanggal 27 Januari 2014.1 (satu) bundel dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/126/11/DK/2021 Kapal Royal Palma 25 Milik PT. Delimuda Nusantara.1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/3/8/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 25 diterbitkan di Rengat tanggal 16 April 2022.1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/3/9/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 25 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 16 April 2022.1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/11/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Rengat tanggal 16 April 2022.1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/57/12/DK/2022 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Januari 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/744/10/DK/2020 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020.1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/40/7/DK/2022 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification For Hull Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 06 November 2018.1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For Machinery Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta tanggal 06 November 2018.1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 154/AP/DMI/V/2022 TB Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 19 Mei 2022.1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 174/AP/DMI/V/2022 TB Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 19 Mei 2022.1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/204638/191494/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	
--	---	--

Halaman 209 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 02 Agustus 2022.</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : B.XXV-903/AL.58 Kapal TB. Royal Palma 25 tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PK.203/30/15/DK-17 Perihal Keterangan Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 25 Eks FUKUMARU No. 68 tanggal 26 Oktober 2017.</p> <p>17. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: Bxxu-903/AL58 Kapal Royal Palma 25 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>18. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta TB. Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 3394 tanggal 28 Januari 2014.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance nomor : SO000479-7 Kapal Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021, berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023 .</p> <p>20. 1 (satu) bundel Berita Acara Penggantian Bendera Nama TB. FUKU MARU No. 68 bendera Pemerintah Tuvalu menjadi TB. Royal Palma 25 Bendera Indonesia tanggal 27 November 2013.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 120 tanggal 27 November 2013 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam tanggal 28 November 2013.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kontruksi dan Perlengkapan Kapal TB. Royal Palma 25 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 02 Maret 2022.</p> <p>24. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – 25 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>25. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 16 Agustus 2022.</p> <p>g) Kapal TK. Royal Palma XXVI, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Royal Palma XXVI oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 16 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXVI.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 5669/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXVI Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Ukuran Dalam Terbesar 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 24 Januari 2014.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.PK.205/1278/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2014.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/4/9/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 02 Juni 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan</p>	
--	--	--



	<p>Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/4/10/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 02 Juni 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/450/3/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni 2022 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/450/14/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/11/5/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/4/18/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/4/11/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXVI pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/102/5/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 043627 No. Register : 19885 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 028463 No. Register : 19885 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 028829 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 089/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Dumai pada tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 096/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI di Dumai pada tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 089/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI di Dumai pada</p>	
--	---	--



	<p>tanggal 24 Maret 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184904/173537/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. BXXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No: AL.602/03/06/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Dumai pada tanggal 06 Juni 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -3389-, Tanggal : 24 Januari 2014, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXVI, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-25 pada tanggal 31 Desember 2021 ; Certificate Furnished As Evidence of Insurance Pursuant to The Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, Blue Card Number : CLC20220007 pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peletakan Lunas Nomor Bangunan : H-229 diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Juni 2013.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peluncuran Kapal Baru NO. 220/BA/XII/2013 diterbitkan di Batam pada tanggal 16 Desember 2013.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 1525 diterbitkan di Batam pada tanggal 06 Mei 2014.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 23 Agustus 2016.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXVI.</p> <p>h) Kapal TB. Royal Palma 27, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 27 Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 29 Juli 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor: PK.205/2027/SL-PM/DK-15 Kapal Royal Palma 27 milik PT. DELIMUDA NUSANTARA yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 November 2015.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 6590/PPm Kapal Royal Palma</p>	
--	--	--



	<p>27 dikeluarkan di Batam tanggal 09 Oktober 2015.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.527/10/20/KSOP.Mrd/2022 Kapal Royal Palma 27 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/5/18/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 27 diterbitkan di Rengat tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/5/19/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 27 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/24/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Rengat tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>8. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/531/5/DK/2020 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2022.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/532/1/DK/2020 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/8/15/DK/2022 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Certificate Of Classification Kapal Royal Palma 27 di Terbitkan di Jakarta 16 juli 2020, berlaku sampai 21 Juni 2025.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel Sertifikat International Load Line Certificate Kapal Royal Palma 27 No: 20JK0362-LLC.</p> <p>13. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 057/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>14. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 056/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>15. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 054/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>16. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. 057/AP/DMI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal</p>	
--	--	--



	<p>Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/184044/172811/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 10 Mei 2022.</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : B.XXV-903/AL.58 Kapal TB. Royal Palma 27 tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL.58 milik PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>20. 1 (satu) Bundel Surat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Document Of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PK.204/21/10/DK-15 Perihal Penggunaan Nama dan Penetapan Tanda Panggilan Kapal 29 Juni 2015.</p> <p>22. 1 (Satu) Lembar Nomor Identifikasi TB. Royal Palma 27 Nomor : NV 101/208/25/DV.2015 tanggal 18 September 2015.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Builder's Certificate nomor: BC.002/PPS/05/2015 tanggal 05 Mei 2015.</p> <p>24. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Selar tanggal 09 Oktober 2015.</p> <p>25. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta TB. Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 4056 tanggal 20 Oktober 2015.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-6 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>27. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 2825 tanggal 19 September 2015.</p> <p>28. Berita Acara Pemeriksaan Kapal Royal Palma 27 tanggal 18 September 2015.</p> <p>29. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 06 Maret 2021.</p> <p>30. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – 27 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>31. Buku catatan minyak Oil Record Book Kapal TB. Royal Palma 27 huruf pengenal YDA.3791.</p> <p>i) Kapal TK. Royal Palma XXVIII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XXVIII oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 05 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXVIII.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut PK.205/1873/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 5705/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXVIII Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 26 Februari 2014.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan</p>	
--	--	--



	<p>Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/2/20/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety equipment Certificate No: AL.501/2/21/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/657/2/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 Oktober 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 Oktober 2021.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/266/19/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal 07 april 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 07 april 2022</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/11/1/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.602/11/2/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/ / /DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII pada tanggal 12 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL.601/102/4/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 043639</p> <p>12. No. Register : 19886 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 028474 No. Register : 19886 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 028838 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 058/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Safety and Rescue Equipment No. : 055/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII di Dumai pada tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 058/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII di Dumai pada 10 Maret 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184905/173980/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/166695/157063/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/143858/136806/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2021.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/122689/118036/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/102971/99169/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/84422/80936/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/64738/62357/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/45771/43989/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/28146/26573/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/10042/9618/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/62544/61012/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2019.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak</p>	
--	---	--

Halaman 216 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/43579/42517/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2019.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL 208/2000/77006934/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76904/73195/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2021.</p> <p>32. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No: AL.602/03/08/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 14 Juni 2022.</p> <p>34. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>35. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>36. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -3452-, Tanggal : 28 Februari 2014, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXVIII, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta ; 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. S/3459 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII periode 08 Januari 2020 s.d 08 Januari 2021.</p> <p>37. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Builder Certificate Nomor Bangunan : H-235 diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Desember 2013.</p> <p>38. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 1524 diterbitkan di Batam pada tanggal 06 Mei 2014.</p> <p>39. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-24 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>40. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 20 Maret 2020</p> <p>41. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXVIII.</p> <p>j) Kapal TB. Royal Palma 29, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 29 tanggal 22 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (satu) lembar surat laut Nomor : AL.520/38/14/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2019 dengan nama Kapal Royal Palma 29 yang diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal milik PT. Delimuda Nusantara.</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 7847/PPm Kapal Royal Palma 29 dikeluarkan di Batam tanggal 10 Mei 2019.4. 1 (satu) lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor: AL.501/5/9/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 07 Juli 2022.5. 1 (satu) lembar Setifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/6/4/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022.6. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor : AL.501/6/5/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022.7. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor : AL.502/2/2/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022.8. 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 S/D 850 M3 Nomor: 2019 PPm No.5192/L Kapal Royal Palma 29.9. 1 (satu) bundel surat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya Izin Stasiun Radio Kapal Laut, Ship Station License No. Klien: 00109413, No. Aplikasi: 0155554, No. Izin: 1026/L/SDPPI/2019 dengan tanggal berlaku 28 September 2019 S/D 27 September 2024.10. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/01/2727-IX/DV/2019 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 September 2019.11. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/181/16/DK/2022 milik Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2022.12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/649/9/DK 2021 milik Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2021.13. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/18/20/DK/2022 milik Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.14. 1 (satu) Bundel Certificate of classification milik Kapal Royal Palma 29 dengan register GT 197 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020.15. 1 (satu) Bundel International Load Line Certificate milik Kapal Royal Palma 29 No. IMO : IMO9881914 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020.16. 1 (satu) bundel Surat CV. AIDIN PERKASA	
--	---	--

Halaman 218 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor: 016/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor: 017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Cetificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. 017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Cetificate Hidrostatic Release Unit Nomor: 016/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Cetificate Hidrostatic Release Unit Nomor: 017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>21. 1 (satu) Bundel surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan LAUT Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/204642/191500/22 Kapal Royal Palma 29 tanggal 02 Agustus 2022.</p> <p>22. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: B XXV-903/AL.58 Kapal Royal Palma 29 tanggal 16 Agustus 2019.</p> <p>23. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanda Panggil (Call Sign) Kapal Royal Palma 29 Nomor: AL.518/13/3/DK/2019 Kapal Royal Palma 29 tanggal 12 April 2019.</p> <p>24. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor Identifikasi Royal Palma 29 Nomor: NV.101/03/0542-IV/DV.2019 Kapal Royal Palma 29 tanggal 16 April 2019.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 atas nama PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Maret 2002.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Fotokopi surat dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document of compliance Nomor: AL.601/18/19/DK/2021 atas nama PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 13 Januari 2021.</p> <p>27. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5192 tanggal 10 April 2019 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>28. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor: SO000479-5 tanggal 31 Desember 2021 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>29. 1 (satu) lembar Berita Acara Peletakan Lunas Nomor: KL.002/PPS/01/2014 diterbitkan di Batam 03 Januari 2014.</p> <p>30. 1 (satu) lembar Builder's Certificate Nomor: BC.003/PPS/02/2019 Kapal Royal Palma 29</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>diterbitkan di Batam 19 Februari 2019.</p> <p>31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 4756 tanggal 06 Agustus 2019.</p> <p>32. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang warga Negara Indonesia tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>33. 1 (satu) buah Buku SIJIL Kapal TB. Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>34. 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak oil record book Kapal Royal Palma 29.</p> <p>35. 1 (satu) buah Buku Catatan Sampah Garbage Record Book.</p> <p>k) Kapal TK. ROYAL PALMA XXX, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal oleh KSOP, Nama Kapal Royal Palma XXX pada tanggal 15 Juli 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXX.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.PK.205/4112/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XXX milik Milik: PT. DELIMUDA NUSANTARA diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014.</p> <p>4. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 6056/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXX Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 08 Juli 2014.</p> <p>5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/3/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/3/19/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/862/6/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Desember 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Desember 2021.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/2/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Rengat pada tanggal 16 Mei 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 16 Mei 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/17/2/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022 beserta Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak bahan bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.602/3/8/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di</p>	
--	---	--

Halaman 220 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 beserta Surat Pengesahan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut No. AL.603/2/16/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXX pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/102/3/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 044717 No. Register : 20670 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 029207 No. Register : 20670 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No.029577 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 juli 2019.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 131/AP/DKI/IV/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Dumai pada tanggal 22 April 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 153/AP/DKI/IV/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX di Dumai pada tanggal 22 April 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. 131/AP/DKI/IV/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Dumai pada tanggal 22 April 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/185329/173979/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/166698/157065/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2022.</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/143874/136474/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2021.</p> <p>20. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/122731/118034/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/102979/98502/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam</p>	
--	--	--



	<p>Negeri No. AL 103/2000/10043/9621/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020.</p> <p>23. 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76900/74339/21 diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Januari 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Grosse Akta No : -3647-, Tanggal : 14 Juli 2014, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXX, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta Selatan</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-23 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>29. Sertifikat Penguji Air Minum (Untuk Keperluan Kapal/Pesawat Udara) No. 0020245 Nama Kapal : Royal Palma XXX dikeluarkan Kuala Enok pada tanggal : 18 Oktober 2014.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel PT.BANDAR ABADI builder certificate Nama Kapal Royal Palma XXX diterbitkan di Batam tanggal 19 Mei 2014.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 3352 tanggal 20 September 2014 diterbitkan di Batam.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia No. PK.301/09/69/KSOP/DMI/2020 dibuat pada tanggal 10 September 2020.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXX.</p> <p>34. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 621154809601815 An. R SUHENDRI, Jakarta 07 Oktober 2015.</p> <p>35. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6201321756010118 An. HERIYANTO, Jakarta 04 Januari 2018.</p> <p>36. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6211743037010117 An. R NURWAN ZAIN PUTRA, Jakarta 06 Maret 2017.</p> <p>37. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6211905596010119 An. JONI HANDOKO, Jakarta 14 Februari 2019.</p> <p>38. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6211930917013819 An. ANDRE PRAYOGA, Aceh Besar 06 Agustus 2019.</p> <p>39. 1 (satu) Bundel Daftar Pengawal Nama Kapal TB. Royal Palma 29/TK Royal Palma XXX, tanggal 21 September 2020.</p> <p>l) Kapal TK. Royal Palma XXXII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XXXII oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/57/11/DK/2019 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019.</p>	
--	---	--



	<ol style="list-style-type: none">3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 7984/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXXII Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 19 Agustus 2019.4. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/3/16/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/3/17/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/421/2/DK/2019 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 September 2019.7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/2/20/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022.8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/11/6/DK/2022 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/3/9/DK/2022 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/2/17/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII pada tanggal 08 Januari 2022.9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/390/10/DK/2020 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020.10. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate No. : 172/ILR/MPJ/VI/22 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta Utara pada tanggal 07 Juni 2022.11. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate No. : 107/PMK/MPJ/VI/22 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta Utara pada tanggal 07 Juni 2022.12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat HRU No. : 123/MPJ/HRU/VI/22 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII di Jakarta Utara.13. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/185879/173865/22	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022.</p> <p>14. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/167344/158193/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/143924/136804/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2021.</p> <p>16. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/122749/117864/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/103656/99886/21diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/86244/82153/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2021.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/64697/62355/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/46006/44862/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/28166/26544/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 208/2000/7703/6917/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/75678/72326/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. BXXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>25. 1 (Satu) Lembar Surat Ship Particular TK. Royal Palma – XXXII.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL58 Nama Perusahaan : PT.DELIMUDA NUSANTARA diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p>	
--	---	--

Halaman 224 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>28. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-22 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5363 di terbitkan di Batam Pada tanggal 23 Agustus 2019 Nama Kapal : Oil Barge Bernama Royal Palma XXXII.</p> <p>30. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Builder Certificate No. 018/BA/VII/2019 Diterbitkan di Batam pada tanggal 18 Juli 2019.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peletakan Lunas Nomor : 027/BA-KL/BTM/II/2019 Bangunan : H-345 diterbitkan di Batam pada tanggal 17 Januari 2019.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peluncuran Kapal Baru No : 328/BA/VII/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 18 Juli 2019.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 5236 diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Agustus 2019.</p> <p>34. 1 (Satu) Bundel Surat Pengawasan Muat Barang Berbahaya No. AL.605-1/14/11/KSOP.Mrd/2021, diterbitkan di Marunda Pada tanggal 27 Juli 2021.</p> <p>35. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 16 Juni 2021.</p> <p>36. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXXII.</p> <p>37. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Laporan Pemeriksaan (SNPP) Pencegahan Pencemaran Kapal Tangki GT 150 atau lebih dan kapal selain tangki minyak GT400 atau lebih (NCVS) Nomor : A.KOP/19/17.</p> <p>38. 1 (Satu) Bundle fotocopy Laporan Pemeriksaan Nautis Kapal Tongkang Menurut Peraturan NCVS Indonesia Nomor : KOP 19/16</p> <p>39. 1 (Satu) Bundle Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran Dari Sistem Anti Teritip dikapal sesuai persyaratan Convention On The Control of Harmfull Anti – Fouling System on Ship 2001 Nomor : A.KOP-19/2.</p> <p>m) Kapal TB. Royal Palma 33, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Royal Palma 33 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 15 Juli 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/77/13/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2019.</p> <p>3. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8065/PPm Nama Kapal : Royal Palma 33 Dimensi Kapal : Panjang 24,34 M, Lebar 8 M, Ukuran Dalam Terbesar 3,65M dikeluarkan di Batam pada tanggal 25 Oktober 2019.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document No : AL.501/4/17/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/4/15/KSOP.KC-2022 Nama Kapal :</p>	
--	--	--

Halaman 225 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/4/16/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate No: AL.502/1/17/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Izin Stasiun Radio Kapal Laut / Ship Station License No. Izin : 1285/L/SDPPI/2019 tanggal berlaku 28 Oktober 2019 s.d 27 Oktober 2024.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/536/15/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 01 November 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 November 2019.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/2/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.601/6/16/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/2/13/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma 33 pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel International Convention on Load Lines, 1966, No. 19JK0045, diterbitkan di Batam pada tanggal 09 Oktober 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 203/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 204/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 218/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 203/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/199755/186857/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022.</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>18. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat perihal Tanda Panggilan (Call Sign) Royal Palma 33 No. No: AL.518/49/14/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 ; Surat perihal Nomor Identifikasi Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2019.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Grosse Akta No : -5431-, Tanggal : 10 Oktober 2019, Nama Kapal : Tug Boat Bernama Royal Palma 33, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-3 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Peluncuran Kapal No.: L.008/PPS/08/2019 beserta Lampiran IV Pemeriksaan Peluncuran tanggal 02 September 2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 02 September 2019 ; Berita Acara Peletakan Lunas No.KL.002/PPS/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 ; Berita Acara Serah Terima No.002A/BAST/PPS/09/2019 tanggal 14 Oktober 2019.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pemasangan Tanda Selar sesuai dengan Surat Ukur No 8065/PPm tanggal 24 Oktober 2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Oktober 2019.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pabeian Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas No.Pengajuan 020401-000094-20191009-000488 diterbitkan di Batam pada tanggal 09 Oktober 2019.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Steering Compass No. DAFDEV/268/IX/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 11 September 2019 ; DAFDEV/267/IX/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 11 September 2019.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TB. Royal Palma 33.</p> <p>30. 1 (Satu) Buku Catatan Minyak / Oil Record Book Bagian I Nama Kapal : TB. Royal Palma 33 DKP.V-07.</p> <p>31. 1 (Satu) Buku Catatan Sampah / Garbage Record Book MARPOL 73/78 ANNEX V</p> <p>32. 1 (Satu) Buku Laporan Pemeriksaan Persyaratan Pengawakan Minimum/ Record of Inspection Requirement for Safe Manning Nama Kapal : TB. Royal Palma 33.</p> <p>n) Kapal TK. Royal Palma XXXIV, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XXXIV oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juli 2022.</p>	
--	---	--

Halaman 227 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXXIV.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/83/16/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2019.</p> <p>4. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8082/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXXIV Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Ukuran Dalam Terbesar 6,10 M dikeluarkan di Batam pada tanggal 04 November 2019.</p> <p>5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/5/7/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/5/8/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/590/7/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 November 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 November 2019.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/10/5/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/4/17/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022; Surat Pengesahan No. AL.603/4/10/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/13/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL. 601/390/9/DK/2020 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 046729 No. Register : 24191 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 030587 No. Register : 24191 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta</p>	
--	--	--



	<p>pada tanggal 10 Februari 2020.</p> <p>13. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 031030 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 248/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV diterbitkan di Dumai pada tanggal 17 September 2021.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 271/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 17 September 2021.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 248/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 17 September 2021.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184048/17620/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2022 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/164755/155167/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/142897/135697/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/120959/116400/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 ; . Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/101318/97451/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/81274/79164/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/63515/60963/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/26845/25453/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2020 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/60872/58900/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2019 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/8088/7745/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2020 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/13759/12621/21</p>	
--	---	--



	<p>diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/76892/74719/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2021</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. AL.602/03/05/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Dumai pada tanggal 31 Mei 2022 beserta Lampiran I Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah pada tanggal 31 Mei 2022.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Builder Certificate No. 28/BA/X/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Batam pada tanggal 05 Oktober 2019.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Certificate of Insurance No. SO000479-21 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV tanggal 31 Desember 2021 ; Bunker Convention Blue Card, Blue Card No. BC20210646 Nama : PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021 ; CLC Blue Card, Blue Card No. CLC20220003 Nama : PT. Delimuda Nusantara tanggal 04 Januari 2022 ; MLC Certificate No. MLC20210591 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV berlaku tanggal 08 Januari 2022 s.d 08 Januari 2023 ; MLC Certificate No. MLC420210591 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV berlaku tanggal 08 Januari 2022 s.d 08 Januari 2023 ; Wreck Removal Convention Blue Card No. WRC20210771 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -5456-, Tanggal : 07 November 2019, Nama Kapal : Kapal Oil Barge Bernama Royal Palma XXXIV, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 7300 diterbitkan di Batam pada tanggal 21 November 2019.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXXIV.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran dari Sistem Anti Tritip di Kapal Sesuai Persyaratan / Convention on The Control of Harmful Anti-</p>	
--	---	--



	<p>Fouling System on Ship, 2001 Nomor A.KOP.19/2.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan (SNPP) Pencegahan Pencemaran Kapal Tangki Minyak GT 150 atau Lebih dan Kapal Selain Tangki Minyak GT 400 atau Lebih (NCVS) Nomor A.KOP-19/17.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kwapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/48/4/PKL-PM/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2019.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/591/9/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 November 2019 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 05 November 2019.</p> <p>33. 1 (Satu) Lembar Surat Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh PT. Pertamina Trans Kontinental pada tanggal 01 Desember 2020.</p> <p>o) Kapal TB. Royal Palma 35, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 35 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 31 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/29/20/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2020.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8279/PPm Nama Kapal : Royal Palma 35 Dimensi Kapal : Panjang 24,34 M, Lebar 8,00 M, Tinggi 3,65 M dikeluarkan di Batam pada tanggal 24 Maret 2020.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document No. AL.504/88/13/DK/2022 Nama Kapal: Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022 s/d 15 Juni 2023.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/5/20/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipemnt Certificate No: AL.501/5/21/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate No. AL.502/1/25/KSOP.KC-2022 Nama Kapal: Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Izin Station Kapal Laut / Ship Station License No. 1397/L/SDPPI/2020 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 April 2020 s/d 07 April 2025.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No.</p>	
--	--	--



	<p>AL.601/280/3/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 20 April 2020 s/d 17 Februari 2023 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 20 April 2020.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.601/8/16/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 s/d 08 Januari 2023 Nama Kapal : Royal Palma 35 Surat Pengesahan No. AL.603/4/16/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma 34 pada tanggal 04 Januari 2022 s/d 08 Januari 2023.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Certificate of Classification No. 21JK0224-CLS Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2021 s/d 25 Februari 2025.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar International Load Line Certificate No. 21JK0224-CLS Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2021 s/d 25 Februari 2025.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 004/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 005/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 008/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. :004/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>18. 1 (Satu) Eksemplar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184434/173227/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022.</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXVI-905/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Tanda Panggil (Call Sign) Kapal No. AL.518/26/19/DK/2020 Nama kapal: Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020.</p>	
--	--	--



	<p>21. 1 (Satu) Bundel Nomor Identifikasi Royal Palma 35 No. NV.101/03/1276-II/DV.2020 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal : 27 Februari 2020.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No. 5622 Nama Kapal: TB. Royal Palma 35, Nama Pemilik: PT. Delimuda Nusantara. Berkedudukan di : Jakarta Selatan pada tanggal: 27 Februari 2020.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021 ;</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-2 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel BUILDER'S CERTIFICATE NO. BC.002/PPS/02/2020 Nama Kapal: Royal palma 35 diterbitkan di Batam pada tanggal : 08 Februari 2020.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pemasangan Tanda Selar Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Batam. Berita Acara Peletakan Lunas diterbitkan di Batam pada tanggal: 28 Agustus 2019 ; Berita acara Peluncuran Kapal No.L.002/PPS/02/2020 Nama Kapal: Royal Palma 35 terbit di Batam tanggal: 08 Februari 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel NSR EPIRB Informasi Report Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Batam pada tanggal 28 Februari 2022.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 1413 diterbitkan di Batam pada tanggal 02 Maret 2020.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 13 Juni 2022.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TB.ROYAL PALMA 35.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Daftar Sertifikat Kapal TB. Royal Palma 35.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Sampah MARPOL 73/78 ANNEX V.</p> <p>p) Kapal TK. Royal Palma 36, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma 36 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 16 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma 36.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut AL.520/67/6/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8031/PPm Nama Kapal : Royal Palma 36 Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 16 September 2019.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/5/22/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan</p>	
--	--	--



	<p>perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety equipment Certificate No: AL.501/5/23/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/466/5/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 26 September 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 26 september 2019</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/19/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma36 diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran dari Sistem Anti Teritip di Kapal Sesuai Dengan Persyaratan Convention on The Control of Harmfull Anti-Fouling System on Ship, 2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma 36 No. Regsiter : 2019 PPM No.5402/L.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran dari Sistem Anti Teritip di Kapal Sesuai Dengan Persyaratan Convention on The Control of Harmfull Anti-Fouling System on Ship, 2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma 36 No : A.KOP 19/2.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/10/6/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/3/7/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/2/15/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma 36 pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL.601/390/11/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020.</p> <p>13. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Transmittal No : 007/ADM-TPN/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 046334</p> <p>15. No. Register : 24016 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar fotocopy Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 030313 No. Register : 24016 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019.</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>17. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 030735 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 205/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 219/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 36 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>20. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 205/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 36 di Dumai pada 07 Agustus 2021.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/172327/162733/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/151452/143014/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/128707/124708/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/108724/104753/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/90093/86361/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/70936/68079/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/51033/50310/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/34200/31964/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/16379/15528/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2020.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam</p>	
--	---	--

Halaman 235 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Negeri No. AL 103/2000/68366/66366/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/49848/48625/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2019.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL 208/2000/77076919/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2020.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL 208/2000/8296/7502/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76947/73623/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021.</p> <p>35. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>36. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>37. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021</p> <p>38. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -5402-, Tanggal : 18 September 2019, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma 36, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta</p> <p>39. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-20 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>40. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 5823 diterbitkan di Batam pada tanggal 21 September 2019.</p> <p>41. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Builder Certificate No.023/BA/VIII/2019 Nomor Bangunan : H-347 diterbitkan di Batam pada tanggal 20 Agustus 2019.</p> <p>42. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peletakan Lunas Nomor Bangunan : H-347 diterbitkan di Batam pada tanggal 02 Maret 2019.</p> <p>43. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Peluncuran Kapal Baru Nomor : 332/BA/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.</p> <p>44. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 13 November 2020.</p> <p>45. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL: TK. Royal Palma 36.</p> <p>q) Kapal TB. Royal Palma 37, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 37 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut No.AL520/44/13/DK/2020, KAPAL ROYAL</p>	
--	---	--



	<p>PALMA 37, Milik PT.DELIMUDA NUSANTARA, Diterbitkan: Jakarta pada Tanggal 04 Juni 2020.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969), KAPAL ROYAL PALMA 37, Tonase Kotor (GT):197, Diterbitkan: di Batam pada Tanggal 26 Mei 2020.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum/Minimum Safe Manning Document, No. AL.527/11/10/KSOP.Mrd/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Marunda pada 10 Juni 2022, Berlaku sampai dengan tanggal : 09 September 2022.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate, No.AL.501/2/23/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Rengat pada Tanggal 24 Maret 2022, Berlaku sampai dengan tanggal : 09 September 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No. AL.501/2/24/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Rengat, 24 Maret 2022, Berlaku sampai dengan tanggal :09 September 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang/Cargo Ship Safety Radio Certificate, No. AL.502/1/8/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Rengat pada tanggal 24 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 09 September 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Izin Stasiun Radio Kapal Laut / Ship Station License, No. 49/L/SDPPI/2020, Kapal Royal Palma 37, Masa Berlaku dari tanggal : 25 November 2020 s/d 24 November 2025.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Precenton Certificate, No. AL.601/377/20/DK/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Jakarta tanggal 03 Juni 2020, Berlaku sampai tanggal 25 Maret 2023.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti-Fouling System Certificate, No. AL.601/378/1/DK/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 03 Juni 2020, Berlaku sampai tanggal : 09 September 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar, National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, No. AL.601/6/17/DK/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022, Berlaku sampai tanggal : 08 Januari 2023.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Certificate of Classification, No. 202024, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Tokyo pada tanggal 21 Mei 2020, Berlaku sampai tanggal : 29 Maret 2025.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Internasional, No. 20HO01208-LLC, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Tokyo pada tanggal 21 Mei 2020, Berlaku sampai tanggal 29 Maret 2025.</p> <p>14. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Re-Inspection Certificate, INFLATABLE LIFE RAFT, No. 065/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Dumai tanggal 05 Maret 2022, berlaku sampai tanggal : 04 Maret 2023.</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>15. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Re-Inspection Certificate, INFLATABLE LIFE RAFT, No. 064/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal : 04 Maret 2023.</p> <p>16. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. HK701/ILR/0341/09/TKP/2021, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023.</p> <p>17. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. HK701/ILR/0341/09/TKP/2021, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023.</p> <p>18. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Fire Extinguishers/Fire Extinguishers Installation/Fire Hoses Safety dan Rescue Equipment, No. 070/AP/DMI/III/2022, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023.</p> <p>19. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate EEBD, No. 071/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal: 04 Maret 2023.</p> <p>20. 1 (satu) Bundel Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, No. AL.103/2000/178355/167811/22, Kapal Royal Palma, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 13 April 2022.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/157927/148947/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/135326/130217/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Eksemplar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/116237/111801/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2021.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, No. B XXV-903/AL.58, Kapal Royal Palma, Diterbitkan: Jakarta pada tanggal 22 April 2020.</p> <p>25. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Royal Palma 37, No. NV.101/03/3138-IV/DV.2020, Kapal Royal Palma, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 22 April 2020.</p> <p>26. 1 (satu) lembar Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 37, No. AL.518/50/9/DK/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Jakarta pada tanggal 23 April 2020.</p> <p>27. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), No. BXXV-903/AL58, PT. Delimuda Nusantara, Diterbitkan: Jakarta 18 Maret 2002.</p> <p>28. 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance, No. AL.601/18/19/DK/2021, PT. Delimuda Nusantara, Diterbitkan: Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021, Berlaku sampai 14 Januari</p>	
--	--	--

Halaman 238 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>2026.</p> <p>29. 1 (satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal, No. 5701, Nama Kapal : Tug Boat bernama Royal Palma 37, PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2020.</p> <p>30. 1 (satu) Bundel Certificate of Insurance, No. SO000479-1, Pemilik PT. Delimuda Nusantara, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: 31 Desember 2021.</p> <p>31. 1 (satu) Bundel PT. PALMA PROGRESS SHIPYARD, Builder's Certificate, No. BC.005/PPS/03/2020, Kapal Royal Palma 37, Diluncurkan: Batam, 10 Maret 2020.</p> <p>32. 1 (satu) Bundel PT. PALMA PROGRESS SHIPYARD, Berita Acara Peluncuran Kapal, No. L.005/PPS/03/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Batam, 10 Maret 2020.</p> <p>33. 1 (satu) Bundel PT. PALMA PROGRESS SHIPYARD, Berita Acara Peletakan Lunas, No. KL.012/PPS/09/2019, Jenis Kapal : Twin Screw Tug Boat, Diterbitkan : Batam, 19 September 2019.</p> <p>34. 1 (satu) Bundel Magnetic Compass Deviation Table 2 (On Monkey I.), Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Batam, 26 Maret 2020.</p> <p>35. 1 (satu) Bundel Magnetic Compass Deviation Table 1 (On Bridge), Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Batam, 26 Maret 2020.</p> <p>36. 1 (satu) Bundel PT. FOCUS TELESINDO UTAMA, NSR EPIRB Information Report, Vessel Royal Palma 37, diterbitkan: 22 April 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : 25 April 2020.</p> <p>38. 1 (satu) Bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), No. 2483, Pengirim/Penerima : PT. Palma Progress Shipyard, PPJK : PT. Cakrawala Nusa Nabilla, Merk Kemasan : Tug Boat "Royal Palma 37" 26 M Tug Boat 2 X 829 HP, Diterbitkan : Batam, 24 April 2020.</p> <p>39. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, dibuat di Rengat, 24 Maret 2022.</p> <p>40. 1 (satu) Bundel Buku SIJIL, Kapal Motor TB. Royal Palma 37.</p> <p>41. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan / Record of Inspection Persyaratan Pengawakan Minimum Requirements for Safe Manning, Nama Kapal TB. Royal Palma 37.</p> <p>r) Kapal Royal Palma XXXVIII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXXVIII.</p> <p>2. 1 (satu) bundel surat laut Nomor : AL.520/74/14/DK/2019 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Oktober 2019.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 8039/PPm Kapal Royal Palma XXXVIII dikeluarkan di Batam tanggal 30 September 2019.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/17/15/KSOP.MRd/2022 milik Kapal Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Marunda tanggal 22 April 2022.</p> <p>5. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor : AL.501/17/16/KSOP.Mrd/2022 Kapal Royal Palma XXXVIII PT. Delimuda Nusantara</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>diterbitkan di Marunda tanggal 22 April 2022.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari kapal National Pollution Prevention Certificate Nomor : AL.601/510/16/DK/2019 milik Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/2/21/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.602/10/7/DK/2022 milik Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan No. AL.601/390/8/DK/2020 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 9 Juni 2020.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification For Hull No. 045940 No. Register : 23932 Nama Kapal : Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 030435 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For Machinery No. 030045 No.Register 23932 Nama Kapal : Royal Palma XXXVI diterbitkan di Jakarta tanggal 22 November 2019.</p> <p>13. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor : 206/AP/DMI/VIII/2022 TK Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>14. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 220/AP/DMI/VIII/2021 TK Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 206/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/199783/187283/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : BXXV-903/AL.58 Nama Kapal : Royal Palma XXXVIII tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>18. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>19. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta Nama Kapal : Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 5426 tanggal 04</p>	
--	---	--

Halaman 240 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Oktober 2019.</p> <p>20. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance nomor : SO000479-19 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021, berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor : 025/BA/VIII/2019 Kapal Royal Palma XXXVIII Tanggal 03 Maret 2019</p> <p>22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 6577 tanggal 18 Oktober 2019 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam tanggal 18 Oktober 2019.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 05 November 2019.</p> <p>24. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>25. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 29 Juli 2022.</p>	
XVI.	<p>a) 1 (satu) bundel map merah TK.Royal Palma 2 yang berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat lembar surat ukur international (1969) international tonnage certificate (19690 No.1720/B.- tanggal 08 Juni 2000;2. Surat lembar Surat Laut No. PK.205/1260/SL-PM/DK-14 tanggal 5 Maret 2014;3. Surat Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. AL.501/15/1/KSOP.STT-2022 tanggal 26 Juli 2022;4. Surat Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. AL.501/15/2/KSOP.STT-2022 tanggal 26 Juli 2022;5. Surat Sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal No. AL.601/373/17/DK/2021 tanggal 02 Juni 2021;6. Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut AL.603/29/8/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022;7. Surat Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/17/4/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022;8. Surat Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak No. AL.602/17/3/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022;9. Surat Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/610/5/DK/2020 tanggal 22 September 2020;10. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Royal Palma - 2 No. Register : 6810 tanggal 15 Oktober 2020;11. Surat Sertifikat garis muat internasional No. : 032913 tanggal 15 Oktober 2020;12. Surat Re-Inspection Certificate TK Royal Palma 2 tanggal 27 April 2022;13. Surat Certificate Of Inspection Certificate No : 088 /ER-JKT/ FE/ IV/ 2022 Date of Inspection 27 April 2022;14. Surat Re Inspection Certificate No : 146/ER-JKT/HRU/IV/2022 Date of Inspection 27 April 2022;15. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Delimuda Nusantara Nama Kapal : Royal Palma 2 eks Royal Palma tanggal 22 April 2016 ;16. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan ANgkutan Laut (SIUPAL) Nomor :BXXV-	Dokumen Kapal Palembang

Halaman 241 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>903/AL58 tanggal 18 Maret 2002;</p> <p>17. Fotocopy Surat Grosse Akte pendaftaran kapal Nomor 2651 tanggal 7 Januari 2002 KM Royal Palma XI Eks Shunei Maru No.2 ;</p> <p>18. Fotocopy Surat certificate of Insurance No. S21082 Royal Palma 2;</p> <p>19. Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang WNI hari Rabu tanggal 05 Mei 2021.</p> <p>b) 1 (satu) bundel map merah TB. Royal Palma 9 yang berisikan:</p> <p>1. Surat Pas Besar Royal Palma 9 eks Delimuda II tanggal 19 Maret 2014;</p> <p>2. Surat Ukur No. 1700/Ba.- Royal Palma 9 Delimuda II tanggal 17 April 2000;</p> <p>3. Surat Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. AL.501/5/24/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>4. Surat Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. AL.501/5/25/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>5. Surat Sertifikat keselamatan radio kapal barang No. AL.502/2/1/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>6. Surat Kementerian Kominfo Izin Stasiun Radio Kapal Laut TB Royal Palma 9;</p> <p>7. Surat Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/3/21/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022</p> <p>8. Surat Sertifikat Nasional sistem anti teritip AL.601/3/20/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>9. Surat Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.601/40/8/DK/2022 tanggal 06 Januari 2022;</p> <p>10. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung Palma - 9 No. Register : 06240 tanggal 20 Juni 2022;</p> <p>11. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin Palma - 9 No. Register : 06240 tanggal 20 Juni 2022;</p> <p>12. Surat Re inspection certificate No. 157/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>13. Surat Re inspection certificate No. 158/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>14. Surat certificate fire extinguisher fire extinguishers Installation fire hoses safety anfd rescue equipment No. 175/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>15. Surat Certificate Hidrostatic Release unit No. 158/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>16. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Delimuda Nusantara Nama Kapal : Royal Palma 9 eks Deli muda II tanggal 22 April 2016</p> <p>17. Surat Kementerian Perhubungan Laut perihal keterangan tanda panggilan (call sign) Kapal Royal Palma 9 Eks deli Muda II tanggal 31 Agustus 2017;</p> <p>18. Surat Kementerian Perhubungan Laut perihal nomor identifikasi TB Royal Palma 9 28 Januari 2016;</p> <p>19. Surat Certificate of Insurance Nomor SO000479-14 EF Marine</p> <p>20. Fotocopy Surat Grosse Akte pendaftaran kapal Nomor 921 tanggal 4 Februari 1997 Kapal Deli Muda II ;</p> <p>21. Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang WNI hari Kamis tanggal 02 September 2021 ;</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>22. Buku Siji TB Royal Palma 9 milik PT. Delimuda Nusantara;</p> <p>23. Buku catatan minyak bagian I Operasi Ruang Permesinan TN Royal Palma 9 YD 4513;</p>	
XVII.	<p>a) Kapal TB. Royal Palma XVIII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XVIII oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 28 Agustus 2022.2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.PK.205/1267/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2014.3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 2089/PPm Nama Kapal : Royal Palma XVIII Dimensi Kapal : Panjang 74,88 M, Lebar 22,00 M, Tinggi 5,30 M Tonase Kotor 2278, Tonase Bersih 1296 dikeluarkan di Batam pada tanggal 15 Juni 2009.4. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/14/13/KSOP.DMI-2022 diterbitkan di Dumai pada tanggal 25 Mei 2022.5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety equipment Certificate No: AL.501/14/14/KSOP.DMI-2022 diterbitkan di Dumai pada tanggal 25 Mei 2022.6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/822/10/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 2021.7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/2/22/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 20228. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/8/9/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022;9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL.601/755/7/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2020.10. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 046507, No. Register : 12351 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020.11. 1 (Satu) Lembar fotocopy Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 03042 No. Register : 12351 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020.12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 030876 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020.13. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 209/AP/DMI/VIII/2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2022.14. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. :	Dokumen Kapal Rengat II

Halaman 243 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>361/AP/DMI/XII/2021 Nama Kapal : Royal Palma XVIII pada tanggal 10 Desember 2021.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Hydrostatic Release Unit No. : 209/AP/DMI/VIII/2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII di Dumai pada 10 Agustus 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/194576/182129/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76933/74718/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2021.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B.XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. AL.602/04/08/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 19 Agustus 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-29 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -1053-, Tanggal : 07 September 2009, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XVIII, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 29 Juli 2022.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL: TK. Royal Palma XVIII.</p> <p>b) Kapal TB. Royal Palma 5, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 28 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor: NO.AL.520/54/2/DK/2019 Kapal Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 9 Agustus 2019.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 7878/PPm Kapal Royal Palma 31 dikeluarkan di Batam tanggal 18 Juni 2019.</p> <p>4. 1 (satu) lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/13/9/DK/2022 Kapal Royal Palma 31 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor:</p>	
--	---	--



	<p>AL.501/3/20/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 31 diterbitkan di Rengat tanggal 27 April 2022.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/3/21/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 31 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 27 April 2022.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/14/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Rengat tanggal 27 April 2022.</p> <p>8. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari kapal National Pollution Prevention Certificate Nomor : AL.601/401/13/DK/2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Juni 2022.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/391/20/DK/2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/24/1/DK/2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Certificate of Classification Nomor : 19JK0613-CLS Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta 01 Oktober 2019.</p> <p>12. 1 (satu) bundel International Load Line Certificate Nomor : 19JK0613-LLC Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2019.</p> <p>13. 1 (satu) bundel sertifikat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor : 088/AP/DMI/III/2022 TB Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>14. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 094/AP/DMI/III/2022 TB Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>15. 1 (satu) bundel Certificate Hidrostatic Release Unit Nomor : 087/AP/DMI/III/2022 Royal Palma 31 Milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 24 Maret 2022.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/205477/191809/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 03 Agustus 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Surat Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : NV.101/03/1681-VIII/DV.2019 Perihal Nomor Identifikasi Royal Palma 31 Tanggal 7 Agustus 2019</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B XXV-903/AL/58 Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara Kapal Royal Palma 31 Tanggal 18 Maret 2002</p> <p>19. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.518/35/1/DK/2019 Perihal Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Agustus 2019.</p> <p>20. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV- 903/AL58 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta TB. Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 5353 tanggal 08 Agustus 2019.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 5267 tanggal 28 Agustus 2019 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam tanggal 05 Mei 2022.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor : SO000479-4 Royal Palma 31 Milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>24. 1 (satu) bundel Berita Acara Peletakan Lunas Nomor : No.KL.028/PPS/08/2013 diterbitkan di Batam Tanggal 30 Agustus 2013.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor : BC.005/PPS/03/2019 diterbitkan di Batam Tanggal 25 Maret 2019.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 02 Februari 2021.</p> <p>27. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>28. 1 (satu) bundel Buku Catatan Minyak</p>	
XVIII.	<p>a) 1 (satu) buah folder dokumen warna biru yang didalamnya terdapat dokumen kapal Royal Palma- IV yang terdiri dari:</p> <p>1. 1 (satu) set Surat Laut No. PK.205/1263/SL- PM/DK-14 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Maret 2014.</p> <p>2. 1 (satu) set Surat Ukur International (1969) Nomor : 402/PPj yang diterbitkan di Dumai tanggal 28 April 2000.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : AL.501/17/23/KSOP.DMI-2022 yang diterbitkan di Dumai tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>4. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : AL.501/17/24/KSOP.DMI-2022 yang diterbitkan di Dumai tanggal 07 Juli 2022 beserta Lampiran Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Peraturan Persyaratan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>5. 1 (satu) set Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/483/18/DK/2021 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2021 beserta lampiran Suplemen Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang Berlayar Di Dalam Negeri (NCVS) tanggal 23 Juli 2021.</p> <p>6. 1 (satu) set Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/498/9/DK/2020 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2020 beserta lampiran Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip tanggal 27 Juli 2020.</p> <p>7. 1 (satu) lembar Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/13/3/DK/2022 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2022.</p> <p>8. 1 (satu) lembar Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak No. AL.602/13/2/DK/2022 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Januari 2022.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Surat Nomor :</p>	Dokumen Kapal Batam

Halaman 246 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>AL.603/20/9/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Internasional No.032847 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 September 2020 beserta lampiran Pengukuhan Untuk Survey Tahunan.</p> <p>11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 049107 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 September 2020.</p> <p>12. 1 (satu) set Sertifikat Pemeriksaan Ulang No. 152/ILR/MPJ/V/22 tanggal 17 Mei 2022 beserta lampiran Inflatable Raft Test And Survey Report.</p> <p>13. 1 (satu) lembar Sertifikat No : 115/MPJ/HRU/V/22 dengan masa berlaku tanggal 16 Mei 2023.</p> <p>14. 1 (satu) lembar Sertifikat Pemeriksaan Ulang No : 090/PMK/MPJ/V/22 tanggal 17 Mei 2022.</p> <p>15. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/194189/182135/22 tanggal 20 Juni 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/174515/164219/22 tanggal 30 Maret 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/152697/144384/21 tanggal 26 Desember 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/131163/125354/21 tanggal 28 September 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/110985/106428/21 tanggal 27 Juni 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/90870/87787/21 tanggal 28 Maret 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>21. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/72971/69411/20 tanggal 27 Desember 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/52891/51515/20 tanggal 29 September 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/17094/16548/20 tanggal 31 Maret 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/70157/67878/20 tanggal 01 Januari 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>25. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/51267/49922/19 tanggal 30 September 2019 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>26. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/33867/32985/19 tanggal 30 Juni 2019 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p>	
--	---	--

Halaman 247 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>27. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.208/2000/12434/11400/21 tanggal 04 Juli 2021 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.208/2000/18515/16841/22 tanggal 01 Maret 2022 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri.</p> <p>29. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Spesifikasi Kapal yang Dimiliki Oleh Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara No: B.XXV-1070/AL.58 tanggal 17 Desember 1998.</p> <p>30. 1 (satu) set fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor : BXXV-903/AL58 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002 beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL / SIOPSUS Nomor : AL.010/548/DA-2018 tanggal 14 Mei 2018, 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL / SIOPSUS Nomor : AL.010/415/DA-2020 tanggal 14 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL / SIOPSUS Nomor : AL.010/412/DA-2022 tanggal 21 Mei 2022.</p> <p>31. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. AL.601/18/19/DK/2021 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>32. 1 (satu) lembar dokumen Bunker Convention Blue Card, Blue Card number BC20210662 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>33. 1 (satu) lembar dokumen CLC Blue Card, Blue Card number CLC20220019 yang diterbitkan tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>34. 1 (satu) lembar dokumen MLC Certificate, MLC Certificate number MLC420210607 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>35. 1 (satu) lembar dokumen MLC Certificate, MLC Certificate number MLC20210607 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>36. 1 (satu) lembar dokumen Wreck Removal Convention Blue Card, Blue Card Number WRC20210787 tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>37. 1 (satu) set dokumen Certificate Of Insurance, Reference number SO000479-37 tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>38. 1 (satu) set fotocopy Invoice, Ref No. 1185210 tanggal 3 Juli 2014 beserta Schedule Ikhtisar Pertanggungan No. Polis 031400001428 tanggal 23 Juni 2014.</p> <p>39. 1 (satu) set fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1213 tanggal 15 Mei 2000 atas nama kapal Tongkang "Royal Palma – IV", nama Pemilik PT. Delimuda Nusantara yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Dumai.</p> <p>40. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pemeriksaan Kondisi Tehnis Kapal Untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran Sesuai Persyaratan Dalam Konvensi Marpol '73/78 Annex-II atas kapal Royal Palma – IV, No. Register : 2000 PPj No. 1213/L tanggal 11-01-2016.</p> <p>41. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Tongkang Kapal Royal Palma – IV tanggal 06 Maret 2018.</p> <p>42. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Vessel Traffic Services (VTS) Petunjuk Penggunaan lalu Lintas Layanan Kapal.</p> <p>43. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Laporan Pemeriksaan Tongkang) yang diterbitkan di Batam tanggal 16 Januari 2014.</p> <p>44. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Laporan Pemeriksaan Tongkang) yang diterbitkan di Batam tanggal 11 Januari 2016.</p> <p>45. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara</p>	
--	---	--

Halaman 248 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/18/IV/KSOP.KC-2022 tanggal 19 April 2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Fiqi Ardiyansyah.</p> <p>46. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/10/V/KSOP.KC-2022 tanggal 19 Mei 2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Fajar Priadi Putra.</p> <p>47. 2 (dua) set Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/09/V/KSOP.KC-2022 tanggal 19 Mei 2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Wan Juni Rianto.</p> <p>48. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/12/VII/KSOP.KC-2021 tanggal 21 Juli 2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Nopi Indriyanto.</p> <p>49. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/07/II/KSOP.KC-2021 tanggal 09 Januari 2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Yuhendri.</p> <p>50. 1 (satu) set Buku Sijil berwarna biru atas nama kapal TK. Royal Palma – IV.</p> <p>51. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Purwanto selaku Pengirim (PT. Internusa Bahtera) dan Suheriman (TB Royal Palma Batam) selaku Penerima.</p> <p>b) 1 (satu) buah folder dokumen warna biru yang didalamnya terdapat dokumen kapal Royal Palma 21 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Surat Pas Besar Kapal Royal Palma 21 milik PT. Delimuda Nusantara, diterbitkan di Tanjung Priok 11 Desember 2013;1 (satu) bundel Surat Ukur International (1969) <i>International Tonnage Certificate (1969)</i> No.: 4450/PPm. Kapal Royal Palma 21 dikeluarkan di Batam tanggal 7 September 2012;1 (satu) bundel Surat Ukur International (1969) Sementara <i>International Tonnage Certificate (1969)</i> No. 4450/PPm. Kapal Royal Palma 21 berlaku sampai 06 Nopember 2012 dikeluarkan di Batam tanggal 7 September 2012;1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum <i>Minimum Safe Manning Document</i> No: AL.501/4/8/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21, tempat penerbitan dokumen Rengat, tanggal 28 Mei 2022, masa berlaku dokumen 27 Agustus 2022;1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang <i>Cargo Ship Safety Construction Certificate</i> No.: AL.501/4/6/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei 2022;	
--	---	--



	<p>6. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang <i>Cargo Ship Safety Equipment Certificate</i> No. AL.501/4/7/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei 2022 berserta Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Konvensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Protokol 1988 Dari Padanya <i>Record Of Equipment For Compliance With The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974 As Modified By The Protocol Of 1988 Relating Thereto</i> No. AL.501/4/7/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21;</p> <p>7. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang <i>Cargo Ship Safety Radio Certificate</i> No.: AL.502/1/15/KSOP.KC-2021, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei 2022 beserta Catatan Perlengkapan Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. AL.502/1/15/KSOP.KC-2021, Kapal Royal Palma 21;</p> <p>8. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 s/d 850 M³ Nama Kapal Royal Palma 21 Nomor Register 2012 PPM No.2575/L</p> <p>9. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. Pemegang Izin: 00109413 tanggal berlaku 05 April 2022 s/d 04 April 2027 Nama Stasiun Royal Palma 21;</p> <p>10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal <i>National Pollution Prevention Certificate</i> No.AL.601/09/09/KSOP.DMI-2022, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Dumai, pada tanggal 01 Juli 2022 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran Dari Kapal <i>Supplement Of National Pollution Prevention Certificate</i> AL.601/D9/09/KSOP.DMI-2022, Kapal Royal Palma 21, Dikeluarkan di Dumai tanggal 01 Juli 2022;</p> <p>11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal <i>National Pollution Prevention Certificate</i> No. AL.601/822/9/DK/2021, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Yang Berlayar Di Dalam Negeri (NCVS) Lampiran Sertifikat Nomor: AL.601/822/9/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip <i>National Anti Fouling System Certificate</i> No. AL.601/12/16/DK/2021 Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2021 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2021;</p> <p>13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar <i>National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage</i> No. AL.601/14/5/DK/2021 Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022;</p> <p>14. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Date: January 6th, 2022 Our ref.: AL.603/8/20/DK/2022;</p> <p>15. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal <i>National Load Line Certificate</i> No.: 012160, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Jakarta tanggal 23 Maret 2018;</p> <p>16. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin <i>Certificate Of Classification For Machinery</i> No. Register: 16638 Royal Palma 21 dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Maret 2018;</p> <p>17. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung <i>Certificate Of Classification For Hull</i> No. Register: 16638 Royal Palma 21 dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Maret 2018;</p> <p>18. 1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft</i> No.: 183/AP/DMI/VII/2022 Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Tanggal 06 Juli 2022 Pemilik & Alamat PT. Delimuda Nusantara-Jakarta beserta <i>Inflatable Liferaft Survey Report Certificate</i> Nomor: 183/AP/DMI/VII/2022 <i>Survey Date</i> 06 Juli 2022;</p> <p>19. 1 (satu) lembar <i>Certificate Hidrostatic Release Unit</i> Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Cert No.: 183/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;</p> <p>20. 1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft</i> No.: 184/AP/DMI/VII/2022 Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Tanggal 06 Juli 2022 Pemilik & Alamat PT. Delimuda Nusantara-Jakarta beserta <i>Inflatable Liferaft Survey Report Certificate</i> Nomor: 184/AP/DMI/VII/2022 <i>Survey Date</i> 06 Juli 2022;</p> <p>21. 1 (satu) lembar <i>Certificate Hidrostatic Release Unit</i> Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Cert No.: 184/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;</p> <p>22. 1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft</i> Nama Kapal: TB. Royal Palma - 21 tanggal 09 Agustus 2021, Pemilik Pt. Delimuda Nusantara - Jakarta, No. Sertifikat: ER.ILR-125 beserta <i>Survey And Test Report</i>.</p> <p>23. 1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft</i> Nama Kapal: TB. Royal Palma - 21 tanggal 09 Agustus 2021, Pemilik Pt. Delimuda Nusantara - Jakarta, No. Sertifikat: ER.ILR-126 beserta <i>Survey And Test Report</i>.</p> <p>24. 1 (satu) lembar <i>Certificate Of Inspection Fire Extinguisher</i> Certificate No: 097/ER-JKT/FE/VIII/2021 Name of Vessel: TB. Royal Palma - 21 Owner: PT. Delimuda Nusantara - Jakarta tanggal 09-08-2022;</p> <p>25. 1 (satu) lembar <i>Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation Fire Koses Safety And Rescue Equipment</i> No: 214/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 Name of Ship: TB. Royal Palma - 21 Owner: PT. Delimuda Nusantara Address: Jakarta-Indonesia;</p> <p>26. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/184040/173126/22 tanggal 11 Mei 2022 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>27. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/164216/155235/22 tanggal 16 Februari 2022 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>28. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/141319/134030/21 tanggal 08 November 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap</p>	
--	---	--

Halaman 251 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>29. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/120324/115493/21 tanggal 13 Agustus 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>30. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/101347/97452/21 tanggal 15 Mei 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>31. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/81809/78639/21 tanggal 11 Februari 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>32. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/63422/61479/20 tanggal 18 November 2020 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>33. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/43943/42578/20 tanggal 14 Agustus 2020 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>34. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/25190/24473/20 tanggal 12 Mei 2020 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>35. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/76924/73194/21 tanggal 16 Januari 2021 perihal: Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah;</p> <p>36. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/77093/73624/21 tanggal 18 Januari 2021 perihal: Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah;</p> <p>37. 1 (satu) lembar Lampiran: Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Nomor: B.XXV-903/AL.58, Tanggal: 18 Maret 2002, Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara, Nama Kapal: Royal Palma 21;</p> <p>38. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PK.203/35/11/DK-12 tanggal 19 November 2012 perihal: Tanda Panggilan (<i>Call Sign</i>) TB. ROYAL PALMA 21;</p> <p>39. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: NV.101/03/0226-IV/DV.2017 tanggal 4 April 2017 perihal: Nomor Identifikasi TB. ROYAL PALMA 21;</p> <p>40. 1 (satu) bundel Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXXV-903/AL58, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002 beserta Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS Nomor: AL.010/412/DA-2002, tanggal 21 Mei 2022;</p> <p>41. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Document Of Compliance No.AL.601/18/19/DK/2021, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021;</p> <p>42. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance, Reference number SO000479-9, Date Issued 31 Dec 2021, Assured PT. Delimuda Nusantara, Name Royal Palma 21;</p> <p>43. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2575, Tanggal: 25 Oktober 2012, Nama Kapal: Kapal Motor Tunda Royal Palma 21, Nama Pemilik: PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di: Jakarta Pusat;</p> <p>44. 1 (satu) lembar fotocopy Builder Certificate, Name of Vessel: Royal Palma 21, July 26th 2012;</p> <p>45. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Peletakan Lunas, Nama Kapal: Royal Palma 21, Batam 29 November 2011;</p> <p>46. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/04/XII/KSOP.KC-2021 tanggal 04/12/2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Endriadi;</p> <p>47. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/12/III/KSOP.KC-2022 tanggal 14/03/2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Rahmat Hidayat;</p> <p>48. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/30/I/KSOP.KC-2021 tanggal 22/01/2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Marlis;</p> <p>49. 2 (dua) ragkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/17/VI/KSOP.KC-2022 tanggal 16/06/2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Fran Basten Sirait;</p> <p>50. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/14/VII/KSOP.RGT-2019 tanggal 19/07/2019 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Dedy Rante Pasang;</p> <p>51. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/25/IX/KSOP.RGT-2019 tanggal 16/09/2019 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Wahyu Lazuardi;</p> <p>52. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/35/III/KSOP.KC-2020 tanggal 23/03/2020 yaitu antara pihak 1 Petrus</p>	
--	--	--

Halaman 253 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Suherman;</p> <p>53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Transpalm Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari Senin tanggal 09 Mei 2022, NO.PK 301/2/5/5/KSOP.Mrd-2022;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Transpalm Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari Senin tanggal 09 Mei 2022 NO.PK 301/2/7/5/KSOP.Mrd-2022;</p> <p>55. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Transpalm Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari Senin tanggal 09 Mei 2022 NO.PK 301/2/8/5/KSOP.Mrd-2022;</p> <p>56. 1 (satu) bundel Buku Sijil, Kapal Motor: TB. Royal Palma 21 Milik: PT. DN Berkedudukan: Rengat;</p> <p>57. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Dan Perlengkapan Kapal Barang, Nama Kapal : Royal Palma 21, Pemilik Kapal: PT. Delimuda Nusantara, Daerah Pelayaran: NCV tanggal 06-05-2014;</p> <p>58. 1 (satu) lembar check list ABK TB. Royal Palma 21;</p> <p>59. 1 (satu) lembar check list ABK TB. Royal Palma XVIII;</p> <p>60. 1 (satu) lembar list dokumen TB. Royal Palma 21 dan list dokumen TV. Royal Palma XVIII;</p> <p>61. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Agustus 2022, pengirim PT. Internusa Bahtera.</p>	
E. Barang Bukti Dokumen Pajak Yaitu:		
XIX.	<p>1. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2012 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-00089/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2015;</p> <p>2. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Panca Agro Lestari NPWP Nomor : 024913303216000 Periode Januari 2012 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-002/WPJ.02/KP/0405/2017;</p> <p>3. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Seberida Subur NPWP Nomor : 018527390213000 Periode Januari 2012 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-00033/WPJ.02/KP.0605/RIK.SIS/2017;</p> <p>4. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2013 s.d Desember 2013 dengan Nomor LHP : LAP-020/WPJ.02/KP.1005/2015;</p> <p>5. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2013 s.d Desember 2013 dengan Nomor LHP : LAP-126/WPJ.02/KP.10/2018;</p> <p>6. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2013 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-240/WPJ.02/KP.10/2018;</p> <p>7. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2014 s.d Desember 2014 dengan Nomor LHP : LAP-226/WPJ.02/KP.10/2019;</p> <p>8. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2014 s.d Desember 2014 dengan Nomor LHP : LAP-270/WPJ.02/KP.10/2019;</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak</p>	Disita dari Dwi Martanto

Halaman 254 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2014 s.d Desember 2014 dengan Nomor LHP : LAP-202/WPJ.02/KP.10/2019;</p> <p>10. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-119/WPJ.02/KP.10/2017;</p> <p>11. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-180/WPJ.02/KP.1005/2017;</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-6/WPJ.02/BD.04/2020;</p> <p>13. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-00049/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2020;</p> <p>14. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2016 s.d Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP-00012/WPJ.02/BD.04/2020;</p> <p>15. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2016 s.d Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP – 111/WPJ.02/KP.10/2018;</p> <p>16. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Seberida Subur NPWP Nomor : 018527390213000 Periode Januari 2016 s.d Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP – 00013/WPJ.02/BD.04/2020;</p> <p>17. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2017 s.d Desember 2017 dengan Nomor LHP : LAP – 098/WPJ.02/KP.10/2019;</p> <p>18. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2018 s.d Desember 2018 dengan Nomor LHP : LAP – 00091/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2020;</p> <p>19. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 dengan Nomor LHP : LAP – 00138/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;</p> <p>20. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Panca Agro Lestari NPWP Nomor : 024913303216000 Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 dengan Nomor LHP : LAP – 00092/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;</p> <p>21. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 dengan Nomor LHP : LAP-00014/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;</p> <p>22. 1 (satu) Rangkap Copy Rekap Statis SPT PT. Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani, Tahun Pajak 2012 s.d 2022.</p>	
Barang bukti angka D berupa dokumen kapal dan barang bukti E berupa dokumen pajak seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.		

F. BARANG BUKTI UANG DALAM REKENING YAITU:

XX.	Uang sejumlah Rp. 1.558.242.189.583,23 (Satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus	Disita Dari Surya
-----	---	-------------------

Halaman 255 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh tiga sen), USD 11.400.813,57 (Sebelas juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas koma lima puluh tujuh sen dollar amerika) dan SGD 646,04 (Enam ratus empat puluh enam koma nol empat sen dollar singapura) atas nama nasabah Aset Pacific dan Darmex Plantation yang tersimpan pada beberapa rekening Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:			Darmadi																																																																		
	<table><tr><th>No</th><th>Perorangan / Perusahaan</th><th>Nomor Rekening</th><th>Saldo</th></tr><tr><td rowspan="24">1</td><td rowspan="24">ASET PASIFIC</td><td>101-02-0577230-2</td><td>Rp. 25.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0577231-0</td><td>Rp. 100.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0577809-3</td><td>Rp. 50.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0579826-5</td><td>Rp. 50.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0580265-3</td><td>Rp. 50.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0582886-4</td><td>Rp. 100.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0582958-1</td><td>Rp. 50.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0583056-3</td><td>Rp. 90.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0583120-7</td><td>Rp. 5.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0583299-9</td><td>Rp. 100.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0583411-0</td><td>Rp. 100.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0583828-5</td><td>Rp. 5.500.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0584695-7</td><td>Rp. 10.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0592971-2</td><td>Rp. 140.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0593899-4</td><td>Rp. 200.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0594479-4</td><td>Rp. 50.000.000.000,00</td></tr><tr><td>101-02-0595472-8</td><td>Rp. 300.000.000.000,00</td></tr><tr><td>123-00-0635241-5</td><td>Rp. 1.106.783.153,84</td></tr><tr><td>124-00-0662397-0</td><td>Rp. 62.319.815.768,11</td></tr><tr><td>124-00-0736687-6</td><td>Rp. 327.928.936,94</td></tr><tr><td>101-00-1185589-5</td><td>SGD 646,04</td></tr><tr><td>124-02-0574869-3</td><td>Rp. 650.000.000,00</td></tr><tr><td>124-02-0578285-8</td><td>Rp. 1.000.000.000,00</td></tr><tr><td>124-02-0581595-5</td><td>Rp. 500.000.000,00</td></tr><tr><td>124-02-0583027-7</td><td>Rp. 500.000.000,00</td></tr><tr><td>124-02-0584420-3</td><td>Rp. 500.000.000,00</td></tr><tr><td rowspan="4">2.</td><td rowspan="4">Darmex Plantations</td><td>101-00-1033143-5</td><td>Rp. 22.169.767,80</td></tr><tr><td>108-00-2007876-3</td><td>Rp. 2.320.881.671,91</td></tr><tr><td>124-00-0769265-1</td><td>Rp. 63.494.610.284,63</td></tr><tr><td>124-00-0780415-7</td><td>USD 11.400.813,57</td></tr></table>	No	Perorangan / Perusahaan	Nomor Rekening	Saldo	1	ASET PASIFIC	101-02-0577230-2	Rp. 25.000.000.000,00	101-02-0577231-0	Rp. 100.000.000.000,00	101-02-0577809-3	Rp. 50.000.000.000,00	101-02-0579826-5	Rp. 50.000.000.000,00	101-02-0580265-3	Rp. 50.000.000.000,00	101-02-0582886-4	Rp. 100.000.000.000,00	101-02-0582958-1	Rp. 50.000.000.000,00	101-02-0583056-3	Rp. 90.000.000.000,00	101-02-0583120-7	Rp. 5.000.000.000,00	101-02-0583299-9	Rp. 100.000.000.000,00	101-02-0583411-0	Rp. 100.000.000.000,00	101-02-0583828-5	Rp. 5.500.000.000,00	101-02-0584695-7	Rp. 10.000.000.000,00	101-02-0592971-2	Rp. 140.000.000.000,00	101-02-0593899-4	Rp. 200.000.000.000,00	101-02-0594479-4	Rp. 50.000.000.000,00	101-02-0595472-8	Rp. 300.000.000.000,00	123-00-0635241-5	Rp. 1.106.783.153,84	124-00-0662397-0	Rp. 62.319.815.768,11	124-00-0736687-6	Rp. 327.928.936,94	101-00-1185589-5	SGD 646,04	124-02-0574869-3	Rp. 650.000.000,00	124-02-0578285-8	Rp. 1.000.000.000,00	124-02-0581595-5	Rp. 500.000.000,00	124-02-0583027-7	Rp. 500.000.000,00	124-02-0584420-3	Rp. 500.000.000,00	2.	Darmex Plantations	101-00-1033143-5	Rp. 22.169.767,80	108-00-2007876-3	Rp. 2.320.881.671,91	124-00-0769265-1	Rp. 63.494.610.284,63	124-00-0780415-7	USD 11.400.813,57	
No	Perorangan / Perusahaan	Nomor Rekening	Saldo																																																																			
1	ASET PASIFIC	101-02-0577230-2	Rp. 25.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0577231-0	Rp. 100.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0577809-3	Rp. 50.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0579826-5	Rp. 50.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0580265-3	Rp. 50.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0582886-4	Rp. 100.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0582958-1	Rp. 50.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0583056-3	Rp. 90.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0583120-7	Rp. 5.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0583299-9	Rp. 100.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0583411-0	Rp. 100.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0583828-5	Rp. 5.500.000.000,00																																																																			
		101-02-0584695-7	Rp. 10.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0592971-2	Rp. 140.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0593899-4	Rp. 200.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0594479-4	Rp. 50.000.000.000,00																																																																			
		101-02-0595472-8	Rp. 300.000.000.000,00																																																																			
		123-00-0635241-5	Rp. 1.106.783.153,84																																																																			
		124-00-0662397-0	Rp. 62.319.815.768,11																																																																			
		124-00-0736687-6	Rp. 327.928.936,94																																																																			
		101-00-1185589-5	SGD 646,04																																																																			
		124-02-0574869-3	Rp. 650.000.000,00																																																																			
		124-02-0578285-8	Rp. 1.000.000.000,00																																																																			
		124-02-0581595-5	Rp. 500.000.000,00																																																																			
124-02-0583027-7	Rp. 500.000.000,00																																																																					
124-02-0584420-3	Rp. 500.000.000,00																																																																					
2.	Darmex Plantations	101-00-1033143-5	Rp. 22.169.767,80																																																																			
		108-00-2007876-3	Rp. 2.320.881.671,91																																																																			
		124-00-0769265-1	Rp. 63.494.610.284,63																																																																			
		124-00-0780415-7	USD 11.400.813,57																																																																			
XXI.	Uang sejumlah Rp544.066.922.778,00,- (Lima ratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Bank BNI di beberapa rekening atas nama Asset Pasific dan Darmex Plantation dengan rincian sebagai berikut:			Disita dari Surya Darmadi																																																																		



putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rekening	Atas Nama	Jenis	Nilai
1	100100113	Aset Pacific	gno	63.848,382
2	1140713207	Aset Pacific	deposito	25.000.000.000
3	1101000125	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
4	1101000004	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
5	1104001210	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
6	1104000230	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
7	1104000704	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
8	1104000405	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
9	1104000901	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
10	1104000903	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
11	1104001727	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
12	1104000904	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
13	1104000909	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
14	1104000908	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
15	1104000907	Aset Pacific	deposito	10.000.000.000
16	2001000991	Darmas Plantation	gno	5.079,348
jumlah				344.896.922,738

XXII.

Uang sejumlah Rp3,020,879,952,618,- (tiga trilyun dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) atas nama nasabah Aset Pacific Edited yang tersimpan pada beberapa rekening Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekening	Saldo Akhir	Keterangan
037601001884305	5,979,952,618	
037601003450403	35,000,000,000	
037601003477405	70,000,000,000	
037601003687408	15,000,000,000	
037601004191400	15,000,000,000	
037601004226409	250,000,000,000	
037601004230408	50,000,000,000	
037601004357404	150,000,000,000	
037601004396408	280,000,000,000	
037601004609403	80,000,000,000	
037601004769407	25,000,000,000	
037601004797400	15,000,000,000	
037601004845407	4,900,000,000	
037601005064402	100,000,000,000	Diblokir pertanggal 25/08/2022
037601005552405	25,000,000,000	
037601005554407	125,000,000,000	
037601005555403	100,000,000,000	
037601005580408	100,000,000,000	
037601005626408	270,000,000,000	
037601005666408	450,000,000,000	
037601005771407	200,000,000,000	
037601005796407	150,000,000,000	
037601005822402	100,000,000,000	
037601005824404	50,000,000,000	
037601005886406	250,000,000,000	
037601005904408	55,000,000,000	
037601005907406	50,000,000,000	

Barang bukti uang dalam rekening sebagaimana angka XX sampai dengan XXII dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan USD

Halaman 257 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) [Telp : 021-384 3348](tel:0213843348) (ext.318)

Halaman 2



7,885,857.36 dengan ketentuan apabila nilai uang tunai tersebut jumlahnya melebihi kerugian keuangan negara maka sisanya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian perekonomian negara.

III. Barang Bukti Yang Disita di Penuntutan.

No	Nama Barang Bukti	Keterangan
1	2	3
A. DIPEROLEH SEBELUM TERJADINYA TINDAK PIDANA		
1.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Duta Palma Nusantara seluas 11.260 Ha berdasarkan HGU Nomor 01 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1988 yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
2.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Duta Palma Nusantara seluas 2.997 Ha berdasarkan HGU Nomor 03 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1997, yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	
3.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Cerenti Subur seluas 8.929 Ha berdasarkan HGU 03/Kuantan Sangingi yang diperoleh terdakwa pada tahun 1990, yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	
4.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Wana Jingga Timur seluas 4.196 Ha berdasarkan HGU 05/Kuantan Sangingi yang diperoleh terdakwa pada tahun 1995, yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	
5.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Eluan Mahkota seluas 5.933,19 Ha berdasarkan HGU 01 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1997, yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;	
6.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Johan Sentosa seluas 5.764 Ha berdasarkan HGU 00008 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1999, terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau	
7.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Bukit Jagoi Indah seluas + 5.700 Ha yang terletak di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2002;	
8.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Bukit Jagoi Indah seluas + 1.050 Ha yang terletak di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2003;	
9.	1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 888/XXXII/Central Park luas 109 M2 di Rusun Hunian dan Non Hunian Puri Casablanca Jl.Casablanca Kav No. 7 No.13.10 Lt 16 Blok B Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 2001 ;	
10.	1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 2641/XXI/Potinara luas 146 M2 Rusun Hunian dan Non Hunian Mal & Kondomonium Taman Anggrek Jl Letjen S. Parman Blok Potinara, Lt.23 No.23 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan kota Jakarta Barat atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 1998 ;	



	<p>11. 1 (satu) unit Apartemen berdasarkan HMRS Nomor : 832/XIX/Ansela luas 88 M2 Rumah Susun Hunian Mal & Kondominium Taman Anggrek Jl Letjen S. Parman Blok Anselia Lt.21 No.21C Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan kota Jakarta Barat atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 1998.</p> <p>12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 28.889 m2 atas nama PT Taluk Kuantan Perkasa yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1999 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 6;</p> <p>13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 11.910 M2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2003 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3283;</p> <p>14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.060 M2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 77;</p> <p>15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 14.450 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 75;</p> <p>16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 9.810 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 76;</p> <p>17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 17.570 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 79;</p> <p>18. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 9.190 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1974 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 80;</p> <p>19. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.600 M2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2001 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 194;</p>	
Agar barang bukti A No 1 s/d 19 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perokonomian negara.		
B. DIPEROLEH SELAMA TEMPUS		
	<p>1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya (Pabrik Biodiesel) atas nama PT Bayas Biofuels yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau seluas 19.750 M2 berdasarkan Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor: 10, yang diperoleh terdakwa pada tahun 2007;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Mekarsari Alam Lestari seluas 4.745,33Ha berdasarkan HGU 00008 yang diperoleh terdakwa pada tahun 2005, yang terletak di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Darmex Plantation seluas + 15.000 Ha di Desa Tempapan dan Desa Godang</p>	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022



	<p>Damar Kec. Samalantan Kab. Bengkayang Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Mitra Daya Permai seluas + 700 Ha di Kec. Seluas Kab. Bengkayang Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Ledo Lestari seluas + 20.000 Ha di Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, diperoleh terdakwa pada tahun 2004;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Lestari Alam Raya seluas + 14.000 Ha di Desa Sekadong, Capkala, Aris, Sebadut Kec. Sei Raya, Capkala, Monterado Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa pada tahun 2005;</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Mitra Wawasan seluas + 5.500 Ha di Desa Sanggoriuk dan Desa Danti Kec. Seluas dan Sanggau Ledo Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa tahun 2007;</p> <p>8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Asset Pasific International seluas + 2.000 Ha di Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa pada tahun 2010;</p> <p>9. 1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 779/XIII/B luas 880 M2 di Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & Apt. Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.35 No.CP-35 Blok Central Park Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 2005 (terdapat blokir KPK);</p> <p>10. 1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 816/XXXVII/Park Avenue luas 440 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & Apt. Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.40 No.PA-40A Blok Park Avenue Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atas nama Cheryl Darmadi perolehan tahun 2005 (terdapat blokir KPK);</p> <p>11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00044</p> <p>12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00041</p> <p>13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00045</p> <p>14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00039;</p> <p>15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang</p>	
--	---	--



	<p>terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00046</p> <p>16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00037;</p> <p>17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00038;</p> <p>18. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00036;</p> <p>19. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 16.372M2 atas nama Cheryl Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 718;</p> <p>20. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 19.997 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 719;</p> <p>21. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 19.997 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 720;</p> <p>22. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 753;</p> <p>23. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 7.513 M2 atas nama Cheryl Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 754;</p> <p>24. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 725;</p> <p>25. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4484;</p> <p>26. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 578;</p> <p>27. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 737;</p> <p>28. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 81.560 M2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau,</p>	
--	--	--



	<p>yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00225;</p> <p>29. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.335 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00226;</p> <p>30. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 5.144 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00227;</p> <p>31. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 31.070 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00228;</p> <p>32. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 51.000 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00229;</p> <p>33. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 53.495 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00196;</p> <p>34. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 47.273 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00198;</p> <p>35. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 55.877 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00197;</p> <p>36. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 7.414 m2 atas nama PT Oleo Kimia Sejahtera Mas yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00194;</p> <p>37. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 300 m2 atas nama PT Duta Palma Nusantara yang terletak di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2005 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 231;</p> <p>38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 176 M2 atas nama PT Danatama Mulia yang terletak di Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 827;</p> <p>39. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-2001 lantai 20 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 005/PSA/LGL.et/II/2011 atas nama Surya Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>40. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-0503 lantai 5 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 003/PSA/LGL.et/II/2011 atas nama Surya Darmadi tahun perolehan 2011;</p>	
--	--	--



	<p>41. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-1003 lantai 10 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 001/PSA/LGL.et/II/2011 atas nama Cheryl Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>42. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-1103 lantai 11 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002/PSA/LGL.et/II/2011 atas nama Cheryl Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>43. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The South Unit ES1-1701 lantai 17 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 013/PSA/LGL/II/2014 atas nama Bill Darmadi tahun perolehan 2014;</p> <p>44. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-2502 lantai 25 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 036/PSA/LGL/V/2015 atas nama PT Delimuda Nusantara tahun perolehan 2015;</p> <p>45. 8 (delapan) unit Satuan Rumah Susun Non Hunian Sopodel Tower B Lantai 20, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, unit 7 dan unit 8 terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dibeli terdakwa Surya Darmadi Tahun 2017 melalui perusahaan milik Terdakwa atas nama PT Permata Dumai Abadi.</p>	
Agar barang bukti B No 1 s/d 45 yang diperoleh selama terjadinya tindak pidana dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.		
C. PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK TERDAKWA YANG SAAT INI TIDAK AKTIF.		
	<p>1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Bengkayang Subur seluas + 20.000 Ha di Desa Serangkat, Desa Sempayuk, Desa Belimbing, Desa Rodaya, Desa Lamolda Kec. Ledo Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat yang diperoleh Terdakwa Tahun 2004;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Dumai Inti Utama seluas + 4.388 Ha terletak di Desa Malo Jelayan, Desa Bongkang, Desa Tampe Desa Puteng dan Desa Telidik Kec. Teriak Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, yang diperoleh terdakwa tahun 2004;</p>	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
Agar barang bukti C no. 1 s/d 2 yang diperoleh selama terjadinya tindak pidana dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. BARANG BUKTI KAPAL MILIK TERDAKWA MELALUI PT DELIMUDA NUSANTARA		
	1. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma I, ukuran panjang 29,91 meter, Lebar 8,30 meter, D 3,60 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 222, Tonase Bersih (NT) 67, IMO Number 7856264, Call sign YD4643, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
	2. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 5, ukuran panjang 21.90 meter, Lebar 7.00 meter, D 2.80 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 120, Tonase Bersih (NT) 72, IMO Number 9024097, Call sign YD3076, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	3. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 13, ukuran panjang 26.78 meter, Lebar 7.15 meter, D 3.38 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 157, Tonase Bersih (NT) 48, IMO Number 8737661, Call sign YD3400, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	4. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma-XVI, ukuran panjang 69,12 meter, Lebar 20.00 meter, D 4,88 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 1849, Tonase Bersih (NT) 1015, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	5. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XX, ukuran panjang 74.88 meter, Lebar 22.00 meter, D 5.30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2263, Tonase Bersih (NT) 1141, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	6. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 25, ukuran panjang 21.00 meter, Lebar 8.80 meter, D 3.00 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 166, Tonase Bersih (NT) 50, IMO Number 9084413, Call sign YDA3495, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	7. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXVI, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	8. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 27, ukuran panjang 23,68 meter, Lebar 8.00 meter, D 3,65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 192, Tonase Bersih (NT) 58, IMO Number 9779642, Call sign YDA3791, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	
	9. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXVIII, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT)	

Halaman 264 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>10. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 29, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9881914, Call sign YDB3085, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>11. 1 (satu) unit Kapal ROYAL PALMA XXX, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>12. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXII, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>13. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 33, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9894117, Call sign YDB3151, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>14. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXIV, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>15. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 35, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9906001, Call sign YDB3195, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>16. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 36, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 3.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>17. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 37, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9908891, Call sign YDB3219, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>18. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXVIII, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter,</p>	
--	---	--



	<p>Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>19. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>20. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>21. 1 (satu) unit Kapal TB.Royal Palma 15 GT 138, NT 42;</p> <p>22. 1 (satu) unit Kapal BG. Indo Ocean Marine IX GT 1596, NT 1317;</p> <p>23. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma III GT 104, NT 62;</p> <p>24. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XII GT 935, NT 731;</p> <p>25. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma XI GT 151, NT 90;</p> <p>26. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XIV GT 2278, NT 1288;;</p> <p>27. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XXIV GT 1683, NT 1075.</p>	
Agar barang bukti D no 1 s/d 27 berupa kapal dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.		
E. KENDARAAN BERMOTOR MILIK TERDAKWA ATAS NAMA ISTRI, ANAK DAN MENANTUNYA		
	<p>1. 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz tipe C 180 AT dengan No.Pol. B-2039-SK tahun pembuatan 1995 atas nama Sutanti Hadi ;</p> <p>2. 1 (satu) buah mobil Mini Cooper tipe John Cooper Works dengan No.Pol. B-20-AMD tahun pembuatan 2016 atas nama Monica Marthen ;</p> <p>3. 1 (satu) buah mobil Porsche tipe Cayman dengan No.Pol. B-913-GTS tahun pembuatan 2013 atas nama Monica Marthen;</p> <p>4. 1 (satu) buah mobil BMW tipe 630/AT dengan No.Pol. B-8-UW tahun pembuatan 2005 atas nama Cheryl Darmadi ;</p> <p>5. 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz tipe S 320 L AT dengan No.Pol. B-34-UW tahun pembuatan 1998 atas nama Cheryl Darmadi ;</p> <p>6. 1 (satu) buah mobil BMW tipe 7351 LA dengan No.Pol. B-182 tahun pembuatan 2003 atas nama Cheryl Darmadi ;</p> <p>7. 1 (satu) buah mobil Nissan tipe Serena dengan No.Pol. B-118-QD tahun pembuatan 2004 atas nama Cheryl Darmadi.</p>	<p>Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022</p>
Agar barang bukti E No. 1 s/d 7 berupa kendaraan bermotor dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian perekonomian negara.		
F. ASSET BERUPA SID		



	SID CPD2412DYX79485 atas nama PT Menara Capital Indonesia yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi saham MCOL.	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022																																																							
Agar barang bukti F berupa asset saham dalam rekening SID CPD2412DYX79485 atas nama PT MENARA CAPITAL INDONESIA dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian perekonomian negara.																																																									
G. ASET ATAS NAMA TERDAKWA SURYA DARMADI DI SINGAPURA DAN AUSTRALIA																																																									
1	Asset pada beberapa rekening perbankan di Singapura dan Australia yaitu: a) Rekening Bank atas nama Asset Pacific Pty Ltd di Australia Account Number: 033-157-771-963 di Wastpac Bank. b) Rekening Bank atas nama Rich Asian Pte Ltd di City Bank N.A, Singapore Branch Nomor: 0-860456-001 beralamat di 8 Marina View #21-00 Asia Square Tower 1 Singapore 018960 c) Rekening Bank atas nama Palmbridge Pte Ltd di Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Nomor Account 0107197871 d) Rekening Palmbridge Pte Ltd di City Bank Singapura Nomor Account 0- 860782-006 e) Rekening Bank atas nama Waxbill Pte Ltd di City Bank Singapura Nomor account: 0860518015;	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022																																																							
2	Asset harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pembelian asset yaitu: a) 1 (satu) unit Office Tower 2#41 beralamat di 9 Temasek Boulevard #23- 01/02/03 Singapore 038989 b) 1 (satu) unit Office Tower 2#23 beralamat di 9 Temasek Boulevard #23- 01/02/03 Singapore 038989.	Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022																																																							
3	Asset berupa 22 unit apartement di Singapura Yang terletak di Draycott 8, 8 Draycott Park, Singapore 259404 yang terdiri atas: <table><tr><td></td><td>Unit #02-05,</td><td>12.</td><td>Unit #14-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #03-05,</td><td>13.</td><td>Unit #15-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #04-05,</td><td>14.</td><td>Unit #16-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #05-05</td><td>15.</td><td>Unit #17-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #06-05</td><td>16.</td><td>Unit #18-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #07-05</td><td>17.</td><td>Unit #19-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #09-05</td><td>18.</td><td>Unit #20-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #10-05</td><td>19.</td><td>Unit #21-05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unit #11-05</td><td>20.</td><td>Unit #22-05</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>Unit #12-05</td><td>21.</td><td>Unit #23-05</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>Unit #13-05</td><td>22.</td><td>Unit #24-05</td><td></td></tr></table>		Unit #02-05,	12.	Unit #14-05			Unit #03-05,	13.	Unit #15-05			Unit #04-05,	14.	Unit #16-05			Unit #05-05	15.	Unit #17-05			Unit #06-05	16.	Unit #18-05			Unit #07-05	17.	Unit #19-05			Unit #09-05	18.	Unit #20-05			Unit #10-05	19.	Unit #21-05			Unit #11-05	20.	Unit #22-05		10.	Unit #12-05	21.	Unit #23-05		11.	Unit #13-05	22.	Unit #24-05		
	Unit #02-05,	12.	Unit #14-05																																																						
	Unit #03-05,	13.	Unit #15-05																																																						
	Unit #04-05,	14.	Unit #16-05																																																						
	Unit #05-05	15.	Unit #17-05																																																						
	Unit #06-05	16.	Unit #18-05																																																						
	Unit #07-05	17.	Unit #19-05																																																						
	Unit #09-05	18.	Unit #20-05																																																						
	Unit #10-05	19.	Unit #21-05																																																						
	Unit #11-05	20.	Unit #22-05																																																						
10.	Unit #12-05	21.	Unit #23-05																																																						
11.	Unit #13-05	22.	Unit #24-05																																																						



4	Properti di Australia pembelian menggunakan Asset Pacific Pty Ltd yang terletak di 235 Queen Street, Melbourne, Victoria, 3000.					Penetapan Penyitaan No:62/Pen.Pid .Sus/TPK/XII/2 022/PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
5	Kepemilikan property berupa Gedung kantor di 7 Temasek Boulevard #40-01 Suntec Tower One, Singapura 038987.					
6	Kepemilikan property berupa Gedung kantor 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One #41-01 Singapura.					
7	Kepemilikan property di 21th Nassim Park Residence #18-01 Orchard Road Singapura.					
Agar barang bukti G 1 s/d 7 berupa asset yang terdapat di Singapura dan Australia dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian perekonomian negara.						

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian Uang**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa SURYA DARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan PENCUCIAN UANG**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp2.238.274.248.234,00;(dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan membayar kerugian perekonomian**

Halaman 268 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp39.751.177.520.000,00;(tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

I. BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI :

No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
1	2	3
A. BARANG BUKTI FOTOCOPY DOKUMEN :		
I.	<ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit XXX Serangge Sengkilo pada UPT KPH Indragiri Provinsi Riau Periode 2020-2029;2) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati No : 215 Tahun 2003 Tanggal 29 September 2003;3) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. Kpts. 1204/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 105 An. Wang Yurizal, S.Hut;4) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/II/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 490 An. Wang Yurizal, S.Hut;5) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1248/VIII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 137 An. Kasman Dahlan, S. Hut;6) 1 (satu) Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1/II/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau No. Urut 492 An. Kasman Dahlan, S. Hut;7) 1 (satu) Bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.	Disita dari WANG YURIZAL, S.Hut, tanggal 10 Juni 2022
II.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Kencana Amal Tani yang didalamnya berisi :<ol style="list-style-type: none">1.1 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Nomor : 34 Tahun 1996 tanggal 07 Juni 1996;1.2 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Perpanjangan izin Lokasi Untuk	Disita dari ENDANG MULYAWAN, S.Hut, M. Si tanggal 09 Juni 2022

Halaman 269 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkebunan Nomor : 08/VI/PIL/1998 tanggal 23 Juni 1998;	
1.3	1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perkebunan perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT Kencana Amal Tani, Propinsi Riau tanggal Januari 1997;	
1.4	1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah ada Izin Usaha tahun 2011 tanggal 09 Januari 2012;	
1.5	1 (satu) rangkap Fotokopi surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 810//PMDN/1988 Nomor Proyek : 1110/3552-09-05577;	
1.6	1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 477/III/PMDN/1996 perihal Persetujuan Perubahan Bidang usaha, Jenis/Kapasitas produksi dan rencana investasi (model II/D) PT. Kencana Amal Tani dalam rangka PMDN tanggal 23 Oct 1996;	
1.7	1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 43/III/PMDN/1999 perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal tanggal 24 Februari 1999;	
1.8	1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 185/III/PMDN/1999 perihal Persetujuan perubahan rencana Penanaman modal tanggal 27 Juli 1999;	
1.9	1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 311/III/PMDN/1999 perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penanaman Modal tanggal 29 Nov 1999;	
1.10	1 (Satu) rangkap Fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, II. RENCANA INVESTASI , III. RENCANA SUMBER PEMBIAYAAN/PERMODALAN;	
1.11	1 (Satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 438/BPT 04.01/IV/2012 tanggal 03 April 2012;	
1.12	1 (satu) lembar fotokopi surat pemerintah kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP 040114604914 berlaku s/d 16 Februari 2015 tanggal surat 03 April 2012;	
1.13	1 (satu) lembar fotokopi surat Daftar : Data Perizinan yang telah disampaikan, Nama Perusahaan : PT Kencana Amal Tani;	
1.14	1 (satu) rangkap fotokopi surat PT Kencana Amal Tani no : 693/Leg/Eks/KAT/IV/2016 tanggal 26 April 2016 perihal Penyapaian izin-izin;	
1.15	1 (satu) rangkap fotokopi surat Menteri Pertanian RI nomor : HK.350/E4.267/11.87 tanggal 25 November 1987 perihal izin/persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Coklat dan kelapa Hibrida seluas 2.500 Ha (intercropping) serta karet seluas 5.000 Ha di Kab. Indragiri Hulu Prop. Riau;	
1.16	1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 83 Tahun 2008 Tentang KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEBERIDA DAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROPINSI RIAU OLEH PT KENCANA AMAL TANI;	
1.17	1 (satu) lembar fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bupati Indragiri Hulu nomor : 114/BPMD & PPT/BP-IMB/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013;	
1.18	1 (satu) lembar fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bupati Indragiri Hulu nomor :	

Halaman 270 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	115/BPMD & PPT/BP-IMB/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013;	
1.19	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Tentang Izin Gangguan nomor : 1189/03.01/BPTPM/IV/2016 Tanggal 08 April 2016;	
1.20	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP : 040114604914 berlaku s/d tgl 16 Februari 2020 tanggal 08 April 2016 nama perusahaan PT. Kencana Amal Tani;	
1.21	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 31/B.04.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 08 April 2016 Nama Perusahaan : PT Kencana Amal Tani;	
1.22	1 (satu) rangkap Fotokopi surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 52/T/Industri/Pertanian/2008 Tentang Izin Usaha Tetap PT Kencana Amal Tani tanggal 25 Januari 2008;	
1.23	1 (satu) rangkap fotokopi surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu nomor : 11/BPMD & PPT/BP/SIPPA-P/V/2014 tentang izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) permukaan tanggal 23 Mei 2014;	
1.24	1 (Satu) rangkap foto kopi Surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu nomor : 10/BPMD&PPT/BP-LB3/IX/2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan beracun an. PT Kencana Amal Tani tanggal 17 September 2014;	
1.25	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Lingkungan Hidup Rengat nomor : 660/BLH-Inhu/VII/2014/191 tanggal 24 Juli 2014 Perihal Pengantar rekomendasi izin tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;	
1.26	1 (satu) rangkap fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Lingkungan Hidup Rengat nomor : 660/BLH-Inhu/VII/2014/190 tanggal 24 Juli 2014 Perihal Rekomendasi izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 An. PT. Kencana Amal Tani;	
2.	1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Kencana Amal Tani yang didalamnya berisi :	
2.1	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Rengat nomor : 03/BPMD-PPT/BP//2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Teguran terhadap kewajiban retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
2.2	1 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Rengat nomor : 259/BPMD-PPT/UM/XI/2012 tanggal 01 November 2012 Perihal Pengantar Retribusi izin Mendirikan Bangunan terhutang;	
2.3	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu nomor : 090/Palma 1/PKU/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan Rekomendasi	

Halaman 271 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	Pelepasan Kawasan HPK;	
2.4	1 (satu) rangkap fotokopi surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan nomor : 5.205/KUH-5/2011 tanggal 09 Maret 2011 Perihal Hasil Telaahan Status Areal;	
2.5	1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 791/9-14/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Perihal Mohon supaya tidak mengesahkan hak guna usaha yang dimohon PT Palma Satu untuk keperluan Pembangunan Kebun kelapa sawit di desa Penyaguan;	
2.6	1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu nomor : 32/Adm.Pum/100/2010 tanggal 21 Februari 2010 perihal keberadaan PT Palma Satu di Kabupaten Indragiri Hulu;	
2.7	1 (satu) rangkap fotokopi surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan nomor : S.121/BPP/2012 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Kelengkapan persyaratan permohonan Pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;	
2.8	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu Nomor : 04/PS-PKU//10 hal : permohonan Perpanjangan izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 05 Januari 2010;	
2.9	1 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma Satu no : 364/UM-PKU/XII/09 tanggal 11 Desember 2009 hal Permohonan untuk menghadap;	
2.101	(satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat nomor : 179/ADM.PUM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Pemasangan Patok Tapal Batas Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Penyaguan dengan PT Palma Satu seluas 3.000 Ha;	
2.111	(satu) rangkap fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat, Laporan Hasil Pengecekan dan Peninjauan Lapangan Terkait Lahan/Desa Masyarakat Penyaguan seluas ± 3000 Ha yang mohon di Inclave dalam Lahan PT Palma Satu;	
2.121	(satu) lembar fotokopi surat Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat perihal Lahan desa atau masyarakat Penyaguan seluas ± 3.000 Ha yang mohon di inclave dalam lahan PT Palma Satu tanggal 2 Juni 2010;	
2.131	(satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor : 228/Adm.Pum/100/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal status izin lokasi	



	<p>PT. Palma Satu;</p> <p>2.141 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Rengat Nomor : 23/TP/100/2008 tanggal Agustus 2008 perihal Panggilan Menghadap;</p> <p>2.151 (satu) rangkap fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pendapatan Daerah Rengat Nomor : 977/DIPENDA/2012/131 tanggal 11 April 2012 perihal Tindak Lanjut Pansus Duta Palma Group;</p> <p>2.161 (satu) rangkap fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional RI nomor : 4169/252-600/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 perihal Laporan Dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan PT Palma Satu di Batas Kabupaten Indragiri Hulu-Indragiri Hilir, Provinsi Riau;</p> <p>2.171 (satu) lembar fotokopi surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia nomor : S. 278/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 04 Maret 2013 perihal Tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan An PT Palma Satu;</p> <p>2.181 (satu) rangkap fotokopi surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau nomor : 522.1/Planhut/800 tanggal 28 Maret 2014 perihal Revisi Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi untuk perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Palma Satu;</p> <p>2.191 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 200 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 Tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan Kebun kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 30 Juli 2010;</p> <p>2.201 (satu) lembar fotokopi Surat bupati Indragiri Hulu nomor 31/ADM.PUM/100/I/2013 Tanggal 25 Januari 2013 perihal Penjelasan Permasalahan PT Palma Satu;</p> <p>2.211 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Indragiri Hulu nomor : 870/Disbun-S/V/2015/597 tanggal 7 Mei 2015 perihal Teguran Pertama;</p> <p>2.221 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Indragiri Hulu nomor 870/Disbun-S/VI/2015/761 tanggal 12 Juni 2015 perihal teguran Kedua;</p> <p>2.231 (satu) rangkap fotokopi Lembar Dipsosisi Index 174 Tanggal Penyelesaian 30-11-2012 perihal Permintaan penyelesaian Lahan Permasalahan Lahan;</p> <p>2.241 (satu) lembar fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Sekretariat Daerah Bagian umum Kepada Tapem, Lembar Pengantar tanggal 23-10-2013;</p> <p>2.251 (satu) rangkap Fotokopi keputusan Bupati Indragiri</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Hulu no 180 tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 8 Juli 2010;</p> <p>2.261 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Indragiri Hulu perihal penghentian aktivitas di lahan masyarakat desa Penyaguan Kecamatan batang gansal nomor : 118/ADM.PUM/100/V/2011 Tanggal 20 Juni 2011;</p> <p>2.271 (satu) lembar fotokopi surat Bupati Indragiri Hulu Perihal Penghentian aktivitas penguasaan dan pengelolaan lahan desa Penyaguan nomor : 338/UIN/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009;</p> <p>2.281 (satu) rangkap fotokopi surat PT Palma Satu perihal tanggapan surat bupati Indragiri Hulu nomor 118/ADM.PUM/100/VI/2011 nomor : 0168/UN/PS/PKU/VI/XI tanggal 30 Juni 2011;</p> <p>2.291 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma Satu tanggal 08 Juli 2010;</p> <p>2.301 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati Indragiri Hulu nomor 91 tahun 2007 Tentang izin Usaha Perkebunan An PT Palma Satu tanggal 26 Februari 2007;</p> <p>2.311 (satu) lembar fotokopi daftar : Data perizinan yang telah disampaikan, Nama perusahaan : PT Palma Satu tanggal 2 Juni 2016;</p> <p>2.321 (satu) rangkap fotokopi surat dinas pertanahan kabupaten Indragiri Hulu nomor 12.A./IL-DPT/III/2007 tanggal 18 Februari 2007 perihal Rekomendasi Izin Lokasi;</p> <p>2.331 (satu) lembar fotokopi surat PT Palma satu nomor: legal-PS/X/1702/IV/2016 tanggal 28 April 2016 perihal daftar perizinan yang dimiliki oleh PT Palma Satu;</p> <p>2.341 (satu) rangkap keputusan bupati Indragiri Hulu nomor 90 tahun 2007 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit an Palma Satu tanggal 26 Februari 2007;</p> <p>2.351 (satu) lembar fotokopi surat penyampaian izin-izin PT Palma Satu nomor 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 20016;</p> <p>2.361 (satu) lembar fotokopi surat izin usaha perdagangan menengah nomor 214/M.04.01/BPTPM/III/2014 tanggal 7 Maret 2014;</p> <p>2.371 (satu) lembar fotokopi Tanda daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) tanggal 07 Maret 2014 nomor TDP : 040114682497 berlaku s/d 7 Maret 2019;</p> <p>2.381 (satu) lembar fotokopi surat Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan</p>	
--	--	--

Halaman 274 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Penanaman Modal Kota Pekanbaru tentang izin gangguan nomor 0804/03.01/BPTPM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014;</p> <p>2.391 (satu) rangkap fotokopi surat dinas Pertanahan Pematang Reba nomor : 590/TGP-II/2007/02 tanggal 23 Februari 2007 perihal Rekomendasi teknis izin lokasi PT Palma Satu;</p> <p>2.401 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan kegiatan perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit di kecamatan Seberida dan kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau oleh PT Palma Satu tanggal 14 April 2008;</p> <p>2.411 (satu) rangkap fotokopi surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor : 522.1/lanhut/5657 tanggal 26 Desember 2012 perihal pertimbangan teknis permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Palma Satu;</p> <p>2.421 (satu) lembar fotokopi surat badan Pelayanan Perizinan Terpadu provinsi Riau nomor 503/BP2T-IR/II/2013/48 tanggal 4 Februari 2013 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kebun kelapa sawit PT Palma Satu;</p> <p>3. 1 (Satu) MAP warna hijau bertuliskan PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) yang berisi :</p> <p>3.1 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Panca Agro Lestari Nomor : 050/DISBUN-Pengem/709 tanggal 08 Agustus 2012;</p> <p>3.2 1 (satu) rangkap foto copy Surat Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Sekretaris Daerah Indragiri Hulu Perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Nomor : 870/DISBUN/VII/2011/639;</p> <p>3.3 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Indragiri Hulu perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Nomor 70/Disbun-VI/2011/556 tanggal 21 Juni 2011;</p> <p>3.4 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 tahun 2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 20 September 2005.</p> <p>3.5 1 (satu) rangkap foto copy surat bupati Indragiri Hulu Nomor: 89 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. SEBERIDA SUBUR tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>3.6 1 (satu) rangkap foto copy surat permohonan</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 0125/PS/PKU/IV/10 tanggal 20 April 2010.	
3.7	1 (satu) lembar foto copy surat pemerintahan kabupaten Indragiri hulu perihal permohonan izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 0125/PS/PKU/IV/10 tanggal 22 April 2010.	
3.8	1 (satu) lembar foto copy surat bupati Indragiri Hulu perihal tindak lanjut permohonan izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 79/ADM.PUM/100/VI/2010 tanggal 06 Mei 2010.	
3.9	1 (satu) lembar foto copy surat pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu perihal tindak lanjut permohonan izin lokasi PT.PANCA AGRO LESTARI dan PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 59/ADM.PUM/100/IV/2014 tanggal 23 April 2014.	
3.10	1 (satu) rangkap foto copy surat pemerintah kabupaten Indragiri Hulu Notulen rapat Koordinasi pembahasan revisi izin lokasi PT. BANYU BENING UTAMA, PT. AGRO LESTARI, PT. INTI INDO SAWIT SUBUR Tanggal 11 April 2014.	
3.111	(satu) lembar foto copy surat bupati Indragiri Hulu perihal revisi izin lokasi Nomor 06/Adm.Pum/100/II/2014 tanggal 02 Januari 2014.	
3.12	1 (satu) lembar foto copy surat PT. PANCA AGRO LESTARI kantor perwakilan Pekanbaru perihal revisi penggabungan izin lokasi Nomor : Legal PAL-PKU/X/039/II/2014 tanggal 15 Januari 2014.	
3.131	(satu) lembar foto copy surat pernyataan kesepakatan atas nama PT. PANACA AGRO LESTARI tanggal 04 Mei 2012.	
3.14	1 (satu) rangkap foto copy akte Notaris & PPAT MEILINA SIDARTA, S.H berita acara Perseroan Terbatas PT. PANCA AGRO LESTARI, berkedudukan di Pekanbaru-kota madya Pekanbaru Nomor: 37 Tanggal 26 Juni 2008.	
3.15	1 (satu) lembar foto copy surat bupati Indragiri Hulu izin mendirikan bangunan Nomor; 42/180/HK/tahun 2008 Tanggal 18 April 2008.	
3.161	(satu) lembar foto copy surat pemerintah kabupaten Indragiri hulu camat batang gansal perihal rekomendasi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor 60/530.08/II/2008 tanggal 25 Februari 2008.	
3.171	(satu) lembar foto copy surat keputusan walikota Pekanbaru Nomor; 286/H/BPT/WK-2009 Tentang izin tempat usaha tanggal 29 Januari 2009.	
3.18	1 (satu) lembar foto copy surat pemerintah kota	

Halaman 276 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Pekanbaru dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar Nomor: 58/Dinas04.01/USDAG/II/2009 Tanggal 11 Februari 2009.</p> <p>3.191 (satu) lembar foto copy surat pemerintah kota Pekanbaru kecamatan bukit raya surat keterangan domisili usaha Nomor: 98/BR/SKDU/2008 Tanggal 04 Desember 2008.</p> <p>3.201 (satu) lembar foto copy tanda daftar perusahaan PT. PANCA AGRO LESTARI.</p> <p>3.21 1 (satu) lembar foto copy surat departemen keuangan republik Indonesia surat keterangan terdaftar Nomor: PEM-PB 124/WPJ.02/KP.0403/2009 Tanggal 11 Maret 2009.</p> <p>3.22 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-93929.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Panca Agro Lestari tanggal 05 Desember 2008;</p> <p>3.231 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Pemberitahuan Rencana Penutupan Jalan Nomor 03/10/DR/III/2010 tanggal 01 Maret 2010;</p> <p>3.241 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. PAL Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;</p> <p>3.25 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. SSK Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;</p> <p>3.261 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. SKP/SS Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;</p> <p>3.271 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. ASIONG Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;</p> <p>3.281 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Susulan Penagihan ke-II kepada PT. SIR Nomor 25/10/DR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;</p> <p>3.291 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.PAL tanggal 22 Mei 2009;</p>	
3.30	1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.SSK tanggal 22 Mei 2009;	
3.311	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.SKP / SS tanggal 22 Mei 2009;	
3.321	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Perehapan Desa yang Mengarah ke Talang Paey Nomor 08/10DR/V/2009 Kepada Bapak Pimpinan PT.ASIONG tanggal 22 Mei 2009;	
3.331	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.PAL tanggal 25 November 2009;	
3.341	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.SSK tanggal 25 November 2009;	
3.351	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.ASIONG tanggal 25 November 2009;	
3.361	(satu) lembar foto copy Pemerintah Indragiri Hulu Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Nomor 38/10/DR/XI/2009 Kepada Pimpinan Perusahaan PT.SS tanggal 25 November 2009;	
3.371	(satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : /DR/10/XI/2009 tentang Musyawarah Desa tanggal 19 November 2009;	
3.381	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 PT.PAL tanggal 1 Juni 2009;	
3.391	(satu) lembar foto copy Surat Pemerintah	

Halaman 278 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 PT.SSK tanggal 1 Juni 2009;</p> <p>3.401 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 Kepada Saudara ASIONG tanggal 1 Juni 2009;</p> <p>3.411 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 Pimpinan PT. tanggal 1 Juni 2009;</p> <p>3.421 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal perihal Penimbunan / Pengerasan Jalan Desa Nomor : 15/10/DR/VI/2009 Kepada Pimpinan PT.SIR tanggal 1 Juni 2009;</p> <p>3.431 (satu) lembar foto copy Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang perihal Permohonan Telaah Areal PT. Panca Agro Lestari Nomor : S.139/VII/BPKH XII-1/2011 tanggal 15 Agustus 2015;</p> <p>3.441 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi di Konversi (HPK) untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 503BP2T-IR/II/2013/50 tanggal 04 Februari 2013;</p> <p>3.451 (satu) lembar foto copy Denah Lokasi An. PT. Panca Agro Lestari;</p> <p>3.461 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Penyampaian Izin-izin PT. Panca Agro Lestari Nomor : 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 2016;</p> <p>3.471 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 23 Januari 2006;</p> <p>3.481 (satu) rangkap foto copy Surat PT. Panca Agro Lestari perihal Daftar Perizinan Yang Dimiliki Oleh PT. Panca Agro Lestari Nomor : Legal-PAL/X/701/IV/2016 tanggal 28 April 2016;</p> <p>3.491 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Panca Agro Lestari Nomor : 522.1/Planhut/5211 Kepada Bapak Gubernur Riau tanggal 30 November 2012;</p> <p>3.501 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama PT. Panca Agro Lestari Kepada Bapak Bupati Kuantan Singingi tanggal 02 Januari 2013;</p> <p>3.511 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Pana Agro Lestari tanggal 04 Februari 2013;</p> <p>3.521 (satu) rangkap foto copy Surat Bupati Kuantan Singingi perihal Rekomendasi Tukar-menukar Atas Nama PT. Panca Agro Lestari Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 522/UM/316 tanggal 11 Maret 2013;</p> <p>3.531 (satu) rangkap foto copy Surat Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Riau perihal Permohonan Pelimpahan Pengukuran Kadastral Areal PT. Panca Agro Lestari di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 885/6.14/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;</p> <p>3.541 (satu) rangkap foto copy Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Nomor : 04BP-HGU/III/2014 tanggal 06 Maret 2016;</p> <p>3.55 1 (satu) rangkap foto copy Denah PT. Panca Agro Lestari Penggunaan Tanah Kini;</p> <p>3.561 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Pekerjaan Umum perihal Advice Planning Lokasi / Kawasan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 832/DPU-TRBT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;</p> <p>3.571 (satu) lembar foto copy Denah Peta Pola Ruang RT/RW Kabupaten Indragiri Hulu;</p> <p>3.581 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kehutanan perihal Pertimbangan Teknis Tukar-menukar Kawasan hutan atas nama PT. Panca Agro Lestari Nomor : 522.1/Planhut/566 tanggal 28 Februari 2014;</p> <p>3.591 (satu) rangkap foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu perihal Rekomendasi Tukar-menukar Kawasan Hutan atas nama Pt. Panca Agro Lestari Nomor : 503/BP2T-IR/III/2014/220 tanggal 14 Maret 2014;</p> <p>3.601 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 524 Tahun 2014.</p>	
--	---	--

Halaman 280 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Seberida Subur yang didalamnya berisi :
4.1	1 (Satu) Lembar Fotocopy daftar perizinan yang dimiliki oleh PT. Seberida Subur No : legal-SS/X/700/IV2016 Tanggal 28 April 2016
4.2	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit An. PT. Seberida Subur No : 05/PS-PKU-1/10 Tanggal 05 Januari 2010
4.3	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Kelayakan Lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit Kec. Seberi dan Kec. Batang Gangsal Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau Oleh PT. Seberida Subur No : 5 Tahun 2008 Tanpa Tanggal, bulan tahun 2008
4.4	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan pembukaan lahan RKT Tahun 2008/2009 No : 522.2/PR-III/2008/316 Tanggal 14 Maret 2008
4.5	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Persetujuan pembukaan lahan RKT Tahun 2007/2008 No : 522.2/PR-III/2007/227 Tanggal 12 Maret 2007
4.6	1 (Satu) Rangkap Fotocopy pertimbangan teknis tukar menukar An . PT. Seberida Subur No : 522.12/DISHUB-PUK/757 Tanggal 22 April 2017
4.7	1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekomendasi tukar menukar An . PT. Seberida Subur No : 503/BP2T-IR/III/2014/219 Tanggal 14 Maret 2014
4.8	1 (Satu) Rangkap Fotocopy pertimbangan teknis tukar menukar kawasan hutan An. PT. Seberida Subur di provinsi Riau No : 522.1/planhut/567 Tanggal 28 Februari 2014
4.9	1 (Satu) Rangkap Fotocopy rekomendasi tukar menukar kawasan hutan An. PT. Seberida Subur No : 522/UM/594 Tanggal 16 Mei 2013
4.101	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit An. PT. Seberida Subur No : 183 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010
4.111	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Izin usaha perkebunan An. PT. Seberida Subur No : 92 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2010
4.121	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Pemberian Izin lokasi untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit An. . PT. Seberida Subur No : 89 Tahun 2007 Tanggal 06 Februari 2007
4.131	(Satu) Rangkap Fotocopy rekomendasi teknis izin lokasi No : 590/TGT-II/2007/01 Tanggal 22 Februari 2007
4.141	(Satu) Lembar Fotocopy Surat pernyataan An. Edison Pinem Tanggal 1 Mei 2012
4.151	(Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati

Halaman 281 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Indragiri Hulu tentang izin usaha perkebunan An. PT. Seberida Subur No : 92 Tahun 2007 Tanggal 26 Februari 2007</p> <p>4.161 (Satu) Lembar Fotocopy penyampaian izin-izin No : 58/BPMD-PPT/IV/2016 Tanggal 19 April 2016</p> <p>4.171 (Satu) Lembar Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) besar (PB) No : 272/BPMD dan PPT/SIUP-PB/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011</p> <p>4.181 (Satu) Lembar Fotocopy tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Tanggal 11 Mei 2011</p> <p>4.191 (Satu) Lembar Fotocopy izin tempat usaha / izin gangguan (HO) Kab. Indragiri Hulu PT. Seberida Subur No: 250/BPMD DAN PPT/V/2011 Tanggal 11 Mei 2011</p> <p>4.201 (Satu) Lembar Fotocopy izin reklame No :465 /BPMD dan PPT/V/2011 An. PT. Seberida Subur Tanggal 11 Mei 2011</p> <p>4.211 (Satu) Rangkap Fotocopy akta pendirian Perseroan terbatas No : 16</p> <p>4.221 (Satu) Lembar Fotocopy persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas No : W7-04854HT.01.04.TH2007 Tanggal1 ,ei 2007</p> <p>4.231 (Satu) Rangkap Fotocopy surat persetujuan perubahan status perusahaan Non penanaman modal dalam negeri / penanaman modal asing (Non PMDN/PMA) menjadi penanaman modal asing (PMA) No : 102/V/PMA/2006 Tanggal 14 Juni 2006</p> <p>5. 1 (Satu) buah map hijau dokumen perijinan PT Banyu Bening Utama yang didalamnya berisi :</p> <p>5.1 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Konfirmasi status lahan An. PT. Banyu Bening Utama No: 522/sekr/VII/2014/19 Tanggal 17 Juli 2014</p> <p>5.2 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Telaahan Staf Kepala Dinas Kehutanan Kan. Indragiri Hulu kepada Bupati Indragiri Hulu Cq. Asisten Tata Pemerintahan No : 522/PU-XII/2010/1230 Tanggal 08 Desember 2010</p> <p>5.3 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pertimbangan Teknis tersediaan lahan An. PT. Banyu Bening Utama No : 522.2/PU-XII/2010/1307 Tanggal 27 Desember 2010</p> <p>5.4 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rekomendasi kesesuaian dengan rencana marko pembangunan perkebunan provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Banyu Bening Utama No : 503/BP2T-IR/II/2013/51 Tanggal 4 Februari 2013</p> <p>5.5 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Pertimbangan Teknis permohonan rekomendasi kesesuaian dengan rencana marko pembangunan perkebunan provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Banyu Bening Utama No :</p>	
--	---	--



	522.1/planhut/5113 Tanggal 21 November 2012	
5.6	1 (Satu) Rangkap Fotocopy pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian dengan rencana marko pembangunan perkebunan provinsi Riau untuk perkebunan kelapa sawit PT. Banyu Bening Utama No : 050/disbun-pengemb/708 Tanggal 08 Agustus 2012	
5.7	1 (Satu) Lembar Fotocopy permohonan izin lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) No : 0192/BBU-PKU/VI/2010 Tanggal 20 Juni 20210	
5.8	1 (Satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan No : 48/SKDP/KC/III/2010 Tanggal 25 Maret 2010	
5.9	1 (Satu) Rangkap fotocopy rekap keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang izin lokasi Tahun 2011 No : 90,93,155,158,178,208,219,284,305,333,349,364. Tahun 2012 No : 187,188,189,190,191,192,240,272,334,357,365,366,395. Tahun 2013 No Urut 1 s/d 9. Tahun 2014 No urut 1 s/d 2. Tahun 2015 No urut 1 s/d 4. Tahun 2016 No urut 1	
5.101	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 158 Tahun 2011 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Pabrik kelapa sawit An . Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 26 April 2011	
5.111	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 155 Tahun 2011 Tentang pemberian izin pembangunan kelapa sawit Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 8 April 2011	
5.121	(Satu) Lembar fotocopy Rekap Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Izin lokasi Tahun 2010 No urut 1 s/d 13.	
5.131	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 6/180/T.HK/2010 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit an. Pt. Banyu bening utama Tanggal 5 Juni 2010	
5.141	(Satu) Rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 83 Tahun 2004 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Kebun kalap sawit An . Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 23 April 2004	
5.151	(Satu) Lembar fotocopy Penghentian aktifitas pengelolaan lahan di Desa Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku No :24/PEM/100/2007 Tanggal 15 Januari 2007	
5.161	(Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 71 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 215 Tahun 2003 Tentang izin usaha perkebunan An. Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 16 April 2004	
5.171	(Satu) lembar fotocopy pertimbangan teknis	



	<p>pertanahan untuk izin lokasi Pt. Banyu Bening Utama No : 850/400/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010</p> <p>5.181 (Satu) lembar fotocopy pengesahan akta pendirian perseroan terbatas (PT) Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-17825HT.01.01.TH2004 Tanggal 16 Juli 2004</p> <p>5.191 (Satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No : 65 An. Pt. Banyu Bening Utama</p> <p>5.201 (Satu) Rangkap fotocopy Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Banyu Bening Utama kapasitas 60 Ton TBS PERJAM</p> <p>5.211 (Satu) Bundel fotocopy pertimbangan teknis ketersediaan lahan An. PT Banyu Bening Utama No : 522.2/PU-XII/2010/1307 Tanggal 27 Desember 2010</p> <p>5.221 (Satu) Rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu No : 155 Tahun 2011 Tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Kebun kelapa sawit An. PT Banyu Bening Utama Tanggal 8 April 2011</p> <p>5.231 (Satu) Rangkap fotocopy penyampaian izin-izin No 694/Leg/Eks/BBU/IV/2016 Tanggal 26 April 2016</p> <p>5.241 (Satu) Rangkap fotocopy Rekomendasi teknis kesesuaian lahan PT Banyu Bening Utama No : 522.2/PR-III/2004/120 Tanggal 09 Maret 2004</p> <p>5.251 (Satu) Lembar fotocopy Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri No : 21/540-01/IUKS/IV/2014 Tanggal 08 April 2014</p> <p>5.261 (Satu) Rangkap fotocopy kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh PT Banyu Bening Utama Nomor : 01 Tanggal 01 November 2021</p> <p>5.271 (Satu) Rangkap fotocopy izin usaha perkebunan (IUP) penanaman modal asing kepala badan koordinasi penanaman modal No : 856/1/IU/PMA/2014 Tanggal 14 Juni 2014</p> <p>5.281 (Satu) Rangkap fotocopy izin pengambilan dan pemanfaatan air (SIPPA) permukaan No : 12/BPMD&PPT/BP/SIPPA-P/V2014 Tanggal 23 Mei 2014</p> <p>5.291 (Satu) Rangkap fotocopy izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun An.PT Banyu Bening Utama No : 11/BPMD&PPT/BP-LB3/IX/2014 Tanggal 17 September 2014</p> <p>5.301 (Satu) Lembar Fotocopy pengantar rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 No : 660/BLH-inhu/VII/2014/193 Tanggal 24 Juli 2014</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5.311 (Satu) Lembar Fotocopy rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 An. PT Banyu Bening Ut No : 660/BLH-inhu/VII/2014/192 Tanggal 24 Juli 2014</p> <p>5.321(Satu) Lembar Fotocopy surat izin usaha perdagangan besar No : 16/B.04.01/BPTPM/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016</p> <p>5.331 (Satu) Lembar Fotocopy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) No: 01747 Tanggal 10 Maret 2016</p> <p>5.341(Satu) Lembar Fotocopy izin gangguan An. Sianto Wetan No :643/03.01/BPTPM/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016</p> <p>5.351 (Satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat tanah Hak guna usaha No : 01</p> <p>5.361 (Satu) Lembar Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) No :72/BPMD&PPT-BP-YMB/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011</p>	
III.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) buah flashdisk/USB warna merah hitam merk Sandisk 32 GB yang berisi data Laporan Harian Produksi TBS (Tandan Buah Segar) sawit.1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Kebun Banyu-II bulan Desember 2017 PT. Banyu Bening Utama.1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Kebun Banyu-II bulan Maret 2017 PT. Banyu Bening Utama Kebun Banyu-II.1 (satu) bundel Laporan Produksi Harian PT. Banyu Bening Utama Kebun Banyu-II bulan Mei 2022.	Disita dari KUKU HERO LESMON O tanggal 09 Juni 2022
IV.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Rekapitulasi Statistik Produksi periode Januari 2013 s/d Desember 2013 PT. Seberida Subur1 (satu) lembar Peta Survey Areal Perkebunan an. PT. Seberida Subur;1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja Traksi (LHK) PT. Seberida Subur periode 1 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022;1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja Traksi (LHK) PT. Seberida Subur periode 1 Juni 2022 s/d 30 Juni 2022;Fotocopy Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor 522/Disbun-PPHP/294/2021 tanggal 09 Maret 2021 perihal Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Riau.1 (satu) bundel File Pembukuan PT. Seberida Subur tahun 2020;1 (satu) bundel data Produksi PT. Seberida Subur tahun 20131 (satu) bundel data Produksi PT. Seberida Subur tahun 20121 (satu) bundel laporan Pembukuan Lahan PT. Seberida Subur tahun 2006 s/d tahun 20081 (satu) bundel File Tanaman PT. Seberida Subur tahun 20151 (satu) bundel File KS Dana Bantuan Untuk Desa PT. Seberida Subur1 (satu) bundel Laporan Stock Bibit PT. Seberida Subur mulai 13 Maret 2007 s/d 20 Juli 20091 (satu) buku Anggaran Belanja Kebun PT. Seberida Subur Tahun 20141 (satu) buku Anggaran Belanja Kebun PT. Seberida Subur Tahun 20121 (satu) buku Berita Acara Serah terima dari Asisten Kepala PT. Seberida Subur an.Hairul Bahri Hasibuan kepada Juandi Lubis tanggal 5 Desember 2014;1 (satu) bundel Surat Keluar PT. Seberida Subur tahun 2015Fotocopy Berita Acara Penerimaan Mesin Doorsmeer Nomor:003/BA/SS-EST/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.	Disita dari EVENDI Tanggal 09 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>18. 1 (satu) lembar data Rekapitulasi Kendaraan PT Seberida Subur periode Juni 2022;</p> <p>19. Daftar Karyawan PT. Seberida Subur</p> <p>20. 1 (satu) Kardus yang berisi Surat Pengantar Pengangkutan Buah Sawit PT. Seberida Subur kepada PT. Kencana Amal Tani Periode Tahun 2021;</p> <p>21. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi PT Seberida Subur periode tahun 2016 s/d tahun 2021;</p>	
V.	<p>1. 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120008300018 dengan nama Perusahaan PT. Seberida Subur tanggal 01 Maret 2019;</p> <p>2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor: 89 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas nama PT. Seberida Subur</p>	Disita dari EVENDI Tanggal 09 Juni 2022
VI.	<p>1. 1 (satu) odner warna hitam data Produksi terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel lembar laporan harian produksi dan pupuk PT. Palma Satu dari tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 20191 (satu) bundel lembar laporan harian produksi dan pupuk PT. Palma Satu dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 <p>2. 2 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Dalam Rangka Penelitian PBB hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016.</p> <p>3. 2 (dua) lembar surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 660/DLH-P4LH/IV/2017/97 tanggal 4 April 2017 Perihal Kewajiban Menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>4. 1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 56/ADM.PUM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal bantuan Personil Keamanan dalam rangka Pengecekan dan Pengukuran Lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gasal seluas 600 Ha (300 KK)</p> <p>5. 1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 57/ADM.PUM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal Izin Masuk Area.</p> <p>6. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 58/BPMD-PPT/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Perihal Penyampaian Izin-izin.</p> <p>7. 1 (satu) lembar surat Nomor: 006/Palma I-Humas/VIII/2015 tanggal 31 Juli 2015 Perihal laporan akan masuknya masyarakat penyaguan melakukan panen di Divisi VI Kbn. Palma -I hari Sabtu, 01 Agustus 2015 serta strategis dan upaya yang akan dilakukan guna menghadang masyarakat.</p> <p>8. 1 (satu) bundel laporan unit kebun PT. Duta Palma Nusantara Bayu Bening Utama bulan Desember 2015</p> <p>9. 1 (satu) bundel laporan produksi dari bulan Januari sampai Juli tahun 2019 PT. Palma Satu Perkebunan Palma A</p> <p>10. 1 (satu) bundel surat Nomor: 014/B/SM-Palma/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Pengajuan Lahan Plasma 1.000 Ha PT. Palma Satu.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Laporan Produksi harian dari bulan Januari sampai dengan Maret 2019 PT. Seberida Subur Perkebunan Siambul.</p> <p>12. 1 (satu) bundel laporan Manager Report bulan Maret 2020 Darmexagro Kebun Palma B.</p> <p>13. 1 (satu) bundel Anggaran Belanja Kebun tahun 2016 PT. Palma Satu Kebun Palma I dan Kebun Palma II Budget Revisi Departemen Agronomy.</p> <p>14. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Oktober 2015 Darmexagro Area IV</p> <p>15. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Januari 2016 Area IV</p> <p>16. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan April 2016 Area IV</p> <p>17. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Mei 2016 Area IV</p> <p>18. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Juni 2016</p>	Disita dari Novendra Tanggal 09 Juni 2022

Halaman 286 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<div>Area IV</div> <div>19. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan Juli 2016 Area IV</div> <div>20. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi bulan September 2016 Area IV</div> <div>21. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Januari 2017</div> <div>22. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2017</div> <div>23. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2017</div> <div>24. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Januari 2019</div> <div>25. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2019</div> <div>26. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Maret 2019</div> <div>27. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2019</div> <div>28. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Mei 2019</div> <div>29. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Januari 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</div> <div>30. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</div> <div>31. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Maret 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</div> <div>32. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2020 PT. Palma satu Kebun Palma B</div> <div>33. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Februari 2020 PT. Palma satu Kebun Palma A</div> <div>34. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan April 2020 PT. Palma satu Kebun Palma A</div> <div>35. 1 (satu) Bundel Statistik Produksi Per Blok bulan Juni 2020 PT. Palma satu Kebun Palma A</div> <div>36. 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat PS.A (palma satu A)</div>	
VII.	<div>1. 1 (Satu) lembar historis Produksi Per Bulan Periode 5 tahun (2017-2021)</div> <div>2. 2 (dua) lembar Areal Statement;</div> <div>3. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Januari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>4. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Januari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>5. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Februari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>6. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Februari 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>7. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Maret 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>8. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Maret 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>9. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan April 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>10. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan April 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>11. 1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulan Mei 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div> <div>12. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Bulan Mei 2022 PT PANCA AGRO LESTARI KEBUN BATANG GANSAL;</div>	Disita dari Dewi Kurniawan Tanggal 09 Juni 2022
VIII.	<div>1. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</div> <div>2. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;</div>	Disita dari Putri Ayu Tanggal 05 Juli 2022

Halaman 287 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
4.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Kencana Amal Tani 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
5.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
6.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
7.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
8.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Palma Satu 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
9.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
10.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
11.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
12.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Banyu Bening Utama 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
13.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
14.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
15.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
16.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Seberida Subur 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
17.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
18.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2018 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
19.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2019 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
20.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Audited PT. Panca Agro Lestari 31 Desember 2020 serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen;
21.	1 (satu) bundel copy Job Description Head Accounting;
22.	1 (satu) lembar asli Surat Keputusan No. 007/HRD/SK-DF-HO/VIII/2021 tanggal 20 Agustus

Halaman 288 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021 pengangkatan Putri Ayu sebagai Head Accounting Riau;	
23.	1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Palma Satu;	
24.	1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Kencana Amal Tani;	
25.	1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Banyu Bening Utama;	
26.	1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Seberida Subur;	
27.	1 (satu) lembar daftar rekening Bank PT. Panca Agro Lestari;	
28.	1 (satu) lembar slip gaji atas nama Putri Ayu;	
29.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-10.170.HT.01.04.th.92 tanggal 14 Desember 1992 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;	
30.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8956.HT.01.04.TH'96 tanggal 16 September 1996 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;	
31.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-91358.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 28 Nopember 2008 persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;	
32.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.01.10-18650 tanggal 24 Mei 2012 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Wana Jingga Timur;	
33.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.01.10-45603 tanggal 31 Oktober 2013 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;	
34.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0938998 tanggal 10 Juni 2012 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;	
35.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0004160 tanggal 18 Januari 2016 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;	
36.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0022511 tanggal 18 Januari 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;	
37.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0148787 tanggal 21 Juni 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;	
38.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0071405.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 18 September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Wana Jingga Timur;	
39.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0389942 tanggal 23 September 2020 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Wana Jingga Timur;	
40.	1 (satu) bundel fotocopy Perseroan Terbatas, Perseroan2 Firma atau Komanditer dan Perkumpulan2 Koperasi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.2745.HT.01.01-Th'89 Persetujuan atas akta pendirian PT. Cerenti Subur;	
41.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0022506 tanggal 18 Januari 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT.	

Halaman 289 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Cerenti Subur;</p> <p>42. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0148783 tanggal 21 Juni 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Cerenti Subur;</p> <p>43. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0070805.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 17 September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Cerenti Subur;</p> <p>44. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0389394 tanggal 22 September 2017 Perihal : penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Cerenti Subur;</p> <p>45. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0054128.Ah.01.02.Tahun2019 tanggal 17 September 2019 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Cerenti Subur;</p> <p>46. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Palma Satu tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>47. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Kencana Amal Tani tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>48. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Banyu Bening Utama tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>49. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Seberida Subur tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p> <p>50. 1 (satu) bundel fotocopy data produksi PT. Panca agro Lestari tahun 2017, 2018, 2019, 2020;</p>	
IX.	<p>1. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Seberida Subur, Juli 2007;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Kencana Amal tani tahun 2007;</p> <p>3. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Realisasi Pembangunan Kebun oleh PT. Sri Anugerah yang berubah nama menjadi PT. Siberida Subur tahun 2007;</p> <p>4. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT. Panca Agro Lestari, Rengat 2013;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Kencana Amal Tani, Pekanbaru 2007;</p> <p>6. 1 (satu) bundel Draf Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal) kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Kencana Amal Tani, Rengat 2006;</p> <p>7. 1 (satu) bundel Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Kencana Amal Tani, Pekanbaru 2007;</p> <p>8. 1 (satu) bundel Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal) kegiatan penambahan luas areal perkebunan kelapa sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha PT. Panca Agro Lestari, Rengat 2013;</p> <p>9. 1 (satu) bundel Surat dari Dinas Kehutanan Kab. Indragiri Hulu Nomor :522/sekr -XII/2011/1490 tanggal 06 Desember 2011 Perihal Data dan Peta Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Kapolres Indragiri Hulu;</p> <p>10. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan</p>	Disita dari Yudhi Eka Saputra tanggal 15 Juli 2022

Halaman 290 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Provinsi Riau;</p> <p>11. 1 (satu) bundel Surat atas nama masyarakat 3 (tiga) Desa, (Kuala Cenaku, Pulau Jum'at dan Tanjung Sari) tanggal 11 Juli 2008 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu tentang Pengunduran Diri dari Kerjasama Kemitraan PT. Agro Lestari;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 121/TP/100/2008 tanggal 26 September 2008 yang ditujukan kepada Kadishutbun Kab. Indragiri Hulu Perihal Permasalahan PT. Agro Lestari dengan Masyarakat 3 Desa di Kecamatan Kuala Cenaku;</p> <p>13. 1 (satu) bundel Surat dari Klinik Hukum Pertanahan Pemberdayaan dan Perjuangan Hak-Hak atas tanah Kuasa Hukum Warga Desa Penyaguan Nomor : 10.KHP/DP-PS/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 Perihal Mohon Kesediaan Mengembalikan Hak Penguasaan Lahan Seluas 3.000 Ha yang ditujukan kepada PT. Duta palma Nusantara Group dan PT Palma 1;</p> <p>14. 1(satu) bundel laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kebakaran Lahan di Areal PT. Banyu Bening Utama dan PT. Bertuah Aneka Yasa Kab. Indragiri Hulu, bulan Januari 2007.</p>	
X.	<p>1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Amal Tani Tahun 1996 beserta lampirannya;</p> <p>2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara Tahun 1996 beserta lampirannya;</p> <p>3. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kencana Amal Tani Tahun 2002 beserta lampirannya;</p> <p>4. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara Tahun 2005 beserta lampirannya;</p> <p>5. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Banyu Bening Utama Tahun 2007 beserta lampirannya;</p>	<p>Disita dari RIJAL ARIQ</p> <p>Tanggal 15 Juli 2022</p>
XI.	<p>1. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Januari 2021 File Kebun;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Februari 2021 File Kebun;</p> <p>3. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Maret 2021 File Kebun;</p> <p>4. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan April 2021 File Kebun;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Mei 2021 File Kebun;</p> <p>6. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2021 File Kebun;</p> <p>7. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juli 2021 File Kebun;</p> <p>8. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Agustus 2021 File Kebun;</p> <p>9. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan September 2021 File Kebun;</p> <p>10. 1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Oktober 2021</p>	<p>Disita dari Jumarihot Ompusun ggu Tanggal 14 Juli 2022</p>

Halaman 291 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	File Kebun;	
11.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan November 2021 File Kebun;	
12.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Desember 2021 File Kebun;	
13.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Februari 2022 File Kebun;	
14.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Maret 2022 File Kebun;	
15.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan April 2022 File Kebun;	
16.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Mei 2022 File Kebun;	
17.	1 (satu) bundel Laporan Neraca Percobaan Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2022 File Kebun;	
18.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Januari 2021 File Kebun;	
19.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Februari 2021 File Kebun;	
20.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Maret 2021 File Kebun;	
21.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan April 2021 File Kebun;	
22.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Mei 2021 File Kebun;	
23.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2021 File Kebun;	
24.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juli 2021 File Kebun;	
25.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Agustus 2021 File Kebun;	
26.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan September 2021 File Kebun;	
27.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Oktober 2021 File Kebun;	
28.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan November 2021 File Kebun;	
29.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Desember 2021 File Kebun;	
30.	1 (satu) bundel Laporan Stock Barang Bulanan PT. Seberida Subur Kebun Siambul Bulan Juni 2022 File Kebun;	
31.	1 (satu) bundel file Permintaan Dana THR Kebun Siambul Tahap I tahun 2022 PT. Seberida Subur – PT. Duta Palma Nusantara – Group;	
32.	1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Januari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex	

Halaman 292 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Agro - Group;</p> <p>33. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Februari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>34. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Maret 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>35. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan April 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>36. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Premi Kebun Siambul Bulan Mei 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>37. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Rapel Gaji Bulan Januari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>38. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Januari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>39. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Februari 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>40. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Maret 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>41. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan April 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>42. 1 (satu) bundel Permintaan Dana Operasional Kebun Siambul Bulan Mei 2022 PT. Seberida Subur – PT. Darmex Agro - Group;</p> <p>43. 1 (satu) bundel Laporan Harian Produksi periode tanggal 1 Mei 2022 s.d 13 Jul 2022;</p> <p>44. 1 (satu) bundel Rekap Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2021 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>45. 1 (satu) bundel Ulasan Pencapaian Produksi PT. Seberida Subur Kebun Siambul periode Februari 2022 s.d Juli 2022;</p> <p>46. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Satu periode 01 April 2022 s.d 31 April 2022;</p> <p>47. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Satu periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;</p> <p>48. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Satu periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022;</p> <p>49. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 April 2022 s.d 31 April 2022;</p> <p>50. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022;</p> <p>51. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022;</p> <p>52. 1 (satu) bundel Laporan Harian Kerja (LHK) Kebun Siambul PT. Seberida Subur Divisi Dua periode 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022;</p> <p>53. 1 (satu) bundel Perjanjian Antara PT. Seberida Subur dengan PT. Hari Bangun Persada mengenai Pekerjaan Pembangunan Jembatan Permanen Nomor : 02/PT.SS/IV/2022 tanggal 25 April 2022;</p> <p>54. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja PT. Kencana Amal Tani dengan PT. Seberida Subur dengan Nomor :</p>	
--	--	--

Halaman 293 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>01/PT.KAT-SS/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;</p> <p>55. 1 (satu) bundel Perjanjian Antara PT. Seberida Subur dengan PT. Graha Mandiri Alam Persada mengenai Pekerjaan Tunas Pokok Kelapa Sawit Nomor : 03/PT.SS/IV/2022 tanggal 25 April 2022;</p> <p>56. 1 (satu) lembar realisasi perbaikan jalan longsor tahun 2022 Divisi Satu Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>57. 1 (satu) bundel Peta Denah Perumahan Karyawan PT. Seberida Subur (Ex Divisi I) Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>58. 1 (satu) bundel Peta Denah Perumahan Karyawan PT. Seberida Subur (Ex Divisi I) Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>59. 1 (satu) bundel Sensus Produksi Semester II Tahun 2022 Blok E32 Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p> <p>60. 1 (satu) bundel Sensus Produksi Semester II Tahun 2022 Blok D34 Kebun Siambul PT. Seberida Subur;</p>	
XII.	<p>1. 1 (satu) bundel Laporan Rekap Kebun, Statistik Produksi bulan Oktober, November 2022 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>2. 1 (satu) lembar history produksi 5 tahun periode 2016 s.d 2021 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>3. 1 (satu) bundel rencana kerja tahun 2022 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>4. 1 (satu) bundel Statistik Produksi Mei 2022, Februari 2022, Januari 2022, Desember 2021 PT. Seberida Subur Kebun Siambul;</p> <p>5. 1 (satu) bundel laporan hasil kunjungan kebun seberida subur Nomor : SS-001/RHPC/III/2014 tanggal 20 Maret 2014;</p> <p>6. 1 (satu) bundel laporan kunjungan ke Lokasi PT. Seberida Subur dan PT. Karya Semesta Persada Kebun Siambul dan Penyaguan Kunjungan tanggal 07 s.d 09 Januari 2010;</p> <p>7. 1 (satu) lembar surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.05/WASDAL-VIII/2010 tanggal Oktober 2010 untuk Monitoring penggunaan kawasan hutan pada areal konsesi oleh PT. Palma Satu di kec. Batang Gangsal, PT. Seberida Subur di Kec. Batang Gangsal;</p> <p>8. 1 (satu) Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.05/Dishut-X/2011/1299 tanggal 25 Oktober 2011</p>	Disita dari Jumarihot Ompusun ggu tanggal 14 Juli 2022
XIII.	<p>1. 1 (satu) lembar konsep Surat Perihal Rekomendasi Teknis Revisi Ketersediaan Ketersediaan Lahan Permohonan IUP An. PT. BANYU BENING UTAMA.</p> <p>2. 1 (satu) bundel konsep Surat Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan Permohonan IUP An. PT. PALMA SATU.</p> <p>3. 1 (satu) bundel lembar disposisi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi Surat Tim 7 Perjuangan Masyarakat Desa Penyaguan kepada Bupati Indragiri Hulu tanggal 15 Maret 2010 perihal Pemberitahuan, masyarakat akan melakukan =pembangunan pondok-pondok dan penutupan/pemutusan akses jalan masuk uang menuju lokasi areal lahan milik masyarakat seluas ± 3.000 hektar dengan menggunakan alat berat excavator.</p> <p>4. 1 (satu) bundel lembar disposisi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu yang berisi Surat Bupati Indragiri Hulu Tanggal 23 Februari 2010 Nomor: 036/ASDA/II/2010 Perihal Aksesibilitas Jalan.</p> <p>5. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Tiga tahun Dua Ribu Tujuh atas nama J. LINGGA.</p> <p>6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Tiga tahun Dua Ribu Tujuh atas nama MUSRAL.</p>	Disita dari Faisal Ilahi tanggal Disita Tanggal 22 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha Di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu oleh PT. Panca Agro Lestari.	
XIV.	<p>28. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.003-0317.0 letak objek Jl. Lintas Timur Gg. Family</p> <p>29. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.003-0314.0 letak objek Desa Ringin, RT.05/RW.04</p> <p>30. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.002-0268.0 letak objek Jl. Desa RT.02/RW01, PRSL 00198</p> <p>31. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.008.001-0872.0 letak objek Jl. Simpang Korindo B 10 Ringin</p> <p>32. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.010-0114.0 letak objek Dsn Aluran Jaya, Panyaguan</p> <p>33. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.007-0087.0 letak objek Dsn Aluran Jaya, Panyaguan</p> <p>34. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.003-0097.0 letak objek Dsn Tanjung Kubu, Panyaguan</p> <p>35. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.050.009.003-0094.0 letak objek Dsn Tanjung Kubu, Panyaguan</p> <p>36. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.003-0344.0 letak objek Sungai Cenaku, Kuala Cinaku</p> <p>37. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.003-0368.0 letak objek Dsn Suka Mulya, Kuala Cinaku</p> <p>38. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.005-0278.0 letak objek Dsn Suka Mulya, Kuala Cinaku</p> <p>39. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.001.005-0264.0 letak objek Dsn Teluk Pinang Jaya, Kuala Cinaku</p> <p>40. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.005-0052.0 letak objek Dsn Mekar Sari, Kuala Mulya</p> <p>41. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.005-0064.0 letak objek Jl. Lingkar Kuala Mulya, Kuala Mulya</p> <p>42. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.006-0034.0 letak objek Lahan Usaha 2, Kuala Mulya</p> <p>43. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.002-0115.0 letak objek Jl. Pisang, Kuala Mulya</p> <p>44. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.001-0356.0 letak objek Jl. Korindi Dusun III, Siambul</p> <p>45. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug</p>	<p>Disita dari ARIEF FADILLAH</p> <p>Tanggal 22 Juli 2022</p>

Halaman 295 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.003-0211.0 letak objek Talang Tanjung, Siambul</p> <p>46. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.006-0111.0 letak objek Dusun Tualang, Siambul</p> <p>47. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 NOP. 14.01.091.004.003-0210.0 letak objek Talang Tanjung, Siambul</p> <p>48. 1 (satu) lembar daftar nilai jual objek pajak diluar kawasan perkebunan;</p> <p>49. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Palma Satu;</p> <p>50. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Seberida Subur;</p> <p>51. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>52. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Panca Agro Lestari;</p> <p>53. 1 (satu) lembar data penerimaan retribusi HO PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>54. 1 (satu) lembar rekapan data penerimaan PPJ Non PLN PT. Banyu Bening Utama periode 2013 s.d 2022;</p> <p>1 (satu) lembar</p>	
XV.	<p>1. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Seberida Subur Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-0005721-379 (USD) BMOD-BMID</p> <p>2. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Panca Agro Lestari Mandiri Dollar A/C:124-0005842-738 BMDO-BMDI</p> <p>3. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Palma Satu A/C:124-000.557-1055 Bank Mandiri Cab. Menara Palma BMDO-BMDI</p> <p>4. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Banyu Bening Utama Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-000.5388.294 BMOD-BMID Per. Januari 2016 s.d.</p> <p>5. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani A/C:101.001.056.6089 (USD) Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta Per Februari 2020 EXFO-EXFI</p> <p>6. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Palma Satu Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-000.5570-610 (IDR) BMI-BMO Per. Agustus 2019</p> <p>7. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Banyu Bening Utama Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta A/C:124-000.538.8286 Per Januari 2022 BMO-BMI</p> <p>8. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Panca Agro Lestari Bank Mandiri Cab. Menara Palma Jakarta IDR A/C:124-000.620.8905 Per. Agustus 2019 s.d.-</p> <p>9. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani Bank Mandiri A/C:070.000.559.5603 (IDR) Per. Mei 2018 BMO-BMI</p> <p>10. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani Bank Mandiri A/C: 070.000.559.5603 (IDR) Per. Maret 2019 BMO-BMI</p> <p>11. 1 (satu) buku tulis catatan Buku Bank PT Kencana Amal Tani Bank Mandiri A/C: 070.000.559.5603 (IDR) Per. 2021 BMO-BMI</p> <p>12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan ke Surya Darmadi terdiri dari:</p> <p>1) PT. DARMEX PLANTATION</p> <p>a) EBITDA</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2017</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2018</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2019</p> <p>YTD JANUARI-DESEMBER 2020</p>	<p>Disita dari Karenina Gunawan tanggal 07 Juli 2022</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YTD JANUARI-DESEMBER 2021	
	b) Laba Fiskal	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2017	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2018	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2019	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2020	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2021	
	2) PT. ALFA LEDO	
	a) EBITDA	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2017	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2018	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2019	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2020	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2021	
	b) Laba Fiskal	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2017	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2018	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2019	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2020	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2021	
	3) PT. MONTERADOMAS	
	b) EBITDA	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2017	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2018	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2019	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2020	
	YTD JANUARI-DESEMBER 2021	
13.	1 (satu) bundel Penilaian Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Duta Palma Nusantara dari KJPP Karmanto dan Rekan (Business License 2.09.0062)	
14.	1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 071/TRS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Pembagian Deviden PT. Kencana Amal Tani	
15.	1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 072/TRS/XI/2020 tanggal 25 November 2020 Perihal Pembagian Deviden PT. Panca Agro Lestari	
16.	1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 030/TRS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pembagian Deviden PT. Kencana Amal Tani	
17.	1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 031/TRS/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pembagian Deviden PT. Banyu Bening Utama	
18.	1 (satu) bundel fotokopi Internal memo Pembagian Deviden Nomor: 032/TRS/III/2020 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Pembagian Deviden PT. Panca Agro Lestari	
19.	1 (satu) lembar fotokopi rekap deposito Per 31 Desember 2018	
20.	1 (satu) lembar fotokopi rekap deposito Per 31 Desember 2020	
21.	1 (satu) lembar fotokopi rekap deposito Per 31	

Halaman 297 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2021	
	22. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran PT. SEBERIDA SUBUR dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2020	
XVI.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. BANYU BENING UTAMA;1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. BANYU BENING UTAMA;1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. PALMA SATU;1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. PALMA SATU;1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. KENCANA AMAL TANI;1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. KENCANA AMAL TANI;1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. PANCA AGRO LESTARI;1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. PANCA AGRO LESTARI;1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 PT. SEBERIDA SUBUR;1 (Satu) Bundel Foto copy Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen PT. SEBERIDA SUBUR;1 (satu) Bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT. PALMA SATU ke PT. BANYU BENING UTAMA, berupa:<ul style="list-style-type: none">Voucher Pengeluaran PT. PALMA SATU, Keterangan: BY TITIP OLAH SAWIT-KWT.166/KW-BBU/12/2019 tanggal 27 Maret 2020, dengan Jumlah Rp. 41.545.872,- (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);Transfer Information, Transaction Status: Executed Succesfully, Transaction References Nomor: 202002171112747645, Amount: IDR 41.545.872,00, Immediate: 27-Mar-2020;Kwitansi PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 166/KW-BBU/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima dari: PT. PALMA SATU, Jumlah Uang: Rp. 42.315.240,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);Invoice PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 204/BBU-INV-L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan Kepada Yth. PT. PALMA SATU, Keterangan: Biaya Titip Olah: Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga Rp. 42.315.240,00 (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);Laporan Pengolahan TBS Dari PALMA SATU Bulan Desember 2019 PKS KUALA CENAKU (BBU) tanggal 31 Desember 2019;Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.006-	Disita dari Putri Ayu tanggal 26 Juli 2022

Halaman 298 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>19.55082035 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha Kena Pajak PT. BANYU BENING UTAMA, NPWP: 02.004.551.4-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak PT. PALMA SATU, NPWP: 02.458.443.5-218.000, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 38.468.400,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 3.846.840,00.</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT. PANCA AGRO LESTARI ke PT. BANYU BENING UTAMA, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voucher Pengeluaran PT. PANCA AGRO LESTARI, Keterangan: BY TITIP OLAH SAWIT-KWT.167/KW-BBU/12/2019 tanggal 19 Maret 2020, dengan Jumlah Rp. 234.087.624,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);- Transfer Information, Transaction Status: Executed Succesfully, Transaction References Nomor: 202002171051736273, Amount: IDR 234.087.624,00, Immediate: 19-Mar-2020;- Kwitansi PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 167/KW-BBU/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima dari: PT. PANCA AGRO LESTARI, Jumlah Uang: Rp. 238.422.580,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);- Invoice PT. BANYU BENING UTAMA Nomor 205/BBU-INV-L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan Kepada Yth. PT. PANCA AGRO LESTARI, Keterangan: Biaya Titip Olah: Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga Rp. 238.422.580,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);- Laporan Pengolahan TBS Dari PANCA AGRO LESTARI Bulan Desember 2019 PKS KUALA CENAKU (BBU) tanggal 31 Desember 2019;- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.006-19.55082036 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha Kena Pajak PT. BANYU BENING UTAMA, NPWP: 02.004.551.4-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak PT. PANCA AGRO LESTARI, NPWP: 02.491.330.3-216.000, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 216.747.800,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 21.674.780,00. <p>13. 1 (satu) Bundel Pembayaran Titip Olah Sawit dari PT. SIBERIDA SUBUR ke PT. KENCANA AMAL TANI, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Voucher Pengeluaran PT. SIBERIDA SUBUR, Keterangan: TITIP OLAH SAWIT-KWT.173/KW-KAT/12/2019 tanggal 08 April 2020, dengan Jumlah Rp. 34.897.608,- (Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);- Kwitansi PT. KENCANA AMAL TANI Nomor 173/KW-KAT/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, Sudah terima dari: PT. SEBERIDA SUBUR, Jumlah Uang: Rp. 35.543.860,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Ratus Enam Puluh Rupiah);- Invoice PT. KENCANA AMAL TANI Nomor 173/KAT-INV-L/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, ditujukan Kepada Yth. PT. SEBERIDA SUBUR, Keterangan: Biaya Titip Olah: Minyak Sawit, Inti Sawit, Total Jumlah Harga Rp. 35.543.860,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Ratus Enam Puluh Rupiah);- Titip Olah Dari PT. SEBERIDA SUBUR Bulan Desember 2019 PT. KENCANA AMAL TANI tanggal 31 Desember 2019;	
--	---	--

Halaman 299 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<ul style="list-style-type: none">- Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri: 010.006-19.53787047 tanggal 31 Desember 2019, Pengusaha Kena Pajak PT. KENCANA AMAL TANI, NPWP: 01.062.203.3-218.000, Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak PT. SEBERIDA SUBUR, NPWP: 01.852.739.0-213.000, Dasar Pengenaan Pajak Rp. 32.312.600,00, PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Rp. 3.231.260,00;- Transfer Information, Transaction Status: Executed Succesfully, Transaction References Nomor: 202002171028718279, Amount: IDR 34.897.608,00, Immediate: 08-Apr-2020. <p>14. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan (Rugi) PT. SEBERIDA SUBUR, Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020, Sisa (Rugi) Rp. 6.133.672.594,-;</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. KENCANA AMAL TANI, Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba (Rugi) Rp. 19.608.994.825,-;</p> <p>16. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. PANCA AGRO LESTARI, Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba (Rugi) Rp. 19.496.207.495,-;</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. BANYU BENING UTAMA, Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2020, Sisa Laba (Rugi) Rp. 44.098.974.491,-;</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Rekap Laporan Laba (Rugi) PT. PALMA SATU, Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2020, Sisa (Rugi) Rp. 111.322.005.402,-.</p>	
XVII.	<p>1. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 91 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2006.tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Palma satu</p> <p>2. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun Kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu.</p> <p>3. 1 (satu) buah map kuning berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Peta Situasi lahan PT. BBU Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.• 6 (enam) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor: 215 tahun 2003 tanggal 29 September 2003 tentang Izin Perkebunan PT. Banyu Bening Utama• 3 (tiga) lembar fotocopy Perjanjian antara masyarakat dengan PT. Banyu Bening Utama dibuat hari Jumat tanggal 18 Maret 2011.• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dua Desa antara Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulia terkait penyerahan lahan atau tanah dari PT. Banyu Bening Utama kepada dua desa tersebut sampai saat ini belum terealisasi dibuat tanggal 10 Februari 2021.• 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 155 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas Nama PT. Banyu Bening Utama.• 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 091/BBU/PKU/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan HPK dari PT. Banyu Bening Utama kepada Bupati Indragiri Hulu.• 2 (dua) lembar fotocopy surat nomor: S.236/VII/Kuh-5/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal Hasil Telaahan Status Areal yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Disita dari Hj. Bonayus Pariza, S.Sos tanggal 10 Juni 2022



	<p>pada Kementerian Kehutanan.</p> <p>4. 1 (satu) buah Map Hitam berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 92 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Seberida Subur.• 4 (empat) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 89 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Seberida Subur.• 3 (tiga) lembar fotocopy surat Nomor: 590/TGT-II/2007/01 tanggal 22 Februari 2007 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi dari Dinas Pertanahan kepada Bupati Indragiri Hulu.• 1 (satu) lembar fotocopy peta kebun siambul PT. Seberida Subur, tahun 2016.• 1 (satu) lembar asli peta bangunan PT. Seberida Subur, bulan September 2015• 2 (dua) lembar fotocopy Pendirian Serikat Pekerja Perkebunan Mandiri PT. Seberida Subur Nomor 70• 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pencatatan nomor: 01/Dinsosnakertrans.04/PHI-PSP/II/2015 tanggal 8 Januari 2015.atas nama PT. Seberida Subur• 4 (empat) lembar PT. Seberida Subur Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 08/P2K3/DINSOSNAKERTRANAS.04/IV/2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan PT. Seberida Subur Desa Siambul, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu.• 2(dua) lembar fotocopy Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan tanggal 11 Juli 2008• 3 (tiga) lembar fotocopy surat Penumpukan Tanaman Menghasilkan PT. Siberida Subur.• 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi statistic produksi per devisi PT. Siberida Subur (Des 13, Des 14, Sep 15)• 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi statistic produksi per devisi PT. Siberida Subur (Des 13, Des 14, Okt 15)• 4 (empat) lembar rencana kerja tahunan tahun 2015 PT. Siberida Subur.• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor:04/SK/Perindagkop.UKM/IV/2007 tanggal 03 April 2007 tentang mendapatkan SIUP dan TDP PT. Siberida Subur.• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor: W7-04854 HT.01.04-TH.2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas nama PT. Siberida Subur.• 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 024/KPK/500/DP/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 atas nama PT. Siberida Subur.• 7 (tujuh) lembar fotocopy Berita Acara Rapat hari Senin tanggal 9 Januari 2006. <p>5. 2 (dua) lembar fotocopy surat Bupati Indragiri Hulu</p>	
--	--	--



	<p>Nomor: 233/TP/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 perihal Pendataan Kebun Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan .</p> <p>6. 3 (tiga) lembar fotocopy data perusahaan di Kab. Indragiri Hulu yang terindikasi dalam Kawasan Hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan.</p> <p>7. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan hasil kunjungan Pansus tanggal 15 Maret 2022.</p> <p>8. 4 (empat) lembar fotocopy surat nomor: 090/PPH/413 tanggal 10 Maret 2022 Perihal Kunjungan Kerja Pansus.</p> <p>9. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun Kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu.</p> <p>10. 1 (satu) bundel fotocopy terkait izin lokasi diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 90 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma Satu.• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2007• 10 (sepuluh) lembar surat Berita Acara Penetapan Batas Desa tanggal 17 Juni 2006 <p>11. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Analisa spasial Hasil Pengecekan lapangan dan pengukuran areal klem masyarakat desa penyaguan kec. Batang gasal kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>12. 4 (empat) lembar data Izin Perkebunan (IUP) di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>13. 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Hasil Verifikasi, Klarifikasi Kelengkapan Data dan Konsinyasi Digitasi Peta Perizinan Perkebunan Untuk Pemenuhan Target Percepatan Implementasi Kebijakan satu Peta di Provinsi Riau tanggal 10 November 2020.</p> <p>14. 3 (tiga) lembar asli Data Izin Usaha Perkebunan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Indragiri Hulu.</p> <p>15. 5 (lima) lembar asli Rekapitulasi jumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Januari 2022.</p> <p>16. 1 (satu) lembar WORK MAP , seismic survey services for 2D seismic acquisition.</p> <p>17. 1 (satu) lembar disposisi nomor agenda :648 tanggal penerimaan 8 September 2016, tanggal penomoran 22 April 2016 dari direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, ringkasan isi melaporkan tentang kejahatan PT. Palma Satu (Duta Palma Nusantara Group).</p> <p>18. 1 (satu) lembar surat nomor:08/YP&MPR-2015.I/Pusat/Tindakum/JK-IV/2016 tanggal 22 April 2016 perihal Melaporkan tentang Kejahatan PT. Palma I (Duta Palma Nusantara Group) yang merampas lahan warga Desa Penyaguhan, Kec. Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, Sekaligus mohon bantuan hukum agar PT. Palma I Segera mengembalikan Hakatas Lahan Masyarakat Desa Penyaguhan, Kec. Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.</p> <p>19. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/KUD-GS/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 perihal surat pemberitahuan penguasaan lahan masyarakat desa</p>	
--	---	--



	<p>penyaguan seluas 3000 Ha.</p> <p>20. 1 (satu) lembar surat Bupati Indragiri Hulu tanggal 8 Oktober 2009 perihal penghentian aktifitas penguasaan dan pengelolaan lahan Desa Penyaguan.</p> <p>21. 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor:118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penghentian Aktifitas di lahan masyarakat Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal.</p> <p>22. 2 (dua) lembar surat Nomor: 0168/UM/PS-PKU/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 hal. Tanggapan surat Bupati Indragiri Hulu No:118/ADM.PUM/100/VI/2011.</p> <p>23. 4 (empat) lembar surat Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Areal Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 3 Februari 2015</p> <p>24. 1 (satu) lembar Peta Kebun PT. Panca Agro Lestari</p> <p>25. 4 (empat) lembar surat Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Areal Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 8 Mei 2015</p> <p>26. 2 (dua) lembar surat hasil rapat permasalahan tindak lanjut tuntutan masyarakat desa Penyaguan terhadap areal PT. Palma Satu (tulis tangan)</p> <p>27. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 061/ORG/XII/2005/225 tanggal 9 Desember 2005 perihal pembubuhan paraf;</p> <p>28. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 49 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 180/HK/10/2003 tanggal 14 Januari 2003 perihal Penyampaian Keputusan Bupati Inhu No. 345 Tahun 2002;</p> <p>30. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 345 Tahun 2002 tanggal 15 November 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;</p> <p>31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 180/HK/138/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal Prosedur Pembuatan dan Penyampaian Keputusan dan Instruksi Bupati;</p>	
XVIII.	<p>1. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Panca Agro Lestari.</p> <p>2. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 525 tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambahan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit dari 2.980 Ha menjadi 3.800 Ha di Desa Penyaguan dan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau Oleh PT. Panca Agro Lestari;</p> <p>3. 1 (satu) Lembar Izin Lingkungan PT. Panca Agro Lestari tanggal 14 Juli 2014 yang di /</p> <p>4. 1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Pelepasan Kawasan Hutan PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>5. 1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);</p>	<p>Disita dari ROBY DAHDAN MARGAN TI tanggal 09 Juni 2022</p>



6.	1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah PT. Panca Agro Lestari Nomor 04/PB-HGU/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau;
7.	1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan an. PT. Panca Agro Lestari tanggal 23 Januari 2006;
8.	1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan PT. Palma Satu tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);
9.	1 (satu) Lembar Izin Usaha berupa Pelepasan Kawasan Hutan PT. Palma Satu tanggal 21 Januari 2019 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);
10.	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP PT DUTAPALMA NUSANTARA Nomor NPWP : 01.326.065.8-073.000 alamat Menara Palma LT.27, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.6 Kuningan Timur – Setiabudi Jakarta Selatan – DKI Jakarta Raya -12950.
11.	1 (satu) rangkap Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 06/RSL/HGU/1995 tanggal 13 Desember 1995.
12.	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor 182/Mentantut/VII/2000 tanggal 03 November 2000 atas nama PT. DUTAPALMA NUSANTARA.
13.	1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108832236 PT. Palma Satu tanggal 23 Agustus 2018 yang di keluarkan dari sistem Online Single Submission (OSS);
14.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Verifikasi Pengaduan pada hari Minggu Tanggal 3 Maret 2019 terhadap PT. Panca Agro Lestari yang dikeluarkan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15.	1 (satu) Lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Terbatas (PT) Palma Satu yang dikeluarkan Badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru tanggal 07 Maret 2014;
16.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0938997 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PALMSA SATU tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum;
17.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 214/M.04.01/BPTPM/III/2014 an PT. PALMA SATU tanggal 07 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;
18.	1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 522.1/Plahut/5657 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Palma Satu tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau berikut dengan Lampiran Fotocopy Peta Lokasi PT Palma Satu;
19.	1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kelayakan



	<p>Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Kecamatan Barang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau Oleh PT. PALMA SATU tanggal 14 April 2008;</p> <p>20. 1 (satu) Lembar fotocopy NPWP PT. PALMA SATU Nomor : 02.458.443.5-218.000;</p> <p>21. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan AN. PT. PALMA SATU tanggal 26 Februari 2007;</p> <p>22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 0804/03.01/BPTPM/III/2014 tentang Izin Gangguan tanggal 10 Maret 2014;</p> <p>23. 1 (satu) rangkap Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Palma Satu Nomor 23 Tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris LINDA HERAWATI, SH;</p> <p>24. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Besar PT. Kencana Amal Tani Nomor 31/B.04.01/BPTPM/IV/2016 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;</p> <p>25. 1 (satu) Lembar fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan an PT. Kencana Amal Tani Nomor TDP 040114604914 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru;</p> <p>26. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten IndragiriHulu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Aplication) Kepada PT. Kencana Amal Tani tanggal 15 November 2018 berikut dengan Lampirannya;</p> <p>27. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri PT. Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>28. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Izin Usaha berupa Izin Usaha Perkebunan PT. Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>29. 1 (satu) lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104712341 PT. Kencana Amal Tani tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS);</p> <p>30. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau oleh PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar (PB), PT SEBERIDA SUBUR, Nomor : 10/DPMD dan PPT/SIUP – PB/XI/2016,yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, pada tanggal 02 November 2016 di Rengat.</p> <p>32. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), PT SEBERIDA SUBUR Nomor TDP : 04061010058 berlaku s/d tanggal 02 November 2021,yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Terpadu, pada tanggal 02 November 2016.</p> <p>33. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB), PT SEBERIDA SUBUR, yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2019.</p> <p>34. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 05 tahun 2008 TENTANG KELAYAKAN LINGUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGELOLAAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEBERIDA DAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRIHULU PROVINSI RIAU OLEH PT. SEBERIDA SUBUR ditetapkan di Rengat pada tanggal 14 April 2008.</p> <p>35. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Nomor : 590/TGT-II/2007/01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 22 Februari 2007.</p> <p>36. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Pelepasan Kawasan Hutan, PT SEBERIDA SUBUR yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2019</p> <p>37. 2 (dua) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu, Nomor : 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT.SEBERIDA SUBUR pada tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>38. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu, Nomor : 92 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan AN.PT.SEBERIDA SUBUR. Yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2010 di Rengat.</p> <p>39. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu, Nomor :183 tahun 2010 Tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT.SEBERIDA SUBUR yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2010.</p> <p>40. 1 (satu) Fotocopy Lembar Fotocopy Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.SEBERIDA SUBUR, Nomor AHU-AH.01.03-093885 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2015 a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Plt Direktur Jendral Administrasi Hukum DR.AIDIR AMIN DAUD,S.H.,M.H NIP.19581120 198810 1 001.</p> <p>41. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-07906 HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 11 April 2003 A.N Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.</p> <p>42. 1 (satu) Rangkap Fotocopy SALINAN/GROSSE akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham "PT.SEBERIDA SUBUR" berkedudukan di Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 24.- Tanggal 5 Juni 2015, Notaris LINDA HERAWATI S.H.</p> <p>43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Operasional/Komersial PT BANYU BENING UTAMA yang Diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2020.</p> <p>44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Lingkungan PT BANYU BENING UTAMA yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Indragiri Hulu pada tanggal 5 Maret 2010.</p> <p>45. 1 (satu) Rangkap Izin Usaha Perkebunan PT.BANYU BENING UTAMA diterbitkan Izin Usaha Proyek Pertama pada Tanggal : 8 Mei 2020, Perubahan ke-16</p>	
--	--	--

Halaman 306 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Tanggal : 20 Januari 2021</p> <p>46. 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP : 02.004.551.4.218.000 PT.BANYU BENING UTAMA</p> <p>47. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.BANYU BENING UTAMA atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2007.</p> <p>48. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau, Nomor : 07/RSL/HGU/2006 pada hari rabu tanggal 13 September 2006.</p> <p>49. 1 (satu) Rangkap surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Perihal Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT. Banyu Bening Utama Nomor 522.2/PR-III/2004/120. Pada tanggal 9 Maret 2004.</p> <p>50. 1 (satu) Rangkap Fotocopy surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Kehutanan Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.N PT. Palma Satu. Nomor 522.1/Planhut/5657 Pada tanggal 26 Desember 2012.</p> <p>51. 1 (satu) Rangkap Fotocopy surat Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk Kebun Kelapa Sawit A.N PT BANYU BENING UTAMA, Nomor : 503/BP2T-IR/II/2013/49</p> <p>52. 2 (dua) Lembar Pelepasan Kawasan Hutan PT.BANYU BENING UTAMA pada tanggal 21 Januari 2019.</p> <p>53. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas Nama PT. Banyu Bening Utama pada tanggal 23 April 2004.</p> <p>54. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Atas nama PT.BANYU BENING UTAMA. Pada tanggal 26 April 2011.</p> <p>55. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT.BANYU BENING UTAMA Nomor: AHU-AH.01.03-0389946. Diterbitkan di Jakarta tanggal 23 September 2020 A.N Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar,S.H.,LLM. NIP 19690918 199403 1 001.</p> <p>56. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 71 Tahun 204 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu No.215 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perkebunan AN. PT.BANYU BENING UTAMA, ditetapkan di Rengat pada tanggal 16 April 2004.</p> <p>57. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. BANYU BENING UTAMA, pada tanggal 8 April 2011.</p> <p>58. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BANYU BENING UTAMA Nomor : 65.- pada hari Selasa, tanggal 8 September</p>	
--	---	--

Halaman 307 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	2020.	
59.	1 (satu) buku catatan PT. DUTA PALMA NUSANTARA disampul warna coklat.	
60.	1 (satu) dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT.DUTA PALMA NUSANTARA Perkebunan dan Pabrik. Laporan Semester I 2020	
61.	1 (satu) dokumen UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tentang Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 60 TON TBS/ JAM di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. PT BANYU BENING UTAMA. Rengat 2010.	
62.	1 (satu) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT PANCAAGRO LESTARI. Rengat 2014.	
63.	1 (satu) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup di Desa Penyaguan dan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. PT PANCAAGRO LESTARI. Rengat 2014.	
64.	1 (satu) dokumen PT JOHAN SENTOSA tentang Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangkinang, 2015.	
65.	1 (satu) dokumen PT.PALMA SATU tentang Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit. Pekanbaru 2007.	
66.	1 (satu) dokumen PT. SEBERIDA SUBUR tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit. Pekanbaru 2007.	
67.	1 (satu) dokumen FINAL REPORT PT. BANYU BENING UTAMA, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 71 Tahun 2004, Tanggal 16 April 2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.420 Ha. Pekanbaru Agustus 2004.	
68.	1 (satu) dokumen FINAL REPORT PT. BANYU BENING UTAMA, Analisis Dampak lingkungan (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 71 Tahun 2004, Tanggal 16 April 2004, Tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 6.420 Ha. Pekanbaru Agustus 2004.	
69.	1 (satu) Odner warna hitam dokumen Panca Argo Lestari (PAL);	
70.	1 (satu) Odner warna hitam dokumen Kencana Amal Tani (KAT);	
71.	1 (satu) Odner warna hitam dokumen DAN KAP Palma Satu;	
72.	1 (satu) Clear Horder File warna kuning Banyu Bening Utama (BBU);	
73.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 741/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 509/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama SUKARDI;	
74.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 738/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 506/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama MERLINDA;	
75.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 740/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 508/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama ARIASEH;	
76.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 829/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 557/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama MURNATI;	
77.	1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor : 773/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rugi Nomor : 527/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama HJ. MINAH;</p> <p>78. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor : 776/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 530/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama ACOK RASID;</p> <p>79. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Tanah Nomor : 774/SP/593.31/VII/2008 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 528/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama KAMARIAH;</p> <p>80. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 737/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 505/SKGR/593.31/ VII /2008 atas nama ARIANI;</p> <p>81. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 741/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 510/SKGR/593.31/ VII /2008 atas nama SULASTRI;</p> <p>82. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 739/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 507/SKGR/593.31/VII/2008 atas nama DR. ARWAN;</p> <p>83. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 830/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 558/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama RAHMANTO;</p> <p>84. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 833/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 561/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama ROHIMAN;</p> <p>85. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 836/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 564/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama SUTRISNO;</p> <p>86. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 828/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 556/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama SUTRISNO;</p> <p>87. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 832/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 560/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama NURUL;</p> <p>88. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 831/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 559/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama FITRI;</p> <p>89. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 834/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 562/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama YANI;</p> <p>90. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 837/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 565/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama ROMADON;</p> <p>91. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 835/SP/593.31/VII/2008 dan Nomor : 563/SKGR/593.31/VIII/2008 atas nama EDI SUSANTO;</p> <p>92. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Izin – Izin PT. Banyu Bening Utama Nomor : 694/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal 26 April 2016 beserta lampiran;</p> <p>93. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Izin – Izin PT. Kencana Amal Tani Nomor : 693/Leg/Eks/BBU/IV/2016 tanggal 26 April 2016 beserta lampiran;</p> <p>94. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 50/Kpts-II/94 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Kuko – S. Toreh yang terletak di kabupaten daerah tingkat II Indragiri Hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 7.830,31 Hektar, untuk usaha budidaya perkebunan karet, coklat dan kelapa hibrida atas nama PT. Cerenti Subur;</p> <p>95. 1 (satu) rangkap surat Perseroan Terbatas , Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi No. 2354;</p> <p>96. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17825</p>	
--	---	--

Halaman 309 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 Juli 2004 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;</p> <p>97. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Indra Giri Hulu Nomor : 182 Tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Panca Agro Lestri.</p> <p>98. 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Riau Nomor : 08/RSL/HGU/2001 tanggal 14 November 2001;</p> <p>99. 1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor : AHU-AH.01.03-0389943 tanggal 23 September 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kencana Amal Tani;</p> <p>100. 1 (satu) rangkap Fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kencana Amal Tani Nomor 66 yang dibuat oleh Notaris Yulia, SH;</p> <p>101. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 332/um/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 Perihal Penghentian Aktifitas Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Desa Penyaguan yang dibuat oleh Bupati Indragiri Hulu;</p> <p>102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perihal Penghentian Aktifitas di lahan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gangsal yang dibuat oleh Bupati Indragiri Hulu;</p> <p>103. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Palma Satu tanggal 08 Juli 2010;</p> <p>104. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 Tahun 2010 (nomor Ketik) Perpanjang dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Palma Satu tanggal 08 Juli 2010;</p> <p>105. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. Palma Satu tanggal 27 Februari 2007;</p> <p>106. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan PT. Palma satu, Desa Penyaguan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 4 Mei 2010;</p> <p>107. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pengecekan dan peninjauan lapangan Terkait Lahan Desa/Masyarakat Penyaguan Seluas ± 3000 ha yang Mohon di Inclave dalam Lahan PT. Palma Satu yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 27 Mei 2010;</p> <p>108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Terhadap Lahan Seluas ± 3000 Ha yang telah di Inclave serta dilakukan pemasangan patok batas lahan perkebunan masyarakat desa Penyaguan dengan PT. Palma Satu;</p> <p>109. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Nomor 179/ADM.PUM/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemasangan Patok Tapal Batas lahan Perkebunan masyarakat Desa Penyaguan dengan PT. Palma Satu Seluas 3000 Ha yang dikeluarkan oleh SEKDA Kabupaten Indragiri Hulu;</p> <p>110. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Nomor 522.12/DISHUT-PUK/757 tanggal 22 April 2013 perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan An. PT. Seberida Subur yang dikeluarkan oleh Dinas</p>	
--	---	--



	<p>Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi;</p> <p>111. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Palma Satu;</p> <p>112. 1 (satu) rangkap Fotocopy Tanda Terima Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Palma Satu tanggal 2 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat;</p> <p>113. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Nomor 503/BP2T-IR/II/2013148 tanggal 04 Februari 2013 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat di Konversi Untuk Kebun Kelapa Sawit PT. Palma Satu yang dibuat oleh Badan Pelayanan Terpadu Propinsi Riau.</p> <p>114. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 171/Leg-Eks/PS/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan dan Pembentukan Tim Terpadu;</p> <p>115. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar di Propinsi Riau.</p> <p>116. 1 (satu) outner warna merah berisikan dokumen PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>117. 1 (satu) Bundel Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Triwulan II tahun 2021 PT. Banyu Bening Utama Periode April Juni 2021;</p> <p>118. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Kencana Amal Tani Periode Juli – Desember 2021 Semester II;</p> <p>119. 1 (satu) bundel Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Banyu Bening Utama Laporan Semester I 2021;</p> <p>120. 1 (satu) bundel Laporan Pemakaian Air Sungai Cenaku PT. Banyu Bening Utama Periode Triwulan III 2021;</p> <p>121. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Analisa Air Limbah PKS PT. Banyu Bening Utama Periode Triwulan III 2021;</p> <p>122. 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV PT Kencana Amal Tani Tahun 2021 dalam Kegiatan Pemanfaatan Air limbah industry Minyak sawit pada tanah perkebunan Kelapa Sawit (Land Aplikasi)</p> <p>123. 1 (satu) bundel Dokumen Final Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit;</p> <p>124. 1 (satu) bundel Laporan identifikasi dan analisis keberadaan nilai Konservasi tinggi (NKT) di areal PT Bayu Bening Utama Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau tahun 2004;</p> <p>125. 1 (satu) Bundel Laporan pelaksanaan izin lingkungan PT. Dutapalma Nusantara Perkebunan dan pabrik Laporan Semester I 2021;</p> <p>126. 1 (satu) bundel Laporan Departemen Operation Internal Audit No. 12/BBU-1 RIAU/02/22 Pemeriksaan tanggal 23 Februari S.d 02 Maret 2022;</p> <p>127. 1 (satu) bundel Laporan Departemen Operation Internal Audit No. 12/BBU-1 RIAU/02/22 Pemeriksaan tanggal 16 Februari S.d 22 Februari 2022;</p> <p>128. 1 (satu) bundel Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Banyu</p>	
--	--	--



	<p>Bening Utama Tahun 2013;</p> <p>129. 1 (satu) map Besar Berisikan Kontak person /Tlp Pimpinan Kebun, PKS dan Downstream Rigion Riau dan Jambi;</p> <p>130. 2 (dua) foto copy lembar bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT. panca agro lestari Tahun 2013;</p> <p>131. 1 (satu) eksemplar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Eluan Mahkota Tahun 2013;</p> <p>132. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PBB tahun 2014 Original;</p> <p>133. 1 (satu) Lembar Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang disusun oleh Sdr. Palgunady dan ditanda tangani oleh Wasikun sekajy HR & GA Manager;</p> <p>134. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Duta Palma Nusantara Tahun 2013</p> <p>135. 2 (dua) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Banyu Bening Utama Tahun 2013</p> <p>136. 2 (dua) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Kencana Amal Tani Tahun 2013</p> <p>137. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Wanajingga Timur Tahun 2013</p> <p>138. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Cerenti Subur Tahun 2013</p> <p>139. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Eluan Mahkota Tahun 2013</p> <p>140. 1 (satu) eksemplar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Johan Sentosa Tahun 2013 beserta lampirannya;</p> <p>141. 2 (dua) lembar bukti foto copy setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Palma Satu Tahun 2013</p> <p>142. 2 (dua) lembar foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan (SSP PBB) an. Wajib pajak PT Seberida Subur Tahun 2013;</p> <p>143. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Surya Darmadi dan Adil Darmadi Tahun 2013;</p> <p>144. 1 (satu) lembar Fax surat Nomor: 660/BLH-AMDAL/XII/2013/440 Perihal Keterlambatan Penyerahan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang ditanda tangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Moch. Bayu Setiya Budiono, SH. MH tertanggal 10 Desember 20-13 ditujukan kepada Pimpinan PT Panca Agro Lestari;</p> <p>145. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-37995.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 09 Agustus 2009 Tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT Seberida Subur beserta lampirannya;</p> <p>146. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-04854 HT.01.04-TH.2007 Tanggal 01 Mei 2007 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas Atas nama PT Seberida Subur beserta Fotocopy Berita Acara Rapat Nomor 08</p>	
--	---	--



	<p>tanggal 9 Januari 2006</p> <p>147. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03282, Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2015 seluas 9635 m2.</p> <p>148. 1 (satu) lembar surat fax nomor:06/Adm.Pum/100/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Bupati Indragiri Hulu YOPI ARIANTO, SE ditujukan kepada pimpinan PT Panca Agro Lestari Perihal Revisi Izin Lokasi.</p> <p>149. 2 (dua) lembar fotocopy surat yang ditanda tangani ZULHER selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau yang ditujukan kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Propinsi Riau tertanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Riau untuk Perkebunan Kepala Sawit a.n PT PANCA AGRO LESTARI.</p> <p>150. 3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Evaluasi Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha budidaya Pertanian / Perkebunan dan Non Kehutanan lainnya An. PT Kencana Amal Tani di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;</p> <p>151. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat nomor 660/BLH-AMDAL/II/2014/12 Tanggal 13 Januari 2014 Perihal Teguran yang ditanda tangani Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu dan ditujukan kepada SKPD Terkait se-Kab. Inhu dan Pimpinan Perusahaan PT Seberida Subur beserta lampirannya;</p> <p>152. 1 (satu) bundel fotocopy sertifikat hak Guna usaha No. 1 Tahun 2007 atas nama PT Banyu Bening Utama yang diterbitkan tanggal 10 Desember 2010 seluas 6.417,90 ha terletak di Desa paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau;</p> <p>153. 1 (satu) eksemplar Rekapitan Permintaan Dana beserta lampirannya;</p> <p>154. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Panca Agro Lestari;</p> <p>155. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Palma Satu Desa Penyaguan Kecamatan Barang Gansal Kab. Indragiri Hulu-Rengat;</p> <p>156. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Johan Sentosa;</p> <p>157. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Banyu Bening Utama;</p> <p>158. 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar perizinan PT Eluan Mahkota (EMA);</p> <p>159. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Nomor: Legal-PAL/X/701/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Perihal Daftar Perizinan yang dimiliki oleh PT Panca Agro Lestari, yang ditujukan kepada Kepala badan penanaman modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu;</p> <p>160. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementerian Hukum dan HAM RI Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Agro Lestari Tanggal 19 Januari 2016 beserta lampirannya;</p> <p>161. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama ABD. RAHMAH dan NURZAJEFRI tertanggal 30 April 2007</p> <p>162. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama R. MUSLIM dan MERY L. tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>163. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama AMAT dan AFWAN tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>164. Surat Keterangan tanah tanpa Register tanpa Tanggal Atas nama Evianti seluas 20.000 M2 yang ditandatangani Kepala Desa Penyaguan, beserta lampirannya;</p> <p>165. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama SIAR dan DIMAS tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>166. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama KILPI dan LATIF tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>167. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama ENNI dan SUWARDI B tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>168. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama EVI SUSANTI dan DWI M tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>169. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama ALI YUSUF dan MUSLIM A tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>170. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama GUSRIADI dan INDRA tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>171. 1 (satu) bundel surat pernyataan sebidang tanah perubahan status kepemilikan tanah/surat keterangan ganti kerugian atas nama SARIFAH dan GUSWIR tertanggal 30 April 2007 beserta lampirannya;</p> <p>172. 1 (satu) lembar data nama pabrik dan kebun Duta Palma;</p> <p>173. 1 (Satu) buku agenda warna biru</p>	
XIX.	<p>A. Dokumen Terkait Duta Palma Grup</p> <p>1. Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 90 Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT Palma Satu;</p> <p>2. Fotocopy Surat Nomor: HK.350/E4.267/11.87 tanggal 25 Nopember 1987 perihal izin/persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Coklat dan Kelapa Hibrida seluas 2.500 Ha (intercropping) serta Karet seluas 5.000 Ha di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;</p> <p>3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 34 tahun 1996 tanggal 7 Juni 1996 tentang Pemberian izin lokasi untuk perkebunan;</p> <p>4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:08/VI/PIL/1998 tentang Perpanjangan izin lokasi untuk perkebunan;</p> <p>5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 83 tahun 2004 tanggal 23 April 2004 Tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 276 tahun 2005 tanggal 20 September 2005</p>	<p>Disita dari Tri Joni, SH. MM tanggal 10 Juni 2022</p>

Halaman 314 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari;	
7.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 66 tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Panca Agro Lestari;	
8.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 92 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Seberida Subur;	
9.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 83 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Seberida dan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau oleh PT. Kencana Amal Tani;	
10.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 91 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin usaha perkebunan PT. Palma Satu;	
11.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 04 tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit di kecamatan seberida dan kecamatan batang gangsal Kabupaten Indragiri hulu Propinsi Riau oleh PT. Palma satu;	
12.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 83 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan Pabrik pengolahan kelapa sawit di kecamatan seberida dan kecamatan batang gangsal Kabupaten Indragiri hulu Propinsi Riau oleh PT. Kencana Amal Tani;	
13.	Fotocopy Surat Bupati Indra Giri Hulu Nomor: 332/um/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal penghentian aktifitas penguasaan dan pengelolaan lahan Desa Penyaguan yang ditujukan kepada PT. Palma Satu;	
14.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu;	
15.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 7/180/T.HK/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama;	
16.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 182 tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Panca Agro Lestari;	
17.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 183 tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Seberida Subur;	
18.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 180 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu;	
19.	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 155 tahun 2011 tanggal 08 April 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun	

Halaman 315 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>kelapa sawit atas nama PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>20. Fotocopy Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal penghentian aktifitas di lahan masyarakat Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal yang ditujukan kepada PT. Palma Satu;</p> <p>21. Fotocopy Surat dari PT. Palma Satu tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu perihal tanggapan surat Bupati Indragiri Hulu;</p> <p>B. Dokumen terkait PT. Kencana Amal Tani, yaitu:</p> <p>1. Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT. Kencana Amal Tani.</p> <p>C. Dokumen terkait PT. Banyu Bening Utama, yaitu:</p> <p>1. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6/180/T.Hk/2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Kelapa Sawit Atas Nama PT. Banyu Bening Utama, Rengat 05 – 06 - 2010</p> <p>2. Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2010, Rengat 26 April 2010</p> <p>3. Foto Copy Surat Masuk Dari PT. Banyu Bening Utama Nomor: 012/Leg-Eks/BBU/VIII/2013, Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Bening Utama, Tanggal 22 Agustus 2013</p> <p>4. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-B) PT. Banyu Bening Utama, Tanggal / 2014 "Tanda Tangan Di Coret Bupati";</p> <p>5. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Banyu Bening Utama, 8 April 2011</p> <p>6. Foto Copy Data Administrasi Perkebunan PT. Banyu Bening Utama, Lokasi Desa Kuala Mulia Ke. Kuala Cenaku Indragiri Hulu</p> <p>7. Foto Copy Surat Masuk Dari Dinas Kehutanan Nomor: 522/Sekr/VII/2014/196, Tentang Konfirmasi Status Lahan Atas Nama PT. Banyu Bening Utama Pada Tanggal 17 Juli 2014</p> <p>8. Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Nomor: 80/Adm.Pum/VI/2013 Tentang Surat Pengantar tanggal 3 Juni 2014</p> <p>9. Foto Copy Surat Dari Pemprov Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/Bp2t-Ir/II/2013/49 Tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonfersi (Hpk) Untuk Kebun Kelapa Sawit an. PT. Banyu Bening Utama tanggal 4 Februari 2013</p> <p>10. Foto Copy Surat Pemprov. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/Bp2t-Ir/II/2013/51 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Banyu Bening Utama tanggal 4 Februari 2013</p> <p>11. Foto Copy Surat Dari Pemprov. Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/Planhut/5113 Tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.N. PT. Banyu Bening Utama tanggal 21 November 2013</p> <p>12. Foto Copy Daftar Nama KUD Koperasi Bermitra Dengan Perusahaan Dibidang Perkebunan</p> <p>13. Foto Copy Surat Dari Pemprov. Dinas Perkebunan Nomor: 050/Disbun-Pengemb/708 Tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prov. Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.N. PT. Banyu Bening Utama tanggal 8 Agustus 2012	
14.	Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah, perihal Undangan Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Kabupaten Indragiri Hilir Secara Pasti Di Lapangan Nomor : 181/Adm.Pum/V/2012 tanggal 03 Mei 2013	
15.	Foto Copy Surat Dari PT. Banyu Bening Utama Tentang Surat Pernyataan, tanggal 1 Mei 2012	
16.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 215 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. Banyu Bening Utama, Tanggal 16 April 2004	
17.	Foto Copy Surat Izin Usaha Nomor : 2232/Bpt/2010 A.N. Surya Darmadi, tanggal 2 Juli 2010	
18.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Banyu Bening Utama, tanggal 26 Agustus 2010	
19.	Foto Copy Surat Dari Badan Pelayanan Terpadu Tentang Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 301/Bpt 04.01/Viii/2010 tanggal 26 Agustus 2010	
20.	Foto Copy Bukti Transfer PT. Banyu Bening Utama Ke Dipenda Nominal Rp. 43.657.800 Tanggal 27 Februari 2012	
21.	Foto Copy Sertifikat Tanah Milik PT. Banyu Bening Utama Tanggal 10 Desember 2010	
22.	Foto Copy Sertifikat Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan Milik PT. Banyu Bening Utama tanggal 15 Juli 2011	
23.	Foto Copy Akta, Rengat 15 Juli 2011	
24.	Foto Copy Surat Pernyataan Dari Pt. Banyu Bening Utama, Pekanbaru 1 Mei 2012	
25.	Foto Copy Surat Pengantar 15 April 2011	
26.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 155 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 8 April 2011	
27.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangun Pabrik Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama Tanggal 26 April 2011	
28.	Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 72/Bpmd&Ppt/Bp-Imb/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011	
29.	Foto Copy Bukti Transfer Tanggal 26 April 2012	
30.	Foto Copy Sertifikat Izin Usaha A.N. Surya Darmadi Tanggal 2 Juli 2010	
31.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan	
32.	Foto Copy Bukti Izin Usaha Perdagangan Besar Tanggal 26 Agustus 2010	
33.	Foto Copy Akta Pengawas Ketenaga Kerjaan Tanggal 25 Mei 2011	
34.	Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Pt. Banyu Bening Utama Dengan Masyarakat Desa Kuala Cenaku Dan Kuala Mulia Kec. Kuala Cenaku Kab. Inhu Tanggal 3 Maret 2011	
35.	Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : Pem-00531/Wpj.02/Kp.1003/2012 Pekanbaru 24 April 2012	
36.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 29 Maret 2012	
37.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 29 Maret 2012	
38.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 2 Maret 2012	
39.	Foto Copy Surat Dari Dispeda Tentang Penyampaian	

Halaman 317 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	Ketetapan Tagihan Retribusi Daerah Tahun 2012 Pada Tanggal 29 Februari 2012	
40.	Foto Copy Bukti Pajak A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 28 Februari 2012	
41.	Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan A.N Surya Darmadi Tanggal 6 Mei 2011	
42.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangun Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama 26 April 2011	
43.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit A.N. Pt. Banyu Bening Utama 26 April 2011	
44.	Foto Copy Surat Perjanjian Pt. Banyu Bening Utama Pada Tanggal 18 Maret 2011	
45.	Foto Copy Surat Dari Pt. Banyu Bening Utama Nomor 0041/Bbu-Pku/I/2011 Tentang Skedul Pembangunan Kebun Plasma Bagi Masyarakat Desa Kuala Cenaku Dan Kuala Mulia Pekanbaru 26 Januari 2011	
46.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Nomor 522.2/Pu-Xii/2010/1307 Tentang Pertimbangan Teknis Ketersediaan Bahan A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 27 Desember 2010	
47.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Nomor : 522.2/Pu-Xii/2010/1307 Tentang Pertimbangan Teknis Ketersediaan Bhan A.N. Pt. Banyu Bening Utama Rengat 27 Desember 2010	
48.	Foto Copy Surat Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 850/400/Xii/2010 Tentang Pertimbangan Teknis Untuk Izin Lokasi Pt. Banyu Bening Utama Rengat 23 Desember 2010	
49.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Telaah Sاتف Nomor 522/Pu-Xii/2010/1230 Tentang Status Area Kebun Dan Kebun Kelapa Sawit Pt. Banyu Bening Utama 8 Desember 2010	
50.	Foto Copy Surat Dari Dinas Kehutanan Telaah Sاتف Nomor 522/Pu-Xii/2010/1230 Tentang Status Area Kebun Dan Kebun Kelapa Sawit Pt. Banyu Bening Utama 8 Desember 2010	
51.	Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan A.N. Pt. Banyu Bening Utama Pekanbaru 26 Agustus 2010	
52.	Foto Copy Surat Izin Usaha A.N. Surya Darmadi Rengat 26 Agustus 2010	
53.	Foto Copy Banyu Bening Utama Nomor 0192/Bbu-Pku/Vi/2010 Tentang Permohonan Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (Pks) Rengat 20 Juni 2010	
54.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 48/Skdp/Kc/lui/2010 25 Maret 2010	
55.	Foto Copy Surat Dari Badan Lingkungan Hidup, Rekomendasi Nomor : 660/Blh-Amdal/lui/2010/30 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (Ukl) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (Upl) Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Banyu Bening Utama Kapasitas 60 Ton Tbs Per Jam Tanggal 5 Maret 2010	
56.	Foto Copy Surat Keputusan Menkumham A.N. Pt. Banyu Bening Utama, Jakarta 24 Oktober 2008	
57.	Foto Copy Surat Dari Pemprov - Setda Nomor 597/Ph/44.12 Tentang Pengaduan Masyarakat Desa Paya Rumbai Kec. Seberida, Pekanbaru 18 Mei 2006	
58.	Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan Pt. Banyu Bening Utama Lokasi Desa Paya Rumbai Kec. Seberida	
59.	Foto Copy Surat Rekomendasi Pt. Banyu Bening	



	Utama Tanggal 25 Juli 2005	
60.	Foto Copy Surat Dari Sekretariat Daerah Nomor : 845/Tp/100/2004 Tentang Tuntutan Masyarakat Desa Payurimbai Rengat 10 Agustus 2004	
61.	Foto Copy Surat Dari Desa Paya Rumbai Nomor : 98/05/Sp-Pr/Xi/2004 Tentang Pengajuan Tuntutan Masyarakat Tanggal 27 Nopember 2004	
62.	Foto Copy Surat Kuasa Khusus Dari Desa Paya Rumbai Kec. Seberida Sebanyak 24 Rangkap Tanggal 20 Maret 2006 Tanggal 19 Juli 2000	
63.	Foto Copy Sk Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17825 Ht.01.01th.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas A.N. Pt. Banyu Bening Utama Jakarta 16 Juli 2004	
64.	Foto Copy Akta Pendirian Persero Terbatas Nomor 65 A.N. Pt. Banyu Bening Utama Oleh Linda Herawati S.H.	
65.	Foto Copy Surat Dari Desa Paya Rumbai Kec. Seberida Nomor ; 002/Sorot/lh/lv.2006 Tentang Tuntutan Masyarakat Paya Rumbai Tanggal 19 April 2006	
66.	Foto Copy Surat Kuasa Dari Desa Paya Rumbai Tanggal 10 April 2006	
67.	Foto Copy Profil Masyarakat Desa Paya Rumbai	
68.	Foto Copy Program Desa Paya Rumbai	
69.	Foto Copy Surat Dari Desa Paya Rumbai Nomor ; 64/05/Sk-Pr/Vi/2004 Tentang Pengajuan Hasil Rapat Pemerintahan Desa Dan Bpd Tanggal 5 Juni 2004	
70.	Foto Copy Berita Acara Tuntutan Masyarakat Paya Rumbai Nomor 002/Sorot/lh/lv/2006 Tanggal 31 Mei 2004	
71.	Foto Copy Daftar Hadir Pada Tanggal 31 Mei 2004	
72.	Foto Copy Surat Dari Camat Seberida Nomor ; / 82/Pem/Xii/2004 Tentang Tuntutan Plasma Masyarakat Desa Payarumbai Terhadap Pt. Banyu Bening Utama, Pangkalan Kasai, 3 Desember 2004	
73.	Foto Copy Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Inhu Nomor : 68/Dprd/lui/2005 Tentang Rekomendasi Hasil Hearing Komisi A Dprd Kab. Inhu, Rengat 3 Maret 2005	
74.	Foto Copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Inhu Nomor : 233/Dprd/Vii/2005 Tentang Rekomendasi Hasil Hearing Komisi A Dprd Kab. Inhu Dengan Pt. Banyu Bening Utama, Rengat 25 Juli 2005	
D.	Dokumen terkait PT. Seberida Subur, yaitu:	
1.	Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan Pt. Seberida Subur	
2.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 92 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. Pt. Seberida Subur, Rengat 26 Februari 2007	
3.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 183 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Dan Revisi Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Seberida Subur, Rengat 10 Juli 2010	
4.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Seberida Subur, Rengat 26 Februari 2007	
5.	Foto Copy Surat Pt. Seberida Subur Tentang Surat Pernyataan Dari Edison Pinem, Pekanbaru 1 Mei 2012	
6.	Foto Copy Bukti Setor Pajak	
7.	Foto Copy Sertifikat Wajib Lapor Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi A.N. Pt. Seberida Subur Yg Di	



	<p>Pimpin Yusuf Dedy. H, Rengat 27 September 2011</p> <p>8. Foto Copy Surat Dari Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor ; 250/Bpmd&Ppt/V/2011 Tentang Izin Tempat Usaha/ Izin Gangguan (Ho) Kabupaten Indragiri Hulu A.N. Rudi Candra, Rengat 11 Mei 2011</p> <p>9. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas A.N. Rudi Candra, Rengat 11 Mei 2011</p> <p>10. Foto Copy Surat Persetujuan Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 102/V/Pma/2006 Tentang Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing (Non Pmdn/Pma) Menjadi Penanaman Modal Asing(Pma), Ditanda Tangan Oleh Sutarto</p> <p>11. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Pt. Seberida Subur, Tidak Di Tanda Tangan Oleh Drs. H. Mujtahid Thalib</p> <p>12. Coretan Tangan</p> <p>13. Foto Copy Bukti Setor Pajak Atas Nama Rudi Candra, Rengat 29 Maret 2012</p> <p>E. Dokumen Terkait PT. Palma Satu, yaitu:</p> <p>1. Fotocopy keputusan bupati Indragiri hulu nomor 90 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma satu tanggal 26 Februari 2007</p> <p>2. Fotocopy keputusan bupati Indragiri hulu nomor 91 tahun 2007 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Palma satu tanggal 26 Februari 2007</p> <p>3. Asli keputusan bupati Indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma satu tanggal 8 Juli 2010</p> <p>4. Fotocopy berita acara rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan PT Palma satu sesuai dengan surat keputusan bupati Indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT Palma satu pada hari rabu tanggal delapan bulan Desember dua ribu sepuluh bertempat di ruang rapat bupati inhu</p> <p>5. Fotocopy surat dari bpd desa penyaguan nomor 05/pyg/v/2009 hal keresahan masyarakat yang ditujukan kepada ketua DPRDProvinsi Riau c.q. ketua komisi b di Pekanbaru tanggal 22 Mei 2009</p> <p>6. Fotocopy surat pernyataan nomor : /ps-pku/iii/2007 atas nama alisati firman tanggal 8 Maret 2007</p> <p>7. Fotocopy berita acara penetapan batas desa pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu enam</p> <p>8. Fotocopy daftar hadir rapat penetapan batas desa kuala cenaku kecamatan kuala cenaku dengan desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 17 Juni 2006</p> <p>9. Fotocopy berita acara penetapan batas desa pada hari minggu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu delapan</p> <p>10. Fotocopy daftar hadir rapat penetapan batas desa payarumbai kecamatan seberida dan desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 3 Februari 2008</p> <p>11. Fotocopy surat tugas nomor 180/st/um/ix/2010 perihal pelaksanaan tugas pemasangan patok tapal batas</p>	
--	--	--



	lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan PT Palma satu seluas 3000 ha tanggal 3 September 2010 s/d selesai. Tanggal 1 September 2010	
12.	Fotocopy berita acara pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu dengan PT Palma satu seluas ± 3000 ha pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh bertempat di desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu	
13.	Fotocopy surat pernyataan warga masyarakat dan kelompok tani yang memiliki lahan di desa penyaguan tanggal 5 Juli 2010	
14.	Fotocopy surat keterangan warga desa penyaguan nomor : /pyg/v/2010 tanggal 3 Mei 2010	
15.	Fotocopy laporan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan terkait lahan desa/masyarakat penyaguan seluas ± 3000 ha yang mohon di inclave dalam lahan PT Palma satu tanggal 27 Mei 2010	
16.	Fotocopy surat kementerian kehutanan nomor : s.278/menhut-vii/kuh/2013 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Palma satu tanggal 4 Maret 2013	
17.	Fotocopy surat bupati Indragiri hulu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 hal penghentian aktivitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 20 Juni 2011	
18.	Fotocopy surat dari pt. Palma satu nomor 168/um/ps-pku/vi/11 hal tanggapan surat bupati Indragiri hulu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 30 Juni 2011	
19.	Fotocopy surat camat batang gansal nomor : 590/btg/vii/2010/212 perihal rekomendasi perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan an. Pt. Palma satu tanggal 2 Juli 2010	
20.	Fotocopy surat kepala desa penyaguan nomor : 01/rek-il/pyn/vi/2010 perihal rekomendasi perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan an. Pt. Palma satu tanggal 2 Juni 2010	
21.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 179/adm.pum/viii/2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3000 ha tanggal 31 Agustus 2010	
22.	Fotocopy lembar disposisi surat dari tim vii perjuangan desa penyaguan tanggal 23 Agustus 2010 perihal mohon bantuan teknis	
23.	Fotocopy surat dari tim vii perjuangan desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu tanggal 23 Agustus 2010 perihal mohon bantuan teknis	
24.	Fotocopy surat dari komisi nasional hak asasi manusia republik Indonesia nomor : 1.908/k/pmt/ix/2014 perihal penanganan kasus sengketa batas dan konflik perkebunan tanggal 10 September 2014	
25.	Fotocopy surat bupati Indragiri hulu nomor 102/adm.pum/100/2013 perihal fasilitasi konflik lahan masyarakat dengan pt. Palma satu tanggal 13 Mei 2013	
26.	Fotocopy surat komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia nomor : r-974/40-43/03/2011 hal tanggapan atas pengaduan masyarakat tanggal 21 Maret 2011	
27.	Fotocopy surat dari lsm kp2mi nomor : 005/pmi-	



	<p>inhu/i/2011 hal pengaduan dugaan korupsi kehutanan penyerobotan lahan dan illegal logging oleh tujuh perusahaan di Indragiri hulu tanggal 5 Januari 2011</p> <p>28. Fotocopy surat klinik hukum pertanahan nomor : 10.a-khp/dp-ps/kih/x/2011 hal mohon bantuan tanggal 19 Oktober 2011</p> <p>29. Fotocopy surat klinik hukum pertanahan nomor : 10.khp/dp-ps/x/2011 hal mohon kesediaan mengembalikan hak penguasaan lahan seluas 3000 ha tanggal 19 Oktober 2011</p> <p>30. Fotocopy surat klinik hukum pertanahan nomor : 10.b-khp/dp-ps/bpn/x/2011 hal mohon perhatian tanggal 19 Oktober 2011</p> <p>31. Fotocopy lembar disposisi surat dari camat batang gansal nomor : 100/320/vi/2009 perihal tentang izin lokasi pt. Palma satu</p> <p>32. Fotocopy surat camat batang gansal nomor : 100/320/vi/2009 perihal izin lokasi pt. Palma satu tanggal 12 Juni 2009</p> <p>33. Fotocopy berita acara rapat koordinasi pembahasan permohonan izin lokasi pt. Palma satu hari kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan</p> <p>34. Fotocopy lembar disposisi surat dari tim vii perjuangan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal perihal pemberitahuan penyampaian aspirasi dan penguasaan lahan perkebunan milik masyarakat seluas ± 3000 ha berdasarkan sk bupati no 180 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 yang saat ini masih digarap dan dikuasai oleh pt. Palma satu tanggal 11 April 2011</p> <p>35. Fotocopy surat dari tim vii perjuangan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu perihal pemberitahuan penyampaian aspirasi dan penguasaan lahan perkebunan milik masyarakat seluas ± 3000 hektar berdasarkan surat keputusan bupati nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 yang saat ini masih digarap dan dikuasai oleh pt. Palma satu tanggal 11 April 2011</p> <p>36. Fotocopy nota dinas nomor : 140/adm.pum/100/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal peninjauan dan pengecekan lapangan lokasi kebakaran lahan masyarakat desa penyaguan sekaligus pengecekan patok tapal batas lahan masyarakat desa penyaguan yang diinclave dari areal pt. Palma satu</p> <p>37. Fotocopy surat sekretarit daerah nomor : 181/adm.pum/100/2010 perihal penunjukan personil pengecekan lapangan tanggal 25 Oktober 2010</p> <p>38. Fotocopy undangan bupati Indragiri hulu nomor : 246/adm.pum/xii/2010 perihal rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan pt. Palma satu sesuai dengan surat keputusan bupati Indragiri hulu nomor : 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu bertempat di ruangan rapat bupati Indragiri hulu tanggal 8 Desember 2010</p> <p>39. Fotocopy surat tugas nomor 206/st/adm.pum/100/2010 tanggal 27 Oktober 2010 perihal melaksanakan tugas pengecekan lapangan terkait adanya pencabutan patok tapal batas lahan masyarakat desa penyaguan dengan lahan pt. Palma satu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanggal 28 Oktober s/d selesai di desa penyaguan kecamatan</p>	
--	---	--



	batang gansal	
40.	Fotocopy laporan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan terkait lahan desa/masyarakat penyaguan seluas ± 3000 ha yang mohon diinclave dalam lahan pt. Palma satu tanggal 27 Mei 2010	
41.	Fotocopy berita acara hasil pengecekan lapangan terhadap lahan seluas ± 3000 ha yang telah diinclave serta telah dilakukan pemasangan patok batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu tanggal 28 Oktober 2010	
42.	Fotocopy kesimpulan rapat koordinasi tindak lanjut hearing DPRD kab. Inhu dengan pt. Palma satu dan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu tanggal 25 Juni 2010	
43.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor 88/adm.pum/v/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal permintaan personil pengecekan dan peninjauan ke lapangan lahan seluas ± 3000 ha lokasi pt. Palma satu di kecamatan batang gansal	
44.	Fotocopy surat DPRD kab. Inhu nomor 118/dprd/iv/2010 tanggal 29 April 2010 perihal undangan rapat dengar pendapat komisi a dprd kab. Indragiri hulu	
45.	Fotocopy berita acara dengar pendapat komisi a dprd kabupaten Indragiri hulu dengan pt. Palma satu desa penyaguan dan pemerintah daerah kabupaten Indragiri hulu tanggal 4 Mei 2010	
46.	Fotocopy undangan nomor : 246/adm.pum/xii/2010 tanggal 6 Desember 2010 perihal rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan pt. Palma satu	
47.	Fotocopy lembar disposisi surat dari tim 7 perjuangan desa penyaguan tanggal 10 November 2010 perihal pemberitahuan pembuatan parit tapal batas	
48.	Fotocopy surat tim vii perjuangan desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu perihal pemberitahuan pembuatan parit tapal batas tanggal 10 November 2010	
49.	Fotocopy surat tim vii perjuangan desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten Indragiri hulu perihal pemberitahuan tanggal 15 November 2010	
50.	Fotocopy undangan sekretariat daerah nomor : 124/adm.pum/005/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal rapat tindak lanjut hearing dprd kab. Inhu dengan pt. Palma satu dan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal	
51.	Fotocopy lembar disposisi surat dari pt. Palma satu tanggal 5 Januari 2010 nomor : 04/ps-pku/i/10 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. Palma satu	
52.	Fotocopy surat dari pt. Palma satu nomor : 04/ps-pku/i/10 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama pt. Palma satu tanggal 5 Januari 2010	
53.	Fotocopy surat pernyataan dari masyarakat dan kelompok tani yang memiliki lahan di desa penyaguan tanggal 5 Juli 2010	
54.	Fotocopy surat keterangan nomor : /pyg/v/2010 tanggal 3 Mei 2010	
55.	Fotocopy surat badan pertanahan nasional republik Indonesia kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Riau nomor : 791/9-14/iv/2010 perihal mohon supaya tidak mengesahkan permohonan hak guna usaha yang dimohon pt palma satu untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit di desa penyaguan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 29 April 2010	
56.	Fotocopy surat bupati indragiri hulu nomor 118/adm.pum/100/vi/2011 perihal penghentian aktivitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 20 Juni 2011	
57.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 179/adm.pum/viii/2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3000 ha tanggal 31 Agustus 2010	
58.	Fotocopy surat dari kapolres inhu nomor : r/42/ii/2010 perihal permasalahan lahan antara masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansak dengan pt. Palma satu tanggal 23 Februari 2010	
59.	Fotocopy surat kapolres inhu nomor : b/770/v/2010/reskrim perihal mohon bantuan penunjukan saksi tanggal 14 Mei 2010	
60.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 180/hk/35/v/2010 perihal penyampaian nama personil tanggal 21 Mei 2010 beserta lampiran nama personil	
61.	Fotocopy surat sekretariat daerah nomor : 70/adm.pum/100/2011 perihal pengecekan dan pengukuran lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal tanggal April 2011	
62.	Fotocopy surat satuan polisi pamong praja nomor : 725/pol.pp/2010 perihal pengiriman personil pengecekan lapangan tanggal 26 Oktober 2010	
63.	Fotocopy surat tugas nomor : 090/disbun/x/2010/831 tanggal 27 Oktober 2010	
64.	Fotocopy keputusan bupati indragiri hulu nomor tahun 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu	
65.	Fotocopy surat keterangan terdaftar nomor : pem-061/wpj.06/kp.0903/2005 tanggal 17 Juni 2005	
66.	Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 025/kpk/500/dp/iii/2007 tanggal 8 Maret 2007	
67.	Surat keterangan domisili perusahaan nomor : 92/-1.751.21 tanggal 14 Juni 2005	
68.	Surat izin usah perdagangan (siup)- besar nomor : 02571/ /1.824.51 tanggal 12 Juli 2005	
69.	Fotocopy surat dinas pertanahan nomor : 590/tgt-ii/2007/02 perihal rekomendasi teknis izin lokasi tanggal 23 Februari 2007	
70.	Fotocopy berita acara pertemuan negosiasi antara PT. Bertuah aneka yasa (duta palma group) dengan masyarakat kuala cenaku kabupaten indragiri hulu provinsi Riau pada hari Selasa tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sepuluh	
71.	Fotocopy rapat koordinasi antara pt. Bertuah aneka yas (PT. Bay) dengan masyarakat desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu tentang program kemitraan dengan masyarakat tanggal 13 Januari 2010	
72.	Akta notaris oleh yulia, s.h. tanggal 8 Juni 2005	
73.	Copy Surat Nomor: 06/PYG/II/2009 tanggal 16 Februari 2009, perihal Penyetopan Aktivitas PT. Palma 1	
74.	Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma SATU, tanggal 26 Februari 2007	
75.	Surat Pernyataan Nomor : /PS-PKU/III/2007	

Halaman 324 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 8 Maret 2007 atas nama ALISATI FIRMAN sebanyak 4 rangkap	
76.	Data Administrasi Perusahaan Perkebunan Pt. Palma 1, Lokasi Desa Payarumbai Kec. Seberida Kab. Inhu 3 Rangkap	
77.	Lembar Disposisi Indeks 104 Perihal Status Kemitraan Pt. Palma Satu Tanggal 16 Februari 2009 Nomor 06/Pyg/II/2009 Asal Tata Pemerintahan	
78.	Lembar Disposisi Surat Dari Kedes Penyaguan Kec.Batang Gansal Tanggal Surat 16 Februari 2009 Nomor Surat 06/Pyg/II/2009 Surat Diterima Tanggal 23 Februari 2009 Ditandatangani 24 Februari 2009	
79.	Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma SATU, tanggal 26 Februari 2007	
80.	Berita Acara Penetapan Batas Desa di buat di Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Tanggal 17 Juni 2006.	
81.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar)	
82.	BERITA ACARA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA PAYA RUMBAI DENGAN DESA PENYAGUAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2008	
83.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Payarumbai Kecamatan Seberida dan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 Lembar)	
84.	LEMBAR DISPOSISI DARI KEPALA DESA PEYAGUAN TANGGAL SURAT 187 JULI 2009 DITERIMA 21 JULI 2009 NOMOR SURAT 07/PYG/VII/2009 OLEH KABAG ADM PEMERINTAH UMUM SETDA KAB.INHU DRS. MULTACDI, MSI	
85.	PENYETOPAN AKTIFITAS PT PALMA SATU NOMOR 07/PYG/VII/2009 TANGGAL 18 JULI 2009 A.N. KETUA DPD DESA PENYAGUAN R MUSLIM A.N. KEPALA DESA PENYAGUAN FIRMANZAH	
86.	Surat Pernyataan Nomor : /PS-PKU/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 atas nama ALISATI FIRMAN	
87.	Keputusan Bupati Nomor 90 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma SATU, tanggal 26 Februari 2007	
88.	Berita Acara Penetapan Batas Desa di buat di Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Tanggal 17 Juni 2006.	
89.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Cenaku dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar)	
90.	BERITA ACARA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA PAYA RUMBAI DENGAN DESA PENYAGUAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2008	
91.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Februari 2008	
92.	Berita Acara Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Tanggal 03 Nopember 2008.	
93.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Nopember 2008	
94.	BERITA ACARA PENETAPAN BATAS DESA ANTARA DESA PAYA RUMBAI DENGAN DESA PENYAGUAN TANGGAL 3 FEBRUARI 2008	
95.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Paya	

Halaman 325 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rumbai Kecamatan Seberida dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Februari 2008	
96.	Surat Sekretariat Daerah Nomor 23/TP/100/2008 Perihal Panggilan Menghadap Tanggal Agustus 2008 Kepada Yth Sdr, Direktur PT. Palma satu di Pekanbaru.	
97.	Berita Acara Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Tanggal 03 Nopember 2008.	
98.	Daftar Hadir Rapat Penetapan Batas Desa Kuala Mulia dengan Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal (2 lembar) Tanggal 3 Nopember 2008	
99.	Lembar Disposisi Surat dari Desa Penyaguan Nomor 09/09-PYG/IV/2008 Perihal Penghentian Alat Berat Pembukaan Lahan An. PT. Palma Satu Tanggal 6 April 2008 Kepada Yth Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu	
100.	Lembar Disposisi Tanggal 16 Februari 2009 Nomor 06/PYG/II/2009 Asal Kades Penyaguan diterima Tanggal 23 Februari 2009	
101.	Surat dari Kepala Desa Penyaguan Nomor 06/PYG/II/2009 Hal Status Kemitraan PT.Palma Satu Kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba.	
102.	Undangan Rapat Camat Batang Gansal Hari Kamis 11 Juni 2009 Pukul 08.30 WIB s/d selesai di Aula Kantor Camat Batang Gansal	
103.	Surat Sekretariat Daerah Nomor 228/Adm.Pum/100/2009 Perihal Status Izin Lokasi PT.Palma Satu Tanggal 15 Juni 2009 Kepada Yth, Sdr Direktur PT.Palma Satu di Pekanbaru (3 Rangkap)	
104.	Surat dari Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Nomor 07/PYG/II/2009 Hal Penyetopan Aktifitas PT. Palma satu Tanggal 18 Juli 2009 Kepada Yth Bapak Camat Batang Gansal di Seberida	
105.	Surat Sekretariat Daerah Nomor 193/ADM.PUM/100/XI/2009 Perihal Surat Pengantar tanggal Nopember 2009 Kepada Yth. Sdr. DIREKTUR PT. PALMA SATU di PEKANBARU.	
106.	Rapat terbatas Penyelesaian Permasalahan Antara PT. Palma Satu dengan Camat Batang Gansal Mewakili Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal	
107.	Daftar hadir Rapat/Pertemuan Antara PT. Palma satu dengan Pemerintah Daerah (Asisten 1, Camat dan Perwakilan PT. Palma satu)	
108.	Surat PT. Palma Satu Nomor 357/UM-PKU/XI/09 Tanggal 30 Nopember 2009 Hal Permohonan untuk menghadap Kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba	
109.	Surat PT. Palma Satu Nomor 364/UM-PKU/XI/09 Tanggal 11 Desember 2009 Hal Permohonan untuk menghadap Kepada Yth. Bapak Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba	
110.	Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21.15/Adm.Pum/XI/2009/100 Perihal Masalah Batas Kabupaten Inhu dan Inhil Tanggal 19 Nopember 2009 Kepada Yth Sdr. Gubernur Riau c/q kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Riau di Pekanbaru	
111.	Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 180 tahun 2010 Tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa sawit Atas nama PT.Palma satu Tanggal 8 Juli 2010.	
112.	Lembar Disposisi Tanggal 2 Juni 2010 Nomor	

Halaman 326 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>25.15/Adm.Pum/IX/2009/100 Tentang Lahan Desa atau masyarakat penyaguan ± 3000 Ha yang mohon di inclave dalam lahan PT. Palma Satu</p> <p>113. Lembar disposisi tanggal 9 Desember 2009 Nomor 201/ADM.PUM/100/XII/2009 tentang undangan rapat perihal permohonan untuk menghadap, bupati Indragiri hulu.</p> <p>114. Lembar Disposisi tanggal 18 Januari 2010 Nomor : 01/Pem/XII/2009 tentang laporan tuntutan masyarakat desa kuala cenaku kecamatan kuala cenaku.</p> <p>115. Lembaran Disposisi tanggal 12 Januari 2010 tentang pemberitahuan masyarakat akan mengambil / menguasai kembali lahan milik masyarakat seluas ± 3000 ha.</p> <p>116. Lembar Disposisi tanggal 10 Februari 2010 tentang tuntutan masyarakat desa penyaguan.</p> <p>117. Nota pengajuan konsep tanggal Februari 2010 Nomor : /ADM.PUM/100/II/2010 tentang surat keberadaan PT. Palma Satu di Kabupaten Indragiri hulu.</p> <p>118. Surat DPRD tanggal 29 April 2010 Nomor 118/DPRD/IV/2010 tentang undangan rapat dengar pendapat komisi A DPRD Kab. Indragiri hulu.</p> <p>119. Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Prov. Riau tanggal 29 April 2010 Nomor : 791/9-14/IV/2010 tentang mohon supaya tidak mengesahkan permohonan hak guna usaha yang dimohon PT. Duta Palma Satu untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit di desa penyaguan.</p> <p>120. Lembar Disposisi tanggal 2 Juni 2010 tentang lahan desa atau masyarakat penyaguan seluas ± 3000 Ha yang mohon di inclave dalam lahan PT. Palma Satu.</p> <p>121. Nota Pengajuan Konsep tanggal Juli 2010 Nomor : 180/HK/ /VII/2010 tentang koreksi draft Setda kab. Inhu.</p> <p>122. Surat tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 179/ADM.PUM/VIII/2010 tentang pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan PT. Palma Satu Seluas 3000 Ha.</p> <p>123. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanggal 8 Juli 2010 Nomor : 180 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Palma Satu.</p> <p>124. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanggal 30 Juli 2010 Nomor : 200 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor 180 tahun 2010 (Nomor Diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma Satu.</p> <p>125. Surat bupati Indragiri hulu tanggal 20 Juni 2011 nomor : 118/ADM.PUM/100/VI/2011 tentang penghentian aktifitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>126. surat DPRD Kab. Inhu tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 28/DPRD/I/2012 tentang konfirmasi ulang data dan peta izin lokasi PT. Palma Satu.</p> <p>127. Surat kementerian kehutanan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : s.121/BPRUK-1/2012 tentang kelengkapan persyaratan permohonan pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.</p> <p>128. Surat Komisi Nasional Hak asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan ke Bupati Indragiri Hulu dan DPRD kab. Inhu tanggal 1 November 2012 Nomor : 2.460/K/PMT/XI/2012 tentang permintaan penjelasan</p>	
--	---	--



	<p>permasalahan lahan, beserta lembar disposisi.</p> <p>129. Surat pemda Inhu tanggal 25 April 2012 Nomor : 176/ADM.PUM/100/IV/2012 tentang tindak lanjut hasil TIM Pansus DPRD Kab. Inhu.</p> <p>130. Surat undangan bupati Indragiri hulu nomor 27/ADM.PUM/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang rapat koordinasi permasalahan duta palma group (PT.Palma Satu).</p> <p>131. Surat bupati Indragiri hulu tanggal 25 Januari 2013 nomor : 31/ADM.PUM/100/II/2013 tentang penjelasan permasalahan PT. Palma Satu beserta bukti kirim tanggal 28 Januari 2013.</p> <p>132. Surat Menteri kehutanan tanggal 4 Maret 2013 nomor : s.278/Menhut-VII/KUH/2013 tentang tanggapan atas permohonan pelepasan Kawasan hutan AN. PT. Palma Satu.</p> <p>133. Surat BPN RI Nomor : 4169/25.2-600/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 tentang laporan dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan PT. Palma Satu dibatas kabupaten Indragiri hulu – Indragiri hilir, Provinsi Riau, beserta lembar disposisi.</p> <p>134. Surat komisi nasional hak asasi manusia RI tanggal 24 Mei 2013 nomor ; 1.459/k/PMT/V/2013 Perihal tindak lanjut rekomendasi DPRD Kab. Inhu yang ditujukan kepada bupati Indragiri hulu.</p> <p>135. Surat dari BPN Kanwil Riau tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 030/18-14/II/2014 perihal laporan dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan PT. Palma Satu.</p> <p>136. Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2014 Nomor : 522.1/Planhut/806 perihal revisi surat pertimbangan teknis rekomendasi pelepasan Kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Palma Satu.</p> <p>137. Draft Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang revisi izin usaha perkebunan PT. Palma Satu tahun 2014.</p> <p>F. Dokumen terkait PT. Panca Agro Lestari, yaitu:</p> <p>1. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 276 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Panca Agro Lestari tanggal 20 September 2005.</p> <p>2. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan An.PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 23 Januari 2006.</p> <p>3. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 10 Juli 2010.</p> <p>4. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 148 A Tahun 2007 tentang Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 6 Agustus 2007.</p> <p>5. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 10 Juli 2010, Yang telah dilegalisir pada tanggal 14 Januari 2015.</p> <p>6. Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT. PANCA AGRO LESTARI, Lokasi Desa Danau Rumbai / Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu. (16 item)</p> <p>7. Foto Copy Data Administrasi Perusahaan Perkebunan PT. PANCA AGRO LESTARI, Lokasi Desa Danau Rumbai / Penyaguan Kecamatan Batang</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>8. Gansal Kab. Indragiri Hulu. (17 item)</p> <p>8. Foto Copy Lembar Disposisi Perihal Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Danau Rumbai Kec, Batang Gansal Kab. Inhu dengan PT. Panca Agro Lestari, tanggal diterima 11-01-2013.</p> <p>9. Foto Copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor : B/52/I/2013/Dit Intelkam tanggal 7 Januari 2013 Perihal Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Danau Rumbai Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu dengan PT. Panca Agro Lestari (PT. PAL) Kepada KAPOLRES INHU.</p> <p>10. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 10 Juli 2010.</p> <p>11. Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanahan Nomor : 144/IL-DP/IX/2005 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi tanggal 3 September 2005.</p> <p>12. Foto Copy Disposisi Kepala Bagian Hukum Nomor : 180/HK/ /VII/2010 bulan Juli 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tanpa nomor tentang perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Panca Agro Lestari.</p> <p>13. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/2010 Hal Permasalahan PT. PAL.</p> <p>14. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 September 2010.</p> <p>15. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/006 Perihal Pengaduan tanggal 5 Oktober 2006.</p> <p>16. Foto Copy Surat Kepala Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tentang Surat Dukungan Masyarakat tanggal 17 Februari 2003.</p> <p>17. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang Nomor : 33/SK-SC/2003 tanggal 24 Desember 2003.</p> <p>18. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Habibi tanggal 24 September 2004.</p> <p>19. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Atas Nama Habibi tanggal 24 September 2004.</p> <p>20. Foto Copy Peta Situasi Tanah Atas Nama Habibi tanggal 24 September 2004.</p> <p>21. Foto Copy Surat Penyerahan Atas Nama Habibi Kepada Toba tanggal 10 Agustus 2004.</p> <p>22. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Sencalang Atas Nama HERDYANTO tanggal 24 Desember 2003.</p> <p>23. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Atas Nama HERDYANTO tanggal 24 September 2004.</p> <p>24. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Nama HERDYANTO tanggal 24 September 2004.</p> <p>25. Foto Copy Surat Penyerahan HERDYANTO KEPADA TOBA tanggal 10 Agustus 2004.</p> <p>26. Foto Copy Peta Situasi Tanah An. HERDYANTO tanggal 24 September 2004.</p> <p>27. Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. PAL dengan Masyarakat Desa Danau Rambai di Seberida tanggal 22 Januari 2010.</p> <p>28. Foto Copy KRONOLOGIS LAHAN MASYARAKAT DUSUN PENCALANG DESA Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang digarap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari</p>	
--	---	--

Halaman 329 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	tanggal 21 Februari 2010.	
29.	Foto Copy Permohonan Izin UNRAS Kepala Desa Danau Rambai Kepada KAPOLRES INHU tanggal 14 Desember 2011.	
30.	Foto Copy Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 670 (tulisan kurang jelas)/Disbun-VII/2011/556 Hal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan Tanggal 21 Juni 2011.	
31.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 04 Agustus 2008.	
32.	Foto Copy Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor : 46/LSM-MPR-Ber-Nas /VII/2010 Hal Permohonan permintaan Hearing kepada Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu tanggal 30 Juli 2010.	
33.	Foto Copy Surat Camat Batang Gansal Nomor : 227/310/VII/BTG/2010 Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Atas Lahan warga masyarakat Desa Danau Rambai ke Pimpinan PT. PAL tanggal 1 Juli 2010.	
34.	Foto Copy Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor : 04/LSM-MPR-Ber-Nas /VI/2010 Hal menindaklanjuti surat pertama ke pimpinan PT. PAL tanggal 28 Juni 2010.	
35.	Foto Copy Surat Kuasa Masyarakat Desa Danau Rambai tanggal 9 Maret 2010.	
36.	Foto Copy KRONOLOGIS LAHAN MASYARAKAT DUSUN PENCALANG DESA Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang digarap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Februari 2010.	
37.	Foto Copy Surat Polsek Pangkalan Kasai tentang Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPI/342/X/2006/Polsek Seberida Atas Nama SUPAR tanggal 01 Oktober 2006.	
38.	Foto Copy Surat Pengurus Penertipan Pengembangan Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 28 Januari 2010.	
39.	Foto Copy Daftar Hadir Rapat PT. PAL dengan Masyarakat Desa Danau Rambai di Seberida tanggal 22 Januari 2010.	
40.	Foto Copy Surat Pengurus Penertipan Pengembangan Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 31 Desember 2010.	
41.	Foto Copy Surat Pengurus Penertipan Pengembangan Penggarapan Hutan Wilayah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Inhu Kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 20 Oktober 2009.	
42.	Foto Copy Surat Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian tanggal 14 Oktober 2009.	
43.	Foto Copy Daftar Hadir Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.	
44.	Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/006 Kepada Camat Batang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Gansal Hal Pengaduan tanggal 5 Oktober 2006.</p> <p>45. Foto Copy Surat Undangan Sekretaris Daerah Kepada Kabag Tapem Setda kab. Inhu Acara Pertemuan Terhadap Permasalahan PT. PAL ,BBU, PALMA SATU dan KAT.</p> <p>46. Foto Copy Surat LSM MPR Ber-Nas Nomor : 46/LSM MPR Ber-Nas/VII/2010 Kepada Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu Hal Permohonan Permintaan Hearing tanggal 30 Juli 2010.</p> <p>47. Foto Copy Surat Camat Batang Gansal Nomor : 227/310/VII/BTG/2010 kepada Pimpinan PT. PAL tanggal 1 Juli 2010 Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Atas Lahan warga masyarakat Desa Danau Rambai.</p> <p>48. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Kepada PT. PAL tanggal 04 Agustus 2008.</p> <p>49. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/2010 kepada Bupati Indragiri Hulu Hal Permasalahan PT. Pal tanggal 20 September 2010.</p> <p>50. Foto Copy Undangan Rapat Sekretaris Daerah Nomor : 114/ADM.PUM/005/2011 Acara Tindaklanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PANCA AGRO LESTARI (PT.PAL) tanggal 15 Juni 2011.</p> <p>51. Foto Copy Surat Kepala Desa Sencalang Nomor : 32/SK-SC/2003 Atas Nama Sahari tanggal 24 Desember 2003.</p> <p>52. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Atas Nama Sahari tanggal 24 September 2004.</p> <p>53. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian An. SAHARI kepada M. Toba tanggal 24 September 2004.</p> <p>54. Foto Copy Surat Penyerahan An. Sahari Kepada Toba tanggal 10 Agustus 2004.</p> <p>55. Foto Copy Peta Situasi Tanah yang dikuasai SAHARI tanggal 24 September 2004.</p> <p>56. Foto Copy Lembar Disposisi Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Lahan Warga Desa Danau Rambai dengan PT. PAL.</p> <p>57. Foto Copy Disposisi Kabag ADM. Pemerintahan Umum Setda kab inhu tanggal 24 September 2010.</p> <p>58. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai Nomor : 18/10/SP-DR/K/2010 Hal Permasalahan PT. PAL tanggal 20 September 2010.</p> <p>59. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tanggal 20/09-2010.</p> <p>60. Foto Copy Daftar Nama-Nama masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kab Inhu yang Menuntut Lahan Diserobot PT. Panca Agro Lestari (PT.PAL).</p> <p>61. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 31/SK-SC/2003 tanggal 24 Desember 2003.</p> <p>62. Foto Copy Surat Penyerahan TAMRIN dengan TOBA tanggal 10 Agustus 2004.</p> <p>63. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Bersengketa TAMRIN tanggal 24 September 2004.</p> <p>64. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian TAMRIN tanggal 24 September 2004.</p> <p>65. Foto Copy Peta Situasi Tanah yang dikuasai TAMRIN tanggal 24 September 2004.</p> <p>66. Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT.</p>	
--	--	--

Halaman 331 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PANCA AGRO LESTARI.	
67.	Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 522 /Sekre/VII/2014/198 Perihal Konfirmasi Status Lahan PT. PAL tanggal 17 Juli 2014. Terlampir peta	
68.	Foto Copy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2014 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT. PAL tanggal 2014. Terlampir peta.	
69.	Foto Copy Surat PT. PAL kepada Bupati Indragiri Hulu Nomor : 003/Leg-Eks/FAL/VIII/2013 Perihal Permohonan Revisi Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit (IUP-B) tanggal 22 Agustus 2013. Terlampir peta.	
70.	Foto Copy Surat PT. PAL tentang Surat Pernyataan Perusahaan atau Kelompok (Grup) Usaha Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas Atas Nama Dedy Sumardi tanggal 29 April 2014.	
71.	Foto Copy Surat Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat tentang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-73/WPJ.02/KP.0603/2010 tanggal 3 November 2010.	
72.	Foto Copy Surat Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Riau kepada Direktur PT. PAL Nomor : 503/BP2T-IR/II/2013/52 Perihal Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. PAL tanggal 4 Februari 2013.Terlampir Peta	
73.	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 182 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit An. PT. PAL tanggal 10 Juli 2010.peta terlampir	
74.	Foto Copy Surat PT. PAL Kepada Bupati Indragiri Hulu Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi PT. Panca Agro Lestari Tanggal 22 Agustus 2013.	
75.	Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 050/Disbun-Pengemb/709 Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. PANCA AGRO LESTARI tanggal 8 Agustus 2012.	
76.	Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 522.1/Planhut/5211 Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro pembangunan perkebunan Propinsi Riau untuk perkebunan Kelapa Sawit An. PT. PAL tanggal 30 November 2012. Peta terlampir	
77.	Foto Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau kepada Menteri Kehutanan RI Nomor; 503/BP2T-IR/II/2013/50 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi dikonversi (HPK) untuk perkebunan Kelapa Sawit An. Pal tanggal 4 Februari 2013.peta terlampir	
78.	Foto Copy Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Pemko Pekanbaru Nomor : 1189/BPT/2011 tentang Izin Tempat Usaha Jufendiwan Herianto tanggal 11 April 2011. Terlampir surat izin usaha perdagangan besar nomor : 153/BPT 04.01/IV/2011 An. PT. PAL tanggal 18 April 2011 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : TDP 040115107308 tanggal 18 April 2014 An. PT. PAL.	
79.	Foto Copy Surat Keterangan Notaris Linda Herawati,	

Halaman 332 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH. Tanggal 12 Desember 2011.	
80.	Foto Copy Surat Dinas Pertanahan Kab. Inhu kepada Bupati Indragiri hulu Nomor : 01.590/TGT-II/2007/03 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Lokasi tanggal 26 Februari 2007.peta terlampir	
81.	Foto Copy Surat Bupati Kuantan Singingi Kepada Menteri Kehutanan RI Nomor : 522/Um/316 Perihal Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan An. PT. PAL tanggal 11 Maret 2013.peta terlampir.	
82.	Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kuantan Singingi Kepada Bupati Kuantan Singingi Nomor : 522.12/DISHUT-PUK/006 Perihal Pertimbangan Teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan An. PT. PAL tanggal 2 Januari 2013.	
83.	Foto Copy Surat Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Bupati Indragiri Hulu Nomor: 522.2/PR-XII/2005/1119 Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT. PAL tanggal 1 Desember 2005. Peta terlampir	
84.	Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai Dengan PT. PANCA AGRO LESTARI (PT.PAL) tanggal 7 April 2014.	
85.	Foto Copy Surat Berita Acara PT. PAL tanggal 15 April 2014.	
86.	Foto Copy Lembar Disposisi Index 800 Perihal Surat Kesepakatan asal masyarakat Desa Danau Rambai tanggal terima 19 Juni (tulisan tidak jelas).	
87.	Foto Copy Surat Kesepakatan akhir masyarakat Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Rencana Kemitraan dengan PT. PAL tanggal 17 Juni 2013.	
88.	Foto copy Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Direktur PT. PAL Nomor : 870/DISBUN-VI/2011/556 Perihal Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Konflik Lahan tanggal 21 Juni 2011.	
89.	Foto Copy Rekomendasi Panitia Khusus Duta Palma Group DPRD Kab. Inhu Tahun 2012.	
90.	Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan An. Vande Simanulang tanggal 4 Mei 2014.	
91.	Foto Copy Surat Pernyataan PT. PAL tanggal 6 Desember 2012.	
92.	Foto Copy Permohonan Pembangunan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berbentuk Plasma tanggal 21 Januari 2013.	
93.	Foto Copy Surat Musyawarah Masyarakat Dusun Pencalang Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menyangkut Penertipan Pengembangan dan Penggarapan Hutan Wilayah untuk mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian tanggal 14 Oktober 2009.	
94.	Foto Copy KRONOLOGIS LAHAN MASYARAKAT DUSUN PENCALANG DESA Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu yang digarap Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Panca Agro Lestari tanggal 21 Februari 2010.	
95.	Foto Copy Coretan Tangan.	
96.	Foto Copy Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai kec. Batang gansal terhadap PT. PAL tanggal 3 Mei 2013.	
97.	Foto Copy Surat Bupati Indragiri hulu kepada Direktur PT. PANCA AGRO LESTARI Nomor : 127/ADM PUM/VI/2013 perihal panggilan menghadap tanggal 27 Juni 2013.	
98.	Foto Copy Disposisi Surat Nomor : 82/LSM MPR Ber-	

Halaman 333 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nas/VI/2013 perihal tindak lanjut penyelesaian masalah tanah yang diserobot PT. PAL Sutrisno Dkk, dengan bukti kepemilikan sejumlah 20 lembar SKGR (40 Hektare) didesa Danau Rambai Kec. Batang Gansal 10 Juni 2013.</p> <p>99. Foto Copy Surat dari Petani Pemilik Tanah Desa Penyaguan tanggal Juni 2011.</p> <p>100. Foto Copy Surat Kepala Desa Belimbing :</p> <p>a. Nomor : 35/08.B/II/2005 tanggal 20 Februari 2005</p> <p>b. Nomor : 92/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>c. Nomor : 93/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>d. Nomor : 94/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>e. Nomor : 95/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>f. Nomor : 96/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>g. Nomor : 97/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>h. Nomor : 98/08.B/SK/VII/2003 tanggal 4 Juli 2003</p> <p>i. Nomor : 37/08.B/II/2005 tanggal 20 Februari 2005</p> <p>101. Foto Copy Surat Kuasa Pemilik Tanah yang terletak di Dusun Penyaguan Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kab. Inhu yang diberikan kepada H. KURDI, HAR tanggal 20 Februari 2006.</p> <p>102. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 27 September 2007.</p> <p>103. Foto Copy Disposisi Surat Perihal Kelanjutan Penyelesaian tuntutan tanah ulayat sekitar 1200 ha yang diserobot PT. PAL Desa Danau Rambai Nomor 54/LSM MPR Ber-Nas/IV/2011 tanggal 11 April 2011.</p> <p>104. Foto Copy Undangan Rapat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 85/ADM.PUM/005/2011 tanggal 9 Mei 2011.</p> <p>105. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Pada tanggal 6 April 2011.</p> <p>106. Foto Copy tanda terima Pemberitahuan Nomor: STTP/II/IV/2011/INTELKAM tanggal 5 April 2011.</p> <p>107. Foto Copy Disposisi Undangan Rapat tanggal 13 Mei 2013 daftar hadir terlampir.</p> <p>108. Foto Copy Tulisan Tangan.</p> <p>109. Foto Copy surat bupati Indragiri Hulu kepada PT. PAL Nomor : 464/ADM.PUM/100/ 2012 tanggal 4 Desember 2012.</p> <p>110. Foto Copy Surat Edaran BPN RI Nomor : 2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Responsibility) Serta Legalisir Dokumen Permohonan Pertanahan tanggal 27 Desember 2012.</p> <p>111. Foto Copy Disposisi Penyampaian dan permohonan untuk segera direalisasikan tuntutan masyarakat desa danau rambai tanggal 14 November 2012, Berita Acara, surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-1270/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-1269/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengaduan Masyarakat.</p> <p>112. Foto Copy Surat Berita Acara Team Sepuluh tanggal 24 Oktober 2012</p> <p>113. Foto Copy Disposisi surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor : B-1270/Kemsetneg/D-</p>	
--	---	--

Halaman 334 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>3/SR.04.07/05/2012 tanggal 14 Mei 2012.</p> <p>114. Foto Copy Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Direktur PT. PAL Perihal Penyelesaian tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal tanggal 14 Mei 2011.</p> <p>115. Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 10 Mei 2011.</p> <p>116. Foto Copy Lembar Disposisi Perihal Penyelesaian Pembangunan Lokasi Perkebunan tanggal 1 Agustus 2013.</p> <p>117. Foto Copy Surat Undangan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 99/ADM.PUM/005/2011 tentang Tindaklanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian PERmasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 6 Juni 2011. Daftar hadir dan berita acara terlampir</p> <p>118. Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan tuntutan masyarakat Desa Danau Rambai kec. Batang Gansal Terhadap PT. PAL tanggal 10 Mei 2011. Daftar hadir terlampir</p> <p>119. Foto Copy Surat Undangan Hearing Komisi A DPRD Kab. Indragiri Hulu Nomor : 32/DPRD/I/2011 tanggal 27 Januari 2011.</p> <p>120. Foto Copy Surat Tagihan Pajak An. PT. PAL Taun 2012.</p> <p>121. Foto Copy Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 6 Juni 2011.</p> <p>122. Foto Copy Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Kab. Inhu kepada Direktur PT.PAL tanggal 15 Juni 2011.</p> <p>123. Foto Copy Surat Bupati Indragiri Hulu Kepada PT. PAL Nomor : 79 /ADM.PUM/100/V/2010 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. PAL tanggal 6 Mei 2010.</p> <p>124. Foto Copy Berita Acara Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penyelesaian PERmasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal terhadap PT. PAL tanggal 21 Juni 2011.</p> <p>125. Foto Copy Surat Kepala Desa Danau Rambai kepada Ketua DPRD Kab. Inhu Nomor : 31/MB-DR/XII/2010 Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Atas Lahan warga masyarakat Desa Danau Rambai tanggal 7 Desember 2010 berserta Disposisi dari Sekretariat DPRD Kab. Inhu.</p> <p>126. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tanggal 20 September 2010.</p> <p>127. Foto Copy Catatan Tangan.</p> <p>G. 4 (empat) buah buku register Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu yang terdiri tahun 2005, tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2011.</p>	
XX.	<p>1. 6 (enam) buah Buku Bank PT. Darmex Oil & Fats;</p> <p>2. 2 (dua) buah Buku Bank PT. Monte Rado Mas;</p> <p>3. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Darmex Agro;</p> <p>4. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Johan Sentosa;</p> <p>5. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Eluan Mahkota;</p> <p>6. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Wirata Daya Bangun Persada;</p> <p>7. 2 (dua) Buah Buku Bank PT Dumai Bulking;</p> <p>8. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Kencana Amal Tani;</p> <p>9. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Ceria Prima;</p> <p>10. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Ledo Lestari;</p> <p>11. 6 (enam) Buah Buku Bank PT Darmex Bio Fuel;</p>	<p>Disita dari BETTI DAME HUTAUR UK Tanggal 04 Agustus 2022</p>

Halaman 335 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<div>12. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT. Duta Palma Nusantara;</div> <div>13. 7 (tujuh) Buah Buku Bank PT Darmex Plantation;</div> <div>14. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Banyu Bening Utama;</div> <div>15. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Mekarsari Alam Lestari;</div> <div>16. 3 (tiga) Buah Buku Bank PT Dabi Bio Fuel;</div> <div>17. 8 (delapan) Buah Buku Bank PT Bayas Bio Fuel;</div> <div>18. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Delimuda Perkasa;</div> <div>19. 4 (empat) Buah Buku Bank PT Alfaledo;</div> <div>20. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Wana Jingga Timur;</div> <div>21. 5 (lima) Buah Buku Bank PT Delimuda Nusantara;</div> <div>22. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Kandis Mekar Lestari;</div> <div>23. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Unggul Beras Indonesia;</div> <div>24. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Lestari alam Raya;</div> <div>25. 1 (satu) Buah Buku Bank PT Palma Lestari;</div> <div>26. 1 (satu) Buah Buku Sewa Tangki Finance Direksi;</div> <div>27. 1 (satu) Buah Buku Bank Jan 2016 tanpa nama Perusahaan;</div>	
XXI.	<div>1. 1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi April 2016;</div> <div>2. 1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi Mart tahun 2016;</div> <div>3. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Februari 2016;</div> <div>4. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi statistik Januari 2016;</div> <div>5. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi per divisi pertahun tanam;</div> <div>6. 1 (satu) lembar budget produksi tahun 2016;</div> <div>7. 1 (satu) lembar history produksi TBS 5 tahun;</div> <div>8. 1 (satu) lembar monitoring produksi semester I 2016</div> <div>9. 1 (sat) rangkap data penaksiran produksi semester I tahun 2016;</div> <div>10. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi bulan Desember 2015;</div> <div>11. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Juni 2016;</div> <div>12. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Mei 2016;</div> <div>13. 1 (satu) rangkap statistik produksi bulan Juli 2016;</div> <div>14. 1 (sat) rangkap rekapitulasi Produksi bulan November 2016;</div> <div>15. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi bulan Oktober 2016</div> <div>16. 1 (Satu) rangkap statistik bulan September 2016;</div> <div>17. 1 (sat) lembar statistik produksi bulan Agustus 2016;</div> <div>18. 1 (satu) rangkap sensus produksi semester I 2016;</div> <div>19. 1 (Satu) rangkap realisasi dan proyeksi produksi tahun 2013 s/d 2021;</div> <div>20. 1 (sat) rangkap history produksi bulanan 2010 sampai dengan 2015;</div> <div>21. 1 (sat) rangkap penaksiran produksi semester 2 tahun 2016;</div> <div>22. 1 (satu) bundel Cash flow budget PT PANCA AGRO LESTARI DIVISI V tahun 2016;</div> <div>23. 1 (satu) bundel Cash Flow Budget PT PANCA AGRO LESTARI DIVISI I tahun 2016;</div> <div>24. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi Desember 2017;</div> <div>25. 1 (sat) rangkap rekapitulasi produksi November 2017;</div> <div>26. 1 (satu) rangkap peta History Produksi 2012 s/d 2017</div> <div>27. 1 (Satu) rangkap surat pernyataan penyelesaian progress perawatan tahun 2017;</div> <div>28. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Oktober 2017;</div> <div>29. 1 (satu) lembar peta rencana water management;</div> <div>30. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi September 2017;</div> <div>31. 1 (satu) rangkap sebaran budget produksi TBS 2017;</div> <div>32. 1 (satu) lembar history sebaran produksi TBS per bulan selama 5 tahun;</div> <div>33. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Agustus 2017;</div> <div>34. 1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi Juli 2017;</div> <div>35. 1 (satu) rangkap rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja Budget Tahun 2017;</div> <div>36. 1 (Satu) lembar surat perihal standar produktivitas kelapa sawit no 349/HoA/NI/II/2017 tanggal 22 Agustus 2017</div> <div>37. 1 (Satu) lembar data karyawan aktif sampai tanggal 15 Juli 2017;</div>	Disita dari Salamuddin, Sp Tanggal 09 Juni 2022

Halaman 336 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	1 (satu) lembar history produksi TBS 5 tahun;	
39.	1 (satu) lembar estimasi selesai perbaikan unit Dump truck;	
40.	1 (satu) lembar data PO tunai spare part Dump truck;	
41.	1 (sat) rangkap rencana crash program pemeliharaan tanaman Septembe s/d Desember 2017;	
42.	1 (satu) rangkap surat persiapan budget tahun 2018 No 328 tanggal 5 Agustus 2017;	
43.	1 (satu) rangkap penaksiran produksi semester 2 tahun 2017;	
44.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi bulan Juni 2017;	
45.	1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Mei 2017;	
46.	1 (Satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik April 2017	
47.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Februari 2017;	
48.	1 (satu) rangkap rekapitulasi produksi statistik Mart 2017;	
49.	1 (sat) rang kap rekapitulasi produksi statistik Januari 2017;	
50.	1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama antara PT Panca Agro Lestari dengan PT SHALI RIAU LESTARI NO.023/SUST/SPK/PAL/SRL/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;	
51.	1 (satu) rangkap perjanjian kerjasama Pemantauan Lingkungan antara PT Panca Agro Lestari dengan PT Mutu Agung Lestari NO. 006/SUST/SPK/PAL/MUTU/IX/2016 tanggal 26 September 2016;	
52.	1 (satu) rangkap perubahan batas maksimal pembayaran premi kutib brondolan No.344/HoA/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;	
53.	1 (satu) rangkap ketetapan SPH di areal gambut dan mineral nomor : 302/HoA/IX/2016 tanggal 28 September 2016;	
54.	1 (satu) rangkap jadwal rapat budget tahap I No 202/HOA/NIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015;	
55.	1 (satu) rangkap persiapan budget tahun 2016 No 190/HoA/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015;	
56.	1 (satu) rangkap data barang mash di gudang sampai dengan 30-12-2015,	
57.	1 (satu) rangkap Outstanding permohonan pembelian tahun 2015 PT Panca Agro Lestari Kebun Batang Gansal;	
58.	1 (sat) rangkap kunjungan rutin staff controller traksi Pekanbaru No. 12/AGR/HOA/1/2016 tanggal 11 Januar 2016;	
59.	1 (satu) lembar Pinjam unit Dump Truck no 003/PAL/KBN/II/2016 tanggal 07 Januari 2016;	
60.	1 (satu) lembar penormalan pusingan panen dan pencapaian target restan Nol nomor 02/AMA-EF/C/V/2016 tanggal 11 Januari 2016;	
61.	1 (Satu) lembar format lampiran pembuatan PP untuk spare part pass moving tanggal 11 Januari 2016;	
62.	1 (satu) rangkap nama Humas tanggal 06 Januari 2016;	
63.	1 (satu) rangkap struktur PIC purchasing RO Riau per tanggal 7 Januari 2017;	
64.	1 (satu)rangkap improvement sistem pendataan curah hujan No.004/RnD.-PKU/STAT/1/2016 tanggal 5 Januar 2016;	
65.	1 (satu) rangkap email RE : IM No.019/SOP/DEPT/Memo/XI1/2015 tanggal 4 Januari 2016;	
66.	1 (satu) rangkap laporan hasil pemeriksaan administrasi dan laporan divisi no.120/HoA/IV/2016 tanggal 21 April 2016;	
67.	1 (satu) rangkap jadwal pelaksanaan LSU 2016 daftar Blok LSU 2016 pedoman teknis LSU 2016 no : 048/RND/PKU/EST/EF/IV/2016 tanggal 21 April 2016;	
68.	1 (satu) lembar pemeriksaan meja miring dan laporan kebun no 107/HoA/TV/2016 tanggi 09 April 2016;	
69.	1 (satu) undangan rapat kerja progress kerja dan RKB no 106/HoA/IV/2016 tanggal 09 April 2016:	

Halaman 337 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>70. 1 (satu) rangkap penerbitan SO/DO motor Grader Komatsu GD 450 tanggal 15 Maret 2016;</p> <p>71. 1 (satu) rangkap progres kerja per divisi per tanggal 20 Maret 2022;</p> <p>72. 1 (satu) rangkap peta divisi I;</p> <p>73. 1 (satu) lembar peta rencana pembuatan Titi Panen;</p> <p>74. 1 (satu) lembar denah kebun Batang Gangsal;</p> <p>75. 1 (satu) rangkap action plan kunjungan ARM IV rayon II;</p> <p>76. 1 (satu) rangkap permohonan dana nomor:011/ENP/PAL-K/Bn/11/2007 tanggal 1 Febrian 2007</p> <p>77. 1 (satu) lembar permohonan dana nomor 016/ENP/PAL-K/BN/V/2007 tanggal 26 Februari 2007;</p> <p>78. 1 (satu) rangkap denah plan Activity;</p> <p>79. 1 (satu) lembar denah PT PAS, PT TOBA, PT SIR, PT SSK;</p> <p>80. 1 (Satu) lembar surat yang ditujukan kepada PT Panca Agro Lestar terkait hasil pematokan yang dilakukan oleh kepala desa penyaguan (P. Tatan) terhadap areal yang diklaim oleh Kelompok Darwis di blok G dan H</p> <p>81. 1 (satu) rangkap nama-nama pemilik kebun sawit masyarakat di sekitar areal PT PAL;</p> <p>82. 1 (Sat) bundel budget 2016 tahap I;</p> <p>83. 1 (sat) rangkap denah rencana pembagian blok areal Toba;</p> <p>84. 1 (satu) bundel rencana kerja tahunan-bulanan budget tahun 2016;</p> <p>85. 1 (sat) bundel working sheet PT PAL Budget Tahun 2016;</p> <p>86. 1 (satu) bundel progress kerja buat tapak timbun;</p> <p>87. 1 (satu) lembar prosedur pinjaman atau permintaan barang antar PT atau kebun;</p> <p>88. 1 (satu) rangkap permohonan ganti rugi kebun sawit kelompok H.tani nomor 328/PAL-KBN/XI1/2014 tanggal 24 Desember 2014;</p> <p>89. 1 (satu) rangkap standar input rasio 0,16 HK atau HA nomor 119/H0A/V/2015 tanggal 20 Mei 2015;</p>	
XXII.	<p>1) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 197 tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu tanpa nomor tentang perpanjangan dan revisi lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Seberida subur.</p> <p>2) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 89 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Seberida subur.</p> <p>3) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor : 92 tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Seberida subur.</p> <p>4) Fotocopy Surat dinas pertanahan nomor : 591/tgt-iv/2007/01 tanggal 3 April 2007 perihal rekomendasi teknis izin lokasi</p> <p>5) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Palma satu lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu tanggal 23 April 2012.</p> <p>6) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Banyu bening utama lokasi desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu tanggal 23 April 2012.</p> <p>7) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Banyu bening utama lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu tanggal 23 April 2012.</p> <p>8) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Seberida subur lokasi desa seberida kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu tanggal 23 April 2012.</p> <p>9) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Kencana amal tani lokasi desa seberida kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu tanggal 23 April 2012.</p> <p>10) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Panca agro lestari lokasi desa danau</p>	<p>Disita dari Raja Fachrurazi tanggal 10 Juli 2022</p>

Halaman 338 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>rambai/penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu tanggal 23 April 2012.</p> <p>11) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Bayu bening utama lokasi desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku tanggal 8 April 2021.</p> <p>12) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Bayu bening utama lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida tanggal 16 April 2004.</p> <p>13) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Seberida subur lokasi desa seberida kecamatan batang gansal tanggal 26 perhari 2007.</p> <p>14) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Kencana amal tani lokasi desa seberida kecamatan seberida tanggal 13 Juni 2008.</p> <p>15) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Panca agro lestari lokasi desa danau rambai/penyaguan kecamatan batang gansal tanggal 20 September 2005.</p> <p>16) Fotocopy Data administrasi perusahaan perkebunan pt. Palma satu lokasi desa paya rumbai kecamatan seberida tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>17) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu/sekretaris daerah nomor :228/adm.pum/100/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal status izin lokasi pt. Palma satu.</p> <p>18) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 200 tahun 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 30 Juli 2010.</p> <p>19) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 8 Juli 2010.</p> <p>20) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 90 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>21) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 91 tahun 2007 tentang izin lokasi usaha perkebunan an. Pt. Palma satu pada tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>22) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor 352/um/x/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal penghentian aktifitas penguasaan dan pengelolaan lahan desa penyaguan.</p> <p>23) Fotocopy Berita acara dengar pendapat komisi a dprd kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu, desa penyaguan dan pemerintah daerah kabupaten indragiri hulu tanggal 4 Mei 2010.</p> <p>24) Fotocopy Laporan hasil pengecekan dan peninjauan lapangan terkait lahan desa/masyarakat penyaguan seluas 3.000 ha yang mohon di inclave dalam lahan pt. Palma satu pada tanggal 27 Mei 2010.</p> <p>25) Fotocopy Kesimpulan rapat koordinasi tindak lanjut hearing dprd kab. Inhu dengan pt. Palma i dan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu pada tanggal 25 uni 2010.</p> <p>26) Fotocopy Surat tugas bupati inhu nomor 180/st/um/ix/2010 untuk melaksanakan tugas pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha, tanggal 3 September 2010.</p> <p>27) Fotocopy Surat bupati inhu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal penghentian aktifitas dilahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>28) Fotocopy Surat wakil bupati inhu nomor : 3/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal penjelasan permasalahan pt. Palma satu.</p> <p>29) Fotocopy Surat bupati inhu nomor : 32/adm.pum/100/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal keberadaan pt. Palma satu di kabupaten indragiri hulu.</p> <p>30) Fotocopy Berita acara hasil pengecekan lapangan terhadap lahan seluas 3.000 ha yang telah di inclave serta telah dilakukan pemasangan patok batas lahan</p>	
--	---	--



	<p>perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu pada tanggal 28 Oktober 2010.</p> <p>31) Fotocopy surat wakil bupati inhu nomor :870/disbun-s/vi/2015/761 tanggal 12 Juni 2015 hal teguran kedua.</p> <p>32) Fotocopy Surat wakil bupati inhu nomor :870/disbun-s/vi/2015/597 tanggal 7 Mei 2015 hal teguran pertama.</p> <p>33) Fotocopy Surat bupati inhu/ sekda nomor : 179/adm.pum/viii/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha.</p> <p>34) Fotocopy Berita acara pemasangan patok tapal batas perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha pada tanggal 3 September 2010.</p> <p>35) Fotocopy Surat bupati inhu/sekda/asisten administrasi dan kesra nomor 179/adm.pum/viii/2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan dengan pt. Palma satu seluas 3.000 ha.</p> <p>36) Fotocopy Surat tugas bupati inhu/sekda/asisten pemerintahan dan kesra nomor : 206/st/adm.pum/100/2010 untuk melaksanakan tugas pengecekan lapangan terkait adanya pencabutan patok tapal batas lahan masyarakat desa penyaguan dengan lahan pt. Palma satu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanggal 28 Oktober 2010 di desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>37) Fotocopy Berita acara rapat penyelesaian tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal dengan lahan perkebunan pt. Palma satu sesuai dengan surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 8 Desember 2010.</p> <p>38) Fotocopy Surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 200 tahun 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 (nomor diketik) tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu pada tanggal 3 Juli 2010.</p> <p>39) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor 32/adm.pum/100/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal keberadaan pt. Palma satu di kabupaten indragiri hulu.</p> <p>40) Fotocopy Surat badan pertanahan nasional republik Indonesia kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi Riau nomor : 791/9-14/iv/2010 tanggal 29 April 2010 perihal mohon supaya tidak mengesahkan permohonan hak guna usaha yang dimohon pt. Palma satu untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit di desa penyaguan.</p> <p>41) Fotocopy Keputusan bupati Indragiri hulu nomor : 90 tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Palma satu tanggal 26 Februari 2007.</p> <p>42) Fotocopy Surat pt. Palma satu Pekanbaru nomor : 0168/um/ps-pku/vi/11 tanggal 30 Juni 2011 hal tanggapan surat bupati indragiri hulu no : 118/adm.pum/100/vi/2011.</p> <p>43) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor : 118/adm.pum/100/vi/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal penghentian aktifitas di lahan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal.</p> <p>44) Fotocopy Berita acara pemasangan patok tapal batas lahan perkebunan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu dengan pt. Palma satu seluas ± 3.000 ha tanggal 3 September 2010.</p> <p>45) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor : 31/adm.pum/100/ii/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal penjelasan permasalahan pt. Palma satu.</p> <p>46) Fotocopy Surat komisi nasional hak asasi manusia republik Indonesia nomor : 2.460/k/pmt/xi/2012 tanggal</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>1 November 2012 perihal permintaan penjelasan permasalahan lahan.</p> <p>47) Fotocopy Daftar hadir rapat koordinasi permasalahan duta palma group (pt. Palma satu) tanggal 25 Januari 2013.</p> <p>48) Fotocopy Surat pt. Palma satu Pekanbaru nomor : 090/palma 1/pku/iii/2012 tanggal 12 Maret 2012 hal permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hpk.</p> <p>49) Fotocopy Surat direktorat jenderal planologi kehutanan direktorat pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan nomor : 5.205/kuh-5/0-011 tanggal 09 Maret 2011 hal hasil telaahan status areal.</p> <p>50) Fotocopy Surat kementerian kehutanan direktorat jenderal bina usaha kehutanan direktorat bina rencana pemanfaatan dan usaha kawasan nomor : 8.121/brpu-1/2012 tanggal 30 Maret 2012.</p> <p>51) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik Indonesia nomor : s.278/menhut-vii/kuh/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Palma satu.</p> <p>52) Fotocopy Surat dinas kehutanan provinsi Riau nomor : 522.1/planhut/806 tanggal 26 Maret 2014 perihal revisi surat pertimbangan teknis rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit an. Pt. Palma satu.</p> <p>53) Fotocopy Surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indragiri hulu nomor : 28/dprd/i/2012 tanggal 12 Januari 2012 hal konfirmasi ulang data dan peta izin lokasi pt. Palma satu.</p> <p>54) Fotocopy Surat kementerian kehutanan direktorat jenderal planologi kehutanan direktorat pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan nomor : 357/bus-3/2012 tanggal 20-1-2012 hal permohonan konfirmasi peta izin-izin lokasi duta palma group di indragiri hulu.</p> <p>55) Fotocopy Surat badan pertanahan nasional kantor wilayah Propinsi Riau nomor : 030/18-14/i/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal laporan dugaan jual/beli lahan yang memicu konflik antara warga dengan pt. Palma satu dibatas kabupaten indragiri hulu-indragiri hilir, provinsi Riau.</p> <p>56) Fotocopy Surat komisi nasional hak asasi manusia republik Indonesia nomor : 1.459/k/pmt/v/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal tindakan lanjut rekomendasi dprd kab. Indragiri hulu.</p> <p>57) Fotocopy Surat sekretaris daerah kabupaten indragiri hulu nomor : 23/tp/100/2008 tanggal Agustus 2008 perihal panggilan menghadap.</p> <p>58) Fotocopy Surat pt. Palma satu Pekanbaru nomor : 364/um-pku/..... Tanggal 11 Desember 2009 hal permohonan menghadap.</p> <p>59) Fotocopy Surat asisten pemerintahan dan kesra nomor : 201/adm.pum/100/xii/2009 tanggal 9 Desember s009 perihal undangan rapat.</p> <p>60) Fotocopy Surat pt. Palma satu Pekanbaru nomor : 357/um-pku/xi/09 tanggal 30 Nopember 2009 hal permohonan untuk menghadap.</p> <p>61) Fotocopy Surat tim 7 perjuangan masyarakat desa penyaguan kecamatan batang gansal kab. Indragiri hulu tanggal 08 Februari 2010 perihal tuntutan masyarakat.</p> <p>62) Fotocopy Surat pt. Palma satu Pekanbaru nomor : 0014/um-pku/ii/2010 tanggal 01 Februari 2010 hal pembangunan kebun plasma pola kkpa untuk masyarakat desa penyaguan.</p> <p>63) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik Indonesia nomor : s.853/menhut-vii/kuh/2012 tanggal 21 Nopember 2012 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Panca agro lestari di kab. Indragiri hulu provinsi Riau.</p> <p>64) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik Indonesia nomor : s.852/menhut-vii/kuh/2012 tanggal 21 Nopember 2012 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Seberida subur di kab. Indragiri hulu provinsi Riau.</p> <p>65) Fotocopy Surat kementerian kehutanan republik Indonesia nomor : s.278/menhut-vii/kuh/2013 tanggal 4</p>	
--	---	--

Halaman 341 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Maret 2013 hal tanggapan atas permohonan pelepasan kawasan hutan an. Pt. Palma satu.</p> <p>66) Fotocopy Surat bupati indragiri hulu nomor : 3/adm.pum/100/i/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal penjelasan permasalahan pt. Palma satu.</p> <p>67) Fotocopy Keputusan bupati indragiri hulu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama PT. Palma satu.</p> <p>68) Fotocopy Keputusan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor : 54/hgu/bpn/96 tanggal 29 Nopember 1996 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah di kabupaten indragiri hulu, Propinsi Riau.</p> <p>69) Fotocopy Keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor : 54/hgu/bpn/2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah terletak di kabupaten indragiri hulu, Propinsi Riau.</p> <p>70) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 71 tahun 2004 tanggal 16 April 2004 tentang perubahan atas keputusan bupati indragiri hulu no. 215 tahun 2003 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Banyu bening utama.</p> <p>71) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 215 tahun 2003 tanggal 29 September 2003 tentang izin usaha perkebunan.</p> <p>72) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 158 tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit atas nama pt. Banyu bening utama.</p> <p>73) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 7/180/t.hk/2010 tanggal 05/06/2010 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan pabrik kelapa sawit atas nama pt. Banyu bening utama.</p> <p>74) Copy surat dinas kehutanan kabupaten indragiri hulu nomor : 522.2/pu-xii/2010/1307 tanggal 27 Desember 2010 perihal pertimbangan teknis ketersediaan lahan an. Pt. Banyu bening utama.</p> <p>75) Telaahan staf nomor : 02/tp/i/2007 tanggal 15 Januari 2007 hal laporan dan pengaduan kelompok tani subur desa kuala mulia atas penyerobotan lahan masyarakat oleh pt. Banyu bening utama.</p> <p>76) Berita acara kesepakatan pt. Banyu bening utama dengan masyarakat desa kuala cenaku dan masyarakat desa kuala mulia kecamatan kuala cenaku kabupaten indragiri hulu tanggal 3 Maret 2011.</p> <p>77) Surat rekomendasi badan lingkungan hidup kabupaten Indragiri hulu nomor : 660/blh-amdal/iii/2010/30 tanggal 5 Maret 2010 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan (upl) kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit pt. Banyu bening utama kapasitas 60 ton tbs per jam.</p> <p>78) Telaahan staf dinas kehutanan kabupaten indragiri hulu nomor 522/pu-xii/2010/1230 tanggal 8 Desember 2010 perihal status areal kebun dan pabrik kelapa sawit pt. Banyu bening utama.</p> <p>79) Surat kantor pertanahan kabupaten indragiri hulu nomor : 119/460-iv/2004 tanggal 12 April 2004 perihal status lahan.</p> <p>80) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 276 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>81) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 182 tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>82) Copy surat pt. Panca agro lestari kantor perwakilan Pekanbaru nomor : 002/leg-eks/pal/viii/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal permohonan perpanjangan izin lokasi pt. Panca agro lestari.</p> <p>83) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 66 tahun 2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang izin usaha perkebunan an. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>84) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor 198 tahun</p>	
--	--	--



	<p>2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang pencabutan keputusan bupati indragiri hulu tanpa nomor tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>85) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor Tanggal 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>86) Copy surat dinas pertanahan kabupaten indragiri hulu nomor : 144/il-dp/ix/2005 tanggal 3 September 2005 perihal rekomendasi teknis izin lokasi.</p> <p>87) Copy surat sekretaris daerah kabupaten indragiri hulu nomor : 88/adm.pum/100/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kec. Batang gansal.</p> <p>88) Copy berita acara rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal terhadap pt. Panca agro lestari (pt. Pal) tanggal 10 Mei 2011.</p> <p>89) Copy berita acara kesepakatan tanggal 06 April 2011.</p> <p>90) Copy surat lsm mpr bernas nomor : 54/lsm mpr bernas/iv/2011 tanggal 11 April 2011 hal kelanjutan penyelesaian tuntutan tanah ulayat sekitar 1200 ha yang diserobot pt. Pal di desa danau rambai.</p> <p>91) Copy surat kapolda Riau nomor : b/52/i/2013/dit intelkam tanggal 07 januari 2013 perihal sengketa lahan antara masyarakat desa danau rambai kec. Batang gansal kab. Inhu dengan pt. Panca agro lestari (PT. PAL).</p> <p>92) Copy surat tanda terima pemberitahuan nomor : sttp/11/iv/2011/intelkam.</p> <p>93) Copy surat dinas perkebunan provinsi riau nomor : 050/disbun-pengemb/709 tanggal 8 agustus 2012 perihal pertimbangan teknis rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit a.n. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>94) Copy surat dinas kehutanan provinsi riau nomor : 522.1/planhut/5211 tanggal 30 november 2012 perihal pertimbangan teknis permohonan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit a.n. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>95) Copy dinas kehutanan kabupaten indragiri hulu nomor : 522/sekre/vii/2014/198 tanggal 17 juli 2014 perihal konfirmasi status lahan an. Pt. Panca agro lestari</p> <p>96) Asli peta lampiran nomor : 522/sekre/vii/2014/198 tanggal 17 juli 2014.</p> <p>97) Copy surat badan pelayanan perizinan terpadu prov. Riau nomor : 503/bp2t-ir/ii/2013/52 tanggal 4 feruari 2013 perihal rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi riau untuk perkebunan kelapa sawit an. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>98) Copy surat badan pelayanan perizinan terpadu prov. Riau nomor : 503/bp2t-ir/ii/2013/50 tanggal 4 feruari 2013 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi dikonversi (hpk) untuk perkebunan kelapa sawit an. Pt. Panca agro lestari.</p> <p>99) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 148a tahun 2007 tanggal 6 agustus 2007 tentang revisi izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>100) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : 276 tahun 2005 tanggal 20 september 2005 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>101) Copy surat undangan nomor : 464/adm.pum/100/2012 tanggal 4 desember 2012 perihal panggilan menghadap.</p> <p>102) Copy surat pernyataan tanggal 6 desember 2012.</p> <p>103) Copy berita acara penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa dana rambai dengan pt. Panca agro lestari (pt. Pal).</p> <p>104) Copy keputusan bupati indragiri hulu nomor : Tahun 2014 tanggal 014 tentang revisi izin usaha</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>perkebunan atas nama pt. Panca agro lestari.</p> <p>105) Copy berita surat kesepakatan akhir masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal kabupaten indragiri hulu menyangkut rencana kemitraan dengan pt. Panca agro lestari tanggal 17 juni 2013.</p> <p>106) Copy berita acara tanggal 15 april 2014.</p> <p>107) Copy surat pernyataan kesepakatan tanggal 04 mei 2012.</p> <p>108) Copy surat bupati indragiri hulu nomor : 870/disbun-vi/2011/556 tanggal 21 juni 2011 perihal hasil rapat koordinasi penyelesaian konflik lahan.</p> <p>109) Copy surat nomor : 88/adm.pum/100/2011 tanggal 12 mei 2011 perihal penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kec. Batang gansal.</p> <p>110) Copy undangan rapat nomor : 85/adm.pum/005/2011 tanggal 9 mei 2011.</p> <p>111) Copy undangan rapat nomor : 99/adm.pum/005/2011 tanggal 1 juni 2011.</p> <p>112) Copy tindak lanjut rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal terhadap PT. Panca agro lestari (PT. PAL) tanggal 06 juni 2011.</p> <p>113) Copy daftar hadir rapat tindak lanjut rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tuntutan masyarakat desa danau rambai kecamatan batang gansal terhadap pt. Panca agro lestari (PT. PAL) tanggal 06 juni 2011.</p>	
XXIII.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0029.1 sebesar Rp408.008.680 (empat ratus delapan juta delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) Tanggal 14 November 2017;2. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0029,1 sebesar Rp391.687.720 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) Tanggal 01 November 2018;3. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-0029.1 sebesar Rp408.926.440 (empat ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) Tanggal 18 September 2019;4. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-0029.1 sebesar Rp327.290.348 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) Tanggal 07 Oktober 2020;5. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Seberida Subur Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213,110-0029.1, sebesar Rp344.883.686 (tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) Tanggal 29 Juli 2021;6. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.050.367.850,- (satu milyar lima puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Tanggal 10 November 2017;7. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.106.659.760,- (satu milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh rupiah) Tanggal 01 November 2018;8. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro	Disita dari Putri Ayu Tanggal 05 Agustus 2022

Halaman 344 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Lestari Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.228.283.760,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Tanggal 02 September 2019;</p> <p>9. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0028.1, sebesar Rp1.252.405.740,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) Tanggal 17 Juli 2020;</p> <p>10. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Panca Agro Lestari Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213, 110-0029, sebesar Rp1.250.894.441,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) Tanggal 29 Juli 2021;</p> <p>11. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.293.177.348,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) Tanggal 07 November 2017;</p> <p>12. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.293.766.336,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) Tanggal 01 November 2018;</p> <p>13. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.371.355.936,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) Tanggal 02 September 2019;</p> <p>14. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp3.362.715.476,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) Tanggal 17 Juli 2020;</p> <p>15. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Kencana Amal Tani Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0006.1, sebesar Rp2.948.281.273,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Tanggal 02 Agustus 2021;</p> <p>16. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.305.476.630,- (dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) Tanggal 10 November 2017;</p> <p>17. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.305.471.124,- (dua milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) Tanggal 01 November 2018;</p> <p>18. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.080.213,110-0025.1, sebesar Rp2.541.281.410,- (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) Tanggal 02 September 2019;</p> <p>19. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.080.213.110-0025.1, sebesar Rp2.585.927.396,- (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) Tanggal 17 juli 2020;</p> <p>20. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Banyu Bening Utama Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.080.213.110-0025.1, sebesar Rp2.507.683.713,- (dua milyar lima ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) Tanggal 02 Agustus 2021;</p> <p>21. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2017 dengan Nomor NOP 14.01.050.213.110-0032.1, sebesar Rp1.908.991.840,- (satu milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) Tanggal 10 November 2017;</p> <p>22. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2018 dengan Nomor NOP 14.01.050.213.110-0032.1, sebesar Rp2.102.376.000,- (dua milyar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Tanggal 13 Mei 2019;</p> <p>23. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2019 dengan Nomor NOP 14.01.050.213.110-0032.1, sebesar Rp2.202.672.800,- (dua milyar dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Tanggal 23 Oktober 2019;</p> <p>24. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2020 dengan Nomor NOP 14.01.050.213.110-0032.1, sebesar Rp2.438.941.288,- (dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) Tanggal 17 Juli 2020;</p> <p>25. 1 (satu) bundel fotocopy Voucher Pengeluaran beserta lampiran untuk Pembayaran PBB PT Palma Satu Tahun Pajak 2021 dengan Nomor NOP 14.01.050.213.110-0032.1, sebesar Rp2.307.365.994,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) Tanggal 02 Agustus 2021.</p>	
XXIV.	<p>1. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KCP Rengat atas nama PT Palma Satu nomor rekening 1080010574771 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>2. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Palma Satu nomor rekening 1080016127251 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>3. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Palma Satu nomor rekening 1080010870401 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>4. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Kencana Amal Tani nomor rekening 1080010870617 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>5. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah atas nama PT Kencana Amal Tani nomor rekening 1080010870625 periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>6. 1 (satu) bundel rekening koran transaksi Bank Mandiri KCP Rengat atas nama PT Kencana Amal Tani nomor rekening 1080010567130 periode 01 Januari 2012 s/d 12 Agustus 2021;</p> <p>7. 1 (satu) bundel rekening koran detail transaksi dan</p>	<p>Disita dari</p> <p>Gussen Teodrif Siahaan</p> <p>Tanggal 11 Agustus 2022</p>

Halaman 346 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>rekening koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Atas Nama PT Banyu Bening Utama Nomor Rekening 1080010870682 Periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>8. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Detail Transaksi dan Rekening Koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Atas Nama PT Banyu Bening Utama Nomor Rekening 1080010870666 Periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Detail Transaksi dan Rekening Koran Bank Mandiri KC Pekanbaru Sudirman Bawah Atas Nama PT Panca Agro Lestari Nomor Rekening 1080011219715 Periode 01 Januari 2012 s/d 08 Agustus 2022;</p> <p>10. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Palma Satu;</p> <p>11. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Kencana Amal Tani;</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Banyu Bening Utama;</p> <p>13. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri (persero), Tbk atas nama PT Panca Agro Lestari;</p>	
XXV.	<p>1. 1 (Satu) Buku Warna Hijau Hitam Bertuliskan Register SK Tahun 2007</p>	<p>Disita dari Yuni Rachmi Tanggal 10 Juni 2022</p>
XXVI.	<p>1. 1 (satu) odner warna merah Pencapaian Produksi tahun 2015</p> <p>2. 1 (sat) odner warna merah Pencapaian Produksi tahun 2016</p> <p>3. 1 (satu) odner warna merah Pencapaian Produksi tahun 2017</p> <p>4. 1 (satu) odner warna Hitam dokumen INHU</p>	<p>Disita dari Robby Dahdan Marganti Tanggal 10 Juni 2022</p>
XXVII.	<p>1. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian Kerjasama antara PT Kuningan Nusa Jaya dan PT Wanamitra Permai dengan PT Nusa Abadi Indo Global (NAI Indonesia) tentang pekerjaan pengelolaan gedung menara palma 2 dan menara palma Nomor : 067/LGL/WMP-KNJ/V/2022 dan Nomor : 275/AGR/NAI/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;</p> <p>2. 1 (satu) Bundel Copy Perjanjian PKWT Nomor : 012/PKWT-III/NAIG/2022 antara PT Nusa Abadi Indo Global dengan Bunnarto Witono tertanggal 1 Agustus 2022;</p> <p>3. 1 (satu) Lembar Copy Form Kesepakatan Kondisi-FM-HR-22 PT Nusa Abadi Indo Global Nomor : 006/NAI/HRD-KK/IV/2022.</p>	<p>Disita dari Bunnarto Witono Tanggal 12 Agustus 2022</p>
XXVIII.	<p>1. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 927 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Wana Mitra Permai</p> <p>2. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 899 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Bumi Jawa Sentosa</p> <p>3. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 1353 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Bumi Jawa Sentosa</p> <p>4. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 2051 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Kuningan Nusa Jaya</p> <p>5. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 6659 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Pondok Pinang atas nama PT. Menara Capital Indo Nusa</p>	<p>Disita dari Rio Prabowo tanggal 15 Agustus 2022</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 224 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kecamatan Senen Kelurahan Paseban atas nama PT. Darmex Pasific1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 941 Propinsi Bali Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Kelurahan Kuta atas nama PT Menara Perdana1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 773 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Kecamatan Menteng Kelurahan Kebon Sirih atas nama PT. Tugu Tani1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 1641 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 1663 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah (HGB) Nomer 2276 Propinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Setia Budi Kelurahan Kuningan Timur atas nama PT. Harapan Jaya Bumi Pertiwi1 (satu) bundel fotokopi surat dari Tim Likuidator PT. Prakarsa Semesta Alam kepada Pemilik Unit Apartemen Essence Darmawangsa perihal Pengumuman Likuidasi dan Hasil Meeting Sosialisasi Likuidasi PT. Prakarsa Semesta Alam	
XXIX.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Copy Berita Acara Serah Terima Unit No. 0294/BAST/SOUTHHILLS-APT/VII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019.1 (satu) bundel Copy Akta Jual Beli dengan No.53/20221 (satu) bundel Copy Formulir Data pemilik1 (satu) bundel Copy KTP a/n ADIL DARMADI1 (satu) bundel Copy Berita Acara Peninjauan Bersama tanggal 18 Mei 20191 (satu) bundel Copy Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Dokumen tanggal 21 Agustus 20191 (satu) bundel Copy Surat Pernyataan Penerimaan House Rules Tanggal 21 Agustus 20191 (satu) bundel Copy Tanda terima Peminjaman Kunci DS untuk perbaikan Defect Unit1 (satu) bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Defect Unit tanggal 21 Agustus 20191 (satu) bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Defect Unit tanggal 22 November 20191 (satu) bundel Copy Checklist Redefect serah terima unit tanggal 13 Juli 20191 (satu) bundel Copy Checklist Defect pra serah terima unit tanggal 21 Juni 2019	Disita dari Djulia tanggal 15 Agustus 2022
XXX.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 124.000.7887.459 periode Agustus 2017 s/d Oktober 2021;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 124.000.5570.610 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 101.001.0150.595 periode Mei	Disita dari Efrinawati Tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 348 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	2019 s/d Oktober 2021;	
4.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Palma satu, no. rek. 124.000.5679.957 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
5.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 0700005595603 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
6.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 124.00.0567993-2 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
7.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 1240005677506 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
8.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.5678.157 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
9.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.00.0538828-6 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
10.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.5679.510 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
11.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.657.4280 periode Oktober 2013 s/d Juli 2022;	
12.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 124.000.691.9873 periode Januari 2015 s/d Januari 2018;	
13.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Banyu Bening Utama, no. rek. 101.00.1071998-5 periode Juli 2020 s/d Juli 2022;	
14.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Panca Agro Lestari, no. rek. 1240006208905 periode Mei 2012 s/d Juli 2022;	
15.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Panca Agro Lestari, no. rek. 1240005810859 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
16.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Seberida Subur, no. rek. 124.00.05721.353 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
17.	1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Seberida Subur, no. rek. 124.00.05782.967 periode Januari 2012 s/d Juli 2022;	
18.	1 (satu) Lembar copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Seberida Subur, no. rek. 124.00.05721.379 (USD) periode Januari 2012 s/d Maret 2020;	
19.	1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening dan legalitas perusahaan an. PT. Palma Satu;	
20.	1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening dan legalitas perusahaan an. PT. Kencana Amal Tani;	
21.	1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening dan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	legalitas perusahaan an. PT. Seberida Subur; 22. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening & legalitas an PT Banyu Bening Utama; 23. 1 (satu) bundel copy formulir pembukaan rekening & legalitas an PT Panca Agro Lestari; 24. 1 (satu) Lembar copy rekening koran Bank Mandiri an. PT. Kencana Amal Tani, no. rek. 101.001.0150.744 periode Mei 2019 s/d Juli 2022.	
XXXI.	1. 2 (dua) lembar Copy Bukti pembayaran Payment History Apartemen Saouth Hills Kode Unit Z1/15/R; 2. 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan atas nama Adil Darmadi; 3. 1 (satu) Bundel Copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen South Hills Nomor : 13, Tanggal 12 April 2017; 4. 1 (satu) Bundel Copy Kwitansi Pembayaran dari tahun 2015 s/d tahun 2019; 5. 1 (satu) Bundel Copy Rekening Koran Bank BCA KCH Sahid Sudirman Residence JKT dengan Nomor Rekening 5265-32-2929 KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti Tanah Abang;	Disita dari Djulia tanggal 16 Agustus 2022
XXXII.	1. 1 (Satu) Buah Paspor Republik Indonesia bergambar Garuda Indonesia atas Nama Surya Darmadi Nomor C2148888	Disita dari Surya Darmadi tanggal 15 Agustus 2022
XXXIII.	A. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung XL, antara lain: 1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. XL Axiata Tbk, Tgl perjanjian 28 April 2017 2. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. Hexamatics Info Tech dengan nomor 007/Lease/XLAT/IV/2019 3. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. Kolaborasi Global Sukses (GO Work) nomor 080/KNJ/LGL/VIII.2020 4. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Kuningan Nusa Jaya dengan PT. Moradi dengan nomor 008/PSM/KNJ/III/2021. B. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Palma Tower, antara lain: 1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Salero Raso dengan nomor ADD No : 044/ADDII/LGL/MCI/III/2022; 2. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Bank Mandiri dengan nomor ADD No : 108/ADD/LGL/MCI/XII/2020 3. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. American Standard, nomor LA No : 035/Lease/Palma Tower/XII/2020 4. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. American Standard Indonusa, nomor LA No : 036/Lease/Palma Tower/XII/2020 5. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Cakrawala Bulan Purnama, nomor ADD No : 011/ADDII/MCI/LGL/II/2022 6. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara	Disita dari Hilda tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 350 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Capital Indonusa dengan The Lobby Café, nomor ADD No : 103/ADDI/Palma Tower/X/2021	
7.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Circleka Indonusa Utama, nomor ADD No : 096/ADDIII/LGL/MCI/IX/2021	
8.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Lixil Trading Indonusa nomor LA No : 037/Lease/Palma Tower/XII/2020	
9.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Robert Bosch, nomor ADD No : 122/ADD/Palma Tower/XI/2017	
10.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Agro Boga Utama, nomor LA No : 001/Lease/Palma Tower/XII/2017	
11.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Asian Paints Color Indonusa, nomor LA No : 016/Lease/Palma Tower/IV/2022	
12.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Asian Paints Indonusa, nomor LA No : 014/Lease/Palma Tower/IV/2022	
13.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Shinsung Tongsang Indonusa, nomor LA No : 024/Lease/Palma Tower/IX/2021	
14.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Sew-Eurodrive Pte Ltd, nomor LA No : 001/Lease/Palma Tower/I/2020	
15.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Miki Indonusa, , nomor ADD No : 063/ADDIII/LGL/MCI/VII/2022	
16.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Linfox Logistics Indonusa, nomor LA No : 010/Lease/Palma Tower/XII/2019	
17.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan AVL SEA & Australia Co., Ltd, nomor ADD No : 097/ADDIII/LGL/MCI/XI/2021	
18.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Hertanto, Grace, Karunawan, nomor ADD No : 070/ADD I/LGL/MCI/VIII/2021	
19.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Eight Teknologi Inovasi, nomor ADD No : 071/ADD I/LGL/MCI/VIII/2021	
20.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan Scroll Corporation, nomor ADD No : 120/ADD/LGL/XI/2021	
21.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. S.O.T. Indo Sourcing, nomor ADD No : 069/ADDIII/LGL/MCI/VIII/2021	
22.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Petrojaya Boral Plasterboard, nomor ADD No : 006/ADD/LGL/MCI/II/2021	
23.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Petrojaya Boral Plasterboard (Storage), nomor ADD No : 007/ADD/LGL/MCI/II/2021	
24.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wirata Daya Bangun Persada, nomor ADD No : 022/ADD/LGL/MCI/II/2021	
25.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Ledo Lestari, nomor ADD No : 019/ADDIII/LGL/MCI/II/2021	
26.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wana Hijau Semesta, nomor ADD No : 020/ADDIII/LGL/MCI/II/2021	
27.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Ceria Prima, nomor ADD No : 018/ADDIII/LGL/MCI/II/2021	
28.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wana Jingga Timur,	

Halaman 351 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>nomor ADD No : 021/ADDII/LGL/MCI/II/2021</p> <p>29. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT. Wana Jingga Timur, nomor ADD No : 027/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>30. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Eluan Mahkota, nomor ADD No : 023/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>31. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Kencana Amal Tani, nomor ADD No : 025/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>32. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Johan Sentosa, nomor ADD No : 024/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>33. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Duta Palma Nusantara, nomor ADD No : 030/ADD/LGL/MCI/II/2021</p> <p>34. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Menara Capital Indonusa dengan PT Cerenti Subur, nomor ADD No : 026/ADD/LGL/MCI/II/2021.</p> <p>C. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Menara Palma, antara lain:</p> <p>1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Fajar Mitra Indah, No.110/PSM/WMP/X/2021</p> <p>2. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT. Harmoni Panca Utama, No. 098/LGL-WMP/ADD-PSM/IX/2020</p> <p>3. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Kusnadi (Kantin), No.104/LGL-WMP/PSM-ADD/IX/2021</p> <p>4. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Fajar Mitra Indah (Storage Room), No.111/PSM/WMP/X/2021</p> <p>5. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT. Dart Media Indonesia, No.031/LGL-WMP/ADD-PSM/III/2019 dan No. 136/PSM/WMP/X/2020</p> <p>6. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Bank Central Asia, 018/LGL-WMP/PSM-ADDII/III/2019</p> <p>7. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Griya Trada, No.001/PSM/WMP/II/2018</p> <p>8. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Bank Mandiri, No. 016/ADDII/LGL/WMP/II/2021.</p> <p>9. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Prodia OHC, No.016/ADDII/LGL/WMP/II/2021</p> <p>10. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan High On Cafeine, No.094/LGL-WMP/PSM-ADDII/VI/2021</p> <p>11. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Pratama Mitra Abadi, No.132/LGL-WMP/ADD/XI/2020</p> <p>12. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Transforma, No.047/ADD/WMP/LGL/IV/2022</p> <p>13. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Aksa Power Indonesia, No. 168/PSM/WMP/XII/2018</p> <p>14. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Eglobal Teknologi Solusindo, No. 047/LGL-WMP/ADD-PSM/III/2020</p> <p>15. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No.089/PSM/WMP/XI/2016</p> <p>16. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No.161/PSM/WMP/XII/2017</p> <p>17. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No. 013/PSM/WMP/II/2020</p> <p>18. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT.</p>	
--	---	--



	<p>Wanamitra Permai dengan KPPA Mando Corporation, No. 137/ADD/LGL/XI/2020</p> <p>19. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Produk Keuangan Digital, No. 027/PSM/WMP/IV/2022</p> <p>20. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Global Alliance For Improved Nutrition, No.124/ADDII/WMP-LGL/XII/2021</p> <p>21. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan KMDICA, No. 116/LGL-WMP/ADD/XII/2021</p> <p>22. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, No.073/PSM/WMP/V/2020</p> <p>23. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Singapore ALE Pte Ltd, No.040/ADDII/LGL/WMP/IV/IV/2022</p> <p>24. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Kawajun Indonesia, No. 032/LGL-WMP/ADD-PSM/IV/2020</p> <p>25. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Perkasa Teknologi Indolube, No. 008/PS/WMP/II/2020</p> <p>26. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Thermax International Indonesia, No. 113/ADDII/WMP-LGL/XI/2021</p> <p>27. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Thermax Limited, No.113/PSM/WMP/XII/2019</p> <p>28. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Colgate Palmolive Indonesia, no.23/ADDII/WMP/LGL/III/2022</p> <p>29. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan KAP Heliantono & Rekan, no. 105/PSM/WMP/IX/2020</p> <p>30. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan FA Leks and Co, no.074/ADDII/LGL/WMP/VIII/2021</p> <p>31. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Hasta Panca Mandiri Utama, No.067/LGL-WMP/ADD-PSM/V/2020</p> <p>32. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Harmoni Panca Utama, No.068/LGL-WMP/ADD-PSM/IV/2020</p> <p>33. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Regus Business Center Indonesia, No.030/PSM/WMP/II/2018</p> <p>34. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Infinite World Esports, No.054/PSM/WMP/VI/2022</p> <p>35. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Adipratama Sukses Mandiri, No. 008/ADDII/LGL/WMP/II/2021</p> <p>36. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia, No.101/LGL-WMP/PSM-ADDII/IX/2020</p> <p>37. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia, No.099/LGL-WMP/PSM-ADDIII/IX/2020</p> <p>38. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT MAN Energy Solutions Indonesia, No.100/LGL-WMP/PSM-ADDIII/IX/2020</p> <p>39. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Darmawan dan Partners, No.002/PSM/WMP/II/2022</p> <p>40. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Mohgatech Indonesia, No.041/ADDII/LGL/WMP/III/2021</p> <p>41. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Dinamika Nuansa Absolute, No. 030/PSM/WMP/II/2021</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>42. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, No.212/PSM/WMP/XII/2015</p> <p>43. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Darma Legal, No.039/LGL-WMP/ADD/IV/2021</p> <p>44. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Jose Pratama Group, No.047/PSM/WMP/VI/2022</p> <p>45. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Alton Yogantara Perkasa, No.022/PSM/WMP/III/2022</p> <p>46. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Photon Labs Indonesia, No.017/ADDII/LGL/WMP/II/2021</p> <p>47. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Photon Interactive Indonesia, No.110/ADDIII/WMP-LGL/X/2021</p> <p>48. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Indo Asiana Lestari, No.037/PSM/WMP/VI/2022</p> <p>49. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan Waruwu and Partners, No.034/ADD/LGL/WMP/IV/2022</p> <p>50. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Wanamitra Permai dengan PT Alexa Monica Cipta, No.006/PSM/WMP/III/2022.</p> <p>D. Perjanjian kontrak dengan tenant pada Gedung Palma One, antara lain:</p> <p>1. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB PRECIOUS, No.157/ADDII/LGL/BJS/XII/2020</p> <p>2. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. DACHSER INDONESIA, No.126/ADDIII/BJS-LGL/XI/2021</p> <p>3. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. JETEC INDONESIA, No. 049/PSM/BJS-BM/II/2022</p> <p>4. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PD. SANDJAJA, No.146/BJS/LGL/XII/2020</p> <p>5. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB, No. 071/BJS/LGL/VI/2020</p> <p>6. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB PRECIOUS, No. 156/ADDII/LGL/BJS/XII/2020</p> <p>7. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan KOPI KREN, No.041/PSM/BJS-BM/VI/2021</p> <p>8. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. DACHSER INDONESIA, No.051/ADDII/LGL/BJS/VI/2022</p> <p>9. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. KENORA RESOURCES INTERNATIONAL, No.082/PSM/BJS-BM/IX/2019</p> <p>10. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. INFOTECH SOLUTIONS, No.013/BJS/LGL/III/2022</p> <p>11. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ONINDO SEKURITA PRATAMA, No.031/PSM/BJS-BM/II/2020</p> <p>12. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. INFOTECH SOLUTIONS, No.014/ADDII/BJS/LGL/II/2022</p> <p>13. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. HITECH SMART SOLUTION, No.045/PSM/BJS-BM/XII/2021</p> <p>14. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan BUT CHIMNEYS REFRACTORIES, No.101/ADD.PSM/BJS-LGL/III/2021</p> <p>15. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan ELC ELECTROCONSULT, No.047/ADDII/LGL/BJS/II/2021</p>	
--	--	--

Halaman 354 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan BUT CHIMNEYS REFRATORIES, No.102/ADD.PSM/BJS-LGL/III/2021	
17.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CENTRA SARANA ARG, No.037/PSM/BJS-BM/X/2020	
18.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CENTRA SARANA ARG, No.047/PSM/BJS-BM/II/2022	
19.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan ELC ELECTROCONSULT, No.048/ADDII/LGL/BJS/I/2021	
20.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PD. SANDJAJA, No.146/BJS/LGL/XII/2020	
21.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. DIGITAL CHINA INFORMATION, No.084/PSM/BJS-BM/IX/2019	
22.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan SSB & R LAW FIRM, No.175/BJS/LGL/XI/2019	
23.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. MULIA INVESTASI, No. 071/ADD/LGL/BJS/XII/2021	
24.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. FLEMINGS INDONESIA, No.015/BJS/LGL/ADDII/II/2021	
25.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. PILAR SUKSES RAHARJA, No.160/BJS/LGL/VIII/2020	
26.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan ND PARTNERSHIP, No.040/PSM/BJS-BM/IV/2021	
27.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan CV. WISEKA DUTA CONSULTING, No.048/PSM/BJS-BM/II/2022	
28.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ABISHAR TECHNOLOGIES, No.119/BJS/LGL/XI/2020	
29.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. SATGURU INDONESIA, No. 046/PSM/BJS-BM/I/2022	
30.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. NETWEB TEKNOLOGI INDONESIA, No.082/ADD/LGL/BJS/VIII/2021	
31.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. VIVENTIS SEARCH ASIA, No.094/BJS/LGL/VII/2019	
32.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. PRIME PROPERTY MANAGEMENT, No. 051/PSM/BJS-BM/III/2022	
33.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. PETRO IT SOLUTIONS ASIA, No.076/ADDII/LGL/BJS/V/2021	
34.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. BANK BJB, No.072/BJS/LGL/VIII/2020	
35.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan RAHAYU & PARTNERS, No.020/PSM/BJS-BM/II/2020	
36.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CLOZETTE INTERAKTIF INDONESIA, No.038/PSM/BJS-BM/VII/2021	
37.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CLOZETTE INTERAKTIF INDONESIA, No.038/PSM/BJS-BM/VII/2021	
38.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ANDROMEDA MULTI TEKNOTAMA, No.125/BJS/LGL/XI/2021	
39.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. INDO PRIMA KREASITAMA, No.128/ADDII/LGL/BJS/X/2021	
40.	Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. CYGNET PERICON, No.149/ADDII/LGL/BJS/X/2020	

Halaman 355 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>41. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ENERGI INDOTEC CONSULTANCY, No.120/ADDIII/BJS/LGL/XII/2021</p> <p>42. Copy Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Bumijawa Sentosa dengan PT. ERGON OIL INDONESIA, No.119/ADDII/BJS/LGL/XII/2021</p>	
XXXIV.	<p>1. 1 (satu) bundel surat kronologi DHL Air waybill No.1242963385, 3067764840 dan 9662751722 Jakarta-Singapore ditandatangani oleh Ahmad Irfan Ashari.</p> <p>2. 1 (satu) bundel printout shipment information for 1242963385 dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express) yang distempel oleh PT. Birotika Semesta.</p> <p>3. 1 (sat) bundel printout shipment information for 3067764840 dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express) yang distempel oleh PT. Birotika Semesta.</p> <p>4. 1 (satu) bundel printout shipment information for 9662751722 dari https://www.dhl.com/id-en/home (situs DHL Express) yang distempel oleh PT. Birotika Semesta.</p>	Disita dari Putra Otvenanjer Samosir Tanggal 21 Agustus 2022
XXXV.	<p>1. 1 (satu) bindex Kontrak Perjanjian Tahun 2017 dan Tahun 2018 PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>2. 1 (satu) bindex Lampiran Voucher BAPP Replanting Tahap 1 Tahun 2020 PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>3. 1 (satu) bindex SKU Tahun 2021 PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>4. 1 (satu) bindex kecil BMOD/I Tahun 2018 PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>5. 1 (satu) bindex kecil BTCO September s.d. Oktober 2021 PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>6. 1 (satu) bindex kecil KPPO/I dan KPPO/1 Oktober s.d. Desember 2021 PT. Banyu Bening Utama;</p> <p>7. 1 (satu) Surat Jasa Pendampingan dalam rangka Initial Public Offering (IPO) Darmex Plantation untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir tanggal 31 Mart 2021;</p> <p>8. 1 (satu) Laporan Keuangan Entitas Induk PT. Darmex Plantations (Perusahaan Di Tahap Pengembangan) 31 Desember, 30 November 2019 dan 31 Desember 2018;</p> <p>9. 1 (satu) Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen PT. Darmex Plantati</p> <p>10. 1 (satu) Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 PT. Darmex Plantations dan Entitas Anak.</p>	Disita dari Yudi Prasetyo Wibowo Tanggal 15 Juni 2022
XXXVI.	<p>1. 1 (satu) bundel copy PT Duta Palma Nusantara Job Description beserta lampirannya;</p> <p>2. 5 (lima) lembar Internal Memorandum Nomor: 007/RIAU/IM-NP/II/2019, Tanggal 19 Februari 2019, tentang Perubahan Susunan Pengurus PT-PT Kebun Wilayah Riau-Pekanbaru;</p> <p>3. 1 (satu) bundel copy Laporan Pemeriksaan Lapang Penyusunan Aspek Tata Guna Tanah PT Banyu Bening utama Sesuai dengan permendagri No. 6 Tahun 1986 Nomor: 32/PB-HGU/XII/2004, Tanggal 11 Desember 2004, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau;</p> <p>4. 1 (satu) bundel copy Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Banyu Bening Utama, Atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau, Tanggal 20 November 2007;</p> <p>5. 1 (satu) bundel copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01 Kec. Sebrida, Kel. Paya-Rumbai, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu a.n. PT Banyu Bening Utama seluas 6.417,9 Ha;</p> <p>6. 1 (satu) bundel copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Riau Nomor: 07/RSL/HGU/2006;</p> <p>7. (dua) Eksemplar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah seluas 194 Ha yang terletak di Ds/Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau antara Sdri. CHERYL DARMADI dan Sdr. FADLAN ARISANDY yang masing-masing terdiri dari 2 (dua)</p>	Disita dari KPK tanggal 25 Agustus 2022

Halaman 356 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>lembar;</p> <p>8. 2 (dua) Eksemplar Perjanjian Pengikatan Jual Beli No : PPJB/CD-P1/194/18 Antara Sdr. CHERYL DARMADI dengan PT PALMA SATU yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) lembar;</p> <p>9. 3 (tiga) lembar Draft INTERNAL MEMORANDUM dari LEGAL Departement PT HARAPANJAYA BUMIPERTIWI kepada Bapak SURYA DARMADI No. 126/HBP/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 perihal DRAFT PPJB dan Surat Komitmen dalam Rencana Pembelian 2 (dua) bidang Tanah a.n. PT Gatsu Persada dan a.n. PT Mulia Mitradaya Perkasa;</p> <p>10. 1 (satu) lembar INTERNAL MEMO dari LEGAL DEPARTEMENT kepada Bapak Surya Darmadi Nomor 143/Leg-Eks/DOF/X/2018 perihal Pelaksana Putusan Pengadilan Tanggal 30 Oktober 2018;</p> <p>11. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Dept AGRONOMI kepada Bpk. DIREKSI No. /Agro/AO/X/18 Tanggal 6 Oktober 2018 tentang PENGAJUAN BANGUNAN TPS LIMBAH B3 beserta 8 (delapan) lembar lampirannya;</p> <p>12. 1 (satu) lembar INTERNAL MEMO dari Legal Departement kepada Bapak SURYA DARMADI No. 143/Leg-Eks/DOF/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung jo. Pengadilan Hubungan Industrial beserta 1 (satu) lembar catatan kertas berwarna kuning;</p> <p>13. 6 (enam) lembar INTERNAL MEMORANDUM Nomor 016/DAG/IM/VIII/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 dari Legal Departemen DARMEX AGRO GROUP kepada Bapak SURYA DARMADI tentang Ratifikasi atau Perubahan Pengurus Perseroan yang sudah berakhir dan yang akan berakhir masa jabatan di Tahun 2018;</p> <p>14. 9 (sembilan) lembar Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham Nomor : 57, Tanggal 21 April 2015 dari Notaris LINDA HERAWATI;</p> <p>15. Foto Copy 3 (tiga) lembar Asset SURYA DARMADI;</p> <p>16. Foto Copy 1 (satu) lembar Flow Hutang Piutang antar Group;</p> <p>17. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada SURYA DARMADI 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131411269353 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>18. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada SURYA DARMADI nomor rekening 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131412269979 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>19. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada SURYA DARMADI nomor rekening 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131413270680 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>20. Asli Voucher Pengeluaran PT DARMEX PLANTATIONS pada Bank Mandiri sebesar Rp 46.972.000.000,- (empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada SURYA DARMADI nomor rekening 124.000.580.3391 Tanggal 14 Agustus 2019, dengan C/BG No:201908131414271202 beserta 1 (satu) lembar printout transaksi;</p> <p>21. Foto Copy 2 (dua) eksemplar Perjanjian Pengalihan Asset PT DARMEX AGRO ke PT DARMEX PLANTATIONS tanggal 15 September 2016, masing-masing 2 (dua) lembar;</p> <p>22. Foto Copy 1 (satu) lembar Flow Hutang Piutang antar group;</p> <p>23. Foto Copy 1 (satu) lembar Flow Dana Palma Lestari;</p> <p>24. Foto Copy 1 (satu) lembar yang berisi catatan modal beberapa perusahaan;</p> <p>25. 1 (satu) lembar print out dokumen Struktur Organisasi Dept. Legal RO Pekanbaru;</p> <p>26. 1 (satu) lembar print out dokumen Struktur Organisasi Dept. HR & GARO Pekanbaru;</p>	
--	--	--

Halaman 357 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>27. 1 (satu) bundel printout dokumen list harta Surya Darmadi beserta lampiran;</p> <p>28. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Keuangan PT Bayas Biofuels tanggal 31 Agustus 2017, 31 Juli 2017, dan 31 Desember 2016</p> <p>29. 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map transparan warna kuning berisi Voucher pengeluaran PT DARMEX AGRO;</p> <p>30. 1 (satu) buah buku dengan cover funny day dengan judul PT CERIA PRIMA (USD) a/c:0700005210526 BMDO/BMDI per Januari 2014;</p> <p>31. 1 (satu) buah buku dengan cover Mongky dengan judul PT WIRATA DAYA BANGUN PERSADA (USD) a/c:070.000.5210.468 BMDO/BMDI per Januari 2014;</p> <p>32. 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna merah dengan judul DARMEX AGRO (FOREX);</p> <p>33. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Kuasa terkait PT DARMEX BIOFUELS;</p> <p>34. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul PT DUTAPALMA NUSANTARA Laporan Posisi keuangan (neraca) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 beserta lampiran.</p> <p>35. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul PT DARMEX AGRO dan Subsidiaries EBITDA-MTM YTD Mei 2014 beserta lampiran.</p> <p>36. 1 (satu) lembar copy dokumen dengan judul PT DARMEX AGRO Flow dana uang muka setoran modal USD40Juta terima tanggal 10 Maret 2014 dan USD40Juta terima tanggal 19 Maret 2014;</p> <p>37. 1 (satu) lembar copy dokumen posisi keuangan Perusahaan PT BANYI BENING UTAMA, PT PALMA SATU, PT SEBERIDA SUBUR, PT PANCA AGRO LESTARI, PT DELIMUDA PERKASA, dan PT MEKARSARI ALAM LESTARI per 31 Desember 2013</p> <p>38. 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul daftar perusahaan yang menggunakan kawasan hutan secara tidak prosedural di 12 Provinsi.</p> <p>39. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT ASET LESTARI;</p> <p>40. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 HOLDING PT DARMEX AGRO;</p> <p>41. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT DOF;</p> <p>42. 1 (satu) lembar copy dokumen Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 PT JASUM PLANTATION;</p> <p>43. 1 (satu) lembar copy Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia periode ke 1 tahun 2016;</p> <p>44. 1 (satu) lembar Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan Periode ke 4 tahun 2016;</p> <p>45. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT Tahunan SURYA DARMADI;</p> <p>46. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SSP PPh Ps. 25 SURYA DARMADI;</p> <p>47. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT Tahunan Ibu Cheryl, P'Adil + Ibu Sutanti;</p> <p>48. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan SPT OP BP SURYA DARMADI;</p> <p>49. 1 (satu) bundel dokumen di dalam odner bertulisan Bukti Potong PPh 23 SURYA DARMADI;</p> <p>50. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map berwarna biru bertulisan Subject: File Pajak, Date: Pemeriksaan PPh Pribadi thn 2005 Bapak Surya Darmadi;</p> <p>51. 1 (satu) bundel dokumen dengan lembar paling depan berjudul Tanda Terima SPT Tahunan Nomor : 018-02-00011971;</p> <p>52. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Hasil Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Pemaduserasian TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau, Laporan Akhir, Kementerian Kehutanan, Juli 2012.</p> <p>53. 1 (satu) lembar Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/BAPPEDA/15.03 , Perihal : Usulan Tambahan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau tertanggal 07 Februari 2012, yang ditandatangani oleh H.M Rusli</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Zainal Selaku Gubernur Riau;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/BAPPEDA/76.03 , Perihal : Usulan Revisi RTRW Provinsi Riau 2010-2029 tertanggal 09 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal.</p> <p>55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/Bappeda/56.10 , Perihal : Permohonan Pembahasan RTRW Prov. Riau 2007-2026 tertanggal 27 April 2009, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal selaku Gubernur Riau.</p> <p>56. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : 050/BAPPEDA/65.27.a , Perihal: Usulan Tambahan Perubahan Kawasan Hutan Pada RTRW Provinsi Riau tertanggal 30 November 2009, yang ditandatangani oleh H.M Rusli Zainal selaku Gubernur Riau;</p> <p>57. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kepada Menteri Kehutanan RI, Nomor : nomor: 050/BAPPEDA/58.13, Perihal: Mohon Pertimbangan perubahan luas kawasan bukan hutan di provinsi riau dalam keputusan penunjukan kawasan hutan sesuai hasil rekomendasi tim terpadu tertanggal 12 Agustus 2014 ;</p> <p>58. 1 (satu) lembar print out Peta Revisi Perubahan SK No. 673/Menhut-II/2014 yang bukan Rekomendasi Tim Terpadu dengan Kab. Indragiri Hulu.</p> <p>59. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna surat Palma Satu Nomor : Legal DPN-PKU/VIII/-42/2014 , perihal Permohonan, Kepada Bapak Gubernur Riau, tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Suheri Tirta</p> <p>60. 1 (satu) lembar print out Peta Indikasi Perubahan Kawasan Hutan Dalam SK 673 yang tidak sesuai Rekomendasi Tim Terpadu</p> <p>61. Foto Copy 1 (satu) dokumen Lembar Disposisi tanggal 3 September 2014 atas Surat No. 522.73/Bappeda/500 perihal Usulan Revisi Terhadap Keputusan Menhut RI No. SK.673/Menhut-II/14</p> <p>62. Foto Copy 1 (satu) dokumen Surat Nomor: 522/DISHUT/268 tanggal 05 September 2014 perihal Usulan Tambahan Pelepasan Kawasan Hutan Pada Revisi RTRW Provinsi Riau beserta lampiran.</p> <p>63. Foto Copy 1 (satu) dokumen Peta Lampiran Usulan Tambahan Pelepasan Kawasan Hutan Pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.</p> <p>64. 1 (satu) bundel printout dokumen dalam map transparan wana abu-abu berisi dokumen Akun perbankan personal Surya Darmadi beserta lampiran.</p> <p>65. 1 (satu) bundel dokumen Akta-Akta Notaris pendirian Perusahaan PT DARMEX AGRO, PT KUNINGAN NUSAJAYA, beserta lampiran dan dokumen pendukung;</p> <p>66. 1 (satu) bundel copy dokumen Group FX Position per 27 October 2016</p> <p>67. 1 (satu) Bundel Administrasi Pembukaan Rekening PT Bayas Biofuels pada PT Bank Central Asia;</p> <p>68. 1 (satu) Bundel Administrasi Pembukaan Rekening PT Mekarsari Alam Lestari pada PT Bank Central Asia.</p>	
XXXVII.	<p>46 (empat puluh enam) bal kardus Gudang Garam Internasional berisikan dokumen transaksi keuangan Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PT. Palma Satu;2. PT. Panca Agro Lestari;3. PT. Seberia Subur;4. PT. Banyu Bening Utama;5. PT. Kencana Amal Tani;6. PT. Duta Palma Group	<p>Disita dari Ni Komang Devi Arisandi Tanggal 09 Juni 2022</p>
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;		

B. BARANG BUKTI TANAH/KEBUN SAWIT:		
I.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada diatasnya yang berlokasi di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,	Disita dari Novendra Tanggal

Halaman 359 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Palma Satu;	22 Juni 2022
I.	1 (sat) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Palma Satu;	Disita dari Novendra Tanggal 22 Juni 2022
II.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Payaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari	Disita dari Dwi Kurniawan Tanggal 22 Juni 2022
III.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Panca Agro Lestari;	Disita dari Dwi Kurniawan Tanggal 22 Juni 2022
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.		
IV.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama;	Disita dari Candro Aritonang Tanggal 22 Juni 2022
V.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Banyu Bening Utama	BA Penolakan Berita Acara Penyitaan dari Rices Heritanto Tanggal 22 Juni 2022
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA		
VI.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Seberida Subur;	Disita dari Jumarihot Tanggal 22 Juni 2022
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.		
VII.	1 (satu) bidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit beserta bangunan yang ada di atasnya yang berlokasi di Desa Seberida, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dikuasai oleh PT Kencana Amal Tani;	BA Penolakan Berita Acara Penyitaan dari Rangi Christian Pelawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanggal 22 Juni 2022
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA		

C. BARANG BUKTI ELEKTRONIK:		
I.	2. 1 (Satu) buah Harddisk Eksternal Merk Toshiba 1 T, Berisi data PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani Disita Tanggal 15 Juli 2022	Disita dari Ricky Amirudin tanggal 17 Juni 2022
II.	3. 1 (satu) unit CPU warna hitam merek Lenovo ThinkCenter E73, Machine Type 10 AS, Model Number 005HIA, Product ID 10AS005HIA. (terkait data tanaman, rencana kerja dan realisasi kerja) 4. 1 (satu) unit CPU warna Hitam merek Lenovo ThinkCenter Edge72 Machine Type 3484, Model Number NMA, Product ID 3484NMA. (terkait rekap hasil produksi)	Disita dari Novendra Tanggal 09 juni 2022
III.	1. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 7 warna Hitam degan SN- F71T30ZAH67P berserta simcard. 2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A10 TTG dengan SM- A105G/DS dengan Imei 1 : 357080103857034 dan Imei 2 : 357081103857032 beserta simcard	Disita dari Tovariga Triagita Ginting tanggal 09 Juni 2022
IV.	1. 1 (satu) buah Hardisk merek WD My Passport warna Hitam 1 TB dengan SN-WXQ2E31FZDJN berisi File sebagai berikut : 1. File Rar Dump Server dengan nilai dengan nilai Hash MD5 : c5adac3cce45e14450d8b0e39d6fa5ea. SHA1 : 35e44b61de33e427927abf4f8699f56519f2875. 2. File Rar dari Komputer Lisensi 1 dengan nilai Hash MD5 : 3205a4fa595e364c202ebb938d5ffc41 SHA1 : 3c9d2f89fd5f07986/809ade92a6d47e4817c9f. 3. File Rar dari Komputer Lisensi 2 dengan nilai Hash MD5 : 763e0fb8a1a996bf6fada05a4af70141 SHA1 : e75811de9e1e516322046d18337ef385b5d8d5a7. 4. File Rar dari Komputer Lisensi 3 dengan nilai Hash MD5 : 43229a3a0e40cae115059783696e3ac SHA1 : d6aefcf1dOd6be01dcOc1a5fb0d7e4b3c3a55bbb. 5. File Rar dari Komputer Lisensi 4 dengan nilai Hash MD5 : 483c4203cd65a4c846365a381ad0e6bd SHA1 : 6845d4C446c55e2f9563fba9a6262d2844d3443b. 6. File Rar dari Komputer Lisensi 5 dengan nilai Hash MD5 : ad2447ef05ab5a752376b73b2d4d0b58 SHA1 : 648169e77f7c8184ebda2a3a3db47b8a2ec0a0a1. 7. File Rar dari Komputer Lisensi 6 dengan nilai Hash	Disita dari Roby Dahdan Marganti Tanggal 10 Juni 2022

Halaman 361 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>MD5 : dc1484883c5c94b5c9b886af9bf9c895 SHA1 : fba22537980e511e03803155774fa3c1361ac7ca</p> <p>8. File Rar data Produksi A dengan nilai Hash MD5 : dc8d19651a2e9ac8e31bf2f876a046e SHA1 : 65a96589dac3f6c4abb95752c9169809a704c029</p> <p>9. File Rar data Produksi B dengan nilai Hash MD5 : 79537d1636abf643a27b74e9bb43fec SHA1 : 4c821671139568d0590176a8bf8ee263a1f2749</p> <p>10. File Rar data Produksi C dengan nilai Hash MD5 : 1be5687a8f160eda9c41c8a52299684 SHA1 : 56764994a2159e54257aad6943be4620c99d99a</p>	
V.	1. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Warna Ungu Nama Model Galaxy A72, Nomor Model : SM-A725F/DS, Nomor Serial : RR8R503VAWA, IMEI (Slot1) 357843235446004, IMEI (Slot2) 353546295446004	Disita dari David Fernando Simanjuntak Tanggal 04 Agustus 2022
VI.	1. 1 (Satu) Unit handphone Iphone 7+ model MN-512PA/A Nomor Imei : 355346083483402 dengan sim card 08569228121456;	Disita dari Karenina Gunawan Tanggal 20 Juni 2022
VII.	1. 1 (Satu) buah Flashdisk capacity 32 GB warna Merah hitam dengan model SDC Z50-032G dari AHLAN Selaku karyawan bagian administrasi tanaman pada PT. Panca Agro Lestari yang Berisi: 1. Data Historis Produksi Periode 2017 – 2021 2. Peta Areal Statement	Disita dari Dwi Kurniawan Tanggal 09 Juni 2022
VIII.	1. 1 (satu) unit Handphone Model MNQM2ZP/A, Serial Number C39T86H7HG04 dengan IMEI: 35 534608 211693 8 dengan Password : 030452; 2. 1 (satu) buah kart SIM (seluler) dengan nomor (019) 0988485122;	Disita dari Surya Darmadi Tanggal 15 Agustus 2022
DIKEMBALIKAN DARI MANA BARANG BUKTI DISITA		

II. BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI :

NO.	BARANG BUKTI	KET
1	2	3
A. Barang Bukti Aset Tanah/Bangunan:		
I.	1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4413 dengan luas 2209 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan; 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4291 dengan luas 800 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi

Halaman 362 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Utama Blok PE Kav No.9 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3740 dengan luas 912 M2 yang terletak Jl. Simprug Garden Blok G No. 20 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor HGB 6659 dengan luas 5.000 M2 yang terletak Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor II Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927 dengan luas 4.720 M2 yang terletak Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 Kav 6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 899 dengan luas 4.340 M2 yang terletak Jl. HR Rasuna Said Rt 08/04 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6846 dengan luas 4.445 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29 Seb Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p> <p>8. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7411 dengan luas 535 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PA Kav 29 Seb Sektor III Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p>	
II.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09396 dengan luas 2.723 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PE Kav. No.7 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09397 dengan luas 2.358 M2 yang terletak Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PE Kav. No.7 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor : 644/XXI/SANDALWOOD dengan luas 270 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian The Pakubuwono Residence Jl. Pakubuwono VI/Jl. Ophir Rt 005 Rw 01 Lt.23 No. S.23A Blok Sandalwood Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor : 40/XI/LACEWOOD dengan luas 180 M2 yang terletak di Rumah Susun Hunian Apartemen The Pakubuwono View, Jl. Tengku Nyak Arief/Jl. Kramat No.12 Rt 009 Rw 01 Lantai 12 No.LW 12B Blok Lacewood Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan;</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 7916 dengan luas 124 M2 yang terletak di Jl. Denpasar Raya Rt 016 Rw 04 Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen South Hills Lantai 15 No. 15-R Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641 dengan luas 5.726 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 28 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi

Halaman 363 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7. Kota Jakarta Selatan; 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Nomor 02276 dengan luas 2.846 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Rt 03 Rw 03 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan;	
III.	1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 224 dengan luas 2.180 M2 yang terletak di Jl. Salemba Raya No 5 dan 5A Rt 014 Rw 03 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat; 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1663 dengan luas 9.271 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 29-30 Rt 04 Rw 03 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan.	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
IV.	1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 773 dengan luas 16.250 M2 yang terletak di Jl. Arief Rachman Hakim No.3 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat; 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2051 dengan las 4.470 M2 yang terletak di Jalan Rangkayo Rasuna Said Blok X.5 No. 12 dan X.5 No.11 seb, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
V.	1. 1 (satu) bidang tanah beserta yang terdapat di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7493 dengan luas 3.554 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru; 2. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3458 dengan luas 9.640 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru; 3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3282 dengan luas 9.635 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru; 4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10944 dengan luas 9.710 M2 yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
VI.	1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 56 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 1.386,08 Ha yang terletak Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; 2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 116 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.106,54 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; 3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 115 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 2.930,21 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; 4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 58 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 3.405,84 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sebunga, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat; 5. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi

Halaman 364 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : 57 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 5.602 Ha yang terletak Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 171 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 169,19 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 170 An. PT Wana Hijau Semesta dengan luas tanah 205,81 Ha yang terletak Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat;</p>	
VII.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01 An. PT. Delimuda Perkasa dengan luas tanah 697.196 M² (meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 8 An. PT. Tunjuk Langit Sejahtera dengan luas tanah 1.002 Ha. yang terletak Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi.</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
VIII.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1093 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 1.998 M² (meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
IX.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 7.023,57 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 4.093,11 Ha. yang terletak Desa Mayak, Kecamatan Sanggau Ledo dan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 07 An. PT. Ceria Prima dengan luas tanah 8.029,803 Ha. yang terletak Desa Mayak dan Kalon, Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 09 An. PT. Wirata Daya Bangun Persada dengan luas tanah 14.335,848 Ha. yang terletak Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat;</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
X.	<p>1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 828 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 152 M² (meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 829 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 143 M² (meter persegi) yang terletak Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;</p> <p>3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 849 An. PT. Danatama Mulia dengan luas tanah 155 M² (meter persegi) yang terletak</p>	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi

Halaman 365 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.	
XI.	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 941 An. PT. Menara Perdana dengan luas tanah 26.730 M2 yang terletak Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Hotel Holiday Inn Resort Bali dan Hotel Holiday Inn Express Bali;2. 1 (satu) bidang tanah berserta yang apa yang terdaat di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1147 dengan luas 2.000 M2 terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.	Barang Bukti Disita dari Surya Darmadi
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.		

B. Barang Bukti Kapal :		
XII.	<ol style="list-style-type: none">3. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.4. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8,00 meter, D 3,65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.	Kapal Palembang
XIII.	<ol style="list-style-type: none">3. Royal Palma – IV, Barge, PT. Delimuda Nusantara, Dumai, 2000 PPj No.1213/L, 1596, 13174. Royal Palma 21, Tug Boat, PT. Delimuda Nusantara, Batam, 2012 PPM No.2575/L, 153, 46	Kapal Tanjung Pinang
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.		

C. Barang Bukti Helikopter :		
XIV.	<ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) unit Helikopter Bell 427 dengan nomor seri 58001 dengan nomor pendaftaran PK-DPN pemilik PT Dabi Air Nusantara.”	Disita Dari Surya darmadi
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.		

D. Barang Bukti Dokumen Kapal:		
XV.	<ol style="list-style-type: none">a) Kapal TB. Royal Palma I, dokumen yang disita sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma I oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juni 2022.2. 1 (satu) Bundel Surat Laut Nomor: PK.205/1885/SL-PM/DK-14 milik PT. Delimuda Nusantara yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014.3. 1 (satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 1722/Ba.- Kapal Royal Palma I dikeluarkan di tanjung priok tanggal 12 Juni 2000.4. 1 (satu) Bundel dokumen keselamatan	Dokumen Kapal Rengat

Halaman 366 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pengawasan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/13/7/DK/2022 Kapal Royal Palma I.</p> <p>5. 1 (satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/6/24/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma I diterbitkan di Rengat tanggal 22 November 2021.</p> <p>6. 1 (satu) Bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor:AL.501/6/25/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma I Milik Kapal Royal Palma I diterbitkan di Rengat tanggal 22 Novemer 2021.</p> <p>7. 1 (satu) Bundel surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/7/13/KSOP.Mrd/2022 milik Royal Palma I diterbitkan di Marunda tanggal 28 April 2022.</p> <p>8. 1 (satu) Bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/822/6/DK/2021 milik Royal Palma I diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Desember 2021.</p> <p>9. 1 (satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/822/5/DK/2021 milik Royal Palma I diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021.</p> <p>10. 1 (satu) Bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor: AL.601/29/13/DK/2022 milik Royal Palma I diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>11. 1 (satu) Bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification For Hull Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Januari 2022.</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For Machinery Royal Palma I diterbitkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2022.</p> <p>13. 1 (satu) Bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 154/ILR/MPJ/V/22 TB Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 17 Mei 2022.</p> <p>14. 1 (satu) Bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 091/PMK/MPJ/V/22 TB Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 17 Mei 2022.</p> <p>15. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/193603/181203/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur Angkutan Laut dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 17 Juni 2022.</p> <p>16. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : B.XXV-903/AL.58 Kapal TB. Royal Palma I tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Nomor Identifikasi</p>	
--	--	--

Halaman 367 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>TB. Royal Palma I Nomor : NV.101/62/28/DV/2016 tanggal 09 Mei 2016.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta Nomor : 2214 tanggal 06 November 2000 Nama Kapal : TB. Royal Palma I eks. Tomy Maru.</p> <p>19. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 milik Deli Muda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>21. 1 (satu) Bundel Fotokopi Certificate Of Insurance nomor : SO000479-17 Kapal Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021, berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023.</p> <p>22. 1 (satu) Bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang Warga Negara Indonesia Senin 18 November 2019.</p> <p>23. 1 (satu) Bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – I milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>24. 1 (satu) Bundel Buku Catatan Minyak Oil Record Book Kapal Royal Palma I berlaku dari 14 Oktober 2019.</p> <p>25. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.PM.29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dalam rangka penerbitan Sertifikat SNPP bagi Kapal Tangki Minyak dibawah GT 150 Atau Kapal selain Tangki Minyak dibawah GT 400 (Kapal Standar Non Konvesi (NCVS)) Kapal TB. ROYAL PALMA I milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : AL.601/3/19/KSOP.KC-2021 berlaku sampai dengan 21 Februari 2022.</p> <p>26. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma I milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 23 Juli 2022.</p> <p>b) Kapal TB. Royal Palma 5, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 5 oleh KSOP Kelas IV. Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juni 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Pas Besar Kapal Royal Palma 5 Eks DELIMUDA – III diterbitkan di Dumai 23 April 2013.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 1697/Ba.- Kapal Royal Palma 5 Eks DELIMUDA-III dikeluarkan di Tanjung Priok 17 April 2000.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/177/1/DK/2021 Kapal Royal Palma 5 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan Jakarta berlaku tanggal 29 Desember 2021 s/d 28 Desember 2022.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship</p>	
--	---	--



	<p>Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/5/5/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma 5 diterbitkan di Rengat tanggal 12 Juli 2021.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/5/6/KSOP.KC-2021 milik Kapal Royal Palma 5 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 12 Juli 2021.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/19/KSOP.KC-2021 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Rengat tanggal 12 Juli 2021.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 s/d 850M3 warna Kuning.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut, Ship Station License, Nomor Pemegang Izin : 00109413, Nomor Aplikasi : 0184728, Nomor Izin : 487/L/SDPPI/2022, Berlaku 24 Februari 2022 s/d 23 fbruari 2027, Nama Stasiun Royal Palma 5.</p> <p>10. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal, National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/267/14/DK/2022 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta tanggal 05 April 2022.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip, National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/501/4/DK/2021 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar, National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/14/8/DK/2021 milik Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.</p> <p>13. 1 (satu) Lembar fotokopi Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikasi Klasifikasi Mesin Royal Palma 5, Nomor 027418, Nomor Register : 06423 diterbitkan di Jakarta 10 Januari 2019 periode survei 5 tahun.</p> <p>14. 1 (satu) Lembar fotokopi Sertifikasi Garis Muat Internasional (1969) International Load Line Certificate, Nomor : 027835 Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta 10 Januari 2019 periode survei 5 tahun.</p> <p>15. 1 (satu) bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 329/ILR/MPJ/XII/21 TB Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 16 Desember 2021.</p> <p>16. 1 (satu) bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 330/ILR/MPJ/XII/21 TB Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 16 Desember 2021.</p> <p>17. 1 (satu) bundel PT. MEGA PRIMA JAYA Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 177/PMK/MPJ/XII/21 TB Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 16 desember 2021.</p> <p>18. 1 (satu) lembar sertifikat Nomor : 267/MPJ/HRU/XII/21 masa berlaku 15</p>	
--	--	--



	<p>Desember 2022</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/193613/181211/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 17 Juni 2022.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/172574/162741/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 23 Maret 2022</p> <p>21. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Nomor : B.XXV-1070/AL.58 Kapal TB. Royal Palma 5 diterbitkan di Jakarta, tanggal 17 Desember 1998.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.518/269/167/DK/2022 Perihal Keterangan tanda panggil (Call Sign) Kapal Royal Palma 5 Eks Deli Muda III tanggal 26 Januari 2022.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : NV.101/62/29/DV.2016, Perihal : Nomor Identifikasi TB. Royal Palma 5 tanggal 9 Mei 2016.</p> <p>24. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: Bxxv-903/AL58 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Surat Dokumen Penyesuaian manajemen Keselamatan Document Of Compliance Nomor: AL.601/18/19/DK/2021 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>26. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akte TB. Royal Palma 5 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 1108 tanggal 15 Desember 1997.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Surat Statement Letter tanggal 16 Agustus 2019.</p> <p>28. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor:SO000479-16 tanggal 31 Desember 2021 milik PT. DELIMUDA NUSANTARA Kapal Royal Palma 5.</p> <p>29. 1 (satu) bundel Invoice PT. DELIMUDA NUSANTARA nomor : 1184316 tanggal 13 Juni 2014.</p> <p>30. 1 (satu) bundel Surat Keterangan permohonan PT. TEGUH ABADI NUSANTARA, Nomor 421/TAN/BTM/IV/213.</p> <p>31. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 16 September 2020 di Tanjung Priok.</p> <p>32. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – 5 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>c) Kapal TB. Royal Palma 13, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pemeriksaan Fisik Kapal, Nama Kapal Royal Palma 13 tanggal 22 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (satu) Lembar Surat Pas Besar, Nomor Tanda Pendaftaran : 2007 PPJ No.1532/L, Nama Kapal "Royal Palma 13" eks Chiyo Maru No.88 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Tanjung priok 03 Juni 2014.</p> <p>3. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara International Tonnage Certificate (1969) Provisional Nomor 626/PPj, Nama Kapal "Royal Palma 13" eks Chiyo Maru No.88 dikeluarkan di Dumai pada tanggal 16 Mei 2007.</p> <p>4. 1 (Satu) Lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document No.AL.504/13/8/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022.</p> <p>5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/7/9/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/7/10/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate No: AL.502/3/10/KSOP.Mrd/2022 diterbitkan di Marunda pad tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Izin Stasiun Radio Kapal Laut/Ship Station License No. Izin 855/L/SDPPI/2017 Nama Stasiun TB. Royal Palma 13 eks Chiyo Maru No.88.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/72/8/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 01 Februari 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 01 Februari 2021.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/625/9/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 september 2020 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.601/14/7/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.</p>	
--	---	--

Halaman 371 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 025449 No. Register : 11607 No.Imo: 8737661 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 025779 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2018.</p> <p>14. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-Inspection Certificate No. : 064/ILR/MPJ/II/2022 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-Inspection Certificate No. : 063/ILR/MPJ/II/2022 Nama Kapal : Royal Palma 13 diterbitkan di Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Pemeriksaan Ulang Re-Inspection Certificate No. : 032/MPK/MPJ/II/22 Nama Kapal : Royal Palma 13 di Tanjung Priok pada tanggal 22 Februari 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Certificate No. : 042/MPJ/HRU/II/22, Nama Kapal : TB. Royal Palma 13, Milik : PT. Delimamuda Nusantara, Nomor Seri : 494045 diterbitkan di Tanjung Priok.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Certificate No. : 043/MPJ/HRU/II/22, Nama Kapal : TB. Royal Palma 13, Milik : PT. Delimamuda Nusantara, Nomor Seri : 494046 diterbitkan di Tanjung Priok.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/193735/182128/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Lembar Surat Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance NO. AL.601/18/19/DK/2021 tanggal 13 Januari 2021</p> <p>23. 1 (Satu) Lembar Keterangan Tanda Panggil (Call Sign) Nama Kapal : TB. Royal palma 13 Eks.Chiyo Maru No.88 Nomor: Pk.203/30/16/DK-17 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2017.</p> <p>24. 1 (Satu) Lembar Nomor Identifikasi Nama Kapal : TB. Royal palma 13 No. NV.101/62/31/DV.2016 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2016.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -1532-, Tanggal : 04 Juni 2007, Nama Kapal : Motor Tunda Bernama Royal Palma 13, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance</p>	
--	--	--



	<p>No. SO000479-12 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 28 September 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TB. Royal Palma 13.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Minyak /Oil Record Book Kapal Motor: TB. Royal Palma 13.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Sampah /Garbage Record Book Kapal Motor: TB. Royal Palma 13.</p> <p>d) Kapal TK. Royal Palma-XVI, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal oleh KSOP Nama Kapal Royal Palma XVI pada tanggal 23 Juni 2022.1 (satu) bundel Surat Laut, No. PK.205/1266/SL-PM/DK-14, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta, 05 Maret 2014.1 (satu) lembar Surat Laut nomor PK.674/369/SL-PM/DK-09, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 20 Maret 2009.1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969)/International Tonnage Certificate (1969), No. 698/PPj, Kapal Royal Palma XVI, Dimensi Kapal : Panjang 69,12 M, Lebar 20 M, Tinggi 4,88 M., dikeluarkan di Dumai 06 Januari 2009.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Constuction Certificate, No. AL.501/4/15/KSOP.STT-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Sintete, 22 Maret 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No. AL.501/4/16/KSOP.STT-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Sintete, 22 Maret 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal, National Pollution Prevention Certificate, No. AL.601/632/17/DK/2020, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta, 30 September 2020.1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip/National Anti Fouling System Certificate, No. AL.501/4/17/KSOP.STT-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Sintete 22 Maret 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak/Certificate of Insurance or Other Financial Security In Respect of Civil Liability For Oil Pollution Damage, No. AL.602/8/7/DK-2022, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 11 Januari 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification For Hull, No.046759, No. Register : 12216, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 11 Februari 2020.1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin/Certificate of Classification For Machinery, No. 030604, No.Register :	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>12216 No. IMO : 8740216, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta, 11 Februari 2020.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 031047 Nama Kapal : Royal Palma XVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2020.</p> <p>13. 1 (satu) lembar CV.AIDIN PERKASA, Re-Inspection Certificate INFLATABLE LIFE RAFT, No.321/AP/DMI/XII/2021, Kapal TK. Royal Palma XVI, Diterbitkan Dumai, 10 Desember 2021.</p> <p>14. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. 321/AP/DMI/XII/2021, Kapal TK.Royal Palma XVI, Diterbitkan Dumai 10 Desember 2021.</p> <p>15. 1 (satu) lembar PT. MEGA PRIMA JAYA, Sertifikat Pemeriksaan Ulang/Re-Inspection Certificate, No. 110/PMK/MPJ/VI/22, Kapal TK. Royal Palma XVI, Pemilik PT. DELIMUDA NUSANTARA, diterbitkan di Jakarta Utara, 10 Juni 2022.</p> <p>16. 1 (satu) lembar Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, No. AL.103/2000/194564/182133/22, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan Di Jakarta 20 Juni 2022.</p> <p>17. 1 (satu) bundel Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, No. AL.103/2000/175021/164213/22, Kapal Royal Palma XVI, Diterbitkan di Jakarta 30 Maret 2022.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Spesifikasi Kapal yang dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara. Kapal Royal Palma XVI Nomor B.XXV-903/AL.58, Diterbitkan di Jakarta 29 April 2009.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Nomor B.XXV/903/AL.58, Perusahaan PT. DELIMUDA NUSANTARA, Diterbitkan Jakarta 18 Maret 2002.</p> <p>20. 1 (satu) bundel Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan/Document of Compliance, No. AL.601/18/19/DK/2021, Nama Perusahaan PT. DELIMUDA NUSANTARA, diterbitkan di Jakarta 13 Januari 2021.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Pendaftaran Kapal/Grosse Akte, No. 1630, Nama Kapal TK. Royal Palma XVI, Berkedudukan di Jakarta 16 Februari 2009.</p> <p>22. 1(satu) bundel Certificate Furnished as Evidence of Insurance Pursuant to the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. Diterbitkan pada 31 Desember 2021.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Certificate of Insurance, No. SO000479-30, Diterbitkan pada 31 Desember 2021.</p> <p>24. 1 (satu) bundel Invoice PT.Delimuda Nusantara, No. 1184319, diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2014.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. UNION MARITIM INDONESIA dengan seorang warga Negara Indonesia</p>	
--	--	--

Halaman 374 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Nomor 524/5/9/KSOP.STT-2021, dibuat di Sintete 23 Juni 2021.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Buku SIJIL, Kapal TK. Royal Palma XVI, Isi kotor 1849.</p> <p>27. 1 (satu) bundel Buku Catatan Sampah/Garbage Record Book, MARPOL 73/78 ANNEX V.</p> <p>e) Kapal TK. Royal Palma XX, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal, Nama Kapal Royal Palma XX tanggal 22 Agustus 2022.2. 1 (satu) Lembar Surat Laut Nomor : PK.205/706/SL-PM/DK-15, Nama Kapal Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 31 Maret 2015.3. 1 (satu) Lembar Surat Laut Nomor : PK.205/1333/SL-PM/DK-11, Nama Kapal Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 24 November 2011.4. 2 (dua) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) Sementara International Tonnage Certificate (1969) Provisional Nomor 3500/PPm, Nama Kapal Royal Palma XX dikeluarkan di Batam pada tanggal 28 September 2011.5. 1 (satu) Lembar Surat Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction Certificate Nomor: AL.501/3/10/KSOP.KC-2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Rengat tanggal 22 April 2022.6. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor : AL.501/3/11/KSOP.KC- 2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Rengat tanggal 22 April 2022.7. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/643/12/DK/2021, Nama Royal Palma XX diterbitkan di Jakarta tanggal 30 September 2021.8. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/384/16/DK/2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2022.9. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Oil Pollution Damage Nomor : AL.602/08/11/DK/2022, Nama Kapal Royal Palma XX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022.10. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/187/13/DK/2020, Nama Kapal Royal Palma XX, Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 11 Maret 2022.11. 1 (satu) Lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Provisional Classification Certificate Hull No. 00067-DM/B1.S/2022 No. Register : 14648	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nama Kapal : Royal Palma XX milik PT. Deli Muda Nusantara diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal 01 April 2022.</p> <p>12. 1 (satu) Lembar Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin, Provisional Certificate Of Classification For Machinery No. 00067-DM/B1.S/2022 No.Register 14648 Nama Kapal : Royal Palma XX diterbitkan di Pekanbaru tanggal 01 April 2022.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Surat Sertifikat Klasifikasi Garis Muat Internasional Sementara / Provisional International Load Line Certificate No. 00067-DM/D1.S/2022-Perp I, Nama Kapal : Royal Palma XX diterbitkan di Pekanbaru pada tanggal 01 Juli 2022.</p> <p>14. 1 (satu) Bundel Surat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor : 166/AP/DMI/V/2022, Nama Kapal TK. Royal Palma XX, milik PT. Delimuda Nusantara-Jakarta tanggal 27 Mei 2022.</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation Fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 185/AP/DMI/V/2022, Nama Kapal TK. Royal Palma XX, milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Dumai pada tanggal 27 Mei 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Surat Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 166/AP/DMI/V/2022 Nama Kapal : TK. Royal Palma XX di Dumai pada tanggal 27 Mei 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/194584/182293/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/175073/164352/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022.</p> <p>19. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/153036/144745/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2022.</p> <p>20. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/130499/125054/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2021.</p> <p>21. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : BXXV-903/AL.58 Nama Kapal : Royal Palma XX tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>22. 1 (satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah International Certificate Fitness For The Carriage Of Dangerous Chemicals In Bulk No. AL.602/04/07/KSOP.DMI-2022, Nama Kapal Royal Palma XX ditebitkan di Dumai 02 Agustus 2022.</p> <p>23. 1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>24. 1 (satu) Bundel Surat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Document Of Complaiance No. AL.601/18/19/DK/2021 Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>25. 1 (satu) Bundel Surat Certificate Of Insurance Nomor : SO000479-28, Nama Kapal Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>26. 1 (satu) Lembar Surat Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 BahagianX Seksyen 381 (A) Nomor : WRC-2015- 00843, Nama Kapal Royal Palma XX, milik PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Malaysia tanggal 21 Mei 2016.</p> <p>27. 1 (satu) Bundel fotocopy Grosse Akta Nama Kapal : Kapal Tongkang "Royal Palma XX" milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 1931 tanggal 22 November 2011.</p> <p>28. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan Seorang Warga Negara Indonesia di Rengat pada 30 November 2019.</p> <p>29. 1 (satu) Bundel BUKU SIJIL warna Hijau Kapal Motor : TK. Royal Palma XX milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>f) Kapal Royal Palma 25, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (satu) bundel Pas Besar Nomor: PK.204/16/05/KPL.BTM-2014 Kapal Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam 24 Maret 2014</p> <p>2. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 5600/PPm Kapal Royal Palma 25 dikeluarkan di Batam tanggal 27 Januari 2014.</p> <p>3. 1 (satu) bundel dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/126/11/DK/2021 Kapal Royal Palma 25 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>4. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/3/8/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 25 diterbitkan di Rengat tanggal 16 April 2022.</p> <p>5. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/3/9/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 25 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 16 April 2022.</p> <p>6. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/11/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Rengat tanggal 16 April 2022.</p> <p>7. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari kapal</p>	
--	---	--

Halaman 377 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/57/12/DK/2022 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Januari 2022.</p> <p>8. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/744/10/DK/2020 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/40/7/DK/2022 milik Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification For Hull Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 06 November 2018.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For Machinery Royal Palma 25 diterbitkan di Jakarta tanggal 06 November 2018.</p> <p>12. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 154/AP/DKI/V/2022 TB Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 19 Mei 2022.</p> <p>13. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 174/AP/DKI/V/2022 TB Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 19 Mei 2022.</p> <p>14. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/204638/191494/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 02 Agustus 2022.</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : B.XXV-903/AL.58 Kapal TB. Royal Palma 25 tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PK.203/30/15/DK-17 Perihal Keterangan Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 25 Eks FUKUMARU No. 68 tanggal 26 Oktober 2017.</p> <p>17. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: Bxxu-903/AL58 Kapal Royal Palma 25 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>18. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta TB. Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 3394 tanggal 28 Januari 2014.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance nomor : SO000479-7 Kapal Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021, berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023 .</p>	
--	---	--

Halaman 378 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>20. 1 (satu) bundel Berita Acara Penggantian Bendera Nama TB. FUKU MARU No. 68 bendera Pemerintah Tuvalu menjadi TB. Royal Palma 25 Bendera Indonesia tanggal 27 November 2013.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 120 tanggal 27 November 2013 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam tanggal 28 November 2013.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kontruksi dan Perlengkapan Kapal TB. Royal Palma 25 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 02 Maret 2022.</p> <p>24. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – 25 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>25. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 25 milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 16 Agustus 2022.</p> <p>g) Kapal TK. Royal Palma XXVI, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Royal Palma XXVI oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 16 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXVI.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 5669/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXVI Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Ukuran Dalam Terbesar 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 24 Januari 2014.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.PK.205/1278/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2014.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/4/9/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 02 Juni 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/4/10/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 02 Juni 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/450/3/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni 2022 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/450/14/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2022.</p>	
--	---	--

Halaman 379 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/11/5/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/4/18/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/4/11/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXVI pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/102/5/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 043627 No. Register : 19885 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 028463 No. Register : 19885 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 028829 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 089/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Dumai pada tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 096/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI di Dumai pada tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 089/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVI di Dumai pada tanggal 24 Maret 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184904/173537/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. BXXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2015.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No: AL.602/03/06/KSOP.DMI-2022 Nama</p>	
--	--	--

Halaman 380 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Kapal : Royal Palma XXVI diterbitkan di Dumai pada tanggal 06 Juni 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -3389-, Tanggal : 24 Januari 2014, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXVI, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-25 pada tanggal 31 Desember 2021 ; Certificate Furnished As Evidence of Insurance Pursuant to The Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, Blue Card Number : CLC20220007 pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peletakan Lunas Nomor Bangunan : H-229 diterbitkan di Batam pada tanggal 13 Juni 2013.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peluncuran Kapal Baru NO. 220/BA/XII/2013 diterbitkan di Batam pada tanggal 16 Desember 2013.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 1525 diterbitkan di Batam pada tanggal 06 Mei 2014.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 23 Agustus 2016.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXVI.</p> <p>h) Kapal TB. Royal Palma 27, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 27 Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 29 Juli 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor: PK.205/2027/SL-PM/DK-15 Kapal Royal Palma 27 milik PT. DELIMUDA NUSANTARA yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 November 2015.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 6590/PPm Kapal Royal Palma 27 dikeluarkan di Batam tanggal 09 Oktober 2015.</p> <p>4. 1 (satu) bundel dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.527/10/20/KSOP.Mrd/2022 Kapal Royal Palma 27 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>5. 1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/5/18/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 27 diterbitkan di Rengat tanggal 22 Juli 2022.</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>6. 1 (satu) bundel sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/5/19/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 27 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/24/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Rengat tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>8. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/531/5/DK/2020 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2022.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip Nasional Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/532/1/DK/2020 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/8/15/DK/2022 milik Royal Palma 27 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>11. 1 (satu) Lembar Certificate Of Classification Kapal Royal Palma 27 di Terbitkan di Jakarta 16 juli 2020, berlaku sampai 21 Juni 2025.</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Sertifikat International Load Line Certificate Kapal Royal Palma 27 No: 20JK0362-LLC.</p> <p>13. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 057/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>14. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Sertifikat Pemeriksaan Ulang Nomor : 056/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>15. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 054/AP/DMI/II/2022 TB Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>16. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. 057/AP/DMI/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/184044/172811/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri diterbitkan di Jakarta 10 Mei 2022.</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : B.XXV-903/AL.58 Kapal TB. Royal</p>	
--	--	--

Halaman 382 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Palma 27 tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>19. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL.58 milik PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>20. 1 (satu) Bundel Surat Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Document Of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 Nama Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PK.204/21/10/DK-15 Perihal Penggunaan Nama dan Penetapan Tanda Panggilan Kapal 29 Juni 2015.</p> <p>22. 1 (Satu) Lembar Nomor Identifikasi TB. Royal Palma 27 Nomor : NV 101/208/25/DV.2015 tanggal 18 September 2015.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Builder's Certificate nomor: BC.002/PPS/05/2015 tanggal 05 Mei 2015.</p> <p>24. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Selar tanggal 09 Oktober 2015.</p> <p>25. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta TB. Royal Palma 27 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 4056 tanggal 20 Oktober 2015.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-6 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>27. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 2825 tanggal 19 September 2015.</p> <p>28. Berita Acara Pemeriksaan Kapal Royal Palma 27 tanggal 18 September 2015.</p> <p>29. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 06 Maret 2021.</p> <p>30. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma – 27 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>31. Buku catatan minyak Oil Record Book Kapal TB. Royal Palma 27 huruf pengenalan YDA.3791.</p> <p>i) Kapal TK. Royal Palma XXVIII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XXVIII oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 05 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXVIII.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut PK.205/1873/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 5705/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXVIII Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 26 Februari 2014.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/2/20/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety equipment Certificate No: AL.501/2/21/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/657/2/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 Oktober 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 Oktober 2021.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/266/19/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal 07 april 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di jakarta pada tanggal 07 april 2022</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/11/1/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.602/11/2/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/ / /DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII pada tanggal 12 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL.601/102/4/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 043639</p> <p>12. No. Register : 19886 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 028474 No. Register : 19886 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 028838 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2019.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatble Life Raft No. : 058/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 10 Maret 2022.</p>	
--	--	--

Halaman 384 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 055/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII di Dumai pada tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 058/AP/DMI/III/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII di Dumai pada 10 Maret 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184905/173980/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/166695/157063/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/143858/136806/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2021.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/122689/118036/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/102971/99169/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/84422/80936/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/64738/62357/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/45771/43989/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/28146/26573/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/10042/9618/20diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/62544/61012/19 diterbitkan di</p>	
--	--	--

Halaman 385 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Jakarta pada tanggal 27 November 2019.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/43579/42517/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2019.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL 208/2000/77006934/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Desember 2020.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76904/73195/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2021.</p> <p>32. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No: AL.602/03/08/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 14 Juni 2022.</p> <p>34. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>35. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>36. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -3452-, Tanggal : 28 Februari 2014, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXVIII, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta ; 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. S/3459 Nama Kapal : Royal Palma XXVIII periode 08 Januari 2020 s.d 08 Januari 2021.</p> <p>37. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Builder Certificate Nomor Bangunan : H-235 diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Desember 2013.</p> <p>38. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 1524 diterbitkan di Batam pada tanggal 06 Mei 2014.</p> <p>39. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-24 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>40. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 20 Maret 2020</p> <p>41. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXVIII.</p> <p>j) Kapal TB. Royal Palma 29, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 29 tanggal 22 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (satu) lembar surat laut Nomor : AL.520/38/14/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2019 dengan nama Kapal Royal Palma 29</p>	
--	--	--



	<p>yang diterbitkan oleh An. Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 7847/PPm Kapal Royal Palma 29 dikeluarkan di Batam tanggal 10 Mei 2019.</p> <p>4. 1 (satu) lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor: AL.501/5/9/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>5. 1 (satu) lembar Setifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/6/4/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor : AL.501/6/5/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022.</p> <p>7. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate Nomor : AL.502/2/2/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Rengat tanggal 05 Agustus 2022.</p> <p>8. 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 S/D 850 M3 Nomor: 2019 PPm No.5192/L Kapal Royal Palma 29.</p> <p>9. 1 (satu) bundel surat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Daya Izin Stasiun Radio Kapal Laut, Ship Station License No. Klien: 00109413, No. Aplikasi: 0155554, No. Izin: 1026/L/SDPPI/2019 dengan tanggal berlaku 28 September 2019 S/D 27 September 2024.</p> <p>10. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. NV.101/01/2727-IX/DV/2019 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 September 2019.</p> <p>11. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/181/16/DK/2022 milik Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2022.</p> <p>12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/649/9/DK 2021 milik Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2021.</p> <p>13. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/18/20/DK/2022 milik Royal Palma 29 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06</p>	
--	--	--



	<p>Januari 2022.</p> <p>14. 1 (satu) Bundel Certificate of classification milik Kapal Royal Palma 29 dengan register GT 197 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020.</p> <p>15. 1 (satu) Bundel International Load Line Certificate milik Kapal Royal Palma 29 No. IMO : IMO9881914 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2020.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor: 016/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor: 017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Cetificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. 017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Cetificate Hidrostatic Release Unit Nomor: 016/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat CV. AIDIN PERKASA Cetificate Hidrostatic Release Unit Nomor: 017/AP/DMI/I/2022 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 22 Januari 2022.</p> <p>21. 1 (satu) Bundel surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan LAut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/204642/191500/22 Kapal Royal Palma 29 tanggal 02 Agustus 2022.</p> <p>22. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: B XXV-903/AL.58 Kapal Royal Palma 29 tanggal 16 Agustus 2019.</p> <p>23. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tanda Panggil (Call Sign) Kapal Royal Palma 29 Nomor: AL.518/13/3/DK/2019 Kapal Royal Palma 29 tanggal 12 April 2019.</p> <p>24. 1 (satu) lembar surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor Identifikasi Royal Palma 29 Nomor: NV.101/03/0542-IV/DV.2019 Kapal Royal Palma 29 tanggal 16 April 2019.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Fotokopi surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 atas nama PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Maret 2002.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Fotokopi surat dokumen penyesuaian manajemen keselamatan document of compliance Nomor: AL.601/18/19/DK/2021 atas nama PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 13 Januari 2021.</p> <p>27. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pendaftaran Kapal Nomor: 5192 tanggal 10 April 2019 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>28. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor: SO000479-5 tanggal 31 Desember 2021 Kapal Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>29. 1 (satu) lembar Berita Acara Peletakan Lunas Nomor: KL.002/PPS/01/2014 diterbitkan di Batam 03 Januari 2014.</p> <p>30. 1 (satu) lembar Builder's Certificate Nomor: BC.003/PPS/02/2019 Kapal Royal Palma 29 diterbitkan di Batam 19 Februari 2019.</p> <p>31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 4756 tanggal 06 Agustus 2019.</p> <p>32. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang warga Negara Indonesia tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>33. 1 (satu) buah Buku SIJIL Kapal TB. Royal Palma 29 milik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>34. 1 (satu) buah Buku Catatan Minyak oil record book Kapal Royal Palma 29.</p> <p>35. 1 (satu) buah Buku Catatan Sampah Garbage Record Book.</p> <p>k) Kapal TK. ROYAL PALMA XXX, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal oleh KSOP, Nama Kapal Royal Palma XXX pada tanggal 15 Juli 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXX.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.PK.205/4112/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XXX milik Milik: PT. DELIMUDA NUSANTARA diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014.</p> <p>4. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 6056/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXX Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 08 Juli 2014.</p> <p>5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/3/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/3/19/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/862/6/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Desember 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Desember 2021.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/2/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX</p>	
--	---	--

Halaman 389 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>diterbitkan di Rengat pada tanggal 16 Mei 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 16 Mei 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/17/2/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022 beserta Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak bahan bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.602/3/8/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 beserta Surat Pengesahan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut No. AL.603/2/16/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXX pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/102/3/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2021.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 044717 No. Register : 20670 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 029207 No. Register : 20670 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No.029577 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 juli 2019.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 131/AP/DKI/IV/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Dumai pada tanggal 22 April 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 153/AP/DKI/IV/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX di Dumai pada tanggal 22 April 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. 131/AP/DKI/IV/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXX diterbitkan di Dumai pada tanggal 22 April 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/185329/173979/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan</p>	
--	--	--



	<p>Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/166698/157065/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2022.</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/143874/136474/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2021.</p> <p>20. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/122731/118034/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/102979/98502/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/10043/9621/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2020.</p> <p>23. 1 (satu) Lembar Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76900/74339/21 diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Januari 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Grosse Akta No : -3647-, Tanggal : 14 Juli 2014, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XXX, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta Selatan</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-23 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>29. Sertifikat Penguji Air Minum (Untuk Keperluan Kapal/Pesawat Udara) No. 0020245 Nama Kapal : Royal Palma XXX dikeluarkan Kuala Enok pada tanggal : 18 Oktober 2014.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel PT.BANDAR ABADI builder certificate Nama Kapal Royal Palma XXX diterbitkan di Batam tanggal 19 Mei 2014.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 3352 tanggal 20 September 2014 diterbitkan di Batam.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia No.</p>	
--	---	--



	<p>PK.301/09/69/KSOP/DMI/2020 dibuat pada tanggal 10 September 2020.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXX.</p> <p>34. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 621154809601815 An. R SUHENDRI, Jakarta 07 Oktober 2015.</p> <p>35. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6201321756010118 An. HERIYANTO, Jakarta 04 Januari 2018.</p> <p>36. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6211743037010117 An. R NURWAN ZAIN PUTRA, Jakarta 06 Maret 2017.</p> <p>37. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6211905596010119 An. JONI HANDOKO, Jakarta 14 Februari 2019.</p> <p>38. 1 (satu) Lembar scan Sertifikat Keterampilan No. 6211930917013819 An. ANDRE PRAYOGA, Aceh Besar 06 Agustus 2019.</p> <p>39. 1 (satu) Bundel Daftar Pengawal Nama Kapal TB. Royal Palma 29/TK Royal Palma XXX, tanggal 21 September 2020.</p> <p>l) Kapal TK. Royal Palma XXXII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XXXII oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/57/11/DK/2019 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 7984/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXXII Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 19 Agustus 2019.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/3/16/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/3/17/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 26 April 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/421/2/DK/2019 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 September 2019.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/2/20/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak /</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/11/6/DK/2022 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/3/9/DK/2022 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/2/17/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII pada tanggal 08 Januari 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan Safety Management Certificate No. AL.601/390/10/DK/2020 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020.</p> <p>10. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate No. : 172/ILR/MPJ/VI/22 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta Utara pada tanggal 07 Juni 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate No. : 107/PMK/MPJ/VI/22 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII diterbitkan di Jakarta Utara pada tanggal 07 Juni 2022.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat HRU No. : 123/MPJ/HRU/VI/22 Nama Kapal : Tongkang Royal Palma XXXII di Jakarta Utara.</p> <p>13. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/185879/173865/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022.</p> <p>14. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/167344/158193/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/143924/136804/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2021.</p> <p>16. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/122749/117864/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/103656/99886/21diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL</p>	
--	--	--

Halaman 393 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>103/2000/86244/82153/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2021.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/64697/62355/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/46006/44862/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2020.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/28166/26544/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2020.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 208/2000/7703/6917/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2020.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/75678/72326/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. BXXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>25. 1 (Satu) Lembar Surat Ship Particular TK. Royal Palma – XXXII.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL58 Nama Perusahaan : PT.DELIMUDA NUSANTARA diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-22 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 5363 di terbitkan di Batam Pada tanggal 23 Agustus 2019 Nama Kapal : Oil Barge Bernama Royal Palma XXXII.</p> <p>30. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Builder Certificate No. 018/BA/VII/2019 Diterbitkan di Batam pada tanggal 18 Juli 2019.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peletakan Lunas Nomor : 027/BA-KL/BTM/I/2019 Bangunan : H-345 diterbitkan di Batam pada tanggal 17 Januari 2019.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peluncuran Kapal Baru No : 328/BA/VII/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 18 Juli 2019.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 5236 diterbitkan di Batam pada tanggal 27 Agustus 2019.</p> <p>34. 1 (Satu) Bundel Surat Pengawasan Muat Barang Berbahaya No. AL.605-1/14/11/KSOP.Mrd/2021, diterbitkan di Marunda Pada tanggal 27 Juli 2021.</p> <p>35. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut</p>	
--	---	--



	<p>Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 16 Juni 2021.</p> <p>36. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXXII.</p> <p>37. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Laporan Pemeriksaan (SNPP) Pencegahan Pencemaran Kapal Tangki GT 150 atau lebih dan kapal selain tangki minyak GT400 atau lebih (NCVS) Nomor : A.KOP/19/17.</p> <p>38. 1 (Satu) Bundle fotocopy Laporan Pemeriksaan Nautis Kapal Tongkang Menurut Peraturan NCVS Indonesia Nomor : KOP 19/16</p> <p>39. 1 (Satu) Bundle Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran Dari Sistem Anti Teritip dikapal sesuai persyaratan Convention On The Control of Harmfull Anti – Fouling System on Ship 2001 Nomor : A.KOP-19/2.</p> <p>m) Kapal TB. Royal Palma 33, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Royal Palma 33 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 15 Juli 2022.1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/77/13/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2019.1 (Satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8065/PPm Nama Kapal : Royal Palma 33 Dimensi Kapal : Panjang 24,34 M, Lebar 8 M, Ukuran Dalam Terbesar 3,65M dikeluarkan di Batam pada tanggal 25 Oktober 2019.1 (Satu) Bundel Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document No : AL.501/4/17/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/4/15/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/4/16/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate No: AL.502/1/17/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.1 (Satu) Bundel Izin Stasiun Radio Kapal Laut / Ship Station License No. Izin : 1285/L/SDPPI/2019 tanggal berlaku 28 Oktober 2019 s.d 27 Oktober 2024.1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/536/15/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 01 November 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di	
--	--	--



	<p>Jakarta pada tanggal 01 November 2019.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/2/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.601/6/16/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/2/13/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma 33 pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel International Convention on Load Lines, 1966, No. 19JK0045, diterbitkan di Batam pada tanggal 09 Oktober 2019.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 203/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 204/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 218/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 203/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 33 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/199755/186857/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Surat perihal Tanda Panggilan (Call Sign) Royal Palma 33 No. No: AL.518/49/14/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 ; Surat perihal Nomor Identifikasi Royal Palma 33 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2019.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di</p>	
--	--	--



	<p>Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Grosse Akta No : -5431-, Tanggal : 10 Oktober 2019, Nama Kapal : Tug Boat Bernama Royal Palma 33, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-3 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Peluncuran Kapal No.: L.008/PPS/08/2019 beserta Lampiran IV Pemeriksaan Peluncuran tanggal 02 September 2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 02 September 2019 ; Berita Acara Peletakan Lunas No.KL.002/PPS/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 ; Berita Acara Serah Terima No.002A/BAST/PPS/09/2019 tanggal 14 Oktober 2019.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pemasangan Tanda Selar sesuai dengan Surat Ukur No 8065/PPm tanggal 24 Oktober 2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 24 Oktober 2019.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas No.Pengajuan 020401-000094-20191009-000488 diterbitkan di Batam pada tanggal 09 Oktober 2019.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Steering Compass No. DAFDEV/268/IX/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 11 September 2019 ; DAFDEV/267/IX/2019 diterbitkan di Batam pada tanggal 11 September 2019.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 04 Juni 2022.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TB. Royal Palma 33.</p> <p>30. 1 (Satu) Buku Catatan Minyak / Oil Record Book Bagian I Nama Kapal : TB. Royal Palma 33 DKP.V-07.</p> <p>31. 1 (Satu) Buku Catatan Sampah / Garbage Record Book MARPOL 73/78 ANNEX V</p> <p>32. 1 (Satu) Buku Laporan Pemeriksaan Persyaratan Pengawakan Minimum/ Record of Inspection Requirement for Safe Manning Nama Kapal : TB. Royal Palma 33.</p> <p>n) Kapal TK. Royal Palma XXXIV, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma XXXIV oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 23 Juli 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXXIV.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/83/16/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2019.</p> <p>4. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8082/PPm Nama Kapal : Royal Palma XXXIV Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Ukuran Dalam Terbesar 6,10 M dikeluarkan di Batam pada tanggal 04 November 2019.</p> <p>5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/5/7/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Rengat</p>	
--	--	--



	<p>pada tanggal 06 Juli 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/5/8/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/590/7/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 05 November 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 November 2019.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/10/5/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022 ; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/4/17/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022; Surat Pengesahan No. AL.603/4/10/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/13/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 06 Juli 2022.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL. 601/390/9/DK/2020 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 046729 No. Register : 24191 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 030587 No. Register : 24191 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020.</p> <p>13. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 031030 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatble Life Raft No. : 248/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV diterbitkan di Dumai pada tanggal 17 September 2021.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire</p>	
--	---	--



	<p>Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 271/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 17 September 2021.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 248/AP/DMI/IX/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 17 September 2021.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184048/17620/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2022 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/164755/155167/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022.</p> <p>18. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/142897/135697/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/120959/116400/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/101318/97451/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/81274/79164/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/63515/60963/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2020 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/26845/25453/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2020 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/60872/58900/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2019 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/8088/7745/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2020 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/13759/12621/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2021 ; Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Dalam Negeri No. AL 103/2000/76892/74719/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2021</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. AL.602/03/05/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Dumai pada tanggal 31 Mei 2022 beserta Lampiran I Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah pada tanggal 31 Mei 2022.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Builder Certificate No. 28/BA/X/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Batam pada tanggal 05 Oktober 2019.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Certificate of Insurance No. SO000479-21 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV tanggal 31 Desember 2021 ; Bunker Convention Blue Card, Blue Card No. BC20210646 Nama : PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021 ; CLC Blue Card, Blue Card No. CLC20220003 Nama : PT. Delimuda Nusantara tanggal 04 Januari 2022 ; MLC Certificate No. MLC20210591 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV berlaku tanggal 08 Januari 2022 s.d 08 Januari 2023 ; MLC Certificate No. MLC420210591 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV berlaku tanggal 08 Januari 2022 s.d 08 Januari 2023 ; Wreck Removal Convention Blue Card No. WRC20210771 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -5456-, Tanggal : 07 November 2019, Nama Kapal : Kapal Oil Barge Bernama Royal Palma XXXIV, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta Selatan.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 7300 diterbitkan di Batam pada tanggal 21 November 2019.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TK. Royal Palma XXXIV.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran dari Sistem Anti Tiritip di Kapal Sesuai Persyaratan / Convention on The Control of Harmful</p>	
--	--	--

Halaman 400 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Anti-Fouling System on Ship, 2001 Nomor A.KOP.19/2.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan (SNPP) Pencegahan Pencemaran Kapal Tangki Minyak GT 150 atau Lebih dan Kapal Selain Tangki Minyak GT 400 atau Lebih (NCVS) Nomor A.KOP-19/17.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kwapal Barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate No: AL.501/48/4/PKL-PM/DK/2019 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2019.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/591/9/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 November 2019 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 05 November 2019.</p> <p>33. 1 (Satu) Lembar Surat Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh PT. Pertamina Trans Kontinental pada tanggal 01 Desember 2020.</p> <p>o) Kapal TB. Royal Palma 35, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 35 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 31 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.AL.520/29/20/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2020.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8279/PPm Nama Kapal : Royal Palma 35 Dimensi Kapal : Panjang 24,34 M, Lebar 8,00 M, Tinggi 3,65 M dikeluarkan di Batam pada tanggal 24 Maret 2020.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum / Minimum Safe Manning Document No. AL.504/88/13/DK/2022 Nama Kapal: Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022 s/d 15 Juni 2023.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/5/20/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety Equipemnt Certificate No: AL.501/5/21/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate No. AL.502/1/25/KSOP.KC-2022 Nama Kapal: Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Izin Station</p>	
--	---	--



	<p>Kapal Laut / Ship Station License No. 1397/L/SDPPI/2020 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 April 2020 s/d 07 April 2025.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/280/3/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 20 April 2020 s/d 17 Februari 2023 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 20 April 2020.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/18/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Rengat pada tanggal 22 Juli 2022 s/d 07 November 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage No. AL.601/8/16/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 s/d 08 Januari 2023 Nama Kapal : Royal Palma 35 Surat Pengesahan No. AL.603/4/16/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma 34 pada tanggal 04 Januari 2022 s/d 08 Januari 2023.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Certificate of Classification No. 21JK0224-CLS Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2021 s/d 25 Februari 2025.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar International Load Line Certificate No. 21JK0224-CLS Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 April 2021 s/d 25 Februari 2025.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 004/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 005/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 008/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. :004/AP/DMI/I/2022 Nama Kapal : Royal Palma 35 di Dumai pada tanggal 11 Januari 2022 s/d 10 Januari 2023.</p> <p>18. 1 (Satu) Eksemplar Surat Persetujuan</p>	
--	--	--



	<p>Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/184434/173227/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022.</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXVI-905/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Tanda Panggil (Call Sign) Kapal No. AL.518/26/19/DK/2020 Nama kapal: Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Nomor Identifikasi Royal Palma 35 No. NV.101/03/1276-II/DV.2020 Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Jakarta pada tanggal : 27 Februari 2020.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No. 5622 Nama Kapal: TB. Royal Palma 35, Nama Pemilik: PT. Delimuda Nusantara. Berkedudukan di : Jakarta Selatan pada tanggal: 27 Februari 2020.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021 ;</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-2 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel BUILDER'S CERTIFICATE NO. BC.002/PPS/02/2020 Nama Kapal: Royal palma 35 diterbitkan di Batam pada tanggal : 08 Februari 2020.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pemasangan Tanda Selar Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Batam. Berita Acara Peletakan Lunas diterbitkan di Batam pada tanggal: 28 Agustus 2019 ; Berita acara Peluncuran Kapal No.L.002/PPS/02/2020 Nama Kapal: Royal Palma 35 terbit di Batam tanggal: 08 Februari 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel NSR EPIRB Informasi Report Nama Kapal : Royal Palma 35 diterbitkan di Batam pada tanggal 28 Februari 2022.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 1413 diterbitkan di Batam pada tanggal 02 Maret 2020.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 13 Juni 2022.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL Kapal Motor : TB.ROYAL PALMA 35.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Daftar Sertifikat Kapal TB. Royal Palma 35.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Sampah MARPOL 73/78 ANNEX V.</p> <p>p) Kapal TK. Royal Palma 36, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma 36 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 16 Agustus 2022.</p>	
--	--	--



	<p>2. 1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma 36.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Laut AL.520/67/6/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 8031/PPm Nama Kapal : Royal Palma 36 Dimensi Kapal : Panjang 77,84 M, Lebar 21,34 M, Tinggi 6,10M dikeluarkan di Batam pada tanggal 16 September 2019.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/5/22/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety equipment Certificate No: AL.501/5/23/KSOP.KC-2022 diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/466/5/DK/2019 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 26 September 2019 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran dari Kapal / Supplement Of National Pollution Prevention Certificate diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 26 september 2019</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/3/19/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma36 diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / Record of National Anti Fouling System Certificate diterbitkan di Rengat pada tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran dari Sistem Anti Teritip di Kapal Sesuai Dengan Persyaratan Convention on The Control of Harmfull Anti-Fouling System on Ship, 2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma 36 No. Regsiter : 2019 PPM No.5402/L.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal Untuk Pencegahan Pencemaran dari Sistem Anti Teritip di Kapal Sesuai Dengan Persyaratan Convention on The Control of Harmfull Anti-Fouling System on Ship, 2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma 36 No : A.KOP 19/2.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/10/6/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022; Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/3/7/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022 ; Surat Pengesahan No. AL.603/2/15/DK/2022 Attestation for Compliance of Insurance or</p>	
--	---	--



	<p>Other Financial Security in Respect of Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks, 2007 Nama Kapal : Royal Palma 36 pada tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>12. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL.601/390/11/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2020.</p> <p>13. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Transmittal No : 007/ADM-TPN/II/2020 tanggal 31 Januari 2020.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 046334</p> <p>15. No. Register : 24016 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>16. 1 (Satu) Lembar fotocopy Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 030313 No. Register : 24016 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>17. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 030735 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 205/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 36 diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>19. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 219/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 36 di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>20. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 205/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : Royal Palma 36 di Dumai pada 07 Agustus 2021.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/172327/162733/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/151452/143014/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/128707/124708/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021.</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/108724/104753/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2021.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/90093/86361/21 diterbitkan di</p>	
--	--	--



	<p>Jakarta pada tanggal 22 Maret 2021.</p> <p>26. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/70936/68079/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2020.</p> <p>27. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/51033/50310/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020.</p> <p>28. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/34200/31964/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2020.</p> <p>29. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/16379/15528/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2020.</p> <p>30. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/68366/66366/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019.</p> <p>31. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/49848/48625/19 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2019.</p> <p>32. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL 208/2000/77076919/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2020.</p> <p>33. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL 208/2000/8296/7502/20 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020.</p> <p>34. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76947/73623/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021.</p> <p>35. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2022.</p> <p>36. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>37. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021</p> <p>38. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -5402-, Tanggal : 18 September 2019, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma 36, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta</p> <p>39. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-20 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>40. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Surat</p>	
--	--	--



	<p>Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 5823 diterbitkan di Batam pada tanggal 21 September 2019.</p> <p>41. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Builder Certificate No.023/BA/VIII/2019 Nomor Bangunan : H-347 diterbitkan di Batam pada tanggal 20 Agustus 2019.</p> <p>42. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Berita Acara Peletakan Lunas Nomor Bangunan : H-347 diterbitkan di Batam pada tanggal 02 Maret 2019.</p> <p>43. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Peluncuran Kapal Baru Nomor : 332/BA/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.</p> <p>44. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 13 November 2020.</p> <p>45. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL: TK. Royal Palma 36.</p> <p>q) Kapal TB. Royal Palma 37, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TB. Royal Palma 37 oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 21 Juni 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut No.AL520/44/13/DK/2020, KAPAL ROYAL PALMA 37, Milik PT.DELIMUDA NUSANTARA, Diterbitkan: Jakarta pada Tanggal 04 Juni 2020.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969), KAPAL ROYAL PALMA 37, Tonase Kotor (GT):197, Diterbitkan: di Batam pada Tanggal 26 Mei 2020.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Dokumen Keselamatan Pengawakan Minumum/Minimum Safe Manning Document, No. AL.527/11/10/KSOP.Mrd/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Marunda pada 10 Juni 2022, Berlaku sampai dengan tanggal : 09 September 2022.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate, No.AL.501/2/23/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Rengat pada Tanggal 24 Maret 2022, Berlaku sampai dengan tanggal : 09 September 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang/Cargo Ship Safety Equipment Certificate, No. AL.501/2/24/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Rengat, 24 Maret 2022, Berlaku sampai dengan tanggal :09 September 2022.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang/Cargo Ship Safety Radio Certificate, No. AL.502/1/8/KSOP.KC-2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Rengat pada tanggal 24 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 09 September 2022.</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Izin Stasiun Radio Kapal Laut / Ship Station License, No. 49/L/SDPPI/2020, Kapal Royal Palma 37, Masa Berlaku dari tanggal : 25 November 2020 s/d 24 November 2025.</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Precention Certificate, No. AL.601/377/20/DK/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Jakarta tanggal</p>	
--	---	--



	<p>03 Juni 2020, Berlaku sampai tanggal 25 Maret 2023.</p> <p>10. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti-Fouling System Certificate, No. AL.601/378/1/DK/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 03 Juni 2020, Berlaku sampai tanggal : 09 September 2022.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar, National Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, No. AL.601/6/17/DK/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 04 Januari 2022, Berlaku sampai tanggal : 08 Januari 2023.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Certificate of Classification, No. 202024, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Tokyo pada tanggal 21 Mei 2020, Berlaku sampai tanggal : 29 Maret 2025.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Internasional, No. 20HO01208-LLC, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Tokyo pada tanggal 21 Mei 2020, Berlaku sampai tanggal 29 Maret 2025.</p> <p>14. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Re-Inspection Certificate, INFLATABLE LIFE RAFT, No. 065/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Dumai tanggal 05 Maret 2022, berlaku sampai tanggal : 04 Maret 2023.</p> <p>15. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Re-Inspection Certificate, INFLATABLE LIFE RAFT, No. 064/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal : 04 Maret 2023.</p> <p>16. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrostatic Release Unit, No. HK701/ILR/0341/09/TKP/2021, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023.</p> <p>17. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Hidrastatic Release Unit, No. HK701/ILR/0341/09/TKP/2021, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumari 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023.</p> <p>18. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate Fire Extinguishers/Fire Extinguishers Installation/Fire Hoses Safety dan Rescue Equipment, No. 070/AP/DMI/III/2022, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal 04 Maret 2023.</p> <p>19. 1 (satu) lembar CV. AIDIN PERKASA, Certificate EEBD, No. 071/AP/DMI/III/2022, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Dumai tanggal 05 Maret 2022, Berlaku sampai tanggal: 04 Maret 2023.</p> <p>20. 1 (satu) Bundel Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, No. AL.103/2000/178355/167811/22, Kapal Royal Palma, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 13 April 2022.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada</p>	
--	--	--



	<p>Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/157927/148947/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022.</p> <p>22.1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/135326/130217/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021.</p> <p>23.1 (Satu) Eksemplar Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/116237/111801/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2021.</p> <p>24.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, No. B XXV-903/AL.58, Kapal Royal Palma, Diterbitkan: Jakarta pada tanggal 22 April 2020.</p> <p>25.1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Royal Palma 37, No. NV.101/03/3138-IV/DV.2020, Kapal Royal Palma, Diterbitkan : Jakarta pada tanggal 22 April 2020.</p> <p>26.1 (satu) lembar Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 37, No. AL.518/50/9/DK/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: Jakarta pada tanggal 23 April 2020.</p> <p>27.1 (satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), No. BXXV-903/AL58, PT. Delimuda Nusantara, Diterbitkan: Jakarta 18 Maret 2002.</p> <p>28.1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance, No. AL.601/18/19/DK/2021, PT. Delimuda Nusantara, Diterbitkan: Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021, Berlaku sampai 14 Januari 2026.</p> <p>29.1 (satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal, No. 5701, Nama Kapal : Tug Boat bernama Royal Palma 37, PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2020.</p> <p>30.1 (satu) Bundel Certificate of Insurance, No. SO000479-1, Pemilik PT. Delimuda Nusantara, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan: 31 Desember 2021.</p> <p>31.1 (satu) Bundel PT. PALMA PROGRESS SHIPYARD, Builder's Certificate, No. BC.005/PPS/03/2020, Kapal Royal Palma 37, Diluncurkan: Batam, 10 Maret 2020.</p> <p>32.1 (satu) Bundel PT. PALMA PROGRESS SHIPYARD, Berita Acara Peluncuran Kapal, No. L.005/PPS/03/2020, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Batam, 10 Maret 2020.</p> <p>33.1 (satu) Bundel PT. PALMA PROGRESS SHIPYARD, Berita Acara Peletakan Lunas, No. KL.012/PPS/09/2019, Jenis Kapal : Twin Screw Tug Boat, Diterbitkan : Batam, 19 September 2019.</p> <p>34.1 (satu) Bundel Magnetic Compass Deviation Table 2 (On Monkey I.), Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Batam, 26 Maret 2020.</p> <p>35.1 (satu) Bundel Magnetic Compass Deviation Table 1 (On Bridge), Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : Batam, 26 Maret 2020.</p> <p>36.1 (satu) Bundel PT. FOCUS TELESINDO</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>UTAMA, NSR EPIRB Information Report, Vessel Royal Palma 37, diterbitkan: 22 April 2020.</p> <p>37. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen, Kapal Royal Palma 37, Diterbitkan : 25 April 2020.</p> <p>38. 1 (satu) Bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), No. 2483, Pengirim/Penerima : PT. Palma Progress Shipyard, PPJK : PT. Cakrawala Nusa Nabilla, Merk Kemasan : Tug Boat "Royal Palma 37" 26 M Tug Boat 2 X 829 HP, Diterbitkan : Batam, 24 April 2020.</p> <p>39. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, dibuat di Rengat, 24 Maret 2022.</p> <p>40. 1 (satu) Bundel Buku SIJIL, Kapal Motor TB. Royal Palma 37.</p> <p>41. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan / Record of Inspection Persyaratan Pengawakan Minimum Requirements for Safe Manning, Nama Kapal TB. Royal Palma 37.</p> <p>r) Kapal Royal Palma XXXVIII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Lembar Dokumentasi Kapal TK. Royal Palma XXXVIII.1 (satu) bundel surat laut Nomor : AL.520/74/14/DK/2019 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 18 Oktober 2019.1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 8039/PPm Kapal Royal Palma XXXVIII dikeluarkan di Batam tanggal 30 September 2019.1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Contruction certificate Nomor: AL.501/17/15/KSOP.MRd/2022 milik Kapal Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Marunda tanggal 22 April 2022.1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor : AL.501/17/16/KSOP.Mrd/2022 Kapal Royal Palma XXXVIII PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Marunda tanggal 22 April 2022.1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/510/16/DK/2019 milik Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019.1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertitip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/2/21/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.602/10/7/DK/2022 milik Royal Palma XXXVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022.1 (satu) bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan No. AL.601/390/8/DK/2020 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta	
--	--	--

Halaman 410 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>9 Juni 2020.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung, Certificate Of Classification For Hull No. 045940 No. Register : 23932 Nama Kapal : Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.</p> <p>11. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 030435 Nama Kapal : Royal Palma XXXIV diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.</p> <p>12. 1 (satu) Bundel Sertifikat Klasifikasi Mesin, Certificate Of Classification For Machinery No. 030045 No. Register 23932 Nama Kapal : Royal Palma XXXVI diterbitkan di Jakarta tanggal 22 November 2019.</p> <p>13. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatble Life Raft Nomor : 206/AP/DMI/VIII/2022 TK Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>14. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 220/AP/DMI/VIII/2021 TK Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2022.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 206/AP/DMI/VIII/2021 Nama Kapal : TK. Royal Palma XXXIV di Dumai pada tanggal 07 Agustus 2021.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/199783/187283/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor : BXXV-903/AL.58 Nama Kapal : Royal Palma XXXVIII tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>18. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>19. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta Nama Kapal : Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 5426 tanggal 04 Oktober 2019.</p> <p>20. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance nomor : SO000479-19 Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 31 Desember 2021, berlaku dari tanggal 8 Januari 2022 s/d 8 Januari 2023.</p> <p>21. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor : 025/BA/VIII/2019 Kapal Royal Palma XXXVIII Tanggal 03 Maret 2019</p> <p>22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 6577 tanggal 18 Oktober 2019 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam tanggal 18 Oktober 2019.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 05 November 2019.</p> <p>24. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda</p>	
--	--	--

Halaman 411 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan. 25. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma XXXVIII milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 29 Juli 2022.	
XVI.	a) 1 (satu) bundel map merah TK.Royal Palma 2 yang berisikan : 1. Surat lembar surat ukur International (1969) International tonnage certificate (19690 No.1720/B.- tanggal 08 Juni 2000; 2. Surat lembar Surat Laut No. PK.205/1260/SL-PM/DK-14 tanggal 5 Maret 2014; 3. Surat Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. AL.501/15/1/KSOP.STT-2022 tanggal 26 Juli 2022; 4. Surat Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. AL.501/15/2/KSOP.STT-2022 tanggal 26 Juli 2022; 5. Surat Sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal No. AL.601/373/17/DK/2021 tanggal 02 Juni 2021; 6. Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut AL.603/29/8/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022; 7. Surat Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/17/4/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022; 8. Surat Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak No. AL.602/17/3/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022; 9. Surat Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/610//5/DK/2020 tanggal 22 September 2020; 10. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Lambung Royal Palma - 2 No. Register : 6810 tanggal 15 Oktober 2020; 11. Surat Sertifikat garis muat internasional No. :032913 tanggal 15 Oktober 2020; 12. Surat Re-Inspection Certificate TK Royal Palma 2 tanggal 27 April 2022; 13. Surat Certificate Of Inspection Certificate No : 088 /ER-JKT/ FE/ IV/ 2022 Date of Inspection 27 April 2022; 14. Surat Re Inspection Certificate No : 146/ER-JKT/HRU/IV/2022 Date of Inspection 27 April 2022; 15. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Delimuda Nusantara Nama Kapal : Royal Palma 2 eks Royal Palma tanggal 22 April 2016 ; 16. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan ANgkutan Laut (SIUPAL) Nomor :BXXV-903/AL58 tanggal 18 Maret 2002; 17. Fotocopy Surat Grosse Akte pendaftaran kapal Nomor 2651 tanggal 7 Januari 2002 KM Royal Palma XI Eks Shunei Maru No.2 ; 18. Fotocopy Surat certificate of Insurance No. S21082 Royal Palma 2; 19. Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang WNI hari Rabu tanggal 05 Mei 2021. b) 1 (satu) bundel map merah TB. Royal Palma 9 yang berisikan: 1. Surat Pas Besar Royal Palma 9 eks	Dokumen Kapal Palembang

Halaman 412 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Delimuda II tanggal 19 Maret 2014;</p> <p>2. Surat Ukur No. 1700/Ba.- Royal Palma 9 Delimuda II tanggal 17 April 2000;</p> <p>3. Surat Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. AL.501/5/24/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>4. Surat Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. AL.501/5/25/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>5. Surat Sertifikat keselamatan radio kapal barang No. AL.502/2/1/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>6. Surat Kementerian Kominfo Izin Stasiun Radio Kapal Laut TB Royal Palma 9;</p> <p>7. Surat Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal Nomor AL.601/3/21/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022</p> <p>8. Surat Sertifikat Nasional sistem anti teritip AL.601/3/20/KSOP.KC-2022 tanggal 27 Juli 2022;</p> <p>9. Surat Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.601/40/8/DK/2022 tanggal 06 Januari 2022;</p> <p>10. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung Palma - 9 No. Register : 06240 tanggal 20 Juni 2022;</p> <p>11. Surat Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Mesin Palma - 9 No. Register : 06240 tanggal 20 Juni 2022;</p> <p>12. Surat Re inspection certificate No. 157/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>13. Surat Re inspection certificate No. 158/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>14. Surat certificate fire extinguisher fire extinguishers Installation fire hoses safety anfd rescue equipment No. 175/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>15. Surat Certificate Hidrostatic Release unit No. 158/AP/DMI/V/2022 tanggal 19 Mei 2022;</p> <p>16. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Spesifikasi kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut PT. Delimuda Nusantara Nama Kapal : Royal Palma 9 eks Deli muda II tanggal 22 April 2016</p> <p>17. Surat Kementerian Perhubungan Laut perihal keterangan tanda panggilan (call sign) Kapal Royal Palma 9 Eks deli Muda II tanggal 31 Agustus 2017;</p> <p>18. Surat Kementerian Perhubungan Laut perihal nomor identifikasi TB Royal Palma 9 28 Januari 2016;</p> <p>19. Surat Certificate of Insurance Nomor SO000479-14 EF Marine</p> <p>20. Fotocopy Surat Grosse Akte pendaftaran kapal Nomor 921 tanggal 4 Februari 1997 Kapal Deli Muda II ;</p> <p>21. Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan seorang WNI hari Kamis tanggal 02 September 2021 ;</p> <p>22. Buku Sijil TB Royal Palma 9 milik PT. Delimuda Nusantara;</p> <p>23. Buku catatan minyak bagian I Operasi Ruang Permesinan TN Royal Palma 9 YD 4513;</p>	
XVII.	<p>a) Kapal TB. Royal Palma XVIII, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (Satu) Lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal TK. Royal Palma</p>	<p>Dokumen Kapal Rengat II</p>



	<p>XVIII oleh KSOP Kelas IV Kuala Cinaku pada tanggal 28 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (Satu) Bundel Surat Laut NO.PK.205/1267/SL-PM/DK-14 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2014.</p> <p>3. 1 (Satu) Bundel Surat Ukur Internasional (1969) / International Tonnage Certificate (1969) No. : 2089/PPm Nama Kapal : Royal Palma XVIII Dimensi Kapal : Panjang 74,88 M, Lebar 22,00 M, Tinggi 5,30 M Tonase Kotor 2278, Tonase Bersih 1296 dikeluarkan di Batam pada tanggal 15 Juni 2009.</p> <p>4. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate No: AL.501/14/13/KSOP.DMI-2022 diterbitkan di Dumai pada tanggal 25 Mei 2022.</p> <p>5. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Keselamatan perlengkapan Kapal Barang / Cargo Ship Safety equipment Certificate No: AL.501/14/14/KSOP.DMI-2022 diterbitkan di Dumai pada tanggal 25 Mei 2022.</p> <p>6. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal / National Pollution Prevention Certificate No. AL.601/822/10/DK/2021 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 2021.</p> <p>7. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip / National Anti Fouling System Certificate No. AL.601/2/22/KSOP.KC-2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Rengat pada tanggal 23 Mei 2022</p> <p>8. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak / Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage No. AL.602/8/9/DK/2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022;</p> <p>9. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Manajemen Keselamatan / Safety Management Certificate No. AL.601/755/7/DK/2020 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2020.</p> <p>10. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Sertifikat Klasifikasi Lambung / Certificate of Classification for Hull No. 046507, No. Register : 12351 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020.</p> <p>11. 1 (Satu) Lembar fotocopy Sertifikat Klasifikasi Mesin / Certificate of Classification for Machinery No. 03042 No. Register : 12351 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020.</p> <p>12. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Garis Muat Internasional / International Load Line Certificate No. 030876 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020.</p> <p>13. 1 (Satu) Lembar Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft No. : 209/AP/DMI/VIII/2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2022.</p> <p>14. 1 (Satu) Lembar Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Hoses Safety and Rescue Equipment No. : 361/AP/DMI/XII/2021</p>	
--	---	--



	<p>Nama Kapal : Royal Palma XVIII pada tanggal 10 Desember 2021.</p> <p>15. 1 (Satu) Lembar Certificate Hidrostatic Release Unit No. : 209/AP/DMI/VIII/2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII di Dumai pada 10 Agustus 2022.</p> <p>16. 1 (Satu) Bundel Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No. AL 103/2000/194576/182129/22 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022.</p> <p>17. 1 (Satu) Bundel Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No. AL 103/2000/76933/74718/21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2021.</p> <p>18. 1 (Satu) Lembar Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara No. B.XXV-903/AL.58 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016.</p> <p>19. 1 (Satu) Bundel Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah / International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk No. AL.602/04/08/KSOP.DMI-2022 Nama Kapal : Royal Palma XVIII diterbitkan di Dumai pada tanggal 19 Agustus 2022.</p> <p>20. 1 (Satu) Bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No: BXXV-903/AL.58 Nama Perusahaan : PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan / Document of Compliance No. AL.601/18/19/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>22. 1 (Satu) Bundel Certificate of Insurance No. SO000479-29 pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>23. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Grosse Akta No : -1053-, Tanggal : 07 September 2009, Nama Kapal : Kapal Tongkang Bernama Royal Palma XVIII, Nama Pemilik : PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di Jakarta</p> <p>24. 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang warga Negara Indonesia dibuat di Rengat pada tanggal 29 Juli 2022.</p> <p>25. 1 (Satu) Bundel Buku SIJIL: TK. Royal Palma XVIII.</p> <p>b) Kapal TB. Royal Palma 5, dokumen yang disita sebagai berikut:</p> <p>1. 1 (satu) lembar Surat Dalam Rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Daftar Pemeriksaan Administratif Kapal Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 28 Agustus 2022.</p> <p>2. 1 (satu) bundel Surat Laut Nomor: NO.AL.520/54/2/DK/2019 Kapal Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Jakarta 9 Agustus 2019.</p> <p>3. 1 (satu) bundel Surat Ukur Internasional (1969) International Tonnage Certificate (1969) No : 7878/PPm Kapal Royal Palma 31 dikeluarkan di Batam tanggal 18 Juni 2019.</p> <p>4. 1 (satu) lembar dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum, Minimum Safe Manning Document Nomor : AL.504/13/9/DK/2022 Kapal Royal Palma 31 Milik PT. Delimuda Nusantara.</p>	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, Cargo Ship Safety Conctruction certificate Nomor: AL.501/3/20/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 31 diterbitkan di Rengat tanggal 27 April 2022.</p> <p>6. 1 (satu) bundel sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: AL.501/3/21/KSOP.KC-2022 milik Kapal Royal Palma 31 PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Rengat tanggal 27 April 2022.</p> <p>7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Cargo Ship Safety Radio Certificate nomor : AL.502/1/14/KSOP.KC-2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Rengat tanggal 27 April 2022.</p> <p>8. 1 (satu) bundel sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari kapal National Polution Prevention Certificate Nomor : AL.601/401/13/DK/2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 Juni 2022.</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip National Anti Fouling System Certificate Nomor: AL.601/391/20/DK/2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022.</p> <p>10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage Nomor : AL.601/24/1/DK/2022 milik Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2022.</p> <p>11. 1 (satu) bundel Certificate of Classification Nomor : 19JK0613-CLS Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta 01 Oktober 2019.</p> <p>12. 1 (satu) bundel International Load Line Certificate Nomor : 19JK0613-LLC Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2019.</p> <p>13. 1 (satu) bundel sertifikat CV. AIDIN PERKASA Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft Nomor : 088/AP/DMI/III/2022 TB Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>14. 1 (satu) bundel CV. AIDIN PERKASA Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers intallation fire Hoses Safety And Rescue Equipment Nomor : 094/AP/DMI/III/2022 TB Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 23 Maret 2022.</p> <p>15. 1 (satu) bundel Certificate Hidrostatic Release Unit Nomor : 087/AP/DMI/III/2022 Royal Palma 31 Milik PT. Delimuda Nusantara tanggal 24 Maret 2022.</p> <p>16. 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.103/2000/205477/191809/22 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri tanggal 03 Agustus 2022.</p> <p>17. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : NV.101/03/1681-VIII/DV.2019 Perihal</p>	
--	---	--

Halaman 416 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>Nomor Identifikasi Royal Palma 31 Tanggal 7 Agustus 2019</p> <p>18. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : B XXV-903/AL/58 Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara Kapal Royal Palma 31 Tanggal 18 Maret 2002</p> <p>19. 1 (satu) bundel Surat Dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.518/35/1/DK/2019 Perihal Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Royal Palma 31 diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Agustus 2019.</p> <p>20. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXV-903/AL58 milik Delimuda Nusantara dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002.</p> <p>21. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta TB. Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara Nomor : 5353 tanggal 08 Agustus 2019.</p> <p>22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 5267 tanggal 28 Agustus 2019 Milik PT. Delimuda Nusantara diterbitkan di Batam tanggal 05 Mei 2022.</p> <p>23. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Nomor : SO000479-4 Royal Palma 31 Milik PT. Delimuda Nusantara Tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>24. 1 (satu) bundel Berita Acara Peletakan Lunas Nomor : No.KL.028/PPS/08/2013 diterbitkan di Batam Tanggal 30 Agustus 2013.</p> <p>25. 1 (satu) bundel Builder Certificate Nomor : BC.005/PPS/03/2019 diterbitkan di Batam Tanggal 25 Maret 2019.</p> <p>26. 1 (satu) bundel Perjanjian Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. DELIMUDA NUSANTARA dengan seorang Warga Negara Indonesia pada 02 Februari 2021.</p> <p>27. 1 (satu) bundel BUKU SIJIL Kapal TB. Royal Palma 31 milik PT. Delimuda Nusantara berkedudukan di Jakarta.</p> <p>28. 1 (satu) bundel Buku Catatan Minyak</p>	
XVIII.	<p>a) 1 (satu) buah folder dokumen warna biru yang didalamnya terdapat dokumen kapal Royal Palma-IV yang terdiri dari:</p> <p>1. 1 (satu) set Surat Laut No. PK.205/1263/SL-PM/DK-14 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 05 Maret 2014.</p> <p>2. 1 (satu) set Surat Ukur International (1969) Nomor : 402/PPj yang diterbitkan di Dumai tanggal 28 April 2000.</p> <p>3. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No : AL.501/17/23/KSOP.DMI-2022 yang diterbitkan di Dumai tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>4. 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No : AL.501/17/24/KSOP.DMI-2022 yang diterbitkan di Dumai tanggal 07 Juli 2022 beserta Lampiran Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Peraturan Persyaratan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 07 Juli 2022.</p> <p>5. 1 (satu) set Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal No. AL.601/483/18/DK/2021 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2021 beserta lampiran Suplemen Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang</p>	Dokumen Kapal Batam



	<p>Berlayar Di Dalam Negeri (NCVS) tanggal 23 Juli 2021.</p> <p>6. 1 (satu) set Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/498/9/DK/2020 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Juli 2020 beserta lampiran Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip tanggal 27 Juli 2020.</p> <p>7. 1 (satu) lembar Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar No. AL.602/13/3/DK/2022 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Januari 2022.</p> <p>8. 1 (satu) lembar Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak No. AL.602/13/2/DK/2022 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Januari 2022.</p> <p>9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.603/20/9/DK/2022 tanggal 11 Januari 2022.</p> <p>10. 1 (satu) set Sertifikat Garis Muat Internasional No.032847 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 September 2020 beserta lampiran Pengukuhan Untuk Survey Tahunan.</p> <p>11. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 049107 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 29 September 2020.</p> <p>12. 1 (satu) set Sertifikat Pemeriksaan Ulang No. 152/ILR/MPJ/V/22 tanggal 17 Mei 2022 beserta lampiran Inflatable Raft Test And Survey Report.</p> <p>13. 1 (satu) lembar Sertifikat No : 115/MPJ/HRU/V/22 dengan masa berlaku tanggal 16 Mei 2023.</p> <p>14. 1 (satu) lembar Sertifikat Pemeriksaan Ulang No : 090/PMK/MPJ/V/22 tanggal 17 Mei 2022.</p> <p>15. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/194189/182135/22 tanggal 20 Juni 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/174515/164219/22 tanggal 30 Maret 2022 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/152697/144384/21 tanggal 26 Desember 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>18. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/131163/125354/21 tanggal 28 September 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>19. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/110985/106428/21 tanggal 27 Juni 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>20. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/90870/87787/21 tanggal 28 Maret 2021 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>21. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/72971/69411/20 tanggal 27 Desember 2020 perihal Persetujuan</p>	
--	--	--



	<p>Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/52891/51515/20 tanggal 29 September 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>23. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/17094/16548/20 tanggal 31 Maret 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>24. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/70157/67878/20 tanggal 01 Januari 2020 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>25. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/51267/49922/19 tanggal 30 September 2019 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>26. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.103/2000/33867/32985/19 tanggal 30 Juni 2019 perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>27. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.208/2000/12434/11400/21 tanggal 04 Juli 2021 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri.</p> <p>28. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AL.208/2000/18515/16841/22 tanggal 01 Maret 2022 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri.</p> <p>29. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Spesifikasi Kapal yang Dimiliki Oleh Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara No: B.XXV-1070/AL.58 tanggal 17 Desember 1998.</p> <p>30. 1 (satu) set fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor : BXXV-903/AL58 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2002 beserta 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL / SIOPSUS Nomor : AL.010/548/DA-2018 tanggal 14 Mei 2018, 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL / SIOPSUS Nomor : AL.010/415/DA-2020 tanggal 14 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL / SIOPSUS Nomor : AL.010/412/DA-2022 tanggal 21 Mei 2022.</p> <p>31. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan No. AL.601/18/19/DK/2021 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2021.</p> <p>32. 1 (satu) lembar dokumen Bunker Convention Blue Card, Blue Card number BC20210662 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>33. 1 (satu) lembar dokumen CLC Blue Card, Blue Card number CLC20220019 yang diterbitkan tanggal 04 Januari 2022.</p> <p>34. 1 (satu) lembar dokumen MLC Certificate, MLC Certificate number MLC420210607 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021.</p>	
--	--	--



	<p>35. 1 (satu) lembar dokumen MLC Certificate, MLC Certificate number MLC20210607 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>36. 1 (satu) lembar dokumen Wreck Removal Convention Blue Card, Blue Card Number WRC20210787 tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>37. 1 (satu) set dokumen Certificate Of Insurance, Reference number SO000479-37 tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>38. 1 (satu) set fotocopy Invoice, Ref No. 1185210 tanggal 3 Juli 2014 beserta Schedule Ikhtisar Pertanggungan No. Polis 031400001428 tanggal 23 Juni 2014.</p> <p>39. 1 (satu) set fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1213 tanggal 15 Mei 2000 atas nama kapal Tongkang "Royal Palma – IV", nama Pemilik PT. Delimuda Nusantara yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Dumai.</p> <p>40. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pemeriksaan Kondisi Tehnis Kapal Untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran Sesuai Persyaratan Dalam Konvensi Marpol '73/'78 Annex-II atas kapal Royal Palma – IV, No. Register : 2000 PPj No. 1213/L tanggal 11-01-2016.</p> <p>41. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Tongkang Kapal Royal Palma – IV tanggal 06 Maret 2018.</p> <p>42. 1 (satu) set fotocopy Rancangan Vessel Traffic Services (VTS) Petunjuk Penggunaan lalu Lintas Layanan Kapal.</p> <p>43. 1 (satu) set fotocopy Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Laporan Pemeriksaan Tongkang) yang diterbitkan di Batam tanggal 16 Januari 2014.</p> <p>44. 1 (satu) set Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Laporan Pemeriksaan Tongkang) yang diterbitkan di Batam tanggal 11 Januari 2016.</p> <p>45. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/18/IV/KSOP.KC-2022 tanggal 19 April 2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Fiqi Ardiyansyah.</p> <p>46. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/10/V/KSOP.KC-2022 tanggal 19 Mei 2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Fajar Priadi Putra.</p> <p>47. 2 (dua) set Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/09/V/KSOP.KC-2022 tanggal 19 Mei 2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Wan Juni Rianto.</p> <p>48. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/12/VII/KSOP.KC-2021 tanggal 21 Juli 2021 yaitu antara pihak 1</p>	
--	---	--



	<p>Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Nopi Indriyanto.</p> <p>49. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT. Delimuda Nusantara dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/07/I/KSOP.KC-2021 tanggal 09 Januari 2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Yuhendri.</p> <p>50. 1 (satu) set Buku Sijil berwarna biru atas nama kapal TK. Royal Palma – IV.</p> <p>51. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Purwanto selaku Pengirim (PT. Internusa Bahtera) dan Suheriman (TB Royal Palma Batam) selaku Penerima.</p> <p>b) 1 (satu) buah folder dokumen warna biru yang didalamnya terdapat dokumen kapal Royal Palma 21 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Surat Pas Besar Kapal Royal Palma 21 milik PT. Delimuda Nusantara, diterbitkan di Tanjung Priok 11 Desember 2013;1 (satu) bundel Surat Ukur International (1969) <i>International Tonnage Certificate (1969)</i> No.: 4450/PPm. Kapal Royal Palma 21 dikeluarkan di Batam tanggal 7 September 2012;1 (satu) bundel Surat Ukur International (1969) <i>Sementara International Tonnage Certificate (1969)</i> No. 4450/PPm. Kapal Royal Palma 21 berlaku sampai 06 Nopember 2012 dikeluarkan di Batam tanggal 7 September 2012;1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum <i>Minimum Safe Manning Document</i> No: AL.501/4/8/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21, tempat penerbitan dokumen Rengat, tanggal 28 Mei 2022, masa berlaku dokumen 27 Agustus 2022;1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang <i>Cargo Ship Safety Construction Certificate</i> No.: AL.501/4/6/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei 2022;1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang <i>Cargo Ship Safety Equipment Certificate</i> No. AL.501/4/7/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei 2022 beserta Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Konvensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 Sebagaimana Diubah Dengan Protokol 1988 Dari Padanya <i>Record Of Equipment For Compliance With The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974 As Modified By The Protocol Of 1988 Relating Thereto</i> No. AL.501/4/7/KSOP.KC-2022 Kapal Royal Palma 21;1 (satu) bundel Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang <i>Cargo Ship Safety Radio Certificate</i> No.: AL.502/1/15/KSOP.KC-2021, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Rengat pada tanggal 28 Mei 2022 beserta Catatan Perlengkapan Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik	
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Indonesia No. AL.502/1/15/KSOP.KC-2021, Kapal Royal Palma 21;</p> <p>8. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 100 s/d 850 M³ Nama Kapal Royal Palma 21 Nomor Register 2012 PPM No.2575/L</p> <p>9. 1 (satu) lembar Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. Pemegang Izin: 00109413 tanggal berlaku 05 April 2022 s/d 04 April 2027 Nama Stasiun Royal Palma 21;</p> <p>10. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal <i>National Pollution Prevention Certificate</i> No.AL.601/09/09/KSOP.DMI-2022, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Dumai, pada tanggal 01 Juli 2022 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegah Pencemaran Dari Kapal <i>Supplement Of National Pollution Prevention Certificate</i> AL.601/D9/09/KSOP.DMI-2022, Kapal Royal Palma 21, Dikeluarkan di Dumai tanggal 01 Juli 2022;</p> <p>11. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal <i>National Pollution Prevention Certificate</i> No. AL.601/822/9/DK/2021, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021 beserta Suplemen Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Yang Berlayar Di Dalam Negeri (NCVS) Lampiran Sertifikat Nomor: AL.601/822/9/DK/2021 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip <i>National Anti Fouling System Certificate</i> No. AL.601/12/16/DK/2021 Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2021 beserta Catatan Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2021;</p> <p>13. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar <i>National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage</i> No. AL.601/14/5/DK/2021 Kapal Royal Palma 21 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2022;</p> <p>14. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Date: January 6th 2022 Our ref.: AL.603/8/20/DK/2022;</p> <p>15. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal <i>National Load Line Certificate</i> No.: 012160, Kapal Royal Palma 21, diterbitkan di Jakarta tanggal 23 Maret 2018;</p> <p>16. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin <i>Certificate Of Classification For Machinery</i> No. Register: 16638 Royal Palma 21 dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Maret 2018;</p> <p>17. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung <i>Certificate Of Classification For Hull</i> No. Register: 16638 Royal Palma 21 dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Maret 2018;</p> <p>18. 1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft</i> No.: 183/AP/DMI/VII/2022 Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Tanggal 06 Juli 2022 Pemilik & Alamat PT. Delimuda Nusantara-Jakarta beserta <i>Inflatable Liferaft Survey Report Certificate</i> Nomor:</p>	
--	--	--

Halaman 422 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	183/AP/DMI/VII/2022 Survey Date 06 Juli 2022;	
19.	1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Cert No.: 183/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;	
20.	1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Life Raft</i> No.: 184/AP/DMI/VII/2022 Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Tanggal 06 Juli 2022 Pemilik & Alamat PT. Delimuda Nusantara-Jakarta beserta <i>Inflatable Liferaft Survey Report</i> Certificate Nomor: 184/AP/DMI/VII/2022 Survey Date 06 Juli 2022;	
21.	1 (satu) lembar Certificate Hidrostatic Release Unit Nama Kapal TB. Royal Palma - 21 Cert No.: 184/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;	
22.	1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft</i> Nama Kapal: TB. Royal Palma - 21 tanggal 09 Agustus 2021, Pemilik PT. Delimuda Nusantara - Jakarta, No. Sertifikat: ER.ILR-125 beserta <i>Survey And Test Report</i> .	
23.	1 (satu) bundel <i>Re-Inspection Certificate Inflatable Liferaft</i> Nama Kapal: TB. Royal Palma - 21 tanggal 09 Agustus 2021, Pemilik PT. Delimuda Nusantara - Jakarta, No. Sertifikat: ER.ILR-126 beserta <i>Survey And Test Report</i> .	
24.	1 (satu) lembar <i>Certificate Of Inspection Fire Extinguisher</i> Certificate No: 097/ER-JKT/FE/VIII/2021 Name of Vessel: TB. Royal Palma - 21 Owner: PT. Delimuda Nusantara - Jakarta tanggal 09-08-2022;	
25.	1 (satu) lembar <i>Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Installation Fire Koses Safety And Rescue Equipment</i> No: 214/AP/DMI/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 Name of Ship: TB. Royal Palma - 21 Owner: PT. Delimuda Nusantara Address: Jakarta-Indonesia;	
26.	1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/184040/173126/22 tanggal 11 Mei 2022 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;	
27.	1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/164216/155235/22 tanggal 16 Februari 2022 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;	
28.	1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/141319/134030/21 tanggal 08 November 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;	
29.	1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/120324/115493/21 tanggal 13 Agustus 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;	
30.	1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/101347/97452/21 tanggal 15 Mei 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak	

Halaman 423 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>31. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/81809/78639/21 tanggal 11 Februari 2021 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>32. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/63422/61479/20 tanggal 18 November 2020 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>33. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/43943/42578/20 tanggal 14 Agustus 2020 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>34. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/25190/24473/20 tanggal 12 Mei 2020 perihal: Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri;</p> <p>35. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/76924/73194/21 tanggal 16 Januari 2021 perihal: Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah;</p> <p>36. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.103/2000/77093/73624/21 tanggal 18 Januari 2021 perihal: Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah;</p> <p>37. 1 (satu) lembar Lampiran: Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Nomor: B.XXV-903/AL.58, Tanggal: 18 Maret 2002, Spesifikasi Kapal Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Angkutan Laut PT. Delimuda Nusantara, Nama Kapal: Royal Palma 21;</p> <p>38. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PK.203/35/11/DK-12 tanggal 19 November 2012 perihal: Tanda Panggilan (Call Sign) TB. ROYAL PALMA 21;</p> <p>39. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: NV.101/03/0226-IV/DV.2017 tanggal 4 April 2017 perihal: Nomor Identifikasi TB. ROYAL PALMA 21;</p> <p>40. 1 (satu) bundel Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: BXXXV-903/AL58, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2002 beserta Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS Nomor: AL.010/412/DA-2002, tanggal 21 Mei 2022;</p> <p>41. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Document Of Compliance No.AL.601/18/19/DK/2021, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021;</p> <p>42. 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance, Reference number SO000479-9, Date Issued 31 Dec 2021, Assured PT. Delimuda Nusantara, Name Royal Palma 21;</p> <p>43. 1 (satu) bundel fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 2575, Tanggal:</p>	
--	---	--

Halaman 424 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>25 Oktober 2012, Nama Kapal: Kapal Motor Tunda Royal Palma 21, Nama Pemilik: PT. Delimuda Nusantara, Berkedudukan di: Jakarta Pusat;</p> <p>44. 1 (satu) lembar fotocopy Builder Certificate, Name of Vessel: Royal Palma 21, July 26th 2012;</p> <p>45. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Peletakan Lunas, Nama Kapal: Royal Palma 21, Batam 29 November 2011;</p> <p>46. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/04/XII/KSOP.KC-2021 tanggal 04/12/2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Endriadi;</p> <p>47. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/12/III/KSOP.KC-2022 tanggal 14/03/2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Rahmat Hidayat;</p> <p>48. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia PK.301/30/I/KSOP.KC-2021 tanggal 22/01/2021 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Marlis;</p> <p>49. 2 (dua) ragkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/17/VI/KSOP.KC-2022 tanggal 16/06/2022 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Fran Basten Sirait;</p> <p>50. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/14/VII/KSOP.RGT-2019 tanggal 19/07/2019 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Dedy Rante Pasang;</p> <p>51. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/25/IX/KSOP.RGT-2019 tanggal 16/09/2019 yaitu antara pihak 1 Petrus (Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Wahyu Lazuardi;</p> <p>52. 2 (dua) rangkap Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, PK.301/35/III/KSOP.KC-2020 tanggal 23/03/2020 yaitu antara pihak 1 Petrus</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(Staf Operasional) yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Pelayaran PT. Delimuda Nusantara) dengan pihak 2 Suherman;</p> <p>53. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Transpalm Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari Senin tanggal 09 Mei 2022, NO.PK 301/2/5/5/KSOP.Mrd-2022;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Transpalm Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari Senin tanggal 09 Mei 2022 NO.PK 301/2/7/5/KSOP.Mrd-2022;</p> <p>55. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. Transpalm Nusantara Dengan Seorang Warga Negara Indonesia, hari Senin tanggal 09 Mei 2022 NO.PK 301/2/8/5/KSOP.Mrd-2022;</p> <p>56. 1 (satu) bundel Buku Sijil, Kapal Motor: TB. Royal Palma 21 Milik: PT. DN Berkedudukan: Rengat;</p> <p>57. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Dan Perlengkapan Kapal Barang, Nama Kapal : Royal Palma 21, Pemilik Kapal: PT. Delimuda Nusantara, Daerah Pelayaran: NCV tanggal 06-05-2014;</p> <p>58. 1 (satu) lembar check list ABK TB. Royal Palma 21;</p> <p>59. 1 (satu) lembar check list ABK TB. Royal Palma XVIII;</p> <p>60. 1 (satu) lembar list dokumen TB. Royal Palma 21 dan list dokumen TV. Royal Palma XVIII;</p> <p>61. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 Agustus 2022, pengirim PT. Internusa Bahtera.</p>	
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA		
E. Barang Bukti Dokumen Pajak Yaitu:		
XIX.	<p>1. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2012 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-00089/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2015;</p> <p>2. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Panca Agro Lestari NPWP Nomor : 024913303216000 Periode Januari 2012 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-002/WPJ.02/KP/0405/2017;</p> <p>3. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Seberida Subur NPWP Nomor : 018527390213000 Periode Januari 2012 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-00033/WPJ.02/KP.0605/RIK.SIS/2017;</p> <p>4. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2013 s.d Desember 2013 dengan Nomor LHP : LAP-020/WPJ.02/KP.1005/2015;</p> <p>5. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2013 s.d Desember 2013 dengan Nomor LHP : LAP-126/WPJ.02/KP.10/2018;</p> <p>6. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2013 s.d Desember 2012 dengan Nomor LHP : LAP-240/WPJ.02/KP.10/2018;</p> <p>7. 1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor :</p>	<p>Disita dari Dwi Martanto</p>

Halaman 426 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010045514218000 Periode Januari 2014 s.d Desember 2014 dengan Nomor LHP : LAP-226/WPJ.02/KP.10/2019;	
8.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2014 s.d Desember 2014 dengan Nomor LHP : LAP-270/WPJ.02/KP.10/2019;	
9.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2014 s.d Desember 2014 dengan Nomor LHP : LAP-202/WPJ.02/KP.10/2019;	
10.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-119/WPJ.02/KP.10/2017;	
11.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-180/WPJ.02/KP.1005/2017;	
12.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-6/WPJ.02/BD.04/2020;	
13.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2015 s.d Desember 2015 dengan Nomor LHP : LAP-00049/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2020;	
14.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Banyu Bening Utama NPWP Nomor : 010045514218000 Periode Januari 2016 s.d Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP-00012/WPJ.02//BD.04/2020;	
15.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2016 s.d Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP – 111/WPJ.02/KP.10/2018;	
16.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Seberida Subur NPWP Nomor : 018527390213000 Periode Januari 2016 s.d Desember 2016 dengan Nomor LHP : LAP – 00013/WPJ.02/BD.04/2020;	
17.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2017 s.d Desember 2017 dengan Nomor LHP : LAP – 098/WPJ.02/KP.10/2019;	
18.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2018 s.d Desember 2018 dengan Nomor LHP : LAP – 00091/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2020;	
19.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Kencana Amal Tani NPWP Nomor : 010622033218000 Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 dengan Nomor LHP : LAP – 00138/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;	
20.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Panca Agro Lestari NPWP Nomor : 024913303216000 Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 dengan Nomor LHP : LAP – 00092/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;	
21.	1 (satu) Bundel Berkas Pemeriksaan Wajib Pajak PT Palma Satu NPWP Nomor : 024584435218000 Periode Januari 2019 s.d Desember 2019 dengan Nomor LHP : LAP-00014/WPJ.02/KP.1005/RIK.SIS/2021;	
22.	1 (satu) Rangkap Copy Rekap Statis SPT PT. Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT	

Halaman 427 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kencana Amal Tani, Tahun Pajak 2012 s.d 2022.	
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA		

F. BARANG BUKTI UANG DAN REKENING :			
XX.	Uang sejumlah Rp.1.558.242.189.583,23 (Satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua puluh tiga sen), USD 11.400.813,57 (Sebelas juta empat ratus ribu delapan ratus tiga belas koma lima puluh tujuh sen dollar amerika) dan SGD 646,04 (Enam ratus empat puluh enam koma nol empat sen dollar singapura) atas nama nasabah Aset Pacific dan Darmex Plantation yang tersimpan pada beberapa rekening Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:	Disita Dari Surya Darmadi	
No	Perorangan / Perusahaan	Nomor Rekening	Saldo
1	ASET PASIFIC	101-02-0577230-2	Rp. 25.000.000.000,00
		101-02-0577231-0	Rp. 100.000.000.000,00
		101-02-0577809-3	Rp. 50.000.000.000,00
		101-02-0579826-5	Rp. 50.000.000.000,00
		101-02-0580265-3	Rp. 50.000.000.000,00
		101-02-0582886-4	Rp. 100.000.000.000,00
		101-02-0582958-1	Rp. 50.000.000.000,00
		101-02-0583056-3	Rp. 90.000.000.000,00
		101-02-0583120-7	Rp. 5.000.000.000,00
		101-02-0583299-9	Rp. 100.000.000.000,00
		101-02-0583411-0	Rp. 100.000.000.000,00
		101-02-0583828-5	Rp. 5.500.000.000,00
		101-02-0584695-7	Rp. 10.000.000.000,00
		101-02-0592971-2	Rp. 140.000.000.000,00
		101-02-0593899-4	Rp. 200.000.000.000,00
		101-02-0594479-4	Rp. 50.000.000.000,00
		101-02-0595472-8	Rp. 300.000.000.000,00
		123-00-0635241-5	Rp. 1.106.783.153,84
		124-00-0662397-0	Rp. 62.319.815.768,11
		124-00-0736687-6	Rp. 327.928.936,94
		101-00-1185589-5	SGD 646,04
		124-02-0574869-3	Rp. 650.000.000,00
		124-02-0578285-8	Rp. 1.000.000.000,00
		124-02-0581595-5	Rp. 500.000.000,00
		124-02-0583027-7	Rp. 500.000.000,00
		124-02-0584420-3	Rp. 500.000.000,00
2.	Darmex Plantations	101-00-1033143-5	Rp. 22.169.767,80
		108-00-2007876-3	Rp. 2.320.881.671,91
		124-00-0769265-1	Rp. 63.494.610.284,63
		124-00-0780415-7	USD 11.400.813,57

Halaman 428 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI.	Uang sejumlah Rp544.066.922.778,00,- (Lima ratus empat puluh empat miliar enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Bank BNI dibebberapa rekening atas nama Asset Pasific dan Darmex Plantation dengan rincian sebagai berikut:	Disita dari Surya Darmadi																																																																																											
<table><tr><th>No.</th><th>Rekening</th><th>Atas Nama</th><th>Saldo</th><th>Saldo</th></tr><tr><td>1</td><td>7000302118</td><td>Asset Pasific</td><td>gnd</td><td>81.843.740</td></tr><tr><td>2</td><td>1148714267</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>25.000.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>1148481175</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>1148480804</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>5</td><td>1148481216</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>6</td><td>1148481701</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>7</td><td>1148480704</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>8</td><td>1148480905</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>9</td><td>1148480801</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>10</td><td>1148477843</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>11</td><td>1148477227</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>12</td><td>1148479401</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>49.000.000.000</td></tr><tr><td>13</td><td>1148477345</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>22.000.000.000</td></tr><tr><td>14</td><td>1227312615</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>5.000.000.000</td></tr><tr><td>15</td><td>1148479408</td><td>Asset Pasific</td><td>Deposito</td><td>2.000.000.000</td></tr><tr><td>16</td><td>7000302903</td><td>Darmex Plantation</td><td>gnd</td><td>5.079.635</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah</td><td>544.066.922.778</td></tr></table>			No.	Rekening	Atas Nama	Saldo	Saldo	1	7000302118	Asset Pasific	gnd	81.843.740	2	1148714267	Asset Pasific	Deposito	25.000.000.000	3	1148481175	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	4	1148480804	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	5	1148481216	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	6	1148481701	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	7	1148480704	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	8	1148480905	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	9	1148480801	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	10	1148477843	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	11	1148477227	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	12	1148479401	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000	13	1148477345	Asset Pasific	Deposito	22.000.000.000	14	1227312615	Asset Pasific	Deposito	5.000.000.000	15	1148479408	Asset Pasific	Deposito	2.000.000.000	16	7000302903	Darmex Plantation	gnd	5.079.635	Jumlah				544.066.922.778	
No.	Rekening	Atas Nama	Saldo	Saldo																																																																																									
1	7000302118	Asset Pasific	gnd	81.843.740																																																																																									
2	1148714267	Asset Pasific	Deposito	25.000.000.000																																																																																									
3	1148481175	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
4	1148480804	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
5	1148481216	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
6	1148481701	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
7	1148480704	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
8	1148480905	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
9	1148480801	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
10	1148477843	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
11	1148477227	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
12	1148479401	Asset Pasific	Deposito	49.000.000.000																																																																																									
13	1148477345	Asset Pasific	Deposito	22.000.000.000																																																																																									
14	1227312615	Asset Pasific	Deposito	5.000.000.000																																																																																									
15	1148479408	Asset Pasific	Deposito	2.000.000.000																																																																																									
16	7000302903	Darmex Plantation	gnd	5.079.635																																																																																									
Jumlah				544.066.922.778																																																																																									
XXII.	Uang sejumlah Rp3,020,879,952,618,- (tiga trilyun dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) atas nama nasabah Aset Pacific Edited yang tersimpan pada beberapa rekening Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :	Disita dari Surya Darma di																																																																																											
<table><tr><th>No. Rekening</th><th>Saldo Akhir</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>037601001884305</td><td>5,979,952,618</td><td></td></tr><tr><td>037601003450403</td><td>35,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601003477405</td><td>70,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601003687408</td><td>15,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004191400</td><td>15,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004226409</td><td>250,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004230408</td><td>50,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004357404</td><td>150,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004396408</td><td>280,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004609403</td><td>80,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004769407</td><td>25,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004797400</td><td>15,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601004845407</td><td>4,900,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005064402</td><td>100,000,000,000</td><td>Diblokir pertanggal 25/08/2022</td></tr><tr><td>03760100552405</td><td>25,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005554407</td><td>125,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005555403</td><td>100,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005580408</td><td>100,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005626408</td><td>270,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005666408</td><td>450,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005771407</td><td>200,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005796407</td><td>150,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005822402</td><td>100,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005824404</td><td>50,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005886406</td><td>250,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005904408</td><td>55,000,000,000</td><td></td></tr><tr><td>037601005907406</td><td>50,000,000,000</td><td></td></tr></table>			No. Rekening	Saldo Akhir	Keterangan	037601001884305	5,979,952,618		037601003450403	35,000,000,000		037601003477405	70,000,000,000		037601003687408	15,000,000,000		037601004191400	15,000,000,000		037601004226409	250,000,000,000		037601004230408	50,000,000,000		037601004357404	150,000,000,000		037601004396408	280,000,000,000		037601004609403	80,000,000,000		037601004769407	25,000,000,000		037601004797400	15,000,000,000		037601004845407	4,900,000,000		037601005064402	100,000,000,000	Diblokir pertanggal 25/08/2022	03760100552405	25,000,000,000		037601005554407	125,000,000,000		037601005555403	100,000,000,000		037601005580408	100,000,000,000		037601005626408	270,000,000,000		037601005666408	450,000,000,000		037601005771407	200,000,000,000		037601005796407	150,000,000,000		037601005822402	100,000,000,000		037601005824404	50,000,000,000		037601005886406	250,000,000,000		037601005904408	55,000,000,000		037601005907406	50,000,000,000								
No. Rekening	Saldo Akhir	Keterangan																																																																																											
037601001884305	5,979,952,618																																																																																												
037601003450403	35,000,000,000																																																																																												
037601003477405	70,000,000,000																																																																																												
037601003687408	15,000,000,000																																																																																												
037601004191400	15,000,000,000																																																																																												
037601004226409	250,000,000,000																																																																																												
037601004230408	50,000,000,000																																																																																												
037601004357404	150,000,000,000																																																																																												
037601004396408	280,000,000,000																																																																																												
037601004609403	80,000,000,000																																																																																												
037601004769407	25,000,000,000																																																																																												
037601004797400	15,000,000,000																																																																																												
037601004845407	4,900,000,000																																																																																												
037601005064402	100,000,000,000	Diblokir pertanggal 25/08/2022																																																																																											
03760100552405	25,000,000,000																																																																																												
037601005554407	125,000,000,000																																																																																												
037601005555403	100,000,000,000																																																																																												
037601005580408	100,000,000,000																																																																																												
037601005626408	270,000,000,000																																																																																												
037601005666408	450,000,000,000																																																																																												
037601005771407	200,000,000,000																																																																																												
037601005796407	150,000,000,000																																																																																												
037601005822402	100,000,000,000																																																																																												
037601005824404	50,000,000,000																																																																																												
037601005886406	250,000,000,000																																																																																												
037601005904408	55,000,000,000																																																																																												
037601005907406	50,000,000,000																																																																																												



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.

III. BARANG BUKTI YANG DISITA PADA SAAT PENUNTUTAN :

No	Nama Barang Bukti	Keterangan
1	2	3
A. DIPEROLEH SEBELUM TERJADINYA TINDAK PIDANA		
1.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Duta Palma Nusantara seluas 11.260 Ha berdasarkan HGU Nomor 01 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1988 yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
2.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Duta Palma Nusantara seluas 2.997 Ha berdasarkan HGU Nomor 03 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1997, yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	
3.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Cerenti Subur seluas 8.929 Ha berdasarkan HGU 03/Kuantan Sangingi yang diperoleh terdakwa pada tahun 1990, yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	
4.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Wana Jingga Timur seluas 4.196 Ha berdasarkan HGU 05/Kuantan Sangingi yang diperoleh terdakwa pada tahun 1995, yang terletak di Kabupaten Kuantan Sangingi Propinsi Riau;	
5.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Eluan Mahkota seluas 5.933,19 Ha berdasarkan HGU 01 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1997, yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau;	
6.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Johan Sentosa seluas 5.764 Ha berdasarkan HGU 00008 yang diperoleh terdakwa pada tahun 1999, terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau	
7.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Bukit Jagoi Indah seluas + 5.700 Ha yang terletak di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat diperoleh Terdakwa pada tahun 2002;	
8.	1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Bukit Jagoi Indah seluas + 1.050 Ha yang terletak di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2003;	
9.	1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 888/XXXII/Central Park luas 109 M2 di Rusun Hunian dan Non Hunian Puri Casablanca Jl.Casablanca Kav No. 7 No.13.10 Lt 16 Blok B Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 2001 ;	
10.	1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 2641/XXI/Potnara luas 146 M2 Rusun Hunian dan Non Hunian Mal & Kondominium Taman Anggrek Jl Letjen S. Parman Blok Potnara, Lt.23 No.23 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan kota Jakarta Barat atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 1998 ;	

Halaman 430 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<div>11. 1 (satu) unit Apartemen berdasarkan HMRS Nomor : 832/XIX/Ansela luas 88 M2 Rumah Susun Hunian Mal & Kondominium Taman Anggrek Jl Letjen S. Parman Blok Ansela Lt.21 No.21C Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan kota Jakarta Barat atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 1998.</div> <div>12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 28.889 m2 atas nama PT Taluk Kuantan Perkasa yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1999 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 6;</div> <div>13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 11.910 M2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2003 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3283;</div> <div>14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.060 M2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 77;</div> <div>15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 14.450 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 75;</div> <div>16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 9.810 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 76;</div> <div>17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 17.570 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1991 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 79;</div> <div>18. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 9.190 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 1974 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 80;</div> <div>19. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.600 M2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2001 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 194;</div>	
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARIMANA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA (TERDAKWA).		
B. DIPEROLEH SELAMA TEMPUS		
	<div>1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya (Pabrik Biodiesel) atas nama PT Bayas Biofuels yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau seluas 19.750 M2 berdasarkan Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor: 10, yang diperoleh terdakwa pada tahun 2007;</div> <div>2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Mekarsari Alam Lestari seluas 4.745,33Ha berdasarkan HGU 00008 yang diperoleh terdakwa pada tahun 2005, yang terletak di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;</div> <div>3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Darmex Plantation seluas + 15.000 Ha di Desa</div>	<div>Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022</div>



	<p>Tempapan dan Desa Godang Damar Kec. Samalantan Kab. Bengkayang Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;</p> <p>4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Mitra Daya Permai seluas + 700 Ha di Kec. Seluas Kab. Bengkayang Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;</p> <p>5. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Ledo Lestari seluas + 20.000 Ha di Desa Kumba Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, diperoleh terdakwa pada tahun 2004;</p> <p>6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Lestari Alam Raya seluas + 14.000 Ha di Desa Sekadong, Capkala, Aris, Sebadut Kec. Sei Raya, Capkala, Monterado Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa pada tahun 2005;</p> <p>7. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Mitra Wawasan seluas + 5.500 Ha di Desa Sanggoriuk dan Desa Danti Kec. Seluas dan Sanggau Ledo Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa tahun 2007;</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;</p> <p>8. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Asset Pasific International seluas + 2.000 Ha di Desa Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, diperoleh Terdakwa pada tahun 2010;</p> <p>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.</p> <p>9. 1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 779/XIII/B luas 880 M2 di Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & Apt. Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.35 No.CP-35 Blok Central Park Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atas nama Surya Darmadi perolehan tahun 2005 (terdapat blokir KPK);</p> <p>10. 1 (satu) unit Apartement berdasarkan HMRS Nomor : 816/XXXVII/Park Avenue luas 440 M2 yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian The Ritz Carlton Hotel & Apt. Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E1-1 Lt.40 No.PA-40A Blok Park Avenue Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan atas nama Cheryl Darmadi perolehan tahun 2005 (terdapat blokir KPK);</p> <p>11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00044</p> <p>12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak</p>	
--	--	--



	<p>Milik Nomor: 00041</p> <p>13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00045</p> <p>14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00039;</p> <p>15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00046</p> <p>16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00037;</p> <p>17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00038;</p> <p>18. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 20.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2006 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00036;</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;</p> <p>19. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 16.372M2 atas nama Cheryl Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 718;</p> <p>20. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 19.997 m2 atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 719;</p> <p>21. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 19.997 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 720;</p> <p>22. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya atas nama Surya Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 753;</p> <p>23. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 7.513 M2 atas nama Cheryl Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2017 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 754;</p> <p>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN</p>	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.</p> <p>24. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 725;</p> <p>25. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4484;</p> <p>26. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 578;</p> <p>27. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 10.000 m2 atas nama Adil Darmadi yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2007 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 737;</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;</p> <p>28. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 81.560 M2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00225;</p> <p>29. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 1.335 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00226;</p> <p>30. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 5.144 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00227;</p> <p>31. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 31.070 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00228;</p> <p>32. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 51.000 m2 atas nama PT Semesta Alam Permai yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00229;</p> <p>33. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 53.495 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00196;</p> <p>34. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 47.273 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada</p>	
--	--	--

Halaman 434 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00198;</p> <p>35. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 55.877 m2 atas nama PT Sari Dumai Oleo yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00197;</p> <p>36. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 7.414 m2 atas nama PT Oleo Kimia Sejahtera Mas yang terletak di Kota Dumai, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2015 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 00194;</p> <p>37. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 300 m2 atas nama PT Duta Palma Nusantara yang terletak di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2005 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 231;</p> <p>38. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 176 M2 atas nama PT Danatama Mulia yang terletak di Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang diperoleh Terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 827;</p> <p>39. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-2001 lantai 20 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 005/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Surya Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>40. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-0503 lantai 5 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 003/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Surya Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>41. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-1003 lantai 10 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 001/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Cheryl Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>42. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-1103 lantai 11 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 002/PSA/LGL.et/I/2011 atas nama Cheryl Darmadi tahun perolehan 2011;</p> <p>43. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The South Unit ES1-1701 lantai 17 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 013/PSA/LGL/I/2014 atas nama Bill Darmadi tahun perolehan 2014;</p> <p>44. 1 (satu) unit Apartement Darmawangsa Essence Tower The East Unit ET1-2502 lantai 25 terletak di Jl. Darmawangsa X No. 86, Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 036/PSA/LGL/V/2015 atas nama PT Delimuda Nusantara tahun perolehan 2015;</p> <p>45. 8 (delapan) unit Satuan Rumah Susun Non Hunian Sopodel Tower B Lantai 20, unit 1, unit</p>	
--	---	--

Halaman 435 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, unit 7 dan unit 8 terletak di Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dibeli terdakwa Surya Darmadi Tahun 2017 melalui perusahaan milik Terdakwa atas nama PT Permata Dumai Abadi.</p> <p>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.</p>	
C. PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG SAAT INI TIDAK AKTIF.		
	<p>1. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Bengkayang Subur seluas + 20.000 Ha di Desa Serangkat, Desa Sempayuk, Desa Belimbing, Desa Rodaya, Desa Lamolda Kec. Ledo Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat yang diperoleh Terdakwa Tahun 2004;</p> <p>2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan di atasnya atas nama PT Dumai Inti Utama seluas + 4.388 Ha terletak di Desa Malo Jelayan, Desa Bongkang, Desa Tampe Desa Puteng dan Desa Telidik Kec. Teriak Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, yang diperoleh terdakwa tahun 2004;</p>	<p>Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022</p>
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.		
D. BARANG BUKTI KAPAL TERDAKWA PADA PT DELIMUDA NUSANTARA		
	<p>1. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma I, ukuran panjang 29,91 meter, Lebar 8,30 meter, D 3,60 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 222, Tonase Bersih (NT) 67, IMO Number 7856264, Call sign YD4643, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.</p> <p>2. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 5, ukuran panjang 21.90 meter, Lebar 7.00 meter, D 2.80 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 120, Tonase Bersih (NT) 72, IMO Number 9024097, Call sign YD3076, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;</p> <p>3. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 13, ukuran panjang 26.78 meter, Lebar 7.15 meter, D 3.38 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 157, Tonase Bersih (NT) 48, IMO Number 8737661, Call sign YD3400, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>4. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma-XVI, ukuran panjang 69,12 meter, Lebar 20.00 meter, D 4,88 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 1849, Tonase Bersih</p>	<p>Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(NT) 1015, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>5. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XX, ukuran panjang 74.88 meter, Lebar 22.00 meter, D 5.30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2263, Tonase Bersih (NT) 1141, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;</p> <p>6. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 25, ukuran panjang 21.00 meter, Lebar 8.80 meter, D 3.00 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 166, Tonase Bersih (NT) 50, IMO Number 9084413, Call sign YDA3495, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.</p> <p>7. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXVI, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;</p> <p>8. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 27, ukuran panjang 23.68 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 192, Tonase Bersih (NT) 58, IMO Number 9779642, Call sign YDA3791, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>9. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXVIII, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>10. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 29, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9881914, Call sign YDB3085, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>11. 1 (satu) unit Kapal ROYAL PALMA XXX, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>12. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXII, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>13. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 33, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60,</p>	
--	---	--

Halaman 437 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



	<p>IMO Number 9894117, Call sign YDB3151, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>14. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXIV, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>15. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 35, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9906001, Call sign YDB3195, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>16. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 36, ukuran panjang 77.84 meter, Lebar 21.34 meter, D 3.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>17. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 37, ukuran panjang 24.34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, IMO Number 9908891, Call sign YDB3219, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>18. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XXXVIII, ukuran panjang 77,84 meter, Lebar 21,34 meter, D 6.10 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2888, Tonase Bersih (NT) 1699, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>19. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma XVIII, ukuran panjang 74,88 meter, Lebar 22,00 meter, D 5,30 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 2278, Tonase Bersih (NT) 1296, Jenis Kapal tongkang, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>20. 1 (satu) unit Kapal Royal Palma 31, ukuran panjang 24,34 meter, Lebar 8.00 meter, D 3.65 meter, Bendera Indonesia, Tonase Kotor (GT) 197, Tonase Bersih (NT) 60, Call sign YE3476, Jenis Kapal tug boat, Pemilik PT. Delimuda Nusantara.</p> <p>21. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma 15 GT 138, NT 42;</p> <p>22. 1 (satu) unit Kapal BG. Indo Ocean Marine IX GT 1596, NT 1317;</p> <p>23. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma III GT 104, NT 62;</p> <p>24. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XII GT 935, NT 731;</p> <p>25. 1 (satu) unit Kapal TB. Royal Palma XI GT 151, NT 90;</p> <p>26. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XIV GT 2278, NT 1288;;</p> <p>27. 1 (satu) unit Kapal BG. Royal Palma XXIV GT 1683, NT 1075.</p> <p>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.</p>	
E. KENDARAAN BERMOTOR MILIK TERDAKWA ATAS NAMA ISTRI, ANAK DAN MENANTU :		
	<p>1. 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz tipe C 180 AT dengan No.Pol. B-2039-SK tahun pembuatan 1995 atas nama Sutanti Hadi ;</p> <p>2. 1 (satu) buah mobil Mini Cooper tipe John Cooper Works dengan No.Pol. B-20-AMD tahun pembuatan 2016 atas nama Monica Marthen ;</p>	<p>Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19</p>



	<div>3. 1 (satu) buah mobil Porsche tipe Cayman dengan No.Pol. B-913-GTS tahun pembuatan 2013 atas nama Monica Marthen;</div> <div>4. 1 (satu) buah mobil BMW tipe 630/AT dengan No.Pol. B-8-UW tahun pembuatan 2005 atas nama Cheryl Darmadi ;</div> <div>5. 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz tipe S 320 L AT dengan No.Pol. B-34-UW tahun pembuatan 1998 atas nama Cheryl Darmadi ;</div> <div>6. 1 (satu) buah mobil BMW tipe 7351 LA dengan No.Pol. B-182 tahun pembuatan 2003 atas nama Cheryl Darmadi ;</div> <div>7. 1 (satu) buah mobil Nissan tipe Serena dengan No.Pol. B-118-QD tahun pembuatan 2004 atas nama Cheryl Darmadi.</div>	Desember 2022									
KARENA ATAS NAMA ORANG LAIN DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAQ DARI MANA BARANG BUKTI DISITA ;											
F. ASSET BERUPA SID											
	SID CPD2412DYX79485 atas nama PT Menara Capital Indonesia yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi saham MCOL.	Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022									
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.											
G. ASET ATAS NAMA TERDAKWA SURYA DARMADI DI SINGAPURA DAN AUSTRALIA											
1	<div>Asset pada beberapa rekening perbankan di Singapura dan Australia yaitu:</div> <div>a) Rekening Bank atas nama Asset Pacific Pty Ltd di Australia Account Number: 033-157-771-963 di Wastpac Bank.</div> <div>b) Rekening Bank atas nama Rich Asian Pte Ltd di City Bank N.A, Singapore Branch Nomor: 0-860456-001 beralamat di 8 Marina View #21-00 Asia Square Tower 1 Singapore 018960</div> <div>c) Rekening Bank atas nama Palmbridge Pte Ltd di Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Nomor Account 0107197871</div> <div>d) Rekening Palmbridge Pte Ltd di City Bank Singapura Nomor Account 0- 860782-006</div> <div>e) Rekening Bank atas nama Waxbill Pte Ltd di City Bank Singapura Nomor account: 0860518015;</div>	Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022									
2	<div>Asset harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pembelian asset yaitu:</div> <div>c) 1 (satu) unit Office Tower 2#41 beralamat di 9 Temasek Boulevard #23- 01/02/03 Singapore 038989</div> <div>d) 1 (satu) unit Office Tower 2#23 beralamat di 9 Temasek Boulevard #23- 01/02/03 Singapore 038989.</div>	Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022									
3	<div>Asset berupa 22 unit apartement di Singapura Yang terletak di Draycott 8, 8 Draycott Park, Singapore 259404</div> <div>yang terdiri atas:</div> <table><tr><td>Unit #02-05,</td><td>12.</td><td>Unit #14-05</td></tr><tr><td>Unit #03-05,</td><td>13.</td><td>Unit #15-05</td></tr><tr><td>Unit #04-05,</td><td>14.</td><td>Unit #16-05</td></tr></table>	Unit #02-05,	12.	Unit #14-05	Unit #03-05,	13.	Unit #15-05	Unit #04-05,	14.	Unit #16-05	Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
Unit #02-05,	12.	Unit #14-05									
Unit #03-05,	13.	Unit #15-05									
Unit #04-05,	14.	Unit #16-05									



		Unit #05-05	15.	Unit #17-05	
		Unit #06-05	16.	Unit #18-05	
		Unit #07-05	17.	Unit #19-05	
		Unit #09-05	18.	Unit #20-05	
		Unit #10-05	19.	Unit #21-05	
		Unit #11-05	20.	Unit #22-05	
		Unit #12-05	21.	Unit #23-05	
		Unit #13-05	22.	Unit #24-05	
4	Properti di Australia pembelian menggunakan Asset Pacific Pty Ltd yang terletak di 235 Queen Street, Melbourne, Victoria, 3000.				Penetapan Penyitaan No:62/Pen. Pid.Sus/TP K/XII/2022/ PN.Jkt.Pst Tgl 19 Desember 2022
5	Kepemilikan property berupa Gedung kantor di 7 Temasek Boulevard #40-01 Suntec Tower One, Singapura 038987.				
6	Kepemilikan property berupa Gedung kantor 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One #41-01 Singapura.				
7	Kepemilikan property di 21th Nassim Park Residence #18-01 Orchard Road Singapura.				
DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA.					

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst. tanggal 23 Pebruari 2023 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Pebruari 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Maret 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 10/Akta.Pid.Sus-TPK/-2023/PN.JKT.PST. yang dibuat dan ditanda-tangani Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2023, dan terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 440 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Maret 2023, dan salinan Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2023, dan salinan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2023, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dengan surat Nomor : W10.U1/147/TPK.05.III.2023.03. tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Maret 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang untuk mempersingkat putusan ini tidak diuraikan lagi, dan pada pokoknya dapat diketahui bahwa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 441 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam memahami fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan pertimbangan hukum juga menjadi salah dan keliru, yakni :

Mengenai perizinan perusahaan :

- Bahwa Pembanding tidak melakukan kesalahan dan tidak ada niat jahat (*mens rea*) dalam diri Pembanding, maka sesuai asas tiada pidana tanpa ada kesalahan (*green Straftz onder schuld*), karena Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga harus dinyatakan bebas atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum;

Pembahasan mengenai tanggung jawab pemegang saham utama (*ultimate shareholders*) :

- Pembanding merupakan pemegang saham utama (*ultimate share Holders*) dari 5 perusahaan sehingga tidak dapat dimintakan Pertanggung-jawaban pidana berdasarkan azas pembatasan tanggung-jawab pemegang saham (*azas corporate separate legal personality*)-(Prinsip *limited liability*);

Pertentangan antara peraturan Pusat dengan Daerah :

- Pertentangan antar peraturan (Pusat dan Daerah) tidak menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang (Kepmenhut No. 173/1986 melawan Perda Riau 10/1994) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No : 45/PUU-IX/2011;

Keterlanjuran penggunaan kawasan hutan tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja :

- Bahwa terbukti aturan administratif terkait keterlanjuran penggunaan kawasan hutan telah diatur dalam pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja yang telah berlaku, oleh karenanya keputusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengkualifikasikan kesalahan administratif sebagai tindak pidana telah melanggar prinsip *ultimum remidium*;
- Bahwa terbukti *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo* telah melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP sehingga putusan *Judex Factie* tingkat pertama haruslah dibatalkan dan Pembanding harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara :

- *Judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan

Halaman 442 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo;

- Dana reboisasi, provisi, sumber daya hutan dan denda tidak diwajibkan terhadap ke lima perusahaan milik Pembanding yang merupakan perusahaan perkebunan yang berlokasi di Areal Penggunaan Lain dan bukan perusahaan pemegang izin usaha Pemanfaatan Hasil Kayu (IPK);
- Dengan berdasarkan pendapat para Ahli dan putusan perhitungan Tersebut diatas, terbukti Judex Factie tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan adanya kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh Pembanding, dengan disadarkan pada Laporan Analisis dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajad Mada tertanggal 24 Agustus 2022, karena Laporan Hasil Analisis tersebut tidak memiliki standar penilaian, tidak berdasarkan hukum dan Lembaga Penelitian tersebut tidak berwenang dalam dan menentukan kerugian perekonomian negara;

Tindak Pidana Pencucian Uang :

- Bahwa seluruh asset hasil usaha (bukan diperoleh dari hasil tindak pidana) tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan Judex Factie menyatakan dakwaan ketiga adalah terbukti penuh dengan keraguan serta tidak berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan dan membuat putusan terhadap Pembanding (Asas In Dubio Pro Reo) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang;

Kerusakan Lingkungan :

- Rusaknya baku mutu lingkungan hidup sebagai dampak dari perbuatan perusahaan-perusahaan milik Pembanding tidak pernah terbukti berdasarkan Hasil Uji Baku Mutu Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Surat Edaran Menteri Kehutanan No : 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 bukan merupakan peraturan hukum yang wajib diataati dan dijalankan karena bersifat edaran bukan bagian dari peraturan perundang-undangan;

Putusan a quo telah salah dan/atau keliru dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Halaman 443 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING SURYA DARMADI** seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/PID.SUS/TPK/-2022/PN.JKT.PST tertanggal 23 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan PEMBANDING SURYA DARMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;
2. Membebaskan PEMBANDING SURYA DARMADI dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya PEMBANDING SURYA DARMADI dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor supaya PEMBANDING SURYA DARMADI dibebaskan dan/atau dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diputuskan walaupun ada upaya hukum Kasasi;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor untuk mengembalikan seluruh alat bukti yang disita, kepada pemilik barang bukti tersebut atau dari mana barang bukti tersebut disita walaupun ada upaya hukum Kasasi;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Eksekutor untuk membuka seluruh blokir rekening yang diblokir atas perkara ini dan mengembalikan rekening tersebut kepada pemilik rekening walaupun ada upaya hukum Kasasi;
6. Memulihkan segala hak PEMBANDING SURYA DARMADI dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*"ex aequo et bono"*).

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 444 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Maret 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi dan pada pokoknya dapat diketahui bahwa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum bahwa putusan tingkat pertama kurang lengkap dalam penerapan dan pembuktian hukum yaitu tidak sesuai dan kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan sehingga keliru dalam mengambil keputusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam melakukan perhitungan pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dibebankan kepada terdakwa. Hasil penilaian/perhitungan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak lengkap karena mengabaikan alat bukti dan dokumen yang terungkap dipersidangan;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan asset barang bukti berupa tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama yang dikembalikan kepada terdakwa karena sudah memiliki HGU, Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang menyatakan tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama masih berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru, tidak lengkap dan tidak tepat dalam mempertimbangkan beberapa asset yang menjadi barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana (alat dan hasil kejahatan) yang dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita karena tidak didasarkan dari fakta hukum dan bukti yang terungkap dipersidangan;

Halaman 445 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara aquo menciderai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan tidak memiliki efek jera bagi pelaku korupsi khususnya kepada terdakwa;
- Pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang dinikmati terdakwa puluhan trilyunan rupiah;

Selanjutnya Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketiga Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menghukum terdakwa SURYA DARMADI dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00;(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.798.706.951.640,00; (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7.885.857,36 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh dolar tiga puluh enam sen dolar Amerika), dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu

Halaman 446 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Jika Terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain pidana seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti ;

5. Menetapkan barang bukti sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Februari 2023, dan membebaskan Terbanding Surya Darmadi dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dengan mengemukakan alasan-alasannya yang terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 4 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 April 2023, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 447 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2023, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta setelah membaca Berita Acara Persidangan dari keterangan saksi-saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge, pendapat Ahli baik Ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan pula memeriksa dengan seksama serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 23 Pebruari 2023 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst., serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.

20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUSIDAIR : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 448 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA : Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

DAN

KETIGA

PRIMAIR : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR : Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa "Terdakwa **SURYA DARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan PENCUCIAN UANG**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair Penuntut Umum", akan tetapi "Terdakwa **SURYA DARMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum". Demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dinilai sudah tepat dan benar sesuai rasa keadilan. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 449 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan mempertimbangkan satu persatu keberatan tersebut sebagaimana terurai tersebut dibawah ini;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Memahami Fakta Hukum Yang Terungkap Dipersidangan:

Mengenai Perijinan Perusahaan

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan (*green strafz onder schuld*), unsur melawan hukum (*means rea*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terbukti Terdakwa/Pembanding telah mengurus dan mendapatkan ijin dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu", menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Penasehat Hukum Terdakwa kurang jeli dalam memahami fakta-fakta hukum seperti tercermin dalam perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa secara nyata sebagai pengendali dari 5 (lima) perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Kencana Amal Tani milik Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan melakukan kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) dikawasan hutan yang pada awalnya sekira 3-4 bulan setelah diterbitkannya IUP (Izin Usaha Perkebunan), tanpa adanya Ijin Pelepasan Hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa dilengkapi HGU (Hak Guna Usaha) serta Izin Prinsip;

Terhadap kawasan hutan harus dilakukan pelepasan hutan terlebih dahulu sebelum diterbitkan HGU sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Halaman 450 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah yang disebutkan bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan;

Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tetapi tetap melakukan kegiatan aktivitas perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan walaupun sudah memiliki ILOK dan IUP, maka badan usaha tersebut sebelum memperoleh Ijin Pelepasan Kawasan dari Kementerian Kehutanan dan sebelum memperoleh HGU dari Kementerian ATR/BPN tidak boleh melakukan aktivitas usaha. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Terkait perusahaan yang sudah memiliki HGU namun belum dilakukan pelepasan kawasan hutan in casu PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah, yang pada pokoknya bahwa HGU yang diberikan apabila diatas kawasan hutan maka dilakukan pelepasan kawasan hutan. Terhadap HGU yang berada dikawasan hutan tersebut adalah **cacat administratif** sehingga HGU harus dibatalkan. Bahwa yang menjadi dasar pembatalan HGU adalah ketentuan dalam Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 107 menegaskan mengenai **cacat administratif**, meliputi : kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Atas dasar cacat administratif perusahaan Terdakwa terkait HGU yang berada dikawasan hutan adalah adanya data yuridis atau data fisik tidak benar, kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap Ijin Lokasi dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah yang diberikan kepada suatu badan hukum ataupun perorangan tidak dapat digunakan untuk melakukan pemanfaatan

Halaman 451 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelolaan kawasan hutan, karena peruntukannya bukan untuk pemanfaatan kawasan hutan tetapi untuk perkebunan kelapa sawit dan pelepasan kawasan hutan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak swasta terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk non kehutanan. Apabila kawasan hutan yang akan dimanfaatkan sebagai perkebunan telah dialih fungsikan sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan proses alih fungsi menjadi Non Kawasan Hutan atau Kawasan Budi Daya, maka statusnya bukan lagi Kawasan Hutan sehingga dapat dikeluarkan dari tata ruang sebelumnya sebagai kawasan hutan;

Berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka unsur kesalahan (*means rea*) Terdakwa yang tercermin dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 1 harus dikesampingkan.

Pembahasan Mengenai Tanggung-Jawab Pemegang Saham Utama (*Ultimate Shareholders*)

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan "Terdakwa/Pembanding merupakan pemegang saham utama (*Ultimate Shareholders*) dari 5 perusahaan sehingga tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana, berdasarkan Azas Pembatasan Tanggung-jawab Pemegang Saham (*Asas Corporate Separate Legal Personality/Prinsip Limited Liability*)", menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak beralasan, oleh karena Azas Pembatasan Tanggung-jawab Pemegang Saham (*Asas Corporate Separate Legal Personality/Prinsip Limited Liability*) pada dasarnya hanya berlaku dan diterapkan dalam ranah hukum perdata untuk korporasi dan bukan ranah hukum pidana khususnya dalam pertanggung-jawaban pidana yang subjek hukumnya orang perorangan in casu Terdakwa, sehingga tidak tepat apabila azas tersebut diterapkan dalam perkara a quo, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 2 harus dikesampingkan;

Pertentangan Antara Peraturan Pusat Dengan Daerah

Halaman 452 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “Adanya pertentangan antar peraturan (aturan Pusat dan Daerah) tidak bisa menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang (Kepmenhut Nomor: 173 Tahun 1976 melawan Perda Riau Nomor: 10 Tahun 1994) berdasarkan putusan MK Nomor: 45/PUU-IX/2011”, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak beralasan, oleh karena terhadap adanya perbedaan status hukum lahan TGHK dan RTRW sudah dilakukan paduserasi TGHK dan RTRWP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Dan sesuai Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 pada butir 1 menyatakan bahwa “bagi provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas Kawasan Hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka Kawasan Hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK”, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 3 harus dikesampingkan.

Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Dapat Di Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “Penyelesaian keterlanjuran penggunaan kawasan hutan oleh Pelaku Usaha telah diatur sebagaimana Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas keterlanjuran penggunaan kawasan hutan bukanlah suatu tindak pidana”, adalah tidak beralasan, oleh karena tujuan diundangkannya atau diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Pasal 110A dan 110 B adalah sebagai upaya penciptaan kerja melalui usaha berupa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat serta percepatan proyek strategis nasional, kendatipun Undang-Undang tersebut dilahirkan dengan penuh dinamika dan kontroversi. Oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha

Halaman 453 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan diatas kawasan hutan tidak dapat diterapkan, sebab suatu perbuatan yang diawali dengan adanya pelanggaran administratif yang mengarah pada perbuatan pidana dan berakibat menimbulkan adanya kerugian negara maka merupakan suatu tindak pidana korupsi, walaupun suatu perbuatan itu sudah ada aturan yang mengatur secara khusus, namun apabila ada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam rentang waktu kerugian negara yang terjadi dalam perkara ini yakni sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 berdasarkan *azas legalitas* dan *azas lex temporis delictie*, maka ketentuan yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada dan telah berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan;

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 273 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa yang dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan hanya pada HPK (Hutan Produksi yang dapat di Konversi) yang tidak produktif. Dengan demikian terhadap perkebunan kelapa sawit PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur yang masih memproduksi (produktif) apabila terdapat perbuatan berdampak pada lingkungan atau pencemaran kepada lingkungan, maka Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diterapkan, namun dalam hal terjadi kerugian negara maka yang diterapkan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; dengan demikian pada angka 4 harus dikesampingkan;

Unsur Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan "*Judex Factie* tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam perkara a quo" adalah tidak beralasan, oleh karena perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Terdakwa a quo didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 454 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp4.798.706.951.640,00 (Empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD7,885,857.36 (Tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima puluh tujuh dollar Amerika tiga puluh enam sen) dikurangi PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan kerugian keuangan negara sehingga menjadi Rp2.641.795.276.640,00 (*dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dan USD4.987.677,36 (*empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika*);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum melakukan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan illegal berupa perkebunan kelapa sawit melalui PT Duta Palma Group (Darmex Group) di Kabupaten Indragiri Hulu yang meliputi 5 perusahaan dengan total luas areal kegiatan usaha perkebunan sawit sesuai pemberian Izin Lokasi dan IUP sebanyak 37.095 Hektar, selain merugikan keuangan negara juga menimbulkan adanya kerugian perekonomian negara, berupa kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan kawasan hutan untuk usaha perkebunan illegal yaitu sebesar Rp73.920.690.300.000,00 (*tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) dikurangi PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan, sehingga kerugian perekonomian negara menjadi Rp39.751.177.520.000,00 (*tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Nilai kerugian perekonomian negara tersebut berdasarkan Laporan lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022, yang didasarkan pada hasil perhitungan Ahli kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan usaha perkebunan illegal, yaitu Ahli perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium

Halaman 455 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan /pencemaran lingkungan (tanah dan air) dengan metode perhitungan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menurut hasil pemeriksaan Ahli menemukan adanya 3 kerugian kerusakan lingkungan hidup akibat perambahan kawasan hutan, yaitu :

1. Kerugian lingkungan hidup (*ekologis*).
2. Kerugian ekonomi lingkungan dan
3. Biaya pemulihan lingkungan.

Oleh karenanya dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa BPKP tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara tidak berdasar, karena dalam Praktek Peradilan BPKP diterima, diakui dan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara. Selain itu ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyatakan bahwa penegak hukum KPK/Kejaksaan/Polri bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, seperti mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu;

Demikian pula dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Lembaga penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara melainkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan harus adanya pernyataan-pernyataan pemerintah dalam kebijakan ekonominya terganggu akibat perbuatan Terdakwa adalah juga tidak berdasar, oleh karena BKF merupakan unit setingkat eselon I dibawah Kementerian Keuangan RI yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. BKF memiliki tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan

Halaman 456 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan *research based policy*, menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan dibidang fiskal dan sektor keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak ada satupun dari tugas dan kewenangan dari BKF yang menyatakan dapat melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara *in casu* dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 5 harus dikesampingkan.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 6 pada pokoknya menyatakan "Seluruh asset hasil usaha bukan diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang" adalah tidak beralasan, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa membuka kebun dan membangun pabrik kelapa sawit didalam kawasan hutan merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana serta dari hasil perkebunan tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di beberapa perusahaan Terdakwa dan dibelanjakan untuk mendirikan perusahaan, membeli tanah dan bangunan serta ditransfer ke rekening perusahaan terafiliasi milik Terdakwa, walaupun sebagian asset/barang bukti yang diperoleh sebelum tahun 2008 dikembalikan karena perkebunan kelapa sawit baru menghasilkan 3-4 tahun pasca tanam kemudian, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 6 harus dikesampingkan.

Hakim Tidak Teliti Dalam Mempertimbangkan dan Membuat Putusan Terhadap Pembanding, Hakim Mengabulkan Dakwaan Pertama Primair Dan Dakwaan Ketiga Primair, Namun Menolak Dakwaan Kedua Primair (*Azas In Dubio Pro Reo*) Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 7, yang pada pokoknya menyatakan "Hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, Hakim mengabulkan Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Ketiga Primair, namun menolak dakwaan Kedua Primair (*azas indubio proreo*) terkait tindak pidana pencucian uang" adalah

Halaman 457 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan, oleh karena pertimbangan hukum dan/atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah dipandang tepat dan benar sesuai fakta hukum serta tidak ada keraguan sebagaimana yang terungkap dipersidangan dengan mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga azas *in dubio pro reo* tidak perlu diterapkan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 7 harus dikesampingkan.

Kerusakan Lingkungan

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan “Rusaknya baku mutu lingkungan sebagai dampak akibat perusahaan-perusahaan Terdakwa tidak pernah terbukti berdasarkan hasil uji baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” adalah tidak beralasan, oleh karena sesuai hasil perhitungan Ahli kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan usaha perkebunan illegal, yaitu Ahli perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan perhitungan melalui pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) dengan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan laboratorium kerusakan /pencemaran lingkungan (tanah dan air) dengan metode perhitungan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menurut hasil pemeriksaan Ahli menemukan adanya 3 kerugian kerusakan lingkungan hidup akibat perambahan kawasan hutan, yaitu :

1. Kerugian lingkungan hidup (*ekologis*).
2. Kerugian ekonomi lingkungan dan
3. Biaya pemulihan lingkungan.

Sehingga dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang mengharuskan rusaknya baku mutu lingkungan sebagai dampak akibat perusahaan-perusahaan Terdakwa harus berdasarkan hasil uji baku mutu lingkungan yang diterbitkan oleh KLHK tidak tepat dan tidak sesuai dengan Peraturan

Halaman 458 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 8 harus dikesampingkan.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: 404/Menhut-II/03 Tanggal 10 Juli 2003 Bukan Merupakan Peraturan Hukum Yang Wajib Ditaati Dan Dijalankan Karena Bersifat Edaran Bukan Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan “Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan bukan merupakan peraturan hukum yang harus ditaati dan dijalankan karena hanya bersifat Surat Edaran bukan bagian dari tata surat peraturan perundang-undangan” adalah tidak beralasan, oleh karena Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut merupakan norma dasar dan umum yang implemintasinya salah satunya melalui Keputusan Menteri dan Surat Edaran Menteri/Gubernur/Bupati. Jika dalam implemintasinya ada perbedaan tentang status lahan dalam TGHK dan RTRW maka dilakukan paduserasi sebagaimana diatur dalam Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Kemudian sesuai Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 pada butir 1 menyatakan bahwa *“bagi provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas Kawasan Hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang TGHK”*, oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berdasar karena dapat membahayakan keberlangsungan hutan Indonesia dan kehidupan masyarakat disekitar hutan, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada angka 9 harus dikesampingkan.

Halaman 459 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Terbukti Dan Terpenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan Penuntut Umum (Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang) Sehingga Terdakwa/Pembanding Sudah Seharusnya Dibebaskan

Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan “Tidak terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang) sehingga Terdakwa sudah seharusnya dibebaskan” adalah tidak beralasan, oleh karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan/atau terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Ketiga Primair sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana, akan tetapi terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi unsur-unsur dan/atau tidak terbukti dalam dakwaan Kedua maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 10 harus dikesampingkan.

Putusan A Quo Telah Salah Dan/Atau Keliru Dalam Memenuhi Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan sebagaimana pada angka 11 yang pada pokoknya menyatakan “Putusan a quo telah salah dan/atau keliru dalam memenuhi unsur-unsur yang didakwakan” adalah tidak beralasan, oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Ketiga Primair sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka seluruh alasan-alasan keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan menanggapi alasan-alasan

Halaman 460 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya,. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan sehingga keliru dalam mengambil keputusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam melakukan perhitungan pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dibebankan kepada terdakwa. Hasil penilaian/perhitungan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak lengkap karena mengabaikan alat bukti dan dokumen yang terungkap dipersidangan;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan asset barang bukti berupa tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama yang dikembalikan kepada terdakwa karena sudah memiliki HGU, Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang menyatakan tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama masih berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru, tidak lengkap dan tidak tepat dalam mempertimbangkan beberapa asset yang menjadi barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana (alat dan hasil kejahatan) yang dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita karena tidak didasarkan dari fakta hukum dan bukti yang terungkap dipersidangan;
- Putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara aquo menciderai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan tidak memiliki efek jera bagi pelaku korupsi khususnya kepada terdakwa;
- Pidana penjara yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang dinikmati terdakwa puluhan trilyunan rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori Bandingnya tersebut, Majelis

Halaman 461 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut sebagaimana terurai tersebut dibawah ini. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan sehingga keliru dalam mengambil keputusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan pemilik manfaat dari 66 (enam puluh) perusahaan, diantaranya PT Kencana Amal Tani, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma Satu yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu ;

Bahwa dari keterangan Ahli bisnis sawit bukan bisnis menebang atau memanen tanaman yang sudah ada di hutan, bisnis sawit adalah murni sebuah investasi karena bisnis sawit adalah bisnis budidaya, bisnis yang harus didahului dengan kegiatan menanam, baru memanen, tanaman sawit baru menghasilkan buah pada tahun ke-4, sehingga selama 5 tahun pertama bahkan lebih adalah investasi dan belum mendapatkan penghasilan apapun selain terus mengeluarkan biaya ;

Bahwa bisnis sawit adalah investasi padat modal, yaitu modal membangun kebun sawit sama tingginya baik dilakukan oleh rakyat dalam skala kecil (*small holder farmers*), kebun yang dibangun dalam rangka industry terpadu hulu hilir, investasi tanaman sampai menghasilkan tidak kurang dari Rp80-90 juta dan bisa mencapai Rp.100 juta per hektar, belum investasi pabrik pengolahan, pergudangan, kalau daerahnya terpencil investasi jalan dan lain lain ;

Halaman 462 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawit mulai berbuah dalam 3-4 tahun lazimnya, disebut buah pasir belum buah batu, buah pertama dibuang saja dan dibiarkan busuk untuk pupuk (kompos), jika dijual tidak akan laku karena masih kecil-kecil dan belum banyak minyaknya, sawit baru berproduksi penuh di usia 8-10 tahun ;

Bahwa Terdakwa SURYA DARMADI dalam perkara ini didakwa bersama-sama dengan H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu agar Terdakwa diberikan kemudahan untuk diberikan ijin kegiatan perkebunan kelapa sawit di Daerah Indragiri Hulu untuk PT. Banyu Bening Utama, PT. Seberida Subur, PT. Palma Satu dan PT Panca Agro Lestari;

Bahwa dalam perkara TPPU yang didakwakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana korupsi oleh Terdakwa yang mendapatkan ILOK dan IUP perkebunan kelapa sawit dari H. RAJA THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dimana ILOK dan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu sampai tahun 2022 masih dipakai oleh Duta Palma Group pada dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa oleh karena Investasi perkebunan Kelapa sawit ILOK dan IUP antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 atau (4 tahun), kelapa sawit tersebut belum mendapatkan hasil/belum memanen karena buahnya baru buah pasir dan tidak laku dijual dan hanya dimanfaatkan untuk pupuk/kompos, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkesimpulan bahwa kelapa sawit antara tahun 2004 s/d tahun 2007 belum menghasilkan apa-apa, sehingga asset-asset yang dibeli oleh Terdakwa maupun yang diatasnamakan anak-anak Terdakwa dan/atau orang lain dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tersebut diatas, bukan dari hasil kejahatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebab unsur "Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana TPPU yang didakwakan pada Dakwaan KEDUA Penuntut Umum, " tidak terpenuhi dan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan

Halaman 463 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan tersebut, karena terhadap ILOK dan IUP (Tahun 2004 s/d Tahun 2007), PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu dan PT Seberida Subur perkebunan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah yang laku dijual, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam poin ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam melakukan perhitungan pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dibebankan kepada terdakwa. Hasil penilaian/perhitungan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak lengkap karena mengabaikan alat bukti dan dokumen yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terkait “Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam melakukan perhitungan pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang dibebankan kepada terdakwa” tidak beralasan, oleh karena penghitungan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dan bukan dihitung dari kerugian keuangan negara, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan berupa uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah menyebabkan kerusakan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau senilai Rp73.920.690.300.000,00 (*tujuh puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah*) dikurangkan PT. Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama yang telah memiliki Sertifikat HGU yang seharusnya tidak menjadi obyek pemeriksaan sehingga kerugian Perekonomian Negara menjadi Rp.39.751.177.520.000,00; (*tiga puluh Sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), Kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.

Halaman 464 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa SURYA DARMADI bersama-sama dengan Drs. H. RAJA TAMSIR RACHMAN, MM telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar : Rp2.641.795.276.640;(dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD4.987.677,36 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika), dari aktifitas perkebunan Kelapa sawit diwilayah Indragiri Hulu oleh PT. Duta Palma Grup dari penerbitan ILOK, IUP oleh H. RAJA THAMSIR RAHMAN selaku Bupati Indra Giri Hulu, kepada Terdakwa SURYA DARMADI selaku Pemilik PT. Duta Palma Grup dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 dan ILOK, IUP tersebut masih digunakan sampai dengan tahun 2022, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli BPKP dan dari Ahli ekonomi dari lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan. Kerugian negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan.

Mengakibatkan kerugian perekonomian negara dari 3 (tiga) Perusahaan yang belum memiliki HGU PT. Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT. Seberida Subur sebesar Rp39.751.177.520.000,00;(tiga puluh Sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha sebagaimana Laporan Analisis Perhitungan Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Terkait Alih Lahan Ilegal PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan pelatihan ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara secara kumulatif sebagaimana pendapat Ahli

Halaman 465 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.DR.AGUS SURONO,SH.,MH, dalam persidangan berpendapat, bahwa dalam norma kaitannya dengan unsur kerugian negara atau perekonomian negara maksudnya adalah apabila salah satu unsur terpenuhi maka dapat memenuhi unsur tersebut namun apabila dalam kondisi tertentu terpenuhi keduanya maka dapat dibuktikan keduanya sehingga tidak bertentangan dengan unsur tersebut, terhadap Pendapat Ahli tersebut, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam poin ini harus dikesampingkan.

Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan asset barang bukti berupa tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama yang dikembalikan kepada terdakwa karena sudah memiliki HGU, Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang menyatakan tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama masih berada dalam kawasan hutan dan tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terkait "Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan asset barang bukti berupa tanah perkebunan PT. Kencana Amal Tani dan PT. Banyu Bening Utama yang dikembalikan kepada terdakwa karena sudah memiliki HGU" adalah tidak beralasan, oleh karena barang bukti berupa asset-asset milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa sebelum tempos tindak pidana dalam perkara a quo tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, sehingga statusnya terhadap barang bukti berupa asset-asset tersebut dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada dari mana barang bukti tersebut disita, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam poin ini harus dikesampingkan.

Putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara aquo menciderai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan tidak memiliki efek jera bagi pelaku korupsi khususnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara a quo menciderai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) tidak beralasan, oleh karena pertimbangan hukum dan/atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 466 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah dipandang tepat dan adil sesuai tingkat kadar kesalahan Terdakwa begitu pula pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah sebanding dengan keuntungan yang diperolehnya,, dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam poin ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka seluruh alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta akan mempertimbangkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tentang :

1. Permohonan Pemindahan Tahanan atas nama Terdakwa Surya Darmadi yang berada di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang No. 45/AAA/S/U/IV/2023 tertanggal 14 April 2023, dengan alasan sedang dalam kondisi membutuhkan perawatan intensif karena sudah berusia lanjut dan menderita penyakit jantung yang selama ini telah mendapatkan perawatan dari dokter spesialis;
2. Permohonan Pembantaran untuk melakukan pengobatan/perawatan kesehatan atas nama Terdakwa Surya Darmadi No: 47/AAA/S/U/IV/2023 tertanggal 27 April 2023 dengan alasan memiliki riwayat sakit jantung dan sudah berusia lanjut;
3. Permohonan izin berobat dan Medical Check-up atas nama Terdakwa No: 48/AAA/S/U/VI/2023 dengan alasan memiliki riwayat sakit jantung dan sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak procedural oleh karena seyogyanya Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permohonan a quo melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Halaman 467 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter yang ada di Rumah Tahanan Negara dan/atau dokter lain jika dianggap perlu dengan pemberitahuan kepada Kejaksaan selaku pelaksana penetapan pengadilan, apakah perlu dirawat di luar Rumah Tahanan Negara atau tidak, selain itu menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi fasilitas untuk berobat lebih banyak Rumah Sakit di DKI Jakarta, bahkan Resume Medis (Dischore Summary) yang dilampirkan dalam surat permohonan dimaksud berada di wilayah DKI Jakarta yaitu Rumah Sakit Siloan (Siloan Hospitals) Kebun Jeruk DKI Jakarta, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga tidak dikabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada : Pengadilan Tinggi Jakarta telah menerima surat dari Koperasi Produsen Cenaku Lestari dan ditujukan kepada Presiden RI tertanggal 3 Oktober 2022, surat tersebut berisikan permohonan untuk dapat dikeluarkan hak lahan/kebun masyarakat Desa Kuala Cenaku dan Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang tergabung dalam Koperasi Cenaku Lestari seluas 2,100 oleh Kejaksaan Agung RI tanggal 22 Juni 2022 seluas 37.095 hektar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa bukan kewenangannya untuk menetapkan dan mengeluarkan lahan kebun tersebut karena kebun kelapa sawit milik Duta Palma Group sudah berstatus HGU, sehingga terhadap lahan kebun tersebut terkait plasma diserahkan kepada pemegang HGU tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN JKT PST tanggal 23 Februari 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP. oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 468 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami **H. Mohammad Lutfi, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Hiyanto, SH.MH.**, dan **Abdul Fattah, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Anthon R. Saragih, SH.MH.** dan **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,M.M.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc

Halaman 469 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 April 2023 Nomor : 18/PID-TPK/2023/PTDKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sumardiyanta, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sugeng Hiyanto, SH.MH.

H. Mohammad Lutfi, SH.MH.

Abdul Fattah, SH.MH.

Anthon R. Saragih, SH.MH.

Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, SH.,MM.

Panitera-Pengganti,

Sumardiyanta, SH.MH.